



P E M E R I N T A H
KABUPATEN JEPARA



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN JEPARA
T A H U N
2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	2
B. Gambaran Umum Daerah	4
C. Kondisi Geografis Daerah.....	5
D. Gambaran Umum Demografis.....	11
E. Kondisi Ekonomi	17
a. Potensi Unggulan Daerah	17
b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	25
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
 (RPJMD)	36
A. Visi dan Misi	37
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	38
C. Prioritas Daerah.....	42
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN	
 PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN	
 UMUM	47
A. Urusan Konkuren.....	47
a. Ringkasan Urusan Wajib.....	47
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
8. Permasalahan dan Solusi	
9. Hal lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan	
b. Ringkasan Urusan Pilihan.....	211
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	

- 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan
- 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)
- 8. Permasalahan dan Solusi.
- 9. Hal lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang

lainnya).....	239
1. Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
7. Permasalahan dan Solusi	

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)..... 326

1. Perangkat Daerah Pelaksana.....	326
2. Program dan Kegiatan.....	326
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	327
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	327
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan.....	328
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya).....	329
7. Permasalahan dan Solusi.....	329

D. Indikator Kinerja Kunci..... 329

1. Tataran Pengambil Kebijakan	329
2. Tataran Pelaksana Kebijakan	341
1) Administrai Umum	341

	2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	386
	3) Urusan Pemerintahan Umum	388
	4) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	388
BAB IV	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018.....	407
BAB V	TUGAS PEMBANTUAN	416
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima	416
	1. Dasar Hukum	416
	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	416
	3. Program dan Kegiatan	416
	4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	417
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	417
	6. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan	417
	7. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	417
	8. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan	417
	9. Permasalahan dan Solusi	417
	B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	420
	1. Dasar Hukum	420
	2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk kabupaten/kota.....	420
	3. Sumber dan jumlah anggaran	420
	4. Sarana dan prasarana	420
BAB VI	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	421
	A. Kerjasama Antar Daerah	421
	1. Daerah yang diajak kerjasama	421
	2. Dasar Hukum	421
	3. Bidang Kerjasama	421
	4. Nama kegiatan	422
	5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Dearah	422
	6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	422

7. Sumber dan Jumlah Anggaran	423
8. Jangka Waktu Kerjasama	423
9. Hasil (Output) dari kerjasama	423
10. Permasalahan dan solusi	424
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	424
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	424
1. Mitra yang Diajak Kerjasama	424
2. Dasar Hukum	425
3. Bidang Kerjasama	425
4. Nama Kegiatan	425
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	426
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	426
7. Sumber dan Jumlah Anggaran	426
8. Jangka waktu Kerjasama	426
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	439
1. Forum Koordinasi	439
2. Materi Koordinasi	439
3. Instansi Vertikal yang terlibat	442
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	445
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	468
	446
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	446
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	446
8. Hasil manfaat dan koordinasi	449
9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi	451
D. Pembinaan Batas Wilayah	453
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi	453
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)	453
3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraa Pembinaan Batas Wilayah	453

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	453
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	454
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	454
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)	454
3. Sumber dan Jumlah Anggaran	454
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	454
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana	454
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	454
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana	455
8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi	455
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ...	456
1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)	456
2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani	456
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	456
4. Penanggulangan dan kendalanya	457
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	457
6. Sumber dan Jumlah Anggaran	457
BAB VII PENUTUP	459

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran III.1	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pengambil Kebijakan
Lampiran III.2	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan untuk OPD yang menangani 1 urusan
Lampiran III.2	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan untuk OPD yang menangani 2 urusan atau lebih
Lampiran III.3	Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan pertanggungjawaban ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini dibuat secara sederhana dengan Indikator Kinerja Kunci pengukurannya menggunakan rumus persamaan dan tidak menggunakan rumus persamaan. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama

tahun 2018 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini . Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara . Trus Karya Tataning Bumi

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, Maret 2019

BUPATI JEPARA

H. AHMAD MARZUQI

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

Keinginan kuat untuk memberikan otonomi kepada daerah telah mendorong Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna lebih terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta meningkatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Adapun dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah tersebut, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan tugas pembantuan. Bupati menyampaikan laporan penyelenggraan pemerintahan daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Menteri akan mengkoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah. Sedangkan pembinaan dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Disamping itu selain menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang – Undang 23 Tahun 2014 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur (sebagai wakil Pemerintah Pusat) untuk bupati/walikota.

Mengingat begitu pentingnya kewajiban menyampaikan LPPD dan ILPPD kepada Pemerintah maupun kepada masyarakat guna terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik, maka dipandang perlu penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah dengan data yang akurat, terkini dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018.
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20)

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara letaknya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan, serta 1.015 RW dan 4766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

C. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis dan wilayah administratif

Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timursehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

b. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

- a. lahan sawah/ wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.
- b. bukan lahan sawah / tanah kering / *build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya pertambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan tehnologi.

Tabel 1.1
Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering
Di Kabupaten Jepara (Ha)

No	Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kedung	1.972,764	2.333,517	4.306,281
2	Pecangaan	1.536,000	2.051,806	3.587,806
3	Welahan	1.576,645	1.187,560	2.764,205
4	Mayong	2.071,009	4.433,259	6.504,268
5	Batealit	2.247,342	6.640,523	8.887,865
6	Jepara	402,467	2.064,232	2.466,699
7	Mlonggo	1.141,346	3.098,890	4.240,236
8	Bangsri	2.734,288	5.800,953	8.535,241
9	Keling	2.270,124	10.041,464	12.311,588
10	Karimunjawa	32,000	7.088,000	7.120,000

11	Tahunan	1.023,472	2.867,109	3.890,581
12	Nalumsari	2.236,255	3.460,283	5.696,538
13	Kalinyamatan	1.391,357	978,644	2.370,001
14	Kembang	2.464,147	8.348,237	10.812,384
15	Pakis Aji	1.484,030	4.571,250	6.055,280
16	Donorojo	1.942,546	8.921,670	10.864,216
	TOTAL	26.525,792	73.887,397	100.413,189

Sumber : Jepara Dalam Angka 2018

Batas wilayah Kabupaten Jepara dengan wilayah lainnya yaitu :

- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Pati dan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Gambar 1.1
Letak Kabupaten Jepara Dalam Konstalasi
Jawa Tengah



Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Jepara
Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas daerah (Km²)	Luas daerah (ha)
1	2	3	4
1	Kedung	43,063	4.306,281
2	Pecangaan	35,878	3.587,806
3	Welahan	27,642	2.764,205
4	Mayong	65,043	6.504,268
5	Batealit	88,879	8.887,865
6	Jepara	24,667	2.466,699
7	Mlonggo	42,402	4.240,236
8	Bangsri	85,352	8.535,241
9	Keling	123,116	12.311,588
10	Karimunjawa	71,200	7.120,000
11	Tahunan	38,906	3.890,581
12	Nalumsari	56,965	5.696,538

13	Kalinyamatan	23,700	2.370,001
14	Kembang	108,124	10.812,384
15	Pakis Aji	60,553	6.055,280
16	Donorojo	108,642	10.864,216
	J u m l a h	1.004,132	100.413,189

Sumber : Jepara Dalam Angka, 2018

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jarak dari Jepara ke kota terdekat yaitu sebagai berikut :

- Kudus : 35 km
- Pati : 59 km
- Rembang : 95 km
- Blora : 131 km
- Demak : 45 km

Gambar 1.2
Peta Wilayah Kabupaten Jepara
Beserta 16 Kecamatan



Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Se – Kabupaten Jepara

No	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5
1	33.20.01	Kedung	18	
2	33.20.02	Pecangaan	12	
3	33.20.03	Welahan	15	
4	33.20.04	Mayong	18	
5	33.20.05	Batealit	11	
6	33.20.06	Jepara	5	11
7	33.20.07	Mlonggo	8	
8	33.20.08	Bangsri	12	
9	33.20.09	Keling	12	
10	33.20.10	Karimunjawa	4	
11	33.20.11	Tahunan	15	
12	33.20.12	Nalumsari	15	
13	33.20.13	Kalinyamatan	12	
14	33.20.14	Kembang	11	
15	33.20.15	Pakis Aji	8	
16	33.20.16	Donorojo	8	
	TOTAL		184	11

Sumber :Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

Tabel 1.4
Jumlah RT/RW Se Kabupaten Jepara

No	Kode	Kecamatan	RW	RT
1	2	3	4	5
1	33.20.01	Kedung	64	267
2	33.20.02	Pecangaan	71	345
3	33.20.03	Welahan	44	217
4	33.20.04	Mayong	74	395
5	33.20.05	Batealit	52	292
6	33.20.06	Jepara	84	308
7	33.20.07	Mlonggo	51	278
8	33.20.08	Bangsri	120	443
9	33.20.09	Keling	66	316
10	33.20.10	Karimunjawa	15	54
11	33.20.11	Tahunan	74	312
12	33.20.12	Nalumsari	78	370
13	33.20.13	Kalinyamatan	50	341
14	33.20.14	Kembang	78	333
15	33.20.15	Pakis Aji	38	236
16	33.20.16	Donorojo	56	259
	TOTAL		1.015	4.766

Sumber :Data per kecamatan

c. **Topografis**

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan utara Jawa ini secara topografis dibagi dalam empat wilayah wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara ; wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan; wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari gunung Muria; wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 – 2 m dpl yang merupakan dataran pantai , sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 – 1.301 m dpl merupakan perbukitan.

Tabel 1.5
Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Ketinggian			
1	2	3			
1	Kedung	0	-	12	meter
2	Pecangaan	2	-	17	meter
3	Welahan	2	-	7	meter
4	Mayong	13	-	438	meter
5	Batealit	68	-	378	meter
6	Jepara	0	-	46	meter
7	Mlonggo	0	-	300	meter
8	Bangsri	0	-	594	meter
9	Keling	0	-	1.301	meter
11	Tahunan	0	-	50	meter
12	Nalumsari	13	-	438	meter
13	Kalinyamatan	0	-	29	meter
14	Kembang	0	-	1.000	meter
15	Pakis Aji	25	-	1.000	meter
16	Donorojo	0	-	619	meter

Sumber Jepara dalam Angka, 2016

Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam lima kemiringan lahan . Dengan mengetahui tingkat kemiringan lahan akan mempermudah perencanaan pembangunan terutama

konservasi tanah dan air.

Tabel 1.6
Kemiringan Lahan

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Prosentase	Klasifikasi
1	2	3	4	5
1	0-8 %	71.313,66	71,02	Datar
2	8-15%	10.236,98	10,19	Landai
3	15-25%	6.368,40	6,34	Agak curam
4	25-40%	5.455,50	5,43	curam
5	≥ 40 %	7.038,61	7,01	Sangat curam

Sumber : Dishutbun 2015

Menurut jenis tanahnya secara topografi kawasan di Kabupaten Jepara memiliki 5 jenis tanah yaitu :

Andosol coklat terdapat diperbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha;

Regosol terdapat dibagian utara seluas 2.700,857 Ha;

Alluvial terdapat di sepanjang pantai utara seluas 9.126,433 Ha;

Asosiasi Mediterian terdapat di pantai barat seluas 19.400,458 Ha;

Latosol merupakan jenis tanah paling dominan di Kab. Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.

Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu : Dataran, Dataran alluvial, Lembah alluvial, Pegunungan sekitar pantai Perbukitan Rawa pasang surut.

Lahan di Kabupaten Jepara berupa dataran pantai cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak , lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit.

Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sungai atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai.

Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul.

Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu dibagian timur ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (laut Jawa).

Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

d. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilayah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 ° celcius dan tertinggi pada 33,71 ° celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia/umur, pendidikan dan pekerjaan dan ketenagakerjaan.

a. Jumlah penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kedung	37.847	37.406	75.253
2	Pecangaan	40.163	39.870	80.033
3	Welahan	38.142	37.158	75.300
4	Mayong	43.817	43.505	87.322
5	Batealit	41.203	40.221	81.424
6	Jepara	40.778	39.962	80.740
7	Mlonggo	41.874	40.362	82.236

8	Bangsri	49.391	48.620	98.011
9	Keling	31.905	31.874	63.779
10	Karimunjawa	4.774	4.607	9.381
11	Tahunan	53.827	52.396	106.223
12	Nalumsari	36.571	36.555	73.126
13	Kalinyamatan	29.985	29.216	59.201
14	Kembang	34.479	34.868	69.347
15	Pakis Aji	29.511	28.452	57.963
16	Donorojo	29.582	29.261	58.843
Total		588.913	579.348	1.168.261

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebesar 1.168.261 jiwa terdiri dari 584.913 laki –laki dan 579.348 perempuan.

Tabel 1.8
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah KK	Ket
1	2	3	4
1	Kedung	24.006	
2	Pecangaan	26.276	
3	Welahan	23.670	
4	Mayong	28.314	
5	Batealit	26.621	
6	Jepara	25.791	
7	Mlonggo	26.441	
8	Bangsri	33.157	
9	Keling	22.847	
10	Karimunjawa	3.164	
11	Tahunan	33.423	
12	Nalumsari	23.705	
13	Kalinyamatan	17.999	
14	Kembang	25.176	
15	Pakis Aji	19.241	
16	Donorojo	20.931	
	Jumlah	380.762	

Sumber Data : Data Base Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I Tahun 2018

Apabila dikaitkan antara jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga dapat terlihat bahwa rata –rata jumlah rata-rata anggota keluarga sebanyak 3, ini berarti bahwa dalam satu keluarga di kabupaten Jepara rata rata dihuni oleh 3 jiwa.

b. Penduduk berdasar jenis kelamin

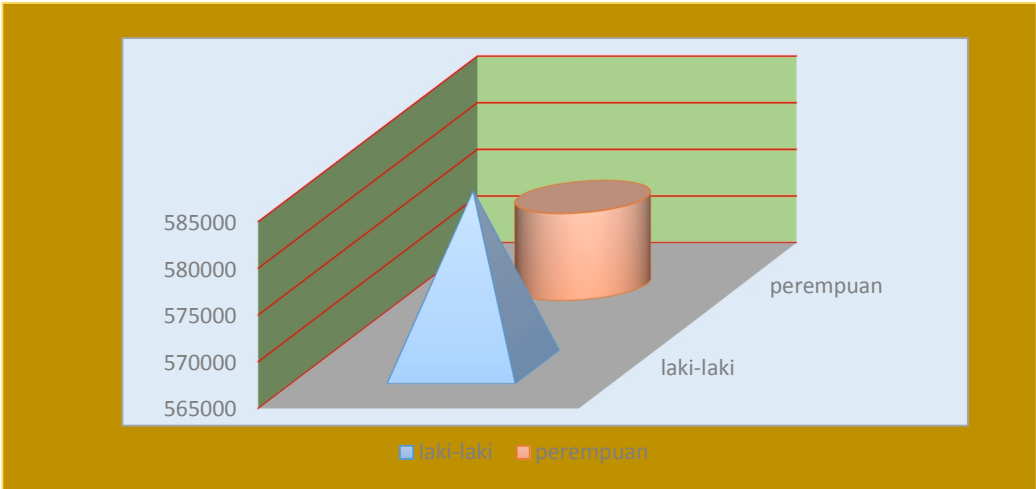
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender.

Tabel 1.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
(Laki-Laki dan perempuan)
Tahun 2018

No	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Jepara	584.913	579.348	1.168.261

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I tahun 2018

Grafik 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
(Laki-Laki dan perempuan)
Tahun 2018



c. Penduduk berdasarkan umur / usia

Penggunaan data komposisi penduduk berdasarkan umur dapat dipergunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ketergantungan merupakan suatu angka yang menunjukkan

besar beban tanggungan kelompok usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif.

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun 2017 sebanyak 288.379 jiwa atau 24,9 persen penduduk Kabupaten Jepara berada pada kelompok umur 0 - 14 tahun. Sementara itu kelompok umur 15 - 64 tahun sebesar 806.736 jiwa atau 69,6 persen dan 65 keatas sebesar 63.067 atau 5,4 persen.

Tabel 1.13
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2018

NO	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0-4	46,119	43,154	89,273
2.	5-9	52,434	49,598	102,032
3.	10-14	49,950	47,124	97,074
4.	15-19	46,961	45,689	92,650
5.	20-24	48,996	47,276	96,272
6.	25-29	46.774	44,906	91,680
7.	30-34	49,562	49,486	99,048
8.	35-39	48,596	47,890	96,486
9.	40-44	43,940	44,913	88,853
10.	45-49	39,954	40,384	80,338
11.	50-54	33,492	34,694	68,186
12.	55-59	27,599	27,460	55,059
13.	60-64	19,771	18,393	38,164
14.	65-69	13,067	13,664	26,731
15.	70-74	8,085	9,468	17,553
16.	75+	8,549	10,234	18,783
	Jumlah	584.913	579.348	1.168.261

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I Tahun 2018

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya . Selain itu penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tinggi rendahnya angka beban ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40 dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas, rasio

ketergantungan Kabupaten Jepara yang merupakan perbandingan kelompok usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun 2018 termasuk dalam golongan tinggi yaitu sebesar 43,56 persen artinya setiap 100 orang kelompok produktif harus menanggung 43 orang dari kelompok yang tidak produktif.

Atas dasar data di atas penyebaran penduduk Kabupaten Jepara masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Jepara dan yang terendah adalah Kecamatan Karimunjawa .

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk adalah:

- Faktor kelahiran, faktor utama yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu.
- Faktor iklim dan topografi, iklim yang nyaman topografi yang relatif landai menyebabkan penduduk terkonsentrasi serta menjadi padat.
- Faktor ekonomi, yang termasuk faktor ekonomi ialah tersedianya sumber daya alam, dan juga tersedianya lapangan kerja.
- Faktor sosial budaya, yang termasuk faktor sosial budaya ialah kesempatan untuk dapat meneruskan pendidikan, keterbukaan masyarakat. Selain hal itu daerah yang relatif aman akan dapat selalu jadi pemukiman yang padat.
- Faktor kebijakan instansi, yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut supaya karyawan tidak datang terlambat karena alasan transportasi.

d. Penduduk berdasarkan pendidikan

Kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah di pengaruhi oleh tingkat pendidikan. Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting, karena dengan ketersediaan data demografi akan di jadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan membantu dalam perumusan kebijakan misalnya dalam menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan dan tenaga kerja.

Tabel 1.15
Penduduk Jepara Usia 15 Tahun ke atas
(Angkatan Kerja)
Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	Tidak / Blm Sekolah	228,134
2.	Tidak Tamat SD / Sederajat	134,047
3.	Tamat SD / Sederajat	370,937
4.	Tamat SLTP / Sederajat	232,021
5.	Tamat SLTA / Sederajat	166,324
6.	Tamat Akademi / Universitas	35,012
	Total	1.166.475

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I Tahun 2018

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Jepara menempuh penduduk sampai pada tingkat SD sederajat . Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk menerima pengetahuan baru serta dapat mengadopsi teknologi baru . Namun terlepas dari pendidikan formal , pendidikan non formal serta pengalaman juga memiliki peranan dalam melaksanakan usaha.

f. Ketenagakerjaan

Tabel 1.16
Penduduk Jepara Usia 15 Tahun ke atas
Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama
Tahun 2018

No	Lapangan Kerja	Jumlah
1	2	3
1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	83.725
2.	Industri Pengolahan	5.470
3.	Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan hotel	14.199
4.	Jasa Kemasyarakatan	108.480

5.	Lainnya	349.171
	Total	561.045

Sumber Data : Data Base Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester I Tahun 2018

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi daerah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya padat karya sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan juga optimalisasi potensi ekonomi.

Peranan produk unggulan sangat *crusial* / karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD - PDRB.

Dari rujukan di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka produk unggulan atau potensi unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui maksimalisasi hasil-hasilnya.

Berikut gambaran tentang potensi unggulan daerah di Kabupaten Jepara.

a. Sektor Pariwisata

Berada di titik paling utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara memiliki topografi tanah yang khas dan bervariasi. Topografi tanahnya mulai dari dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Clering sampai dataran rendah, pantai dan wilayah kepulauan di Karimunjawa. Kondisi ini menjadikan Jepara memiliki banyak potensi wisata alam, di luar wisata religi dan budaya .

Wisata alam terbanyak adalah wisata pantai, karena Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km. Potensi untuk investasi yang sangat baik berada di beberapa titik wisata pantai. Disamping wisata pantai, terdapat desa wisata, yaitu Desa wisata Mulyoharjo (patung) dan Desa wisata Troso (Kain Tenun).

1. Pantai Tirta Samudra

Yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan terletak ± 7 km sebelah utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Tak jarang para wisatawan yang datang ke obyek ini sengaja melakukan mandi laut. Biasanya saat yang paling disukai adalah pada waktu pagi hari dan disaat sore menjelang senja dimana akan tampak panorama *sunset* yang memukau.

Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa. Selain itu juga sering digunakan ajang permainan motor cross dan pertunjukan festival layang-layang baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Obyek wisata ini dapat dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum, sebab sudah tersedia prasarana jalan yang beraspal dan sudah ada angkutan kota yang langsung menuju lokasi obyek wisata tersebut. Sedangkan makanan khas yang dapat dinikmati wisatawan adalah kerang rebus, rajungan, pindang srani.

Pada tahun 2017 jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke pantai tirta samudra yaitu 346.211 orang sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah 6.122 orang.

2. Pantai Kartini

Terletak $\pm 2,5$ km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola, perahu arus) dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah $\pm 3,5$ ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau Panjang.

Untuk menunjang kegiatan pengembangan pariwisata di Karimunjawa telah dilayani dengan 2 kapal yaitu kapal cepat kartini (waktu tempuh 2,5 jam) dan KMP Muria/ ASDP (waktu tempuh 5 jam), sedang perhubungan udara menghubungkan Kepulauan Karimunjawa dengan

kota Semarang.

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke pantai kartini yaitu 194.554 orang sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah 4.267 orang.

3. Benteng Portugis dan Pulau mandalika

Benteng Portugis terletak di desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo Ujung Utara Kabupaten Jepara. Merupakan salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Jepara. Kawasan ini mempunyai nilai sejarah yang penting bagi perkembangan Kabupaten Jepara. Lebih dari pada itu kawasan wisata yang masuk dalam kawasan cagar budaya ini mempunyai potensi alam yang demikian menarik dan menakjubkan. Sehingga kawasan ini bisa diandalkan menjadi kawasan wisata yang mempunyai nilai edukasi dan rekreatif. Wisatawan yang mempunyai minat khusus, di obyek wisata Benteng Portugis bisa menyalurkan kegemaran untuk mancing, tracking, out bond, camping, hiking dan wisata mediasi.

Untuk yang hobi mancing, banyak terdapat ikap kakap merah, bawal, kerapu, patikoli dan lainnya. Sebagai destinasi wisata, Benteng Portugis dilengkapi aneka mainan anak-anak serta fasilitas pendukung lainnya diantaranya adalah paviliun untuk penginapan "Kampoeng Portugis", area parkir yang luas dan beberapa gazebo atau gardu pandang.

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke benteng portugis dan pulau mandalika kartini 88.109 orang sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah 205 orang.

4. Taman Nasional Laut Karimunjawa

Karimunjawa terletak sekitar 48 mil laut dari Jepara. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 27 pulau. Wilayah kepulauan Karimunjawa memiliki daya tarik tersendiri sebagai lokasi wisata alam, budaya, bahari dan pendidikan. Kelebihan dan daya tarik di Taman Nasional Laut Karimunjawa:

- *Hiking, Camping dan Surfing*
- Wisata budaya dengan dipertahankannya kultur dan budaya tiap suku

- Terumbu karang dan kekayaan ikan hias dan biota laut dibalik kejernihan perairan yang mengitarinya
- *Diving* dan *snorkeling* menjadi daya tarik di Karimunjawa. Apalagi kedalaman air di kepulauan tersebut banyak yang dangkal sekitar 5-7 meter
- Hamparan pasir putih di setiap pulauanya , banyak dihiasi dengan pesona terumbu karang
- Sarana perahu kaca yang disediakan di Karimunjawa memudahkan setiap wisatawan menikmati pesona ini
- Dukungan transportasi lengkap mulai kapal ferry Siginjai, Kapal Cepat Kartini I, Express Bahari dan transportasi udara
- Landasan pacu di bandara perintis Dewandaru diupayakan terus ditingkatkan seiring minat investor untuk mengembangkan karimunjawa.

Kepulauan Karimunjawa dapat ditempuh dengan kapal KMP Muria selama 6 jam atau dengan kapal cepat Kartini selama 3 jam.

Karimunjawa menawarkan :

- Wisata alam (tracking/hiking di hutan mangrove, canoing, snorkling, diving, atraksi penyu bertelur)
- Wisata religi ke makam Sunan Nyamplung, Sumur Wali di P. Parang
- Wisata budaya (menyaksikan keanekaragaman budaya dan adat istiadat suku Jawa, Bugis, Mandar, Buton, Bajo, Luwu dan Madura, kesenian rakyat reog barongan, pencak silat)

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Taman Nasional Laut Karimunjawa 120.323 orang sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah 8.988 orang.

Secara keseluruhan jumlah wisatawan yang berkunjung di beberapa tempat di Kabupaten Jepara tahun 2018 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Sektor Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Jepara yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah pesisir dengan ketersediaa sumber daya perikanan atau hasil laut yang cukup besar baik untuk konsumsi maupun bahan baku pembuatan produk perikanan merupakan wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Kegiatan produksi perikanan di kabupaten Jepara sendiri meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran. Kegiatan usaha penangkapan dilakukan di perairan laut dan di perairan umum serta kegiatan budidaya ikan dilakukan di tambak kolam dan perairan umum berupa budidaya karamba.

1. Rumput laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Jepara. Selain di Kepulauan Karimunjawa yang menjadi sentranya, budidaya rumput laut juga dikembangkan di Kecamatan Jepara (Teluk Awur, Bandengan) dan Kecamatan Bangsri (Bondo).

Lahan potensi budidaya rumput laut seluas 1,274 ha, luas lahan yang dimanfaatkan 287 ha, pembudidaya rumput laut 28 orang, jumlah usaha 34 unit dengan produksi 12,060.9 ton.

Untuk sektor perikanan, Kabupaten Jepara mempunyai sumber daya ikan yang cukup besar. Sumber daya ikan tersebut terdapat di Laut Jawa yaitu di sebelah barat dan utara wilayah Kabupaten Jepara, serta di perairan umum yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara .

Diperkirakan luas potensi perikanan tangkap 2,916 ha , Jumlah nelayan laut sejumlah 8,431 orang dengan armada penangkapan 3,190 unit kapal. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah 1,421,007 kg dengan nilai produksi Rp 10,195,148,000,-

2. Perikanan Budidaya

Selain budidaya air payau, potensi perikanan budidaya yang dimiliki adalah budidaya air tawar. Luas lahan budidaya air tawar Kabupaten Jepara adalah 31,678 ha, tersebar di kecamatan Nalumsari, Tahunan, Jepara, Bangsri, Kedung dan Welahan. Komoditas yang diusahakan adalah Lele, Patin, Gurame dan Nila

Jumlah pembudidaya air tawar adalah 1,274 orang dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 807,09 ton atau Rp 11.550.260.000,-

Tabel 1.22
Kondisi Perikanan Budidaya
Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas lahan Budidaya (Ha)
1	2	3
1	Kec. Kedung	798,20
2	Kec. Tahunan	9
3	Kec. Jepara	6
4	Kec. Mlonggo	97,5
5	Kec. Bangsri	23
6	Kec. Keling	3,5
7	Kec. Donorojo	305,5
8	Kec. Karimunjawa	4
9	Kec. Kembang	5
	Total	1.251,7 Ha

Sumber : Dinas perikanan tahun 2018

c. Pertanian dan Peternakan

Tabel 1.24
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Lokal Tahun 2018

No	Komoditas	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	2	3	4	5
1	Padi	46.178,0	262.752,8	56,9
2	Jagung	11.778,3	97.100,3	82,4
4	Ubi kayu	8.274,2	217.975,5	263,4
5	Ubi jalar	49,0	1.000,3	204,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 2018

Produksi sektor tanaman pangan tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada komoditas padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Peningkatan produksi ini dikarenakan peningkatan kesadaran petani terhadap penggunaan tehnologi di bidang pertanian , pengetahuan petani mengenai tehnik budidaya dan optimalisasi peran dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).

Tabel 1.25
Potensi Unggulan Hortikultura
Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Produksi (Kw)	Produksi (Rp)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
1	Durian	48.978	24.516	5.393.520.000	Tersebar seluruh kecamatan Kecuali karimunjawa dan Welahan
2	Belimbing	26.141	11.992	1.678.880.000	Tersebar seluruh kecamatan
3	Pisang Sobo	257.177	221.324	17.705.920.000	Tersebar seluruh kecamatan
4	Jeruk Siam	12.097	3.161	316.100.000	Nalumsari, Muryolobo
5	Salak	5.771	426	42.600.000	Kec. Keling
6	Mangga	202.309	204.273	24.512.760.000	Tersebar seluruh kecamatan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 2018

Produksi tanaman hortikultura unggulan mengalami peningkatan disemua komoditas yaitu durian, belimbing, pisang, jeruk siam dan jambu air dibanding tahun sebelumnya.

Komoditas mangga mengalami kenaikan jumlah pohon maupun peningkatan dari sisi produksi. Jumlah pohon naik dari 127.024 pohon pada tahun 2017 menjadi 202.309 pada tahun 2018 dikarenakan semakin banyaknya warga yang berminat menanam mangga karena masih mempunyai pekarangan yang terhitung luas, terutama rumah di desa-desa yang kebanyakan memang masih mempunyai lahan yang masih bias ditanami pohon mangga, selain itu juga tingginya permintaan konsumen membuat para penjual buah terutama mangga biasanya datang ke rumah-rumah untuk membeli mangga dengan penawaran yang lumayan menguntungkan.

Tabel 1.26
Pemilik Ternak dan Populasi Ternak
Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Ternak	Pemilik Ternak	Populasi Ternak
1	2	3	4
1	Sapi potong	21.852	50.291
2	Sapi perah	8	31
3	Kerbau	1.124	3.652
4	Kuda	102	173
5	Babi	-	-
6	Kambing	13.610	70.472
7	Domba	5.220	28.864
8	Ayam Layer	9	281.992
9	Ayam Broiler	83	543.701
10	Ayam Buras	120.105	647.005
11	Itik	850	74.436
12	Kelinci	349	1.982
13	Burung Puyuh	25	32.366
14	Entog	4.601	31.576
15	Angsa	3.427	12.059

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 2018

Tabel 1.27
Produksi Ternak
Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Jenis Ternak	Produksi		
		Daging	Telur	
		kg	Butir	Kg
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	940.135		
2	Sapi perah	-		
3	Kerbau	130.550		
4	Kuda	-		
5	Kambing	145.321		
6	Domba	34.618		
7	Babi	-		
8	Ayam Layer	91.644	31.734.153	1.866.715
9	Ayam Broiler	459.142	-	
10	Ayam Buras	180.252	2.357.446	117.872
11	Itik	32.290	1.931.802	148.754
12	Kelinci	368		
13	Burung Puyuh	995	3.706.636	43.100
14	Entog	2.816	426.394	30.340
15	Angsa	4.030		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 2018

Populasi ternak di kabupaten Jepara baik ternak besar, ternak kecil, maupun unggas pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan populasi khususnya ternak sapi karena didukung oleh kegiatan Nasional PUSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Dimana kegiatan ini memfasilitasi pelayanan IB gratis pada ternak sapi betina produktif.

Tabel 1.28
Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Ket
		2017	
1	2	3	
1	Kelapa	9.361,47	
2	Kopi	919,02	
3	Cengkeh	83,08	
4	Jambu Mete	81,35	
5	Kapok	3.068,83	
6	Kakao	51,17	
7	Lada	6,34	
8	Panili	0,615	
9	Aren	2,64	
10	Karet	3,46	
11	Tebu	10.391,35	
12	Nilam	1.92,61	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 2018

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2015-2017

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Jepara dalam periode tertentu. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik seperti perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dsb.

Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara selama kurun waktu tiga tahun (2015 – 2017).

Tabel 1.29

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara
Tahun 2015 -2017 (Prosen)**

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,02	5,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2016 bukan berarti menurun, tetap tumbuh hanya saja mengalami sedikit perlambatan pertumbuhannya, karena seperti dapat dilihat pada tabel untuk tahun 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 5,02 menjadi 5,13.

2. Laju Inflasi 2015 - 2017

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat untuk lebih meningkatkan produksinya, memperluas produksinya karena dengan kenaikan harga yang terjadi akan lebih memberi keuntungan bagi pihak tertentu. Selain itu peningkatan produksi memberi dampak positif lain yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya lebih dari sepuluh persen.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Jepara memiliki kecenderungan menurun selama tiga tahun sebesar 38 persen dan terendah apabila diperbandingkan dengan nasional, Jawa Tengah dan Semarang pada tahun 2017. Yang dimaksud dengan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

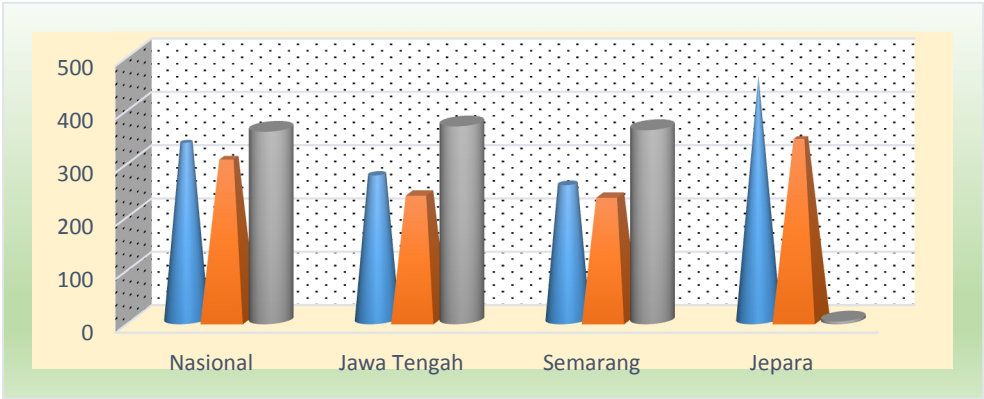
Tabel 1.30
Laju Inflasi Tahunan
Nasional, Jawa Tengah, Semarang dan Jepara
Tahun 2016-2017 (Prosen)

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Semarang	Jepara
1	2	3	4	5
2015	3,33	2,73	2,55	4,57
2016	3,02	2,36	2,32	3,40

2017	3,61	3,71	3,64	2,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2017 (sampai dengan Januari)

Grafik 1.11
Laju Inflasi Tahunan
Nasional, Jawa Tengah, Semarang dan Jepara
Tahun 2016-2017 (Prosen)



3. Produk Domestik Regional Bruto 2015 – 2017

PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam satu tahun ditunjukkan oleh data PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Sejak tahun 2014 perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010, menggantikan tahun dasar 2000 yang digunakan pada perhitungan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga nilai PDRB tahun 2010-2013 dilakukan penghitungan ulang menggunakan tahun dasar 2010.

Tabel 1.31
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	3.394.047,62
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	424.646,69
3	Industri Pengolahan (C)	7.574.052,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	18.587,69
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	13.983,22

6	Konstruksi (F)	1.471.459,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.691.321,64
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	819.917,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	870.640,38
10	Informasi dan Komunikasi (J)	512.510,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	465.943,73
12	Real Estate (L)	337.697,33
13	Jasa Perusahaan (M,N)	100.710,88
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	549.364,96
15	Jasa Pendidikan (P)	1.161.119,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	207.850,97
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	457.993,39
	Total	22.071.848,25 *

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2017

Tabel 1.32
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	3.535.360,10
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	458.184,23
3	Industri Pengolahan (C)	8.235.433,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	21.845,55
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	14.597,72
6	Konstruksi (F)	1.597.389,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.993.310,22
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	874.384,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	977.768,55
10	Informasi dan Komunikasi (J)	555.580,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	523.664,80
12	Real Estate (L)	366.384,51
13	Jasa Perusahaan (M,N)	115.568,70
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	593.189,40
15	Jasa Pendidikan (P)	1.289.250,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	230.436,39
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	521.268,08
	Total	23.903.616,74 **

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2017 * menunjukkan angka sementara

Nilai PDRB Kabupaten Jepara pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dari angka sebesar **22.071.848,25*** pada tahun 2015 menjadi **23.903.616,74 **** (*angka Sementara*)pada tahun 2016 dan terakhir tahun 2017 sebesar **25.865.317,87 **** (*angka sangat sementara*) sebagaimana tabel 1.33.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Jepara tetapi masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga atau inflasi.

Tabel 1.33
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	3.606.395,02
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	499.831,59
3	Industri Pengolahan (C)	8.940.259,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	25.583,09
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	15.764,16
6	Konstruksi (F)	1.755.182,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	4.370.734,02
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	992.600,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	1.071.903,69
10	Informasi dan Komunikasi (J)	647.211,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	573,440,27
12	Real Estate (L)	396.946,53
13	Jasa Perusahaan (M,N)	130.406,97
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	624.380,27
15	Jasa Pendidikan (P)	1.393.537,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	256.335,00
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	564.806,21
	Total	25.865.317,87 **

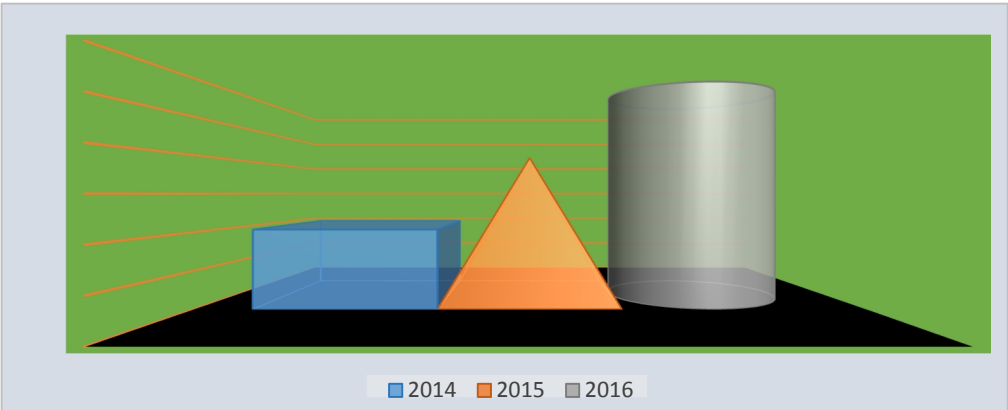
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara ** merupakan angka sangat sementara

Tabel 1.34
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB
		Atas Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	2015	22.071.848,25*
2	2016	23.903.616,74**
3	2017	25.865.317,87**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Grafik 1.12
Perbandingan
PDRB ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017



Tabel 1.35
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	2.446,432,19

2	Pertambangan dan Penggalian (B)	300.899,51
3	Industri Pengolahan (C)	5.756.335,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	18.910,60
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	13.030,56
6	Konstruksi (F)	1.103.072,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.072.168,46
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	735.840,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	715.421,07
10	Informasi dan Komunikasi (J)	523.714,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	357.449,54
12	Real Estate (L)	305.842,53
13	Jasa Perusahaan (M,N)	82.665,47
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	417.005,74
15	Jasa Pendidikan (P)	803.497,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	157.930,65
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	390.149,20
	Total	17.200.365,92*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2017

Tabel 1.36
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	2.479.799,29
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	313.740,82
3	Industri Pengolahan (C)	6.019.957,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	20.377,20
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	13.313,70
6	Konstruksi (F)	1.178.918,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.226.680,25
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	784.577,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	761.339,56
10	Informasi dan Komunikasi (J)	567.217,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	390.111,64
12	Real Estate (L)	326.624,70
13	Jasa Perusahaan (M,N)	91.446,89
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	426.883,79
15	Jasa Pendidikan (P)	864.862,81

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	173.501,30
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	423.781,89
	Total	18.063.134,88*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara

Peningkatan produksi barang dan jasa secara riil tanpa dipengaruhi faktor inflasi dicerminkan oleh kenaikan **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2015 sebesar **17.200.365,92*** dilanjutkan tahun 2016 sebesar **18.063.134,88***(*angka sementara*) dan terakhir tahun 2017 sebesar **19.001.040.83**** (*angka sangat sementara*) sebagaimana tabel 1.37.

Tabel 1.37
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	2.515.714,39
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	328.090,83
3	Industri Pengolahan (C)	6.335.541,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	21.888,17
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	14.130,56
6	Konstruksi (F)	1.263.964,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.409.951,76
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	832.670,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	813.631,01
10	Informasi dan Komunikasi (J)	629.485,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	409.880,30
12	Real Estate (L)	345.825,78
13	Jasa Perusahaan (M,N)	99.418,23
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	434.858,05
15	Jasa Pendidikan (P)	906.669,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	187.428,36
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	451.892,31

	Total	19.001.040.83**

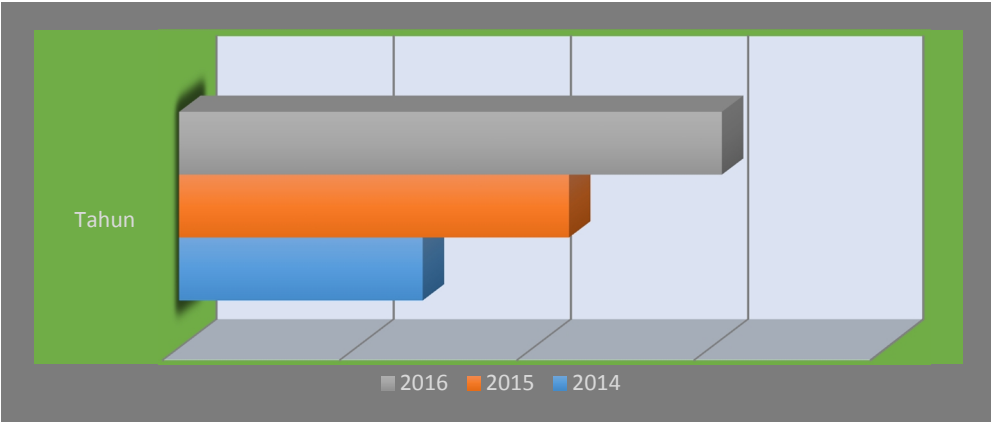
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara ** merupakan angka sangat sementara

Tabel 1.38
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB
		Harga Konstan(ADHK)
1	2	3
1	2015	17.200.365,92 *
2	2016	18.063.134,88 **
3	2017	19.001.040,83 **

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Grafik 1.13
Perbandingan
PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016
(Juta Rupiah)



4. Rata –Rata PDRB Perkapita

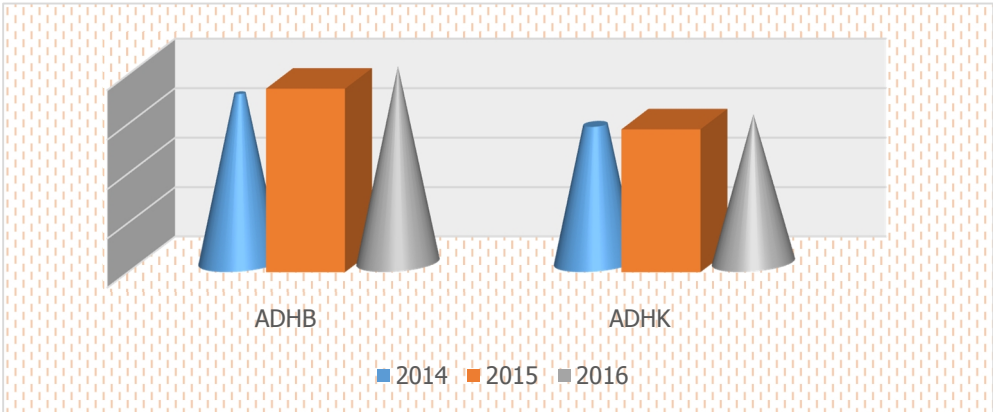
PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Tabel 1.39
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

TAHUN	PDRB Perkapita	
	ADHB	ADHK
1	2	3
2014	17.140.033,41	13.986.099,25
2015	18.574.478,30 *	14.474.901,24 *
2016	19.823.865,26 **	14.980.208,06 **

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Grafik1.14
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)



Berikut ini manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita:

- Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu.
- Membandingkan tingkat kesejahteraan dengan daerah lain
- Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan ekonomi.
- Mengelompokkan suatu daerah ke dalam beberapa tingkat

pendapatan.

Berikut adalah secara ringkas Gambaran Umum Kondisi Ekonomi dilihat dari angka Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) , Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Perkapita) Kabupaten Jepara Tahun 2015 -2017.

Secara garis besar pilar penyangga perekonomian Kabupaten Jepara dipegang oleh kategori industri pengolahan (C) , kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor (G) dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan (A). Dinamika yang terjadi pada tiga sektor ini akan sangat berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana didalamnya juga mengatur perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang SPPN tersebut, setelah Kepala Daerah (Bupati) dilantik maka diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD.

Dalam penyusunannya, RPJMD tersebut berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 yang sedang berjalan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun periode sebelumnya, serta masukan dari penjangkaran aspirasi masyarakat.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui suatu proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan pembangunan daerah dan instansi terkait. Secara substansial RPJMD Kabupaten Jepara merupakan janji politik dari Kepala Daerah terpilih dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya daerah yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil pembangunan daerah yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2018 telah terjabarkan dalam RKPD Tahun 2018 yaitu difokuskan kepada Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Industri Pariwisata Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tema pembangunan tahun 2018 merupakan penjabaran dari Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, dan Misi ke 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Kendati tidak secara eksplisit tercantum dalam fokus pembangunan, pencapaian Misi 1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya sangat erat

kaitannya dalam penjabaran fokus pembangunan Tahun 2018. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- 2) Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata;
- 3) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal;
- 5) Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu ***"Trus Karya Tataning Bumi"*** yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

A.1 VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah : ***"Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan Berdaya Saing"***

A.2 MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan

yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

No.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masy	1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap
		1.3	Perluasan cakupan pemberian beasiswa
2	Meningkatkan budaya baca bagi masyarakat	2.1	Peningkatan cakupan pelayanan Perpustakaan

No.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat	3.1	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat
		3.2	Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan
		3.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
		3.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standard
4	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	4.1	Pengendalian angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
		4.2	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
5	Meningkatkan kualitas hidup perempuan & anak	5.1	Peningkatan UPPKS
		5.2	Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak
6	Meningkatkan even/gelaran seni/budaya	6.1	Peningkatan even/gelaran seni/budaya berskala nasional maupun regional
		6.2	Peningkatan pembinaan dan pemberian apresiasi pada kelompok seni/budaya
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	7.1	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		7.2	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
		7.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		7.4	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau public
		7.5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

No.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
8	Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kerja	8.1	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
		8.2	Pengembangan balai tenaga kerja
		8.3	Perluasan jejaring penempatan tenaga kerja
9	Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM	9.1	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM
		9.2	Pengembangan OVOP
10	Meningkatkan kinerja perindustrian, perdagangan, dan investasi	10.1	Pengembangan sentra IKM
		10.2	Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi produksi.
		10.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan
		10.4	Peningkatan nilai ekspor
		10.5	Peningkatan sarana prasarana penunjang investasi.
		10.6	Peningkatan partisipasi dalam berbagai event promosi investasi.
11	Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan	11.1	Peningkatan mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian dalam arti luas
		11.2	Pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan
		11.3	Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan petani
		11.4	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi petani

No.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
12	Meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan	12.1	Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan
		12.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan
		12.3	Perluasan akses permodalan di bidang perikanan
		12.4	Pengembangan pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan
13	Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata	13.1	Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan
		13.2	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan
		13.3	Pengembangan jejaring informasi kepariwisataan
14	Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni	14.1	Peningkatan jangkauan program penanganan RTLH
15	Mengurangi kawasan permukiman kumuh	15.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
16	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat	16.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi layak
17	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum/bersih layak bagi masyarakat	17.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum/bersih layak
18	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	18.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

No.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	19.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
20	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	20.1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan public
21	Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan	21.1	Pengembangan sistem dan prosedur pengawasan

C. PRIORITAS DAERAH

1. Tahun 2017

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017 telah terjabarkan dalam RKPD Tahun 2017 yaitu difokuskan kepada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Fokus pembangunan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Misi Pembangunan Pemerintah periode sebelumnya. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kinerja ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal serta sektor-sektor unggulan daerah dalam upaya percepatan pengurangan pengangguran;
- 2) Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Ketersediaan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, dengan sasaran daerah;
- 4) Peningkatan kualitas penyediaan fasilitas umum/infrastruktur;
- 5) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar mesyarakat secara berkelanjutan;
- 6) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak;

- 7) Peningkatan Pelayanan publik dan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang adil, bersih dan bertanggungjawab.

2. Tahun 2018

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2018 telah terjabarkan dalam RKPD Tahun 2018 yaitu difokuskan kepada Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Industri Pariwisata Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tema pembangunan tahun 2018 merupakan penjabaran dari Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, dan Misi ke 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Kendati tidak secara eksplisit tercantum dalam fokus pembangunan, pencapaian Misi 1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya sangat erat kaitannya dalam penjabaran fokus pembangunan Tahun 2018. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- 2) Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata;
- 3) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal;
- 5) Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

3. Tahun 2019

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan

Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pencapaian terhadap Misi ke-5 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional dilakukan secara *mainstream* dan melekat pada masing-masing tahun fiskal pembangunan mulai dari tahun 2017-2022. Fokus pembangunan pada tahun 2019 adalah Optimalisasi pembangunan infrastruktur pariwisata yang didukung oleh pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas;
- 2) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster;
- 3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Jepara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran;
- 4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama;
- 7) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Tahun 2020

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Arah pembangunan tahun 2020 adalah Penguatan kualitas SDM untuk

mendukung tumbuhnya industri kreatif berbasis potensi unggulan. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
- 2) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- 3) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memerhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
- 4) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
- 5) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

5. Tahun 2021

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 diarahkan kepada Penguatan industri Kreatif berbasis potensi unggulan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang memerhatikan kelestarian lingkungan. Arah pembangunan tersebut berfokus untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat, Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna;

- 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan;
- 5) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

6. Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan Penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera di masa akhir jabatan kepala daerah.

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan;
- 5) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- 6) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a) Ringkasan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pendidikan anak usia dini

- Kegiatan :

- 1). Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung TK Negeri
- 2). Lomba Kreatifitas siswa dan guru PAUD
- 3). Penyelenggaraan Gebyar PAUD
- 4). Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Pendidik PAUD
- 5). Fasilitasi Penyelenggaraan Gugus PAUD
- 6). Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina
- 7). Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Mitra PAUD
- 8). Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK REGULER)

➤ Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

- Kegiatan :

- 1). Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
- 2). Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba Sekolah sehat, Adiwiyata SMP
- 3). Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK REGULER
- 4). Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah
- 5). Penataan Lingkungan dan Pavingisasi Halaman SD
- 6). Pembangunan Pagar dan Talud SD
- 7). Pengadaan TIK SD
- 8). Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD
- 9). Pembangunan Ruang Laboratorium SMP
- 10). Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Siswa Teladan dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD
- 11). Seleksi dan fasilitasi Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N dan Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD)

- 12). Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum MGMP/ MKKS SMP
- 13). Seleksi dan fasilitasi Lomba MAPSI (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami)
- 14). Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK REGULER)
- 15). Pembangunan Kamar Mandi/WC, Sanitasi SD
- 16). Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI
- 17). Fasilitasi Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi
- 18). Pembangunan Pagar Lingkungan SD
- 19). Pembangunan dan Penataan Ruang Kelas SD
- 20). Pengadaan TIK SMP
- 21). Seleksi dan Fasilitasi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
- 22). Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD,
- 23). fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online
- 24). Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka
- 25). Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
- 26). Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SMP
- 27). Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Siswa Teladan dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP
- 28). Seleksi dan fasilitasi Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) SMP
- 29). Seleksi dan Fasilitasi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
- 30). Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SD
- 31). Rehabilitasi dan penyempurnaan Pagar Lingkungan, Senderan SMP
- 32). Pelaksanaan BOS SD
- 33). Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SD
- 34). Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP
- 35). Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
- 36). Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Penyusunan RPP, Model Pembelajaran dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru SD

➤ **Program Pendidikan Non Formal**

- **Kegiatan :**

- 1). Pameran hasil bina Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 2). Fasilitasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C
- 3). Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan C
- 4). Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal dan Pengarusutamaan gender bidang pendidikan
- 5). Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
- 6). Penyelenggaraan dan Fasilitasi Jambore PTK PAUDNI Berprestasi

➤ **Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan**

- **Kegiatan :**

- 1). Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya
- 2). Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT
- 3). Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD dan Guru SMP
- 4). Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah SD
- 5). Tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dan non sertifikasi
- 6). Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru SD
- 7). Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala TK, SMP, SKB, Pengawas dan Penilik
- 8). Pembinaan, pengelolaan data dan pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi dan pengiriman PTK berprestasi/OGN
- 9). Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD
- 10). Fasilitasi riset penelitian pendidikan dan publikasi hasil riset melalui Jurnal Pendidikan

- **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
 - **Kegiatan :**
 - 1). Pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data backbone Dapodik
 - 2). Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah
 - 3). Pembinaan dan pendampingan pengelolaan BOS SD dan SMP
 - 4). Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung PAUD SKB di Pengkol dan Penataan Lingkungan SKB
 - 5). Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6). Manajemen Pelayanan Pendidikan (Banprov)
- **Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1). Fasilitasi biaya operasional satuan pendidikan keagamaan
- **Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1). Fasilitasi biaya operasional satuan pendidikan keagamaan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan dinilai melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dari sejumlah 63.368 anak usia 4 – 6 tahun di kab. Jepara terdapat 36.684 anak yang bersekolah pada jenjang Taman kanak-kanak (TK), RA, dan Penitipan Anak sehingga capaian kinerjanya sebesar 58,21 %.
2. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Penduduk Kabupaten Jepara yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 845.250 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 884.900 orang, sehingga IKK-nya mencapai 95,52 %
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A
Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.1
Tabel Indikator APM tingkat SD/MI/Paket A

No	Jenis APM	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SD/MI/ PaketA	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun jenjang SD/MI	107.125	99,52%
		Jumlah penduduk kel usia 7-12 thn	107.125	

4. Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.2
Tabel Indikator APM tingkat SMP/MTs/Paket B

No	Jenis APM	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SMP/MT s/ Paket B	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs	51.112	81,58 %
		Jumlah penduduk kel usia 13-15 tahun	62.650	

5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.4
Tabel Indikator APS tingkat SD/MI

No	Jenis APS	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SD/MI	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD	28	0,04%
		Jumlah Siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya	77.805	

6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.5
Tabel Indikator APS tingkat SMP/MTs

No	Jenis APS	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SMP / MTs	Jml putus sekolah pd tk & jenjang SMP/MTs	19	0,09 %
		Jmlh Siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	22.299	

7. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.7
Tabel Indikator AL tingkat SD/MI

No	Jenis AL	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	19.718	100 %
		Jml lulusan pd jenjang SD/MI pd thn ajaran sebelumnya	19.718	

8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.8
Tabel Indikator AL tingkat SMP/MTs

No	Jenis AL	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	17.924	100 %
		Jml lulusan pd jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya	17924	

9. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.10

Tabel Indikator AM dari SD/MI ke SMP/MTs

No	Jenis AM	Uraian	Jumlah	Capaian Kinerja
1	SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	19.716	99,76 %
		Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya	19.763	

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
 Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D4 tahun 2018 adalah 15.214 orang dari seluruh jumlah guru SD/MI,MTS/SMP, sebanyak 17.863 orang, atau capaian kinerjanya sebesar 85,17 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 93 orang
- Kualifikasi pendidikan
 S3: 0 orang, S2 : 24 orang, S1: 44 orang, D3: 4 orang, D2 : 1 orang, D1: 1 orang, SLTA : 19 orang
- Pangkat dan Golongan :
 Pembina Tk.I (IVb) : 7 orang, Pembina (IVa) : 13 orang, Penata Tk.I (IIIId) : 15 orang, Penata (IIIC) : 18 orang, Penata Muda Tk.I (IIIB) : 7 orang, Penata Muda (IIIa) : 12 orang, Pengatur Tk.I (IID) : 0 orang, Pengatur (IIC) : 18 orang, Pengatur Muda Tk.I (IIB) : 3 orang,
- Pejabat Struktural : 18 orang
 Eselon IIa : 0 orang, eselon IIB : 0 orang, eselon IIIa : 1 orang, eselon IIIB : 4 orang, Eselon IVA : 13 orang,

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pendidikan Anak Usia Dini			
1	Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung TK Negeri	300.000.000	298.640.000
2	Lomba Kreatifitas siswa dan guru PAUD	32.675.000	29.083.000
3	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	74.495.000	71.996.600
4	Pembinaan Kelpmk Kerja Guru/Pendidik PAUD	31.981.000	31.780.000
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Gugus PAUD	28.375.000	27.563.000
6	Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina	187.000.000	180.700.000
7	Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Mitra PAUD	73.540.000	69.497.000
8	Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK REGULER)	156.000.000	156.000.000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun			
1	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP	25.760.000	10.764.000
2	Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SMP	266.991.000	249.846.729
3	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK REGULER)	7.338.272.000	4299777.900
4	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah	200.000.000	199.161.000
5	Penataan Lingkungan dan Pavingisasi Halaman SD	300.000.000	298.143.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6	Pembangunan Pagar dan Talud SD	250.000.000	248.974.000
7	Pengadaan TIK SD	243.820.000	227.380.000
8	Faslitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD	26.920.000	26.383.000
9	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	750.000.000	747.618.000
10	Penyelenggaraan dan Fasilitas Lomba Siswa Teladan dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD	50.195.000	48.207.000
11	Seleksi dan fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N dan Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD)	103.650.000	95.300.000
12	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum MGMP/ MKKS SMP	32.398.000	32.233.600
13	Seleksi dan fasilitas Lomba MAPSI (Mata Pelajaran Pendidkn Agama Islam & Seni Islami)	210.610.000	210.025.000
14	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK REGULER)	7.619.629.000	7.591.209.070
15	Pembangunan Kamar Mandi/WC, Sanitasi SD	600.000.000	597.663.400
16	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI	681.600.000	676.928.000
17	Fasilitas Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi	21.025.000	21.019.000
18	Pembangunan Pagar Lingkungan SD	1.350.000.000	1.342.488.500
19	Pembangunan dan Penataan Ruang Kelas SD	480.000.000	443.641.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
20	Pengadaan TIK SMP	6.140.890.000	6.137.209.000
21	Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	68.015.000	67.313.000
22	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD,	27.025.000	26.251.000
23	fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	266.991.000	249.846.729
24	Fasilitas Penyelenggaraan SMP Terbuka	23.525.000	7.692.000
25	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	299.225.000	296.729.205
26	Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gd SMP	80.000.000	79.002.000
27	Penyelenggaraan dan Fasilitas Lomba Siswa Teladan dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP	37.007.000	36.905.000
28	Seleksi dan fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) SMP	297.452.000	263.112.500
29	Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	115.560.000	111.311.000
30	Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SD	44.825.000	44.727.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
31	Rehabilitasi & penyempurnaan Pagar Lingk, Senderan SMP	300.000.000	299.060.000
32	Pelaksanaan BOS SD	67.610.220.000	66.770.581.253
33	Rehabilitasi & Penyempurnaan Gedg SD	2.030.000.000	2.018.299.200
34	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP	91.300.000	86.360.000
35	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP	150.000.000	148.698.750
36	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Penyusunan RPP, Model Pembelajaran dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru SD	38.890.000	38.840.000
Program Pendidikan Non Formal			
1	Pameran hasil bina Pend Luar Sekolah (PLS)	28.125.000	26.599.210
2	Fasilitasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C	91.850.000	78.708.000
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nas Pend Kesetaraan (UNPK) Paket B dan C	48.600.000	46.447.000
4	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendiidikan non formal dan Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	55.445.000	53.435.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	42.810.000	42.754.800
6	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Jambore PTK PAUDNI Berprestasi	39.975.000	28.100.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan			
51	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya	47.087.000	39.726.000
52	Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT	13.360.190.000	13.333.370.595
53	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD dan Guru SMP	38.750.000	38.688.000
54	Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah SD	230.785.000	178.082.600
55	Tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dan non sertifikasi	2.513.259.000	2.512.353.600
56	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) & Pengemb Keprofesian Ber kelanjut an (PKB) Guru SD	58.325.000	50.368.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
57	Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala TK, SMP, SKB, Pengawas dan Penilik	65.860.000	51.225.000
58	Pembinaan, pengelolaan data dan pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi dan pengiriman PTK berprestasi/OGN	77.960.000	77.222.500
59	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD	58.662.000	56.086.900
60	Fasilitasi riset penelitian pendidikan dan publikasi hasil riset melalui Jurnal Pendidikan	90.362.000	90.005.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
61	Pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data backbone Dapodik	126.875.000	112.884.975
62	Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah	63.925.000	44.072.575
63	Pembinaan dan pendampingan pengelolaan BOS SD SMP	64.689.000	52.167.075
64	Rehabilitasi & Penyempurnaan Gedung PAUD SKB di Pengkol & Penataan Lingk SKB	148.760.000	148.369.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
65	Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan & Penyelenggaraan Pend	102.924.000	63.766.500
66	Manajemen Pelayanan Pendidikan (Banprov)	70.000.000	54.458.400
Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan			
67	Fasilitasi biaya operasional satuan pendidikan keagamaan	16.263.786.000	15.634.550.219

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah :
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Masih rendahnya capaian APK PAUD, yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan PAUD untuk pengembangan potensi anak (golden age), masih terbatasnya satuan pendidikan dan sarana prasarana PAUD; kualifikasi dan kompetensi Pendidikan PAUD masih rendah.
 - 2) Pendidikan Dasar
 - Belum terpenuhinya rasio ideal 1 buku : 1 siswa (95%);
 - Belum terpenuhinya semua satuan pendidikan, 1 rombel maksimal 32 siswa untuk SD/MI dan 1 rombel maksimal 36 siswa untuk SMP/MTs;
 - Belum tersedianya ruang perpustakaan untuk 223 SD dari 595 SD (56%); dan dan 9 SMP dari 87 SMP (10%);
 - Belum tersedianya ruang Laboratorium IPA untuk 17 sekolah dari 87 SMP (SMP/MTs (20%);
 - Kondisi kerusakan ruang kelas masih 10% rusak sedang dan 4% rusak berat untuk jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rusak sedang 5% dan rusak berat 3%
 - Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;

- Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tidak meratanya tenaga pendidik;
- 3) Pendidikan Non Formal
 - Jumlah PKBM masih kurang (18 PKBM dari target 32 PKBM);
 - Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal
- 4) Tenaga Pendidik
 - Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata;
 - Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik;
 - Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan minimal.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Mengupayakan melalui pengusulan penganggaran berbasis kinerja dengan sasaran :
 - Peningkatan APK PAUD
 - Peningkatan layanan TK/RA swasta.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah, pemuda dan olahraga.
 - Pemberian beasiswa untuk Gakin, beasiswa retrival, beasiswa bakat dan prestasi.
 - Penyelenggaraan PLS
 - Efisiensi pengelolaan anggaran melalui penggabungan sekolah dengan jumlah murid sedikit dan tidak berlokasi di daerah terpencil dan penggabungan sekolah – sekolah yang berlokasi dalam satu halaman sekolah.
 - Efisiensi pengelolaan sumber daya manusia guru dengan penataan guru di sekolah sekolah yang kekurangan guru dan sekolah – sekolah yang kelebihan guru.
 - Menerapkan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang terintegrasi melalui : Peningkatan kualitas input, peningkatan kualitas proses, dan peningkatan kualitas output pendidikan.
 - Mengupayakan kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tenaga yang profesional dalam bidang tugasnya.
 - Memberdayakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan prestasi di bidang : akademik, keterampilan, olah raga, dan seni melalui berbagai event dan strata.

- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan
7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
8. Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasana yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam kondisi cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Masih rendahnya capaian APK PAUD, yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan PAUD untuk pengembangan potensi anak (golden age) ,
 - Masih terbatasnya satuan pendidikan dan sarana prasarana PAUD; kualifikasi dan kompetensi Pendidikan PAUD masih rendah
 - 2) Pendidikan Dasar
 - Rasio ideal terpenuhinya 1 buku : 1 siswa baru mencapai 100%;
 - Belum terpenuhinya semua satuan pendidikan, 1 rombel maksimal 32 siswa untuk SD/MI dan 1 rombel maksimal 36 siswa untuk SMP/MTs;
 - Belum tersedianya ruang perpustakaan untuk 223 SD dari 595 SD (56%); dan 9 SMP dari 87 SMP (10%)
 - Belum tersedianya ruang Laboratorium IPA untuk 15 sekolah dari 87 SMP (SMP/MTs (19%);
 - Kondisi kerusakan ruang kelas masih 10% rusak sedang dan 4% rusak berat untuk jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rusak sedang 5% dan rusak berat 3%
 - Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;

- Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tidak meratanya tenaga pendidik;
- 3) Pendidikan Non Formal
 - Jumlah PKBM masih kurang (16 PKBM dan 1 SKB dari target 32 PKBM);
 - Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal
- 4) Tenaga Pendidik
 - Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata;
 - Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik;
 - Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan minimal.
- Solusi :
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang penting pendidikan PAUD dan memberikan bantuan stimulan dana pembangunan lembaga PAUD
 - Memberikan bantuan APE Indoor dan Outdoor kepada lembaga PAUD yang sarprasnya masih minim
 - 2) Pendidikan Dasar
 - Penambahan Buku paket siswa melalui dana DAK dan Banprov
 - Pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium IPA pada satuan pendidikan yang belum mempunyai ruang perpustakaan dan ruang laboratorium IPA;
 - Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas;
 - Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Lomba Baris Berbaris (LBB) SD/MI sampai SMP/MTs;
 - 3) Pendidikan non Formal
 - Program pendidikan keaksaraan terutama pada desa miskin;
 - Memberikan bantuan operasional untuk PKBM melalui Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - Memberikan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana lembaga non formal melalui Bantuan Penguatan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
 - 4) Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - Melakukan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - Mengajukan pengangkatan tenaga pendidik baru;

- Memberikan dana bantuan pada tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1;
- Memberikan bantuan kesejahteraan tenaga pendidik wiyata bhakti;
- Mendorong kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi akademiknya.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- 1) Juara I Tingkat Internasional, Kejuaraan International Karate Championship Mayors Cup atas nama Farizal Wahyu Adika (FORKI Jepara);
- 2) Juara I Tingkat Internasional, Kejuaraan International Karate Championship Mayors Cup atas nama M. Fahri Aufa (SMP AZ-ZAHRO MLONGGO);
- 3) Juara I Tingkat Internasional, Kejuaraan International Karate Championship Mayors Cup atas nama Karolin Cassey Mandagi (SD N 6 BANGSRI);
- 4) Juara I Tingkat Internasional, Kejuaraan International Karate Championship Mayors Cup atas nama Feliks Parlindungan Sinaga (SD N 2 BANGSRI);
- 5) Juara I Tingkat Internasional, Kejuaraan International Karate Championship Mayors Cup atas nama Alcarol Darby Agrasiano A (SD N 1 SROBYONG);

2. Urusan Kesehatan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
- RSUD. RA. KARTINI

b. Program dan Kegiatan :

- DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
 - **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Kesehatan
 - 2) Pengelolaaa Obat Instalasi Farmasi
 - 3) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
 - 4) Pelayanan Distribusi Obat dan Penunjang E-Logistik (DAK NON FISIK)
 - **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penanggulangan Krisis Kesehatan (Kegawatdaruratan dan Bencana)
 - 2) Pelayanan Kesehatan Haji

- 3) Fasilitasi upaya kesehatan masyarakat sekunder (DAK NON FISIK)
- 4) Dukungan Manajemen BOK Puskesmas di Kabupaten Jepara (DAK NON FISIK)
- **Program Pengawasan Obat dan Makanan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembinaan dan Perijinan Kefarmasian
- **Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Promosi di Bidang Kesehatan dan Rakerkeskab
- **Program Perbaikan Gizi Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
- **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengembangan Kualitas Lingkungan Sehat
- **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 2) Surveilans, Imunisasi dan pengendalian KLB
 - 3) Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Jepara
- **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Pembinaan dan Perijinan Sarana Kesehatan
 - 3) Pengembangan Tenaga Fungsional Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan
 - 4) Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK NON FISIK)
 - 5) Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara (DAK NON FISIK)
- **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pusk/ Pustu dan Jaringannya**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Bangsri I (DBHCHT)
 - 2) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Karangnongko Kecamatan Nalumsari (DBHCHT)
 - 3) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK REGULER)

- 4) Pengadaan Alat Pendukung Imunisasi bagi Puskesmas (DAK REGULER)
- 5) Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Wahana Pendidikan DLP bagi Puskesmas (DAK REGULER)

➤ **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 2) Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)

➤ **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelayanan bagi Masyarakat Miskin dan Kelas III diluar Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan JKN

➤ **Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

- **Kegiatan :**

- 1) Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
- 2) Penanganan Kasus Kedaruratan Jiwa, Indra dan NAPZA

➤ **Program Pelayanan Kesehatan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelayanan Kesehatan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan ada 8 IKK, yaitu:

1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Pada tahun 2018 di Kabupaten Jepara dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan sebanyak 4.483, yang mendapat penanganan definitif sebanyak 4.153 atau capaian kinerjanya sebesar 92,63 %.
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
Pada tahun 2018, dari seluruh sasaran ibu bersalin yaitu sebanyak 19.684 orang, semuanya ditolong/ ditangani oleh tenaga kesehatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Dari 195 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara, sudah melaksanakan Universal Child Immunization (UCI) seluruhnya sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Dari 114 kasus balita gizi buruk, kesemuanya mendapat pelayanan perawatan, sehingga nilai capaian kinerjanya 100 %
5. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC BTA
Selama kurun waktu 2018 diperkirakan terdapat 1.521 penderita baru TBC BTA (+), sedangkan yang dapat ditemukan dan diobati sebesar 1.008 penderita atau capaian kinerjanya 66,27%
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Pada tahun 2018 di Kabupaten Jepara ditemukan 216 penderita penyakit DBD, dan semua kasus itu dapat ditangani atau capaian kinerjanya sebesar 100 %
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Dari 619.196 orang masyarakat miskin di Jepara, terdapat 348.163 kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan atau kinerjanya sebesar 56,22 %.
8. Cakupan kunjungan bayi
Hal lain yang penting untuk mendapat pelayanan dasar kesehatan adalah bayi lahir yang hidup. Selama tahun 2018 terdapat 19.735 bayi lahir yang hidup di Kabupaten Jepara, akan tetapi yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 19.666 capaian kinerjanya sebesar 98,65 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara : 61 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 15 orang, S1= 31 orang, D4= 2 orang, D3= 8 orang, SLTA= 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 3 orang, Pembina (IV/a)= 12 orang, Penata Tk. I (III/d) = 18 orang, Penata (III/c) = 10 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 13 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, pengatur (II/c) = 2 orang.
- Jumlah pegawai RSUD RA. Kartini Kab. Jepara : 452 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 19 orang, S1= 158 orang, D4= 12 orang, D3= 159 orang, D2 = 0 orang, D1 = 0 orang, SLTA= 92 orang, SLTP= 9 orang, SD= 3 orang

- Pangkat dan golongan : Pembina Utama (IV/e)= 1 orang, Pembina Utama Madya (IV/d)= 2 orang, Pembina Utama Muda (IV/c)= 3 orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 11 orang, Pembina (IV/a)= 26 orang, Penata Tk. I (III/d) = 88 orang, Penata (III/c) = 50 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 108 orang, Penata Muda (III/a) = 66 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 6 orang, pengatur (II/c) = 74 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) = 10 orang, pengatur muda (II/a) = 5 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Program dan Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp)
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
1	Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Kesehatan	440.000.000	421.099.293
2	Pengelolaaa Obat Instalasi Farmasi	167.338.000	164.989.816
3	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	4.553.537.000	4.362.272.064
4	Pelayanan Distribusi Obat dan Penunjnag E-Logostik (DAK NON FISIK)	70.526.000	65.328.696
Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
1	Penanggulangan Krisis Kesehatan (Kegawatdaruratan dan Bencana)	167.719.000	157.186.360
2	Pelayanan Kesehatan Haji	10.000.000	8.551.000
3	Fasilitasi upaya kesehatan masy sekunder (DAK NON FISIK)	783.138.000	664.928.350
4	Dukungan Manajemen BOK Pusk di Kab Jepara (DAK NON FISIK)	783.138.000	664.928.350

Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Pembinaan & Perijinan Kefarmasian	15.425.000	14.953.300
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat			
1	Promosi di Bidang Kesehatan dan Rakerkeskab	172.930.000	155.019.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
1	Peningkatan perbaikan gizi masyarakat	156.747.000	156.305.292
Program Pengembangan Lingkungan Sehat			
	Pengembangan Kualitas Lingk Sehat	927.040.000	831.565.700
Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular			
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	194.720.000	190.969.372
2	Surveilans, Imunisasi dan pengendalian KLB	98.872.000,-	95.588.350
3	Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Jepara	101.650.000,-	100.981.700
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
1	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	43.390.000
2	Pembinaan dan Perijinan Sarana Kes	8.162.000	5.375.000
3	Pengembangan Tng Fungsional Kes, Diklat Peningkatan Mutu & Kompetensi SDM Kesehatan	68.373.000	66.978.000
4	Standarisasi Pelayanan Kes Dasar (DAK NON FISIK)	232.000.000	207.550.388
5	Akreditasi Lab Kes Daerah Kab Jepara (DAK NON FISIK)	156.705.000	114.869.685

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pusk/ Pustu dan Jaringannya			
1	Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Bangsri I (DBHCHT)	450.000.000	394.114.000
2	Rehabilitasi Puskesmas Pemb Karangnongko Kec. Nalumsari (DBHCHT)	200.000.000	198.500.000
3	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pusk, Puskesmas Pemb dan Jaringannya (DAK REGULER)	3.500.000.000	3.393.764.080
4	Pengadaan Alat Pendukung Imunisasi bg Pusk (DAK REGULER)	1.329.998.000	1.329.998.000
5	Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Wahana Pendidikan DLP bagi Puskesmas (DAK REGULER)	2.429.161.000	2.402.656.800
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			
1	Peningkatan plyn kes ibu dan anak	184.890.000	182.604.950
2	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	2.970.436.000	2.235.339.050
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional			
3	Pelayanan bagi Masyarakat Miskin dan Kelas III diluar Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit	33.288.636.000	32.961.299.089
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan JKN	22.850.000	11.326.000

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
1	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	65.992.000	58.044.000
2	Penanganan Kasus Kedaruratan Jiwa, Indra dan NAPZA	32.137.000	27.750.200
Program Pelayanan Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	150.450.258.000	152.206.434.277
2	Pelayanan Kesehatan (DAK)	4.765.757.000	4.247.942.626

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah :
 - 1) Target indikator Proporsi Rumah Tangga berPHBS tahun 2018 82 % tercapai 78,88 %
 - 2) Target indikator Persentase balita pendek (stunting) tahun 2018 24 % tercapai 27 %
 - 3) Target indikator Persentase Desa melaksanakan STBM Tahun 2018 85 % tercapai 61,54 %
 - 4) Target indikator Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan Tahun 2018 75 % tercapai 69,81 %
 - 5) Target indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) Tahun 2018 94 % tercapai 92,49%
 - 6) Target indikator Persentase ODHA yang mendapat akses ARV Tahun 2018 target 61 % tecapai 54,32%
 - 7) Jumlah sumber daya mannusia yang kurang di beberapa instalasi/ unit/ KSM RSUD RA. Kartini
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - 1) Intensifikasi kunjungan rumah PISPK dan pemberdayaan tenaga akselerator kesehatan di tingkat desa
 - 2) Pengambilan data dengan cara pengukuran status gizi sesuai standar dan metode pengolahan data yang konsisten melalui aplikasi e-PPBGM sehingga data yang dihasilkan lebih baik kualitasnya

- 3) Koordinasi linsek untuk integrasi program STBM
 - 4) Advokasi usulan anggaran untuk rehabilitasi sarana sanitasi sekolah
 - 5) Kunjungan rumah untuk sweeping ibu hamil terutama untuk ibu hamil yang periksa ke dokter ahli
 - 6) Penambahan Klinik CST untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ODHA. Tahun 2018 ada 5 Klinik CST yaitu di RSUD RA Kartini, Puskesmas Pecangaan, Mlonggo, Bangsri I dan Donorojo.
 - 7) Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit yang kompeten
 - 8) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
 - 9) Jumlah SDM yang kurang di beberapa instalasi/ unit/ KSM
- Program, yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - 1) Program Pelayanan Adminitansi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 3) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 5) Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - 11) Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
 - 12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan perorangan memlalui Jaminan Kesehatan Nasional
 - 14) Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 15) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
 - 16) Program Pelayanan Kesehatan

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang cukup baik disesuaikan dengan standar secara bertahab.

h. Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di Tahun 2018:

- Permasalahan :
 - 1) Belanja BBM ada beberapa yang tidak terserap karena disesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
 - 2) Pengadaan yang disesuaikan dengan hasil perolehan sehingga tidak bisa terserap anggaran keseluruhan
 - 3) Penggunaan dana DAK terutama DAK Non Fisik menunggu perubahan anggaran dan juknis pelaksanaan yang mengikat
 - 4) Kebutuhan masing-masing sektor sangat variatif
- Solusi
 - 1) Penggunaan sesuai kebutuhan dan pengembalian ke kas
 - 2) Realisasi permintaan sesuai kebutuhan yang krusial

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

RSUD RA. Kartini :

- Telah ter Akreditasi 16 pelayanan
- Telah mendapatkan ISO 2008:9001 tahun 2010
- Telah ter Akreditasi paripurna versi 2012
- Penghargaan sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori Baik dengan catatan. Tahun 2018

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

• **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

- **Kegiatan :**

- 1). Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik
- 2). Lanjutan Penataan TPA Bandengan dengan Sanitary Landfill
- 3). Lanjutan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Karimunjawa
- 4). Optimalisasi TPA Krasak
- 5). Penunjang Petugas Kebersihan
- 6). Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Sampah Sejak dari Sumbernya di Titik Pantau Adipura
- 7). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan se Kab. Jepara
- 8). Penunjang Persampahan

- 9). Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kebersihan
- 10). Pembangunan Sarana Prasarana Reduksi Sampah

➤ **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

- **Kegiatan :**

- 1). Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- 2). Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 3). Penanganan Pengaduan LH
- 4). Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- 5). Pengawasan Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari Air, Udara dan Tanah
- 6). Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3
- 7). Pembangunan IPAL untuk Mengelola Limbah Organik Ternak
- 8). Gerakan Bersih Pantai dan Prokasih
- 9). Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Jepara
- 10). Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Untuk Masyarakat
- 11). Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan

➤ **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

- **Kegiatan :**

- 1). Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati
- 2). Pembinaan dan Pengembangan Kampung Organik Bebas Sampah
- 3). Pembinaan dan Pengembangan Kampung Iklim
- 4). Mendukung Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
- 5). Peringatan Hari Besar Bidang Lingkungan Hidup
- 6). Operasional Sekretariat Komisi Penilai Amdal dan Peningkatan Kapasitas KPA Kabupaten Jepara
- 7). Operasional Pelayanan Pemeriksaan UKL UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan
- 8). Sosialisasi Penaataan Pengelolaan Lingkungan oleh Pelaku Usaha
- 9). Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar
- 10). Operasional Dan Penunjang UPT Laboratorium Lingkungan

11). Peningkatan Saran Laboratorium Lingkungan

➤ **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

- **Kegiatan :**

- 1). Peningkatan Sarana Promosi dan Informasi LH
- 2). Persiapan Penyusunan RPPLH
- 3). Penyusunan Dan Pelaporan Data Informasi SLHD Kab. Jepara 2017
- 4). Menunjang Lomba-Lomba Bidang LH
- 5). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pengelola Lingkungan Hidup dan Bantuan Peralatan Pengelola Lingkungan
- 6). Peningkatan Sarana Promosi dan Informasi LH
- 7). Penyusunan dan Pelaporan Data Informasi SLHD Kab. Jepara 2017
- 8). Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup
- 9). Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa dalam Rangka Pelaksanaan SPM Bidang LH
- 10). Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Kabupaten Jepara
- 11). Pembentukan Kader Lingkungan Kabupaten Jepara
- 12). Sosialisasi Lingkungan Hidup untuk Menunjang Bangunpraja, Hari Jadi Jepara dan HUT RI

➤ **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

- **Kegiatan :**

- 1). Pemeliharaan Hutan Kota, Hutan Pantai dan Penghijauan Lingkungan
- 2). Pemeliharaan Taman-Taman Kota, Kanston dan Sarana Prasarana Pertamanan
- 3). Penunjang Pengelolaan Pertamanan
- 4). Penghijauan Kota Tersebar se-Kabupaten Jepara
- 5). Pemeliharaan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan
- 6). Pembangunan Taman Rusunawa Ujung Batu
- 7). Pengecatan Taman-Taman Kota, Gapura/Tugu Kota, Kanstin
- 8). Pembangunan Taman Sekitar Ari-Ari Kartini Mayong
- 9). Pembangunan Taman di Sekitar Komplek Kolam Renang Ujungbatu
- 10). Pembangunan Bangku taman Beserta Kelengkapannya

- 11). Pemeliharaan Lampu Taman dan Gapuro
- 12). Lanjutan Penataan Gapuro dan Lingkungan Batas Welahan-Demak
- 13). Penataan dan Pemeliharaan Taman/Gapura Macan Kurung Nalumsari

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan Lingkungan Hidup digunakan 4 IKK, yaitu :

1. Penanganan Sampah
Penanganan masalah sampah merupakan permasalahan yang krusial yang sering dihadapi di kabupaten/kota termasuk Jepara. Dari total produksi sampah sebanyak 5.640 m³ perhari, hanya sebesar 649,16 m³ perhari yang dapat ditangani atau sebesar 11,51 %.
2. Kebersihan
Jumlah pasar tradisional tergolong baik pada tahun 2018 sebanyak 4 buah dari total 21 buah pasar atau 38 %.
3. Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2018 sebesar 1.168.261 jiwa. Sedangkan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebesar 576 m³. Dengan demikian dari 1000 penduduk Jepara yang bisa ditangani pada TPS adalah 47 orang.
4. Penegakan Hukum Lingkungan
Pemerintah daerah berkewajiban menangani pengaduan kasus pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan jumlah aduan kasus lingkungan yang ada sebanyak 13 kasus dan yang terselesaikan semuanya sehingga capaian kinerjanya bisa 100 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 71 orang.
- Kualifikasi Pendidikan :
S2 : 11 orang, S1 : 13 orang, D-3 : 5 orang, D-2 : - orang, D-1 : - orang, SLTA : 30 orang, SMP : 7 orang, SD : 5 orang.
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 15 orang, Penata (III/c) : 5 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 5 orang, Pengatur (II/c) : 12 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 7 orang, Pengatur Muda (II/a) : 9 orang, Juru Tk. (I/d) : 2 orang, Juru (I/c) : 7 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
1.	Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik	1.298.551.000	1.137.164.354
2.	Lanjutan Penataan TPA Bandengan dengan Sanitary Landfill	63.150.000	23.885.000
3	Lanjutan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Karimunjawa	489.300.000	22.169.000
4	Optimalisasi TPA Krasak	200.000.000	198.950.000
5	Penunjang Petugas Kebersihan	150.000.000	29.720.000
6	Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Sampah Sejak dari Sumbernya di Titik Pantau Adipura	95.747.000	95.005.000
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan se Kab. Jepara	186.500.000	38.850.000
8	Penunjang Persampahan	2.828.778.000	2.723.726.720
9	Pengadaan Kendaraan Oprs Pelayanan Kebersihan	2.382.000.000	2.324.087.400
10	Pembangunan Sarana Prasarana Reduksi Sampah	87.820.000	19.940.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
1	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	177.795.000	174.515.614
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	237.320.000	211.259.574
3	Penanganan Pengaduan LH	43.960.000	42.629.878
4	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	177.795.000	174.515.614
5	Pengawasan Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari Air, Udara dan Tanah	53.787.000	52.405.986

6	Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3	65.220.000	63.679.000
7	Pembangunan IPAL untuk Mengelola Limbah Organik Ternak	188.626.000	145.868.400
8	Gerakan Bersih Pantai dan Prokasih	65.000.000	0
9	Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Jepara	382.212.000	372.224.800
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Untuk Masyarakat	35.000.000	33.524.500
11	Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan	18.403.000	15.236.136
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
12	Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	62.023.000	61.299.000
13	Pembinaan dan Pengembangan Kampung Organik Bebas Sampah	52.900.000	46.010.000
14	Pembinaan dan Pengembangan Kampung Iklim	39.787.000	37.551.800
15	Mendukung Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	51.230.000	49.614.374
16	Peringatan Hari Besar Bidang Lingkungan Hidup	52.852.000	52.761.915
17	Operasional Sekretariat Komisi Penilai Amdal dan Peningkatan Kapasitas KPA Kabupaten Jepara	68.582.000	63.294.790
18	Operasional Pelayanan Pemeriksaan UKL UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan	47.185.000	45.877.898
19	Sosialisasi Penaataan Pengelolaan Lingkungan oleh Pelaku Usaha	58.481.000	56.280.620
20	Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar	96.735.000	93.486.350
21	Operasional Dan Penunjang UPT Laboratorium Lingkungan	165.555.000	151.999.440
22	Peningkatan Saran Laboratorium Lingkungan	200.000.000	186.450.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
1	Peningkatan Sarana Promosi dan Informasi LH	25.320.000	24.949.980
2	Persiapan Penyusunan RPPLH	24.350.000	24.215.793
3	Penyusunan Dan Pelaporan Data Informasi SLHD Kab. Jepara 2017	55.115.000	54.230.562
4	Menunjang Lomba-Lomba Bidang LH	45.260.000	14.850.300
5	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pengelola Lingkungan Hidup dan Bantuan Peralatan Pengelola Lingkungan	185.135.000	173.850.000
6	Peningkatan Sarana Promosi dan Informasi LH	25.320.000	24.949.980
7	Penyusunan dan Pelaporan Data Informasi SLHD Kab. Jepara 2017	55.115.000	54.230.562
8	Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingk Hidup	46.295.000	44.831.882
9	Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa dalam Rangka Pelaksanaan SPM Bidang LH	49.205.000	48.677.000
10	Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Kabupaten Jepara	59.805.000	56.789.550
11	Pembentukan Kader Lingkungan Kabupaten Jepara	40.220.000	26.003.000
12	Sosialisasi Lingkungan Hidup untuk Menunjang Bangunpraja, Hari Jadi Jepara dan HUT RI	50.500.000	47.026.500
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1	Pembibitan Tanaman Kehutanan	536.210.000	531.894.556
2	Pemeliharaan Hutan Kota, Hutan Pantai dan Penghijauan Lingkungan	196.685.000	189.607.500
3	Pemeliharaan Taman-Taman Kota, Kanston dan Sarana Prasarana Pertamanan	733.380.000	685.708.713

4	Penunjang Pengelolaan Pertamanan	737.530.000	669.130.000
5	Penghijauan Kota Tersebar se-Kabupaten Jepara	165.000.000	159.145.000
6	Pemeliharaan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan	60.000.000	57.000.000
7	Pembangunan Taman Rusunawa Ujung Batu	150.000.000	147.700.000
8	Pengecatan Taman2 Kota, Gapura/Tugu Kota, Kanstin	100.000.000	98.829.000
9	Pembangunan Taman Sekitar Ari-Ari Kartini Mayong	400.000.000	9.970.000
10	Pembangunan Taman di Sekitar Komplek Kolam Renang Ujungbatu	200.000.000	197.700.000
11	Pembangunan Bangku taman Beserta Kelengkapannya	75.000.000	74.182.000
12	Pemeliharaan Lampu Taman dan Gapuro	150.000.000	144.700.000
13	Lanjutan Penataan Gapuro dan Lingkungan Batas Welahan-Demak	93.900.000	21.990.000
14	Penataan dan Pemeliharaan Taman/Gapura Macan Kurung Nalumsari	50.000.000	48.850.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari :

- Identifikasi Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Perrmasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - b. Permasalahan terkait pengawasan pelaku usaha dan penegakan hukum lingkungan:
 - 1) Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk

menunjang pemantauan kualitas lingkungan.
3) Kurangnya Tenaga Pengawas.

- c. Permasalahan terkait pelestarian lingkungan hidup:
 - 1) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
 - 2) Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau diperkotaan.
- d. Permasalahan terkait persampahan:
 - 1) Masih rendahnya presentase penanganan sampah se-Kabupaten.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang persampahan.
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - 1) Melaksanakan Pembibitan konservasi dan penghijauan disekitar sumber air, lahan kritis dan rawan longsor,
 - 2) Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
 - 3) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup
 - 4) Melaksanakan penambahan area RTH di kota/kecamatan
 - 5) Perluasan dan/atau pembangunan taman
 - 6) Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha
 - 7) Penegakan hukum lingkungan
 - 8) Penambahan sarana prasaran laboratorium lingkungan
 - 9) Pemantauan kualitas air dan udara
 - 10) Peningkatan sarana prasarana pengangkut sampah
 - 11) Penambahan operasional dan SDM pengelola sampah
 - 12) Peningkatan manajemen pengelola sampah dari open dumping ke control landfill dan sanitari landfill
- Program, yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 7) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
 - 8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup memadai dan baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha.
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pemantauan kualitas lingkungan.
 - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
 - Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau diperkotaan.
 - Masih rendahnya presentase penanganan sampah se-Kabupaten.
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang persampahan.
- Solusi :
 - Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup, Amdal, Perijinan HO atau Ijin Gangguan bagi perusahaan yang mempunyai nilai strategis berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan serta memberikan layanan penanganan terhadap kasus lingkungan hidup dengan membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan keterlibatan semua komponen yang terkait.
 - Meningkatkan Kinerja SDM Pengelola Lingkungan Hidup yang ada serta penambahan sarana/prasarana pemantauan dan uji kualitas lingkungan hidup pada laboratorium lingkungan hidup.
 - Sosialisasi Lingkungan Hidup kepada masyarakat, Pembentukan dan pembinaan Kader Lingkungan, Masyarakat Peduli Lingkungan, peningkatan peran serta Kecamatan dan desa dalam upaya pembangunan lingkungan hidup melalui sumber daya yang tersedia
 - Upaya Penambahan dan perluasan RTH pada Kota Kecamatan
 - Optimalisasi Pengelolaan dan penanganan sampah di pemukiman dengan memperbanyak Bank sampah di masing-masing kecamatan, pengelolaan sampah di fasilitas umum, dengan kolaborasi peran serta masyarakat melalui sistem pengolahan sampah terpadu (TPS3R) dan TPST dalam untuk mengurangi residu sampah dibuang ke TPA serta meningkatkan system pengolahan sampah TPA melalui inovasi intervensi teknologi dengan pemanfaatan gas metan pada sanitary landfill, pengelolaan sampah menjadi pupuk organik.

- Menambah sarana dan prasarana serta sumber daya Manusia melalui Tenaga Lepas Harian pengelola sampah serta perluasan jangkauan pelayanan ke masing-masing kecamatan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Penghargaan : Adipura Th. 2018 untuk kategori Kota Sedang (ke 14 kali) dan berupaya untuk meraih Adipura Kencana.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya**

- **Kegiatan :**

- 1) Lanjutan Pembangunan Puskesmas Batealit
- 2) Lanjutan Pembangunan Puskesmas Nalumsari II
- 3) Pembangunan Gedung PMI

➤ **Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Jalan Kerso - Dongos
- 2) Kegiatan Peningkatan Jalan Panggung - Surodadi
- 3) Peningkatan Jalan Surodadi - Kalianyar - Panggung
- 4) Pelebaran Jalan Pecangaan - Damarjati
- 5) Peningkatan Jalan Pecangaan Kulon - Sowan Kidul
- 6) Pelebaran Jalan Pecangaan - Sowan Lor
- 7) Pelebaran Jalan Bakalan - Pendosawalan
- 8) Peningkatan Jalan Gidanglo - Guwosobokerto
- 9) Peningkatan Jalan Kalipucang - Teluk
- 10) Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru
- 11) Peningkatan Jalan Mayong - Jebol
- 12) Peningkatan Jalan Pancur - Bungu
- 13) Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean
- 14) Peningkatan Jalan Pringtulis - Balekambang - Buaran
- 15) Peningkatan Jalan Batealit - Setro
- 16) Peningkatan Jalan Damaran - Somosari
- 17) Pelebaran Jalan Ngabul - Raguklampitan
- 18) Peningkatan Jalan Kecapi - Bringin
- 19) Peningkatan Jalan Semat - Rau
- 20) Pelebaran Jalan Kedungcino - Bandengan
- 21) Pembangunan Coastal Road Kawasan Bulu
- 22) Pelebaran Jalan Jambu - Bondo Mlonggo

- 23) Peningkatan Jalan Keongsari - Blebak
- 24) Peningkatan Jalan Karanggondang-Mpu Rancak
- 25) Peningkatan Jalan Karanggondang - Pailus Mlonggo
- 26) Pelebaran Jalan Guyangan - Lebak
- 27) Pelebaran Jalan Mambak - Pakis
- 28) Peningkatan Jalan Tanjung - Jurang Nganten
- 29) Pelebaran Jalan Bangsri - Tengguli
- 30) Peningkatan Jalan Lingkar Bangsri
- 31) Peningkatan Jalan Jinggotan - Dudakawu
- 32) Peningkatan Jalan Jlegong - Damarwulan
- 33) Peningkatan Jalan Keling - Bumiharjo
- 34) Peningkatan Jalan Jugo - Sumberejo
- 35) Peningkatan Jalan Sambungoyot - Tulakan
- 36) Peningkatan Jalan Ujungwatu - Clering
- 37) Peningkatan Jalan Kamojan - Mrican
- 38) Pembangunan Jalan Desa Balong Kec. Kembang
- 39) Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Kecapi Rt 42/08
Dengan Desa Mulyoharjo
- 40) Pembangunan Jalan Penghubung Desa Karagan-Doriyo
Desa Tunahan Di Desa Tunahan
- 41) Pembangunan Trotoar Jalan Mt Haryono
- 42) Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dan
Jembatan
- 43) Lanjutan Pavingisasi Dan Saluran Air Desa Bulu Rw 2
- 44) Peningkatan Jalan Kabupaten Jalur Angkot K. 15
Tahunan Langon
- 45) Pembangunan Tebing Pengaman Jalan Kabupaten Di
Dukuh Dengenan Tulaksoro Di Desa Bategede
Kec.Nalumsari
- 46) Peningkatan Jalan Kabupaten Buaran - Bategede
- 47) Peningkatan Jalan Kabupaten Bungu - Bategede
- 48) Peningkatan Jl. Rukmini (Dak Reguler)
- 49) Peningkatan Jl. Kardinah (DAK REGULER)
- 50) Peningkatan Jl. Rukmini (Dak Reguler)
- 51) Operasional Penunjang Dak (Dak Reguler)
- 52) Peningkatan Jalan/Saluran Jalan Ongko Wijoyo Dan
Gemaharjo 7 Kel.Pengkol Kec. Jepara
Kab.Jepara(Banprov)
- 53) Peningkatan Jalan Poros Petekeyan - Ngabul Kec.
Tahunan Kab. Jepara (Banprov)
- 54) Betonisasi Jalan Poros Teluk Wetan- Kendengsidialit
Kec. Welahan Kab.Jepara (Banprov)
- 55) Peningkatan Jalan Pecangaan -Damarjati Kab. Jepara
(Banprov)
- 56) Peningkatan Jalan Mantingan Ngabul (Jalan Sultan
Hadlirin) Kab. Jepara (Banprov)

- 57) Peningkatan Jalan Nalumsari - Papringan Kab. Jepara (Banprov)
- 58) Peningkatan Jalan Kedungcino - Bandengan Kab. Jepara (Banprov)
- 59) Peningkatan Jalan Kuwasen - TPA Bandengan Kab. Jepara (Banprov)
- 60) Peningkatan Jalan Poros Desa Plajan - Kepuk Kab. Jepara (Banprov)
- 61) Peningkatan Jalan Jerukwangi - Bondo (Banprov)
- 62) Peningkatan Jalan Ujungwatu-Clering (Banprov)
- 63) Peningkatan Jalan Mambak -Mororejo Jepara (Banprov)
- 64) Peningkatan Jalan Poros Ngetuk -Karangnongko Kec. Nalumsari Kab.Jepara (Banprov)
- 65) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Guyangan - Lebak Jepara (Banprov)
- 66) Pelebaran Jalan Ngabul - Raguklampitan (Banprov)
- 67) Pembangunan Talud Jalan Jebol - Pule (Banprov)
- 68) Pembangunan Talud Jalan Pelang - Kuanyar (Banprov)
- 69) Pembangunan Drainase Pakis -Bulungan Kec Pakis Aji Kab Jepara(Banprov)
- 70) Pembangunan Drainase Kelet -Blingoh Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)
- 71) Penataan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Bapangan Dan Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (Banprov)
- 72) Peningkatan Jalan Lingkungan Dk.Depok Kel. Karangkebagusan Kec.Jepara Kab. Jepara (Banprov)
- 73) Peningkatan Jalan Tunggulpandean -Blimbingrejo Kec. Nalumsari Kab.Jepara (Banprov)
- 74) Peningkatan Jalan Nalumsari -Tunggul Pandean Kec. Nalumsari Kab. Jepara (Banprov)
- 75) Penataan Jalan Dan Saluran Di Lingkungan Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara (Banprov)
- 76) Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ngetuk - Karangnongko Jepara (Banprov)
- 77) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jinggotan – Dudakawu (Banprov)
- 78) Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Tuk Songo (Banprov)
- 79) Peningkatan Jalan Bumiharjo -Ngandong (Banprov)
- 80) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sebagor - Tunahan (Banprov)
- 81) Peningkatan Jalan Sambungoyot -Tulakan (Banprov)
- 82) Peningkatan Jalan Poros Desa Banjaran - Tengguli – Srikandang Kab. Jepara (Banprov)

- 83) Pembangunan Sandaran Dan Peningkatan Jalan Poros Pancur -Bategede ; Jalan PenghubungPancur - Bategede (Banprov)
- 84) Pembangunan Jalan/Talud/Drainase Jalan Poros Kedungpenjalin-Jl.Sole Man(Srobyong-Karanggondang) Kab.Jepara (Banprov)
- 85) Pembangunan Drainase Tulakan -Bandungharjo Kec. Donorojo Kab.Jepara (Banprov)
- 86) Pembangunan Drainase Keling -Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara(Banprov)
- 87) Peningkatan Jalan Poros Papasan-Srikandang-Tengguli Kab.Jepara (Banprov)
- 88) Peningkatan Jalan Panggung -Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara (Banprov)
- 89) Peningkatan Jalan Batulawang -Pelabuhan Legon Bajak (Banprov)
- 90) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pringtulis – Nalumsari (Banprov)
- 91) Pembangunan Saluran Drainase Karimunjawa - Kemojan (Banprov)
- 92) Peningkatan Jalan Pulau Nyamuk (Banprov)
- 93) Pembangunan Talud Pengaman Jalan Keongsari - Blebak (Banprov)
- 94) Pembangunan Drainase Jalan Guyangan - Bangsri Kab. Jepara (Banprov)
- 95) Pembangunan Drainase Jalan Sinanggul - Slagi Kab. Jepara (Banprov)
- 96) Peningkatan Jalan Sukosono – Kerso Kec. Kedung Kab. Jepara (Banprov)
- 97) Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru Kec. Welahan Kab. Jepara(Banprov)
- 98) Pembangunan Drainase Ngeling - Rengging Jepara (Banprov)

➤ **Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembuatan Talud Utara Terminal Gedangan Welahan
- 2) Pembanguan Talud Langon Bugel Kec.Tahunan
- 3) Pembangunan Talud Kedungcino -Bandengan Kec. Jepara

➤ **Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan Se-Kabupaten Jepara
- 2) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Se-Kabupaten Jepara

- 3) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Singorojo
- 4) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Karangnongko
- 5) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Bendan Pete
- 6) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Gemiring Lor
- 7) Peningkatan Jalan Roros Desa Ngetuk
- 8) Peningkatan Jalan Poros Desa Muryolobo
- 9) Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Paving Mulyoharjo
- 10) Lanjutan Drainase Jalan Karangkebagusan Krapyak
- 11) Pembangunan Drainase Jalan Ngabul Sukosari
- 12) Pembangunan Drainase Jalan Pesajen
- 13) Pembangunan Trotoar Jalan Kopral Sapari
- 14) Overlay Jalan Sowan Kidul -Sowanlor
- 15) Pembangunan Talud Jalan Pailus Ds.Karanggondang
- 16) Peningkatan Jalan Poros Desa Ngabul - Petekeyan
- 17) Peningkatan Jalan Poros Desa Tahunan - Pekalongan
- 18) Peningkatan Jalan Poros Desa Langan - Sukosono
- 19) Peningkatan Jalan Poros Desa Sukodono - Langan
- 20) Pembuatan Saluran Drainase Jalan Kabupaten Jalur Angkot K.15
- 21) Pembangunan Senderan Jalan Surodadi-Panggung
- 22) Betonisasi Jalan Sengon Bugel-Pelang Kidul Sepanjang 1,5 Km
- 23) Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten Watuaji - Damarwulan
- 24) Pembangunan Senderan Jalan Daren gebog
- 25) Pembangunan Senderan Jalan Dorang- Gedangan
- 26) Lanjutan Pembangunan Senderan Jalan Ternalum-Bendanpete
- 27) Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Tunggulpandean- Ternalum
- 28) Peningkatan Jalan Ngabul (Cemoro Cilik)- Ngasem
- 29) Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Tembus Pringtulis-Tunggulpandean
- 30) Overlay Jalan Gudang Sawo
- 31) Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Gedangan-Guwosokerto
- 32) Pelebaran Jalan Desa Balong Kec Kembang
- 33) Pembangunan Jalan Desa Bucu Kec.Kembang
- 34) Peningkatan Jalan Jl Kh Kathi , Desa Kecapi, Kec. Tahunan

- 35) Pembangunan Talud Jalan Rw 03 Desa Bucu Kec Kembang
- 36) Pembangunan Talud Jalan Rw 02 Desa Bucu Kec Kembang
- 37) Pembangunan Talud Jalan Desa Tunahan Kec Keling
- 38) Betonisasi Jalan Penghubung Jembatan Karangaji Ke Kab Demak
- 39) Peningkatan Jalan Poros Desa Daren, Penghubung Kab. Jepara Dan Kab. Kudus
- 40) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Mambak-Pakis Aji
- 41) Pembangunan Drainase Jalan Raya Tanjung - Plajan (Depan Balai desa Tanjung) Kec Pakis Aji
- 42) Pembangunan Senderan Jalan Raya Kawak - Guyangan
- 43) Pembangunan Drainase Jalan Raya Batealit - Setro
- 44) Pembuatan Talud Jalan Raya Batealit - Setro Rt 14 Rw 03
- 45) Penataan Bahu Jalan Tempur - Doplak
- 46) Pembangunan Talud Drainase Kali Klutuk Rt 09 Rw 02
- 47) Pembangunan Drainase Pembuangan Desa Bulu Kec. Jepara
- 48) Pembangunan Drainase Jl. Patiunus Kec Jepara
- 49) Pembangunan Jalan Kabupaten Pecangaan Pendosawalan
- 50) Pembangunan Drainase Jalan Petekeyan - Platar
- 51) Pengaspalan Rt 03 Rw 01 Kec. Bangsri Desa Bangsri
- 52) Pembangunan Drainase Km 14 Jalan Langon
- 53) Pembangunan Jalan Hotmix Gelang Klepu
- 54) Pembangunan Drainase Jalan Kardinah Senenan
- 55) Peningkatan Jalan Demangan - Mantingan Kec. Tahunan
- 56) Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Sukosono - Langon
- 57) Sandaran Jalan Rw 01 S.D Rw 2 Krajan Jaten Desa Bumiharjo
- 58) Pembangunan Drainase Jalan Sowon Lor Sowon - Kidul Kedung
- 59) Peningkatan Jalan Sentral -Ngandong Desa Bumiharjo
- 60) Pengaspalan Terusan Dermayu -Ngandong Selatan Desa Bumiharjo
- 61) Pembangunan Drainase Sukosono-Dongos
- 62) Lanjutan Betonisasi Jalan Poros Desa Teluk Wetan Kendeng Sidialit
- 63) Penataan Bahu Jalan Damarwulan - Tempur
- 64) Pembangunan Jalan / Penataan Lingkungan Jalan Poros
- 65) Penataan Lingkungan Dan Talud Kuwasharjo Rt 08 Rw 02
- 66) Pengaspalan Jalan Poros Desa Gemulung

- 67) Peningkatan Jalan Poros Desa Bungu Di Dukuh Sewengen-Sekutut Desa Bungu
- 68) Pemeliharaan Jalan Cemoro Kembar Di Desa Troso
- 69) Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Desa Gelang, Kec. Keling
- 70) Pembangunan Senderan Jalan Ds.Rengging Rt 17/ Rw 03, Kec.Pecangaan
- 71) Pemeliharaan Jalan (Sisa Dak Penugasan Tahun 2017)

➤ **Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya**

- **Kegiatan :**

- 1) Perbaikan Pintu Air
- 2) Perbaikan Jaringan Irigasi Dan Perbaikan Pasangan Talud Sungai Tersebar Se Kab. Jepara
- 3) Klinik Pemeliharaan Pengairan
- 4) Ded Dan Biaya Pengawasan Banprov Tahun 2018
- 5) Pemeliharaan Drainase Kota
- 6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bapangan
- 7) Pembangunan Saluran Drainase Gorong Jl. Patiunus
- 8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gowak I
- 9) Peningkatan Jaringan Irigasi Tuk Jero
- 10) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dung Doro
- 11) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ngetuk
- 12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blumbang
- 13) Peningkatan Jaringan Irigasi Pecangaan
- 14) Peningkatan Jaringan Irigasi Siwali
- 15) Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Bendo
- 16) Peningkatan Jaringan Irigasi Seputat
- 17) Peningkatan Jaringan Irigasi Joyo
- 18) Peningkatan Jaringan Irigasi Rombong (Lanjutan)
- 19) Peningkatan Jaringan Irigasi Bogo
- 20) Peningkatan Jaringan Irigasi Pace
- 21) Peningkatan Jaringan Irigasi Grojogan
- 22) Rehab Saluran Irigasi Bendung Pulerejo
- 23) Rehabilitasi Daerah Irigasi (Di) Sungon
- 24) Pembangunan Senderan Jalan Pecangaan- Karangrandu
- 25) Pembangunan Talud Jalan Pecangaan - Sowankidul (Jalan Peikanan)
- 26) Pembangunan Talud Jalan Tanggul Tlare - Kerso
- 27) Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Pelang
- 28) Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Pace
- 29) Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Ngipik
- 30) Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Ringin
- 31) Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Susukan
- 32) Pembangunan Senderan Sungai

- 33) Pembangunan Bronjong Pengaman Tanggul Bendung Kedawung
- 34) Normalisasi Tanggul Bendung Kedung Bende Kec. Mayong
- 35) Pembangunan Senderan Sungai
- 36) Rehab Pembangunan Saluran Irigasi Bendung Sigap
- 37) Pembangunan Irigasi Sungapan - Tegal Sambu
- 38) Pembangunan Senderan / Talud Tanggul Sungai Troso
- 39) Normalisasi Irigasi Petekeyan Mangunan - Platar - Semat
- 40) Perbaikan Irigasi Sungon Demangan Tahunan
- 41) Pembangunan Bendung Belorong Desa Kedungsari Mulyo
- 42) Penataan Embung Desa Kalipucang Kulon
- 43) Pembangunan Pengaman Sungai Dengan Brojung Kali Bakalan (Utara Jembatan Bakalan Desa Margoyoso)
- 44) Penataan Lingkungan Pagar Pengaman Sungai Kanal
- 45) Pembangunan Talud Saluran Irigasi Siwali
- 46) Pembangunan Talud Saluran Irigasi Kali Ngemplak
- 47) Normalisasi Dan Pasangan Kali Ngubres
- 48) Pembangunan Talud Kali Karang Malang
- 49) Rehab Bendungan Waru
- 50) Pembangunan Talud Sungai Sarwan
- 51) Normalisasi Sungai Cipluk Desa Kriyan Kec. Kalinyamatan
- 52) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Klepu - Watuaji
- 53) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Ngetuk Bategede
- 54) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Lebak - Bulungan
- 55) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Suwawal Timur Guyangan
- 56) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Lebak - Tanjung
- 57) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Bondo - Jeruk Wangi
- 58) Pembangunan Drainase Pengaman Jalan Ngabul - Troso
- 59) Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Ngeling
- 60) Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Raguklampitan
- 61) Pembangunan Saluran Air Jalan Ngabul - Ngeling
- 62) Pembangunan Saluran Drainase Jl.Datuk Mulyoharjo
- 63) Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Tuk (DAK Penugasan)
- 64) Peningkatan Jaringan Irigasi Balong (DAK Penugasan)

- 65) Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Jumbleng (DAK Penugasan)
- 66) Peningkatan Jaringan Irigasi Ngajok (DAK Penugasan)
- 67) Peningkatan Jaringan Irigasi Rau (DAK Penugasan)
- 68) Peningkatan Jaringan Irigasi Karimun (DAK Penugasan)
- 69) Peningkatan Jaringan Irigasi Tanggul (DAK Penugasan)
- 70) Peningkatan Jaringan Irigasi Lambir (DAK Penugasan)
- 71) Peningkatan Jaringan Irigasi Pligen (DAK Penugasan)
- 72) Peningkatan Jaringan Irigasi Mabal (DAK Penugasan)
- 73) Peningkatan Jaringan Irigasi Sebagor (DAK Penugasan)
- 74) Peningkatan Jaringan Irigasi Jati (DAK Penugasan)
- 75) Peningkatan Jaringan Irigasi Kandeg (DAK Penugasan)
- 76) Biaya Penunjang Dak Irigasi (DAK Penugasan)
- 77) Peningkatan Jaringan Irigasi Kedondong Desa Damarwulan Kec.Keling Kab. Jepara (Banprov)
- 78) Peningkatan Jaringan Irigasi Bengkok Desa Klepu Kec. Keling Kab.Jepara (Banprov)
- 79) Lanjutan Peningkatan Pengaman Tebing/Talud Kali Klumprit Desa Kelet Kec. Keling Kab. Jepara(Banprov)
- 80) Peningkatan Jaringan Irigasi Ces Desa Banyumanis Kec. Donorojo Kab.Jepara (Banprov)
- 81) Peningkatan Jaringan Irigasi Kali Putih Desa Bulungan Kec. Pakis Aji Kab. Jepara (Banprov)
- 82) Peningkatan Jaringan Irigasi Suwuk Desa Bulungan Kec. Pakis Aji Kab.Jepara (Banprov)
- 83) Peningkatan Jaringan Irigasi Punden Desa Cepogo Kec. Kembang Kab.Jepara (Banprov)
- 84) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Bate (Bbt.1 - Bbt.10) (Banprov)
- 85) Peningkatan Jaringan Irigasi Sentong Desa Bucu Kec. Kembang Kab. Jepara (Banprov)
- 86) Peningkatan Jaringan Irigasi Taroan / Wuluh Desa Kaligarang Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)
- 87) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Sisa Dak Penugasan Tahun 2017)

➤ **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Buaran
- 2) Pembangunan Saluran Drainase Dan Trotoar Jalan Raya Mlonggo
- 3) Pembangunan Trotoar Dan Saluran Drainase Jalan Mangunsarkoro
- 4) Pembangunan Drainase Jalan Pulodarat-Gemulung
- 5) Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Pasar Suwawal Timur

- 6) Rehabilitasi Saluran Tambak Desa Panggung Surodadi
- 7) Pembangunan Drainase Jalan Pecangaan- Sowankidul
- 8) Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Kawak Guyangan
- 9) Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Sinanggul Slagi
- 10) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang-Teluk Wetan Kec.Welahan
- 11) Pembangunan Senderan Jalan Raya Utara Terminal Gedangan Welahan
- 12) Pembangunan Saluran Air (Drainase) Jalan Kabupaten Desa Tahunan Ke Pekalongan
- 13) Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang - Kuanyar Kec. Welahan
- 14) Pembangunan Drainase Prapatan Kalipucang Ke Selatan Dan Kebarat
- 15) Pembangunan Saluran Air (Drainase) Jalan Kabupaten
- 16) Pembangunan Drainase Jalan Pelemkerep Singorojo Rw 02Pelemkerep
- 17) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Nalumsari Papringan
- 18) Pembangunan Drainase Jalan Sowanlor - Dongos
- 19) Pembangunan Drainase Jln. Gotri Welahan Di Kalipucang Wetan
- 20) Pembangunan Drainase Desa Nalumsari Rw 04 Sepanjang 500 Meter
- 21) Pembangunan Drainase Desa Daren Rt 02 Rw 03 Sepanjang 400 Meter
- 22) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Sebagor - Kaligarang
- 23) Drainase Desa Sekuro Rt 27 - 28
- 24) Perbaikan Saluran Drainase Jalan Tunggul Pandean - Blimbingrejo
- 25) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Tigajuru - Kalipucang
- 26) Pembangunan Drainase Jl Rengging-Ngasem Di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan
- 27) Pembangunan Drainase Jalan Mayong-Dorang
- 28) Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Ngasem Di Desa Ngasem Kec. Batealit
- 29) Pembangunan Drainase Jalan Ternalum-Tunggulpandean
- 30) Pembangunan Drainase Jln. Kab Dk.Ngemplik Desa Karanggondang Kec.Mlonggo
- 31) Pembangunan Drainase Jalan Daren-Gebog
- 32) Pembangunan Saluran Drainase Jln. Mantingan Bugel (Depan Smk)

- 33) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Ngabul (Cemoro Cilik) - Ngasem
- 34) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl.Karangkebagusan Krapyak
- 35) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Ngabul- Ngasem
- 36) Pembangunan Drainase Jalan Ngabul (Samping Pom)- Sukosari
- 37) Pembangunan Drainase Jalan Ngabul-Sukosono
- 38) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Ngabul-Langon
- 39) Perbaikan Trotoar Dan Saluran Drainase Jalan Ae. Suryani
- 40) Pembangunan Drainase Jalan Tembus Singorojo-Pelemkerep
- 41) Pembangunan Drainase Jalan Bendanpete-Jebol
- 42) Pembangunan Drainase Jl.Bakalan-Datar Di Desa Pendosawalan
- 43) Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro - Jambu Timur Guyangan Jambu Timur Rt 33, Rw 7,Desa Sekuro, Kec. Mlonggo
- 44) Pembangunan Drainase Jl.Margoyoso-Damarjati Di Desa Banyuputih
- 45) Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Jambu Timur Guyangan Jambu Timur Rt 20, Rw 04, Kec. Mlonggo
- 46) Pembangunan Drainase Jalan Depan Masjid Sidik Mulya
- 47) Drainase Kabupaten Jalan Kabupaten Pasar Suwawal Timur Rt 01, 03, Rw 04,Kebarat Arah Jepara, Kec. Pakis Aji
- 48) Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Kawak Guyangan Di Desa Sekuro, Rt 16,17,19, Rw 04, Kec.Mlonggo
- 49) Drainase Jl Kabupaten Jurusan Sinanggul Slagi, Kec. Mlonggo
- 50) Perbaikan Saluran Drainase Jalan Kelurahan Bapangan Rt 02 Rw 02
- 51) Drainase Ruas Jalan Sekuro, Jambu,Kawak
- 52) Perbaikan Trotoar & Saluran Air Pengkol Jepara
- 53) Pembangunan Saluran Mantingan-Bugel
- 54) Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Semat Tanggul Tlare Rt 02/01
- 55) Pembangunan Saluran Drainase Rw 1Kelurahan Potroyudan
- 56) Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Cangkring Rt 02/01
- 57) Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Semat Petekeyan Rt 01/01

- 58) Pembangunan Saluran Desa Semat Rt 7 Rw 3
- 59) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Platar Rt 3 Rw 1
- 60) Pembangunan Saluran Drainase Rt 2 Rw 1 Desa Platar
- 61) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Demangan Petekeyan
- 62) Pembangunan Drainase Saluran Air Jl.Mantingan-Bugel (Depan Smk)
- 63) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo Bulungan
- 64) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl.Karangkebagusan Krapyak
- 65) Pembangunan Saluran Drainase Jl Kedungcino Bandengan
- 66) Pembangunan Saluran Drainase Jl Poros Desa Ngabul- Ngasem
- 67) Perbaikan Trotoar Dan Saluran Drainase Jl Letjen Suprpto
- 68) Pembuangan Drainase Pembuangan Ds Bulu Kec.Jepara
- 69) Pembangunan Drainase Pembuangan Jl Patiunus Kec.Jepara
- 70) Pembangunan Drainase Sepanjang Bok Kuning Desa Tahunan
- 71) Penataan Lingkungan Jalan Dan Drainase Jalan Gawerejo Rt 01 Rw 05 Kel. Pengkol
- 72) Pembangunan Drainase Jalan Jl.Kalinyamat, Ds. Krapyak
- 73) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Nalumsari - Tunggul
- 74) Lanjutan Drainase Jalan Menuju Kuwasharjo
- 75) Penataan Drainase Dan Pengaspalan Jalan Menuju Kuwasharjo
- 76) Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang Wetan - Mayong , Kec.Welahan
- 77) Pembangunan Drainase Jalan Teluk Wetan - Kalipucang Wetan, Kec.Welahan
- 78) Pembangunan Drainase Jalan Jl.Sukosono - Petekeyan, Desa Sukosono
- 79) Pembangunan Drainase Jalan Jl.Kerso - Menganti, Ds. Kerso Kec.Kedung
- 80) Pasangan Senderan Drainase Poros Desa Paren- Desa Kalipucang Wetan
- 81) Pembangunan Talud Jalan Jondang - Surodadi
- 82) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Banjaran Rw 12
- 83) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Banjaran Rw 06

- 84) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Jl. Jondang - Surodadi, Ds.Jondang, Kec. Kedung
- 85) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Bulungan Rw 08
- 86) Pembangunan Talud Kali Mbah Puan
- **Program Lingkungan Sehat Perumahan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembangunan Jalan Poros Desa SeKab. Jepara
 - 2) Penataan Lingkungan Lapangan Kec.Kedung
 - 3) Penataan Lingkungan Jalan Poros Bulungan - Lebak Kec. Pakis Aji Kab.Jepara (Banprov)
 - 4) Peningkatan Jalan Poros Kaligarang - Keling Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)
 - 5) Peningkatan Jalan Poros Tulakan - Blingoh Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)
- **Program Perencanaan Tata Ruang**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan peta RTH Publik
- **Program Pemanfaatan Ruang**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Program P2kh
 - 2) Pembuatan Patok Tapal Batas Kecamatan
 - 3) Penataan Kolam Taman P2kh Gelora Bumi Kartini Sisi Selatan
 - 4) Penataan Kolam Taman P2kh Gelora Bumi Kartini Sisi Utara
- **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengendalian Tata Bangunan Dan Imb
 - 2) Pengawasan Dan Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten Jepara
 - 3) Pembuatan Papan Informasi Pada Garis Sempadan Pantai
 - 4) Pemeliharaan Web Dan Materi Portal Informasi Rencana Tata Ruang
 - 5) Penyusunan Kajian Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (Abg) Dan Sertifikat Laik Fungsi (Slf)
- **Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembangunan Gapura Pembatas Kabupaten Di Desa Daren, Kec. Nalumsari
- **Program Pengembangan Data/Informasi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Perencanaan & Evaluasi
- **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga**

- **Kegiatan :**

- 1) Lanjutan Pembangunan Kolam Renang Di GBK
- 2) Pembangunan Lapangan Tembak Dan Panah Di Kawasan GBK
- 3) Rehab Stadion GBK Jepara
- 4) Penataan Kawasan GBK Jepara
- 5) Pembangunan Sport Center Lapangan Kenari
- 6) Peningkatan Sarpras Di Lingkungan Stadion Gbk Kab. Jepara (Banprov)
- 7) Penataan Sport Center Di Kawasan GBK Jepara (Banprov)

➤ **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Ke-Cipta Karya-An
- 2) Lanjutan Pembangunan Gedung Persalinan Rsu Kartiini
- 3) Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Mlonggo
- 4) Pembangunan Gapura Sentra Industri Tersebar Di Kab Jepara
- 5) Perencanaan, Pengawasan DanOperasional Kegiatan Keciaptakaryaan Yg DibiayaiApbd/Banprov Dan Sumber Dana Lainnya.
- 6) Penataan Sarana Dan Prasarana Kantor Disdukcapil (Pemanfaatan Lahan Baru Di Belakang Kantor Disdukcapil)
- 7) Lanjutan Pembangunan Kantor Bpbd
- 8) Lanjutan Pembangunan Mapolres Jepara
- 9) Pembangunan Pos Jaga Sar
- 10) Perawatan Stadion Gbk Dan Kamal Junaidi
- 11) Perawatan Kolam Renang 'Jepara Olympic Pool
- 12) Perawatan Gedung Wanita,Padepokan Silat, Gedung Futsal Dan Tennis
- 13) Perbaikan Kantor & Perbaikan Pagar Kecamatan Kec,Tahunan

➤ **Program : Peningkatan Sarana Perdagangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan Pasar Bangsri

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditentukan melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Panjang jalan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Panjang seluruh jalan di Kabupaten Jepara adalah 873 km, sedangkan panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik

adalah 575,51 km sehingga panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 67,99 %.

b. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi yang baik akan sangat menunjang hasil pertanian, adapun irigasi yang berkondisi baik di Kabupaten Jepara sebesar 6.184 ha dari total 28.247 ha luas irigasi di Kabupaten Jepara atau sebesar 22 %.

c. Rumah tangga per-sanitasi

Jumlah rumah tangga bersanitasi Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah sebanyak 218.186 dari total jumlah rumah tangga sebanyak 317.316 sehingga IKK-nya adalah 88,00%

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 141 orang.
- Kualifikasi Pendidikan :
S2 : 14 orang, S1 : 28 orang, D-3 : 10 orang, SLTA : 73 orang, SMP : 13, SD : 3
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 5 orang, Penata Tk. I (III/d) : 16 orang, Penata (III/c) : 12 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 10 orang, Penata Muda (III/a) : 16 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 2 orang, Pengatur (III/c) : 35, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 19 orang, Pengatur Muda : (II/a) : 20 orang, Juru Tk I (I/d) : 2, Juru (I/c) : 3 orang
- Jumlah Pejabat Struktural : 27 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

N0	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya			
1	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Batealit	3.298.260.000	3.288.986.000
2	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Nalumsari II	475.943.000	470.832.750
3	Pembangunan Gedung PMI	993.053.000	985.769.250
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan			
1	Peningkatan Jalan Kerso - Dongos	986.265.000	986.161.400
2	Kegiatan Peningkatan Jalan Panggung - Surodadi	841.900.000	841.796.800
3	Peningkatan Jalan Surodadi -	980.621.000	978.119.000

	Kalianyar - Panggung		
4	Pelebaran Jalan Pecangaan - Damarjati	1.939.954.000	1.936.851.600
5	Peningkatan Jalan Pecangaan Kulon - Sowon Kidul	199.800.000	199.244.000
6	Pelebaran Jalan Pecangaan - Sowon Lor	2.424.964.000	2.424.862.800
7	Pelebaran Jalan Bakalan - Pendosawalan	1.185.503.000	1.185.377.000
8	Peningkatan Jalan Gidanglo - Guwosobokerto	842.000.000	841.883.200
9	Peningkatan Jalan Kalipucang - Teluk	1.262.200.000	1.262.094.400
10	Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru	842.000.000	841.890.000
11	Peningkatan Jalan Mayong - Jebol	2.052.400.000	2.052.290.800
12	Peningkatan Jalan Pancur - Bungu	1.991.797.000	1.991.693.800
13	Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean	985.000.000	984.897.200
14	Peningkatan Jalan Pringtulis - Balekambang - Buaran	984.950.000	984.847.600
15	Peningkatan Jalan Batealit - Setro	2.519.300.000	2.519.191.200
16	Peningkatan Jalan Damaran - Somosari	970.233.000	970.125.000
17	Pelebaran Jalan Ngabul - Raguklampitan	200.000.000	197.614.000
18	Peningkatan Jalan Kecapi - Bringin	992.588.000	992.486.800
19	Peningkatan Jalan Semat - Rau	784.068.000	783.964.400
20	Pelebaran Jalan Kedungcino - Bandengan	2.007.385.000	1.926.708.600
21	Pembangunan Coastal Road Kawasan Bulu	2.910.556.000	2.899.681.500
22	Pelebaran Jalan Jambu - Bondo Mlonggo	8.491.640.000	8.485.592.600
23	Peningkatan Jalan Keongsari - Blebak	987.245.000	983.943.000
24	Peningkatan Jalan Karanggondang-Mpu Rancak	988.121.000	987.271.000
25	Peningkatan Jalan Karanggondang - Pailus Mlonggo	994.413.000	994.309.000
26	Pelebaran Jalan Guyangan - Lebak	1.546.308.000	1.546.184.400
27	Pelebaran Jln Mambak - Pakis	831.234.000	827.915.600

28	Peningkatan Jalan Tanjung - Jurang Nganten	994.303.000	994.196.200
29	Pelebaran Jalan Bangsri - Tengguli	1.186.920.000	1.186.795.200
30	Peningkatan Jalan Lingkar Bangsri	2.052.570.000	2.052.461.600
31	Peningkatan Jalan Jinggotan - Dudakawu	994.299.000	994.198.200
32	Peningkatan Jalan Jlegong - Damarwulan	1.444.021.000	1.443.918.600
33	Peningkatan Jalan Keling - Bumiharjo	993.111.000	993.009.400
34	Peningkatan Jalan Jugo - Sumberejo	1.262.400.000	1.262.296.000
35	Peningkatan Jalan Sambungoyot - Tulakan	989.710.000	989.607.200
36	Peningkatan Jalan Ujungwatu - Clering	1.180.527.000	1.175.155.400
37	Peningkatan Jalan Kamojan - Mrican	994.852.000	979.930.400
38	Pembangunan Jalan Desa Balong Kec. Kembang	200.000.000	99.584.250
39	Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Kecapi Rt 42/08 Dengan Desa Mulyoharjo	200.000.000	199.614.500
40	Pembangunan Jalan Penghubung Desa Karagan-Doriyo Desa Tunahan Di Desa Tunahan	200.000.000	198.958.000
41	Pembangunan Trotoar Jalan Mt Haryono	200.000.000	97.608.000
42	Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan	2.645.662.000	2.569.398.500
43	Lanjutan Pavingisasi Dan Saluran Air Desa Bulu Rw 2	200.000.000	199.534.750
44	Peningkatan Jalan Kabupaten Jalur Angkot K. 15 Tahunan Langon	200.000.000	197.852.000
45	Pembangunan Tebing Pengaman Jalan Kabupaten Di Dukuh Dengeran Tulaksoro Di Desa Bategede Kec.Nalumsari	200.000.000	199.312.500
46	Peningkatan Jalan Kabupaten Buaran - Bategede	200.000.000	197.747.000
47	Peningkatan Jalan Kabupaten Bungu - Bategede	200.000.000	199.247.000
48	Peningkatan Jl. Rukmini (Dak Reguler)	17.000.000.000	14.140.662.001

49	Peningkatan Jl. Kardinah (DAK REGULER)	2.400.000.000	1.967.800.000
50	Peningkatan Jl. Rukmini (Dak Reguler)	180.750.000	178.574.000
51	Operasional Penunjang Dak (Dak Reguler)	32.358.000	3.344.000
52	Peningkatan Jalan/Saluran Jalan Ongko Wijoyo Dan Gemaharjo 7 Kel.Pengkol Kec. Jepara Kab.Jepara(Banprov)	800.000.000	785.985.000
53	Peningkatan Jalan Poros Petekeyan - Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
54	Betonisasi Jalan Poros Teluk Wetan- Kendengsidialit Kec. Welahan Kab.Jepara (Banprov)	1.000.000.000	990.800.000
55	Peningkatan Jalan Pecangaan - Damarjati Kab. Jepara (Banprov)	2.000.000.000	1.999.000.000
56	Peningkatan Jalan Mantingan Ngabul (Jalan Sultan Hadlirin) Kab. Jepara (Banprov)	900.000.000	895.520.000
57	Peningkatan Jalan Nalumsari - Papringan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
58	Peningkatan Jalan Kedungcino - Bandengan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	988.640.000
59	Peningkatan Jalan Kuwasen - TPA Bandengan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	988.300.000
60	Peningkatan Jalan Poros Desa Plajan - Kepuk Kab. Jepara (Banprov)	500.000.000	497.480.000
61	Peningkatan Jalan Jerukwangi - Bondo (Banprov)	1.500.000.000	1.458.604.000
62	Peningkatan Jalan Ujungwatu-Clering (Banprov)	2.000.000.000	1.956.723.000
63	Peningkatan Jalan Mambak - Mororejo Jepara (Banprov)	670.000.000	664.020.000
64	Peningkatan Jalan Poros Ngetuk -Karangnongko Kec. Nalumsari Kab.Jepara (Banprov)	1.500.000.000	1.476.939.000
65	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Guyangan - Lebak Jepara (Banprov)	1.000.000.000	977.703.000

66	Pelebaran Jalan Ngabul - Raguklampitan (Banprov)	800.000.000	786.672.000
67	Pembangunan Talud Jalan Jebol - Pule (Banprov)	500.000.000	497.101.000
68	Pembangunan Talud Jalan Pelang - Kuanyar (Banprov)	1.200.000.000	1.198.000.000
69	Pembangunan Drainase Pakis - Bulungan Kec Pakis Aji Kab Jepara(Banprov)	1.000.000.000	984.974.000
70	Pembangunan Drainase Kelet - Blingoh Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)	500.000.000	489.978.000
71	Penataan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Bapangan Dan Saripan Kec. Jepara (Banprov)	500.000.000	495.900.000
72	Peningkatan Jalan Lingkungan Dk.Depok Kel. Karangkebagusan Kec.Jepara Kab. Jepara (Banprov)	500.000.000	496.000.000
73	Peningkatan Jalan Tunggulpandean -Blimbingrejo Kec. Nalumsari (Banprov)	2.000.000.000	1.969.987.000
74	Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggul Pandean Kec. Nalumsari Kab. Jepara (Banprov)	3.000.000.000	2.982.870.000
75	Penataan Jalan Dan Saluran Di Lingkungan Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara (Banprov)	2.000.000.000	1.958.520.000
76	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ngetuk - Karangnongko Jepara (Banprov)	1.000.000.000	995.700.000
77	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jinggotan – Dudakawu (Banprov)	1.000.000.000	988.700.000
78	Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Tuk Songo (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
79	Peningkatan Jalan Bumiharjo - Ngandong (Banprov)	1.000.000.000	994.053.000
80	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sebagor - Tunahan (Banprov)	1.000.000.000	988.149.000
81	Peningkatan Jalan Sambungoyot -Tulakan (Banprov)	2.566.000.000	2.533.396.000

82	Peningkatan Jalan Poros Desa Banjaran - Tengguli – Srikandang Kab. Jepara (Banprov)	1.600.000.000	1.592.050.000
83	Pembangunan Sandaran Dan Peningkatan Jalan Poros Pancur -Bategede ; Jalan PenghubungPancur - Bategede (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
83	Pembangunan Jalan/Talud/Drainase Jalan Poros Kedungpenjalin-Jl.Sole Man(Srobyong-Karanggondang) (Banprov)	500.000.000	492.000.000
83	Pembangunan Drainase Tulakan -Bandungharjo Kec. Donorojo Kab.Jepara -Banprov	1.000.000.000	990.284.000
83	Pembangunan Drainase Keling -Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara(Banprov)	750.000.000	736.800.000
83	Peningkatan Jalan Poros Papasan-Srikandang-Tengguli Kab.Jepara (Banprov)	1.500.000.000	1.492.510.000
83	Peningkatan Jalan Panggung - Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara (Banprov)	920.000.000	910.645.000
83	Peningkatan Jalan Batulawang -Pelabuhan Legon Bajak (Banprov)	1.500.000.000	1.492.698.000
83	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pringtulis – Nalumsari (Banprov)	750.000.000	735.014.000
83	Pembangunan Saluran Drainase Karimunjawa - Kemojan (Banprov)	1.000.000.000	995.229.000
83	Peningkatan Jalan Pulau Nyamuk (Banprov)	750.000.000	745.967.000
83	Pembangunan Talud Pengaman Jalan Keongsari - Blebak (Banprov)	1.000.000.000	996.918.000
83	Pembangunan Drainase Jalan Guyangan - Bangsri Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	999.445.000
83	Pembangunan Drainase Jalan Sinanggul - Slagi Kab. Jepara (Banprov)	1.500.000.000	1.485.000.000
83	Peningkatan Jalan Sukosono – Kerso Kec. Kedung Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	988.330.000

83	Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru Kec. Welahan Kab. Jepara(Banprov)	1.000.000.000	987.750.000
83	Pembangunan Drainase Ngeling - Rengging Jepara (Banprov)	1.000.000.000	992.500.000
Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong			
1	Pembuatan Talud Utara Terminal Gedangan Welahan	199.800.000	199.297.250
2	Pembanguan Talud Langon Bugel Kec.Tahunan	199.800.000	198.877.000
3	Pembangunan Talud Kedungcino -Bandengan Kec. Jepara	199.800.000	198.547.750
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan			
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan Se-Kab Jepara	62.927.390.000	59.596.677.830
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Se-Kabupaten Jepara	8.945.715.000	8.597.147.121
3	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Singorojo	200.000.000	199.486.000
4	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Karangnongko	200.000.000	199.478.250
5	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Bendan Pete	200.000.000	199.484.500
6	Pembangunan Drainase Jl Kabupaten Ds Gemiring Lor	199.800.000	199.271.250
7	Peningkatan Jalan Roros Desa Ngetuk	200.000.000	199.444.250
8	Peningkatan Jalan Poros Desa Muryolobo	199.800.000	198.940.500
9	Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Paving Mulyoharjo	200.000.000	199.463.750
10	Lanjutan Drainase Jalan Karangkebagusan Krapyak	199.800.000	199.284.750
11	Pembangunan Drainase Jalan Ngabul Sukosari	199.800.000	199.386.500
12	Pembangunan Drainase Jalan Pesajen	199.800.000	199.259.000
13	Pembangunan Trotoar Jalan Kopral Sapari	200.000.000	197.731.000
14	Overlay Jalan Sowan Kidul - Sowanlor	200.000.000	197.631.000
15	Pembangunan Talud Jalan Pailus Ds.Karanggondang	199.800.000	198.503.000

16	Peningkatan Jalan Poros Desa Ngabul - Petekeyan	199.800.000	199.243.750
17	Peningkatan Jalan Poros Desa Tahunan - Pekalongan	199.800.000	199.241.500
18	Peningkatan Jalan Poros Desa Langon - Sukosono	199.800.000	199.243.500
19	Peningkatan Jalan Poros Desa Sukodono - Langon	199.800.000	199.245.000
20	Pembuatan Saluran Drainase Jalan Kab Jalur Angkot K.15	199.800.000	199.317.250
21	Pembangunan Senderan Jalan Surodadi-Panggung	199.800.000	199.166.250
22	Betonisasi Jalan Sengon Bugel-Pelang Kidul Sepanjang 1,5 Km	199.800.000	199.089.500
23	Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten Watuaji - Damarwulan	199.800.000	198.673.750
24	Pembangunan Senderan Jalan Daren gebog	199.800.000	199.298.750
25	Pembangunan Senderan Jalan Dorang- Gedangan	199.800.000	199.167.250
26	Lanjutan Pembangunan Senderan Jalan Ternalum-Bendanpete	199.800.000	199.328.000
27	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Tunggulpandean- Ternalum	199.800.000	198.628.000
28	Peningkatan Jalan Ngabul (Cemoro Cilik)- Ngasem	831.225.000	827.906.600
29	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Tembus Pringtulis-Tunggulpandean	199.800.000	199.312.500
30	Overlay Jalan Gudang Sawo	200.000.000	197.842.000
31	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Gedangan-Guwosokerto	199.800.000	199.314.250
32	Pelebaran Jalan Desa Balong Kec Kembang	199.800.000	199.284.750
33	Pembangunan Jalan Desa Bucu Kec.Kembang	199.800.000	199.551.500
34	Peningkatan Jalan Jl Kh Kathi , Desa Kecapi, Kec. Tahunan	199.800.000	199.242.750
35	Pembangunan Talud Jalan Rw 03 Desa Bucu Kec Kembang	199.800.000	198.596.000
36	Pembangunan Talud Jalan Rw 02 Desa Bucu Kec Kembang	199.800.000	198.314.500
37	Pembangunan Talud Jalan	199.800.000	198.674.750

	Desa Tunahan Kec Keling		
38	Betonisasi Jalan Penghubung Jembatan Karangaji Ke Kab Demak	200.000.000	199.491.000
39	Peningkatan Jalan Poros Desa Daren, Penghubung Kab. Jepara Dan Kab. Kudus	199.800.000	199.147.250
40	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Mambak-Pakis Aji	199.800.000	199.446.250
41	Pembangunan Drainase Jalan Raya Tanjung - Plajan (Depan Balai desa Tanjung) Kec Pakis Aji	199.800.000	199.311.500
42	Pembangunan Senderan Jalan Raya Kawak - Guyangan	149.800.000	148.859.000
43	Pembangunan Drainase Jalan Raya Batealit - Setro	199.800.000	199.286.750
44	Pembuatan Talud Jalan Raya Batealit - Setro Rt 14 Rw 03	199.800.000	198.851.250
45	Penataan Bahu Jalan Tempur - Doplak	150.000.000	147.806.000
46	Pembangunan Talud Drainase Kali Klutuk Rt 09 Rw 02	199.750.000	198.420.000
47	Pembangunan Drainase Pembuangan Desa Bulu Kec. Jepara	199.800.000	199.308.500
48	Pembangunan Drainase Jl. Patiunus Kec Jepara	199.800.000	199.283.250
49	Pembangunan Jalan Kabupaten Pecangaan Pendosawalan	199.800.000	199.513.500
50	Pembangunan Drainase Jalan Petekeyan - Platar	199.800.000	199.279.250
51	Pengaspalan Rt 03 Rw 01 Kec. Bangsri Desa Bangsri	199.800.000	199.345.250
52	Pembangunan Drainase Km 14 Jalan Langon	199.800.000	199.260.500
53	Pembangunan Jalan Hotmix Gelang Klepu	199.800.000	199.443.500
54	Pembangunan Drainase Jalan Kardinah Senenan	199.800.000	199.269.500
55	Peningkatan Jalan Demangan - Mantingan Kec. Tahunan	200.000.000	197.696.000
56	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Sukosono - Langon	199.800.000	199.274.500
57	Sandaran Jalan Rw 01 S.D Rw 2 Krajan Jaten Desa Bumiharjo	199.800.000	199.089.750

58	Pembangunan Drainase Jalan Sowan Lor Sowan - Kidul Kedung	199.800.000	199.409.750
59	Peningkatan Jalan Sentral - Ngandong Desa Bumiharjo	199.800.000	199.241.250
60	Pengaspalan Terusan Dermayu -Ngandong Selatan Desa Bumiharjo	199.800.000	198.944.750
61	Pembangunan Drainase Sukosono-Dongos	199.800.000	199.407.000
62	Lanjutan Betonisasi Jalan Poros Desa Teluk Wetan Kendeng Sidalit	200.000.000	199.468.500
63	Penataan Bahu Jalan Damarwulan - Tempur	200.000.000	197.769.000
64	Pembangunan Jalan / Penataan Lingkungan Jalan Poros	199.800.000	199.267.250
65	Penataan Lingkungan Dan Talud Kuwasharjo Rt 08 Rw 02	199.800.000	198.827.750
66	Pengaspalan Jalan Poros Desa Gemulung	199.800.000	199.523.000
67	Peningkatan Jalan Poros Desa Bungu Di Dukuh Sewengen-Sekutut Desa Bungu	200.000.000	199.246.250
68	Rabat beton Jalan blorde Joyo	199.800.000	199.240.250
69	Pemeliharaan Jalan Cemoro Kembar Di Desa Troso	199.800.000	199.352.750
70	Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Desa Gelang, Kec. Keling	199.800.000	199.355.500
71	Pembangunan Senderan Jalan Ds.Rengging Rt 17/ Rw 03, Kec.Pecangaan	199.800.000	199.133.500
72	Pemeliharaan Jalan (Sisa Dak Penugasan Tahun 2017)	165.000.000	164.061.000
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya			
1	Perbaikan Pintu Air	498.875.000	495.470.000
2	Perbaikan Jaringan Irigasi Dan Perbaikan Pasangan Talud Sungai Tersebar Se Kab. Jepara	10.469.685.000	10.198.983.184
3	Klinik Pemeliharaan Pengairan	2.332.160.000	2.155.813.984
4	Ded Dan Biaya Pengawasan Banprov Tahun 2018	550.000.000	539.255.000
5	Pemeliharaan Drainase Kota	1.566.250.000	1.487.184.218

6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bapangan	199.750.000	198.024.500
7	Pembangunan Saluran Drainase Gorong Jl. Patiunus	769.068.000	758.269.000
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gowak I	307.226.000	305.585.500
9	Peningkatan Jaringan Irigasi Tuk Jero	291.614.000	290.094.000
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dung Doro	411.086.000	409.380.000
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ngetuk	362.983.000	361.392.000
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blumbang	321.649.000	297.122.052
13	Peningkatan Jaringan Irigasi Pecangaan	410.582.000	408.987.250
14	Peningkatan Jaringan Irigasi Siwali	396.661.000	395.018.000
15	Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Bendo	394.914.000	393.324.500
16	Peningkatan Jaringan Irigasi Seputat	677.755.000	675.292.000
17	Peningkatan Jaringan Irigasi Joyo	401.935.000	137.539.123
18	Peningkatan Jaringan Irigasi Rombong (Lanjutan)	410.691.000	409.083.000
19	Peningkatan Jaringan Irigasi Bogo	394.210.000	392.502.000
20	Peningkatan Jaringan Irigasi Pace	490.001.000	488.441.000
21	Peningkatan Jaringan Irigasi Grojogan	496.753.000	486.302.500
22	Rehab Saluran Irigasi Bendung Pulerejo	397.232.000	395.675.500
23	Rehabilitasi Daerah Irigasi (Di) Sungon	199.750.000	198.322.500
24	Pembangunan Senderan Jalan Pecangaan- Karangrandu	199.800.000	199.274.750
25	Pembangunan Talud Jalan Pecangaan - Sowankidul (Jalan Peikanan)	199.800.000	198.865.750
26	Pembangunan Talud Jalan Tanggul Tlare - Kerso	199.800.000	198.858.750
27	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Pelang	199.750.000	197.976.000
28	Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Pace	199.750.000	198.509.000

29	Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Ngipik	199.750.000	198.375.000
30	Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Ringin	199.750.000	198.390.000
31	Pasangan Pengaman Tebing / Talud Kali Susukan	199.750.000	198.666.500
32	Pembangunan Senderan Sungai	199.750.000	197.894.250
33	Pembangunan Bronjong Pengaman Tanggul Bendung Kedawung	199.750.000	198.122.500
34	Normalisasi Tanggul Bendung Kedung Bende Kec. Mayong	199.750.000	198.220.000
35	Pembangunan Senderan Sungai	199.750.000	197.725.500
36	Rehab Pembangunan Saluran Irigasi Bendung Sigap	199.750.000	198.340.500
37	Pembangunan Irigasi Sungapan - Tegal Sambi	199.750.000	198.056.500
38	Pembangunan Senderan / Talud Tanggul Sungai Troso	199.750.000	198.591.500
39	Normalisasi Irigasi Petekeyan Mangunan - Platar - Semat	199.750.000	198.459.500
40	Perbaikan Irigasi Sungon Demangan Tahunan	199.750.000	198.013.000
41	Pembangunan Bendung Belorong Desa Kedungsari Mulyo	199.750.000	197.961.500
42	Penataan Embung Desa Kalipucang Kulon	199.750.000	198.136.500
43	Pembangunan Pengaman Sungai Dengan Brojung Kali Bakalan (Utara Jembatan Bakalan Desa Margoyoso)	199.750.000	198.981.500
44	Penataan Lingkungan Pagar Pengaman Sungai Kanal	199.750.000	198.864.000
45	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Siwali	199.750.000	198.218.500
46	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Kali Ngemplak	199.750.000	198.799.500
47	Normalisasi Dan Pasangan Kali Ngubres	199.750.000	199.463.500
48	Pembangunan Talud Kali Karang Malang	199.750.000	198.320.000
49	Rehab Bendungan Waru	199.750.000	198.722.500
50	Pembangunan Talud Sungai Sarwan	199.750.000	198.410.500

51	Normalisasi Sungai Cipluk Desa Kriyan Kec. Kalinyamatan	199.750.000	198.453.500
52	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Klepu – Watuaji	199.800.000	199.306.250
53	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Ngetuk Bategede	199.800.000	199.285.750
54	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Lebak - Bulungan	199.800.000	199.377.000
55	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Suwawal Timur Guyangan	199.800.000	199.286.250
56	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Lebak - Tanjung	199.800.000	199.269.250
57	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Bondo - Jeruk Wangi	199.800.000	199.336.000
58	Pembangunan Drainase Pengaman Jalan Ngabul - Troso	199.800.000	199.267.000
59	Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Ngeling	199.800.000	199.292.000
60	Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Raguklampitan	199.800.000	199.288.000
61	Pembangunan Saluran Air Jalan Ngabul - Ngeling	199.800.000	199.269.000
62	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Datuk Mulyoharjo	199.800.000	199.296.750
63	Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Tuk (DAK Penugasan)	600.000.000	533.708.000
64	Peningkatan Jaringan Irigasi Balong (DAK Penugasan)	900.000.000	831.041.000
65	Peningkatan Jaringan Irigasi Dung Jumbleng (DAK Penugasan)	450.000.000	426.330.000
66	Peningkatan Jaringan Irigasi Ngajok (DAK Penugasan)	700.000.000	694.975.000
67	Peningkatan Jaringan Irigasi Rau (DAK Penugasan)	800.000.000	703.810.000
68	Peningkatan Jaringan Irigasi Karimun (DAK Penugasan)	600.000.000	592.991.000
69	Peningkatan Jaringan Irigasi Tanggul (DAK Penugasan)	600.000.000	532.980.999
70	Peningkatan Jaringan Irigasi Lambir (DAK Penugasan)	500.000.000	400.000.000
71	Peningkatan Jaringan Irigasi Pligen (DAK Penugasan)	1.000.000.000	903.086.000

72	Peningkatan Jaringan Irigasi Mabal (DAK Penugasan)	500.000.000	486.774.000
73	Peningkatan Jaringan Irigasi Sebagor (DAK Penugasan)	1.200.000.000	1.140.672.000
74	Peningkatan Jaringan Irigasi Jati (DAK Penugasan)	548.725.000	407.734.679
75	Peningkatan Jaringan Irigasi Kandeg (DAK Penugasan)	450.000.000	445.170.000
76	Biaya Penunjang Dak Irigasi (DAK Penugasan)	262.883.000	180.689.800
77	Peningkatan Jaringan Irigasi Kedondong Desa Damarwulan Kec.Keling Kab. Jepara (Banprov)	700.000.000	693.877.000
78	Peningkatan Jaringan Irigasi Bengkok Desa Klepu Kec. Keling Kab.Jepara (Banprov)	750.000.000	741.929.000
79	Lanjutan Peningkatan Pengaman Tebing/Talud Kali Klumprit Desa Kelet Kec. Keling Kab. Jepara(Banprov)	500.000.000	495.770.000
80	Peningkatan Jaringan Irigasi Ces Desa Banyumanis Kec. Donorojo Kab.Jepara (Banprov)	700.000.000	692.000.000
81	Peningkatan Jaringan Irigasi Kali Putih Desa Bulungan Kec. Pakis Aji Kab. Jepara (Banprov)	500.000.000	492.000.000
82	Peningkatan Jaringan Irigasi Suwuk Desa Bulungan Kec. Pakis Aji Kab.Jepara (Banprov)	500.000.000	495.882.000
83	Peningkatan Jaringan Irigasi Punden Desa Cepogo Kec. Kembang Kab.Jepara (Banprov)	750.000.000	740.880.000
84	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Bate (Bbt.1 - Bbt.10) (Banprov)	2.000.000.000	1.796.691.000
85	Peningkatan Jaringan Irigasi Sentong Desa Bucu Kec. Kembang Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000	788.000.000
86	Peningkatan Jaringan Irigasi Taroan / Wuluh Desa Kaligarang Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)	750.000.000	747.270.000
87	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Sisa Dak Penugasan Th 2017)	561.787.000	557.578.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			
1	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Buaran	200.000.000	199.441.250
2	Pembangunan Saluran Drainase Dan Trotoar Jalan Raya Mlonggo	1.962.707.000	1.958.430.900
3	Pembangunan Trotoar Dan Saluran Drainase Jalan Mangunsarkoro	199.800.000	199.307.750
4	Pembangunan Drainase Jalan Pulodarat-Gemulung	199.800.000	199.404.000
5	Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Pasar Suwawal Timur	199.800.000	199.387.750
6	Rehabilitasi Saluran Tambak Desa Panggung Surodadi	199.800.000	199.348.500
7	Pembangunan Drainase Jalan Pecangaan- Sowankidul	199.800.000	199.456.750
8	Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Kawak Guyangan	199.800.000	199.315.750
9	Pembangunan Drainase Jln.Kabupaten Sinanggul Slagi	99.800.000	99.556.250
10	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang-Teluk Wetan Kec.Welahan	199.800.000	199.355.250
11	Pembangunan Senderan Jalan Raya Utara Terminal Gedangan Welahan	199.800.000	199.296.500
12	Pembangunan Saluran Air (Drainase) Jalan Kabupaten Desa Tahunan Ke Pekalongan	199.800.000	199.261.250
13	Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang - Kuanyar Kec. Welahan	199.800.000	199.305.500
14	Pembangunan Drainase Prapatan Kalipucang Ke Selatan Dan Kebarat	199.800.000	199.379.750
15	Pembangunan Saluran Air (Drainase) Jalan Kabupaten	199.800.000	199.259.750
16	Pembangunan Drainase Jalan Pelemkerep Singorojo Rw 02Pelemkerep	199.800.000	199.356.500
17	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Nalumsari Papringan	199.800.000	199.267.750

18	Pembangunan Drainase Jalan Sowanlor – Dongos	199.800.000	199.392.750
19	Pembangunan Drainase Jln. Gotri Welahan Di Kalipucang Wetan	199.800.000	199.414.000
20	Pembangunan Drainase Desa Nalumsari Rw 04 Sepanjang 500 Meter	199.800.000	199.274.250
21	Pembangunan Drainase Desa Daren Rt 02 Rw 03 Sepanjang 400 Meter	199.800.000	199.275.750
22	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Sebagor - Kaligarang	199.800.000	199.312.750
23	Drainase Desa Sekuro Rt 27 - 28	199.800.000	199.432.250
24	Perbaikan Saluran Drainase Jalan Tunggul Pandean - Blimbingrejo	199.800.000	199.244.500
25	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Tigajuru - Kalipucang	199.800.000	199.336.000
26	Pembangunan Drainase Jl Rengging-Ngasem Di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan	199.800.000	199.345.250
27	Pembangunan Drainase Jalan Mayong-Dorang	199.800.000	199.283.750
28	Pembangunan Drainase Jalan Rengging - Ngasem Di Desa Ngasem Kec. Batealit	199.800.000	199.301.750
29	Pembangunan Drainase Jalan Ternalum- Tunggulpandean	199.800.000	199.268.500
30	Pembangunan Drainase Jln. Kab Dk.Ngemplik Desa Karanggondang Kec.Mlonggo	199.800.000	199.295.000
31	Pembangunan Drainase Jalan Daren-Gebog	199.800.000	199.273.250
32	Pembangunan Saluran Drainase Jln. Mantingan Bugel (Depan Smk)	199.800.000	199.257.000
33	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Ngabul (Cemoro Cilik) - Ngasem	199.800.000	199.362.750
34	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl.Karangkebagusan Krapyak	199.800.000	198.880.000

35	Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Ngabul- Ngasem	199.800.000	199.342.750
36	Pembangunan Drainase Jalan Ngabul (Samping Pom)- Sukosari	199.800.000	199.359.000
37	Pembangunan Drainase Jalan Ngabul-Sukosono	199.800.000	199.324.250
38	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Ngabul-Langon	199.800.000	199.373.750
39	Perbaikan Trotoar Dan Saluran Drainase Jalan Ae. Suryani	199.800.000	199.261.750
40	Pembangunan Drainase Jalan Tembus Singorojo-Pelemkerep	199.800.000	199.269.750
41	Pembangunan Drainase Jalan Bendanpete-Jebol	199.800.000	199.281.750
42	Pembangunan Drainase Jl.Bakalan-Datar Di Desa Pendosawalan	199.800.000	199.273.500
43	Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro - Jambu Timur Guyangan Jambu Timur Rt 33, Rw 7,Desa Sekuro, Kec. Mlonggo	199.800.000	199.364.250
44	Pembangunan Drainase Jl.Margoyoso-Damarjati Di Desa Banyuputih	199.800.000	199.345.750
45	Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Jambu Timur Guyangan Jambu Timur Rt 20, Rw 04, Kec. Mlonggo	199.800.000	199.298.750
46	Pembangunan Drainase Jalan Depan Masjid Sidik Mulya	199.800.000	199.275.250
47	Drainase Kabupaten Jalan Kabupaten Pasar Suwawal Timur Rt 01, 03, Rw 04,Kebarat Arah Jepara, Kec. Pakis Aji	199.800.000	199.327.250
48	Drainase Jl. Kabupaten Jurusan Mlonggo Sekuro Kawak Guyangan Di Desa Sekuro, Rt 16,17,19, Rw 04, Kec.Mlonggo	199.800.000	199.464.750
49	Drainase Jl Kabupaten Jurusan Sinanggul Slagi, Kec. Mlonggo	199.950.000	199.207.750
50	Perbaikan Saluran Drainase Jln Kel. Bapangan Rt 02 Rw 02	199.800.000	199.271.000
51	Drainase Ruas Jalan Sekuro, Jambu,Kawak	199.800.000	199.295.500

52	Perbaikan Trotoar & Saluran Air Pengkol Jepara	199.800.000	199.302.250
53	Pembangunan Saluran Mantingan-Bugel	199.800.000	199.255.250
54	Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Semat Tanggul Tlare Rt 02/01	200.000.000	199.504.000
55	Pembangunan Saluran Drainase Rw 1Kelurahan Potroyudan	199.800.000	199.317.000
56	Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Cangkring Rt 02/01	200.000.000	199.278.000
57	Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Semat Petekeyan Rt 01/01	200.000.000	199.466.000
58	Pembangunan Saluran Desa Semat Rt 7 Rw 3	200.000.000	199.286.750
59	Pembangunan Saluran Drainase Jl Platar Rt 3 Rw 1	200.000.000	199.481.500
60	Pembangunan Saluran Drainase Rt 2 Rw 1 Desa Platar	199.800.000	199.264.250
61	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Demangan Petekeyan	199.800.000	199.255.500
62	Pembangunan Drainase Saluran Air Jl.Mantingan-Bugel (Depan Smk)	199.800.000	199.362.250
63	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo Bulungan	199.800.000	198.905.250
64	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl.Karangkebagusan Krapyak	199.800.000	199.404.250
65	Pembangunan Saluran Drainase Jl Kedungcino Bandengan	199.800.000	199.308.500
66	Pembangunan Saluran Drainase Jl Poros Desa Ngabul-Ngasem	199.800.000	199.275.250
67	Perbaikan Trotoar Dan Saluran Drainase Jl Letjen Suprpto	199.800.000	199.233.250
68	Pembuangan Drainase Pembuangan Ds Bulu Kec.Jepara	199.800.000	199.260.750
69	Pemb Drainase Pembuangan Jl Patiunus Kec.Jepara	199.800.000	199.258.250
70	Pembangunan Drainase Sepanjang Bok Kuning Desa	199.800.000	199.264.750

	Tahunan		
71	Penataan Lingkungan Jalan Dan Drainase Jalan Gawerejo Rt 01 Rw 05 Kel. Pengkol	199.800.000	199.281.500
72	Pembangunan Drainase Jalan Jl.Kalinyamat, Ds. Krapyak	199.800.000	199.283.500
73	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Di Jalan Raya Nalumsari - Tunggul	199.800.000	199.281.000
74	Lanjutan Drainase Jalan Menuju Kuwasharjo	199.800.000	199.341.750
75	Penataan Drainase Dan Pengaspalan Jalan Menuju Kuwasharjo	199800000	199.295.500
76	Pembangunan Drainase Jalan Kalipucang Wetan - Mayong , Kec.Welahan	199.800.000	199.282.250
77	Pembangunan Drainase Jalan Teluk Wetan - Kalipucang Wetan, Kec.Welahan	199.800.000	199.276.250
78	Pembangunan Drainase Jalan Jl.Sukosono - Petekeyan, Desa Sukosono	199800000	199.287.250
79	Pembangunan Drainase Jalan Jl.Kerso - Menganti, Ds. Kerso Kec.Kedung	199.800.000	199.350.500
80	Pasangan Senderan Drainase Poros Desa Paren- Desa Kalipucang Wetan	199.800.000	199.380.250
81	Pembanguan Talud Jalan Jondang - Surodadi	199.800.000	198.868.000
82	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Banjaran Rw 12	199.800.000	199.278.500
83	Lanjutan Pembangunan Drainase Jl Ds Banjaran Rw 06	199.800.000	199.305.000
84	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Jl. Jondang - Surodadi, Ds.Jondang, Kec. Kedung	199.800.000	199.281.500
85	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Bulungan Rw 08	199.800.000	199.383.250
86	Pembangunan Talud Kali Mbah Puan	199.750.000	198.423.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1	Pembangunan Jalan Poros Desa SeKab. Jepara	7.423.071.000	7.385.294.500

2	Penataan Lingkungan Lapangan Kec.Kedung	199.800.000	199.285.500
3	Penataan Lingkungan Jalan Poros Bulungan - Lebak Kec. Pakis Aji Kab.Jepara (Banprov)	1.500.000.000	1.476.000.000
4	Peningkatan Jalan Poros Kaligarang - Keling Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)	1.220.000.000	1.215.450.000
5	Peningkatan Jalan Poros Tulakan - Blingoh Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)	1.250.000.000	1.243.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang			
1	Penyusunan Peta Rth Publik	150.000.000	107.240.000
Program Pemanfaatan Ruang			
1	Penunjang Program P2kh	475.185.000	458.012.340
2	Pembuatan Patok Tapal Batas Kecamatan	100.000.000	97.260.000
3	Penataan Kolam Taman P2kh Gelora Bumi Kartini Sisi Selatan	292.670.000	292.670.000
4	Penataan Kolam Taman P2kh Gelora Bumi Kartini Sisi Utara	297.550.000	297.550.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
1	Pengendalian Tata Bangunan Dan Imb	282.192.000	260.808.390
2	Pengawasan Dan Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten Jepara	313.228.000	302.142.727
3	Pembuatan Papan Informasi Pada Garis Sempadan Pantai	98.675.000	97.812.000
4	Pemeliharaan Web Dan Materi Portal Informasi Rencana Tata Ruang	144.875.000	46.093.535
5	Penyusunan Kajian Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (Abg) Dan Sertifikat Laik Fungsi (Slf)	100.000.000	98.000.000
Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan			
1	Pembangunan Gapura Pembatas Kabupaten Di Desa Daren, Kec. Nalumsari	997.502.000	987.348.500
Program Pengembangan Data/Informasi			
1	Penyusunan Perencanaan & Evaluasi	55.050.000	40.725.750
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga			

1	Lanjutan Pembangunan Kolam Renang Di GBK	2.500.000.000	1.733.811.250
2	Pembangunan Lapangan Tembak Dan Panah Di Kawasan GBK	662.175.000	661.027.750
3	Rehab Stadion GBK Jepara	989.075.000	988.756.500
4	Penataan Kawasan GBK Jepara	2.000.000.000	51.200.000
5	Pembangunan Sport Center Lapangan Kenari	199.800.000	199.253.500
6	Peningkatan Sarpras Di Lingkungan Stadion Gbk Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
7	Penataan Sport Center Di Kawasan GBK Jepara (Banprov)	1.000.000.000	997.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran			
1	Pemeliharaan KeCipta KaryaAn	4.936.141.000	4.802.067.605
2	Lanjutan Pembangunan Gedung Persalinan Rsu Kartiini	7.755.900.000	7.752.230.000
3	Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Mlonggo	990.461.000	989.999.500
4	Pembangunan Gapura Sentra Industri Tersebar Di Kab Jepara	199.800.000	199.291.500
5	Perencanaan, Pengawasan DanOperasional Kegiatan KeciaptakaryaAn Yg DibiayaiApbd/Banprov Dan Sumber Dana Lainnya.	761.400.000	730.351.500
6	Penataan Sarana Dan Prasarana Kantor Disdukcapil (Pemanfaatan Lahan Baru Di Belakang Kantor Disdukcapil)	485.591.000	485.155.000
7	Lanjutan Pembangunan Kantor Bpbd	1.980.250.000	1.970.716.750
8	Lanjutan Pembangunan Mapolres Jepara	5.999.700.000	5.986.762.000
9	Pembangunan Pos Jaga Sar	495.200.000	488.961.750
10	Perawatan Stadion Gbk Dan Kamal Junaidi	876.700.000	858.509.635
11	Perawatan Kolam Renang 'Jepara Olympic Pool	575.725.000	561.531.987
12	Perawatan Gedung Wanita,Padepokan Silat, Gedung Futsal Dan Tennis	265.425.000	255.914.958
13	Perbaikan Kantor & Perbaikan Pagar Kecamatan Kec,Tahunan	407.200.000	16.000.000

Program Peningkatan Sarana Perdagangan			
1	Pembangunan Pasar Bangsri	11.001.411.000	10.909.667.250

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan DPUPR Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas.

- Sasaran, apa yang ingin dicapai pada urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :
 - Terwujudnya kualitas jalan bagi jalan-jalan strategis dan mempunyai road demand tinggi.
 - Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dan pemanfaatan air sungai.
 - Meningkatnya kapasitas daerah aliran sungai.
 - Terwujudnya ruang publik yang representatif.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah dengan pelayanan jalan interkoneksi antar bagian wilayah serta peningkatan kapasitas jalan.
 - Meningkatkan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi kegiatan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan air irigasi bagi pertanian.
- Program yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Sasaran dengan huruf a program dan kegiatan tersebut diatas.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dipergunakan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan masih belum mampu menampung kebutuhan lalu lintas dan pengembangan perekonomian.
 - Penurunan fungsi bendung dan saluran irigasi karena usia dan terbatasnya pemeliharaan.
 - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengendalian banjir.
 - Menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung sistem distribusi barang.
- Solusi
 - Meningkatkan Kualitas jalan dan jembatan sehingga bisa menampung kebutuhan lalu lintas

- Peningkatan fungsi jaringan irigasi
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengendalian banjir secara maksimal

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DISPERKIM

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)
- 2) Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 3) Sosialisasi Penyediaan Air Minum Lingkungan Permukiman di Kabupaten Jepara
- 4) Pengadaan Sarana Air Bersih
- 5) Pendampingan Kegiatan Hibah Air Minum Pedesaan
- 6) Peningkatan Infrastruktur Air Minum Desa Dermolo Kec. Kembang dan Desa Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara (DAK REGULER)
- 7) Pengadaan Sarana Air Bersih (DAK PENUGASAN)
- 8) Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa Tanjung – Tanjungsari – Plajan Kab. Jepara (Banprov)
- 9) Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Banprov, DAK, Dan Dana Transfer Lainnya

➤ Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 2) Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- 3) Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD Provinsi
- 4) Review Dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan/Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Jepara
- 5) Pembuatan SimRTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Jepara
- 6) Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedungmalang

- 7) Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - 8) Penunjang Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (DAK REGULER)
- **Program Lingkungan Sehat Perumahan**
- **Kegiatan :**
- 1) Penunjang Pengelolaan Rusunawa Jepara
 - 2) Penataan dan Rehab Rusunawa Ujungbatu
 - 3) Pendampingan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (KOTAKU Kota Tanpa Kumuh)
 - 4) Penataan Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Jepara
 - 5) Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebar di Kecamatan se Kabupaten
 - 6) Pengaspalan jalan gang beny` s kelurahan Bapangan Jepara
 - 7) Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara (DAK REGULER)
 - 8) Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara (DAK PENUGASAN)
- **Program Pengelolaan Area Pemakaman**
- **Kegiatan:**
- 1) Penataan Area Pemakaman
 - 2) Pengelolaan dan Operasional Pemakaman

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ada 5 IKK yaitu :

1. Kawasan Kumuh
Dari luas wilayah di Kabupaten Jepara yaitu 2.466,701 ha, masih terdapat kawasan kumuh seluas 4,13 Ha, sehingga capaian kinerja untuk urusan ini sebesar 0,17%
2. Ruang Terbuka hijau per satuan luas wilayah
Dari luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu 100.400 ha, ruang terbuka hijau yang tersedia adalah 3.802,14 ha atau 3,78 %
3. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Pada tahun 2018, dari seluruh jumlah rumah tangga di Kabupaten Jepara yaitu 380.762, rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih sebanyak 343.528 atau sebesar 90,22%.
4. Lingkungan Permukiman Kumuh

Dari total luas wilayah di Kabupaten Jepara yaitu 2.466,701 ha, masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan seluas 4,13 ha atau sebesar 0,17 %.

5. Rumah Layak Huni
- Dari jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2018, yaitu sebanyak 289.546 buah, rumah yang masuk kategori layak huni sebanyak 231.107 buah atau sebesar 79,82 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 27 orang.
- Kualifikasi Pendidikan :
S2 : 6 orang, S1 : 12 orang, D-3 : 3 orang, SLTA : 6 orang,
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 8 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 7 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 orang, Pengatur Muda : (II/a) : 3 orang.
- Jumlah Pejabat Struktural : 12 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
1	Pengadaan Sarana Air Bersih (DAK Penugasan)	8.039.924.000	7.868.355.000
2	Penunjang Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	154.644.000	123.851.783
3	Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	197.850.000	189.224.000
4	Sosialisasi Penyediaan Air Minum Lingk Per- mukiman di KabJepara	40.100.000	25.816.500
5	Pendampingan Kegiatan Hibah Air Minum Pedesaan	72.225.000	52.966.450

6	Pengadaan Sarana Air Bersih Se Kab. Jepara	1.638.273.000	1.425.771.000
7	Peningkatan Infrastruktur Air Minum Desa Dermolo Kec. Kembang dan Desa Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara (DAK Reg)	1.500.000.000	1.491.750.000
8	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa Tanjung – Tanjungsari – Plajan Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000,-	796.000.000
9	Perencanaan, Pengawasan, Kegiatan Yang Bersumber dr Dana Banprov, DAK, & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	183.755.000
Program Pengembangan Perumahan			
1	Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	293.800.000	261.129.500
2	Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tdk Layak Huni	1.407.587.000	1.381.180.650
3	Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yang Bersumber dari APBD Provinsi	85.987.000	82.869.000
4	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan/Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Jepara	247.445.000	243.088.000
5	Pembuatan SimRTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Jepara	50.000.000	49.750.000
6	Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedungmalang	1.400.000.000	1.399.150.000
7	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	197.250.000	194.500.000
8	Penunjang Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler)	125.000.000	124.025.000

Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1	Penunjang Pengelolaan Rusunawa Jepara	1.380.522.000	1.279.132.704
2	Penataan dan Rehab Rusunawa Ujungbatu	500.000.000	485.300.000
3	Pendampingan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (KOTAKU Kota Tanpa Kumuh)	213.612.000	183.093.000
4	Penataan Lingkungan Kelurahan Se Kecamatan Jepara	2.590.000.000	2.169.734.225
5	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten	1.925.800.000	1.075.538.191
6	Pengaspalan Jalan Gang Beny's Kelurahan Bapangan Jepara	100.000.000	96.250.000
7	Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara (DAK Reguler)	1.904.100.000	1.870.800.000
	Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara (DAK Penugasan)	4.100.000.000	4.003.300.000
Program Pengelolaan Area Pemakaman			
1	Penataan Area Pemakaman	917.000.000	915.877.000
2	Pengelolaan dan Operasional Pemakaman	62.623.000	62.513.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka : meningkatkan kualitas perumahan guna mengurangi rumah tidak layak huni

(RTLH), mengurangi kebutuhan rumah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dengan didukung PSU, mengurangi luasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastuktur lingkungan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan sehat, pemenuhan kebutuhan air bersih/minum bagi seluruh penduduk, penataan permukiman termasuk penataan area pemakaman, dilakukan dengan tahapan :

- **Perumusan Masalah :**

- 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jepara;
- 2) Masih adanya luasan kumuh perkotaan;
- 3) Masih terbatasnya ketersediaan sanitasi bagi masyarakat;
- 4) Belum tercukupinya kebutuhan air bersih/minum secara menyeluruh bagi masyarakat

- **Kebijakan :**

- 1) Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya;
- 2) Mengurangi luasan kumuh perkotaan setiap tahunnya;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana sanitasi bagi masyarakat;
- 4) Meningkatkan sarana prasarana air bersih/minum;
- 5) Meningkatkan pembangunan dan penataan infrastruktur permukiman.

- **Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :**

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 4) Program Pengelolaan Area Pemakaman.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**

- 1) Data kependudukan dan perumahan yang sifatnya dinamis (selalu berkembang);
- 2) Masih adanya RTLH di luar data base yang dimiliki;
- 3) Minimnya tenaga teknis sesuai kompetensi;
- 4) Minimnya Tenaga Lapangan;
- 5) Keterbatasan Anggaran

- **Solusi :**

- 1) Inventarisasi jumlah RTLH secara berkala;
- 2) Pemantapan validasi RTLH;
- 3) Pembuatan simRTLH;
- 4) Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
- 5) Membuat sediaan pengusulan penambahan anggaran, Membuat usulan program kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran ke tingkat provinsi dan pusat

6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

- Kegiatan :

- 1). Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Siswa/ Pendidik yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Pendidik yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional
- 2). Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Pemuda
- 3). Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Baris-berbaris (LBB)
- 4). Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan dan Even Sumpah Pemuda
- 5). Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Pelajar
- 6). Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR dan Pramuka
- 7). Fasilitasi Penyelenggaraan AUBADE
- 8). Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 9). Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

➤ **Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba**

- Kegiatan :

- 1). Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

➤ **Program Upaya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**

- **Kegiatan :**

- 1). Pembinaan dan pemusatan latihan Atlet Pelajar yang maju mewakili Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional
- 2). Penyelenggaraan POPDA SD,SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Tingkat Eks.Karesidenan, Provinsi/Nasional

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, standar pelayanan minimumnya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Gelanggang/Balai Remaja
Jumlah Gelanggang olahraga yang dimiliki sebanyak 8 buah dibagi jumlah penduduk Jepara sebesar 1.168.261 jiwa, maka capaian nilai IKK-nya adalah 0.001 %
- b. Lapangan Olahraga
Untuk menunjang kegiatan olahraga, pada tahun 2018 Kabupaten Jepara memiliki lapangan olahraga sebanyak 474 buah.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 93 orang
- Kualifikasi pendidikan
S3: 0 orang, S2 : 24 orang, S1: 44 orang, D3: 4 orang, D2 : 1 orang, D1: 1 orang, SLTA : 19 orang
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Tk.I (IVb) : 7 orang, Pembina (IVa) : 13 orang, Penata Tk.I (IIIId) : 15 orang, Penata (IIIC) : 18 orang, Penata Muda Tk.I (IIIb) : 7 orang, Penata Muda (IIIa) : 12 orang, Pengatur Tk.I (IId) : 0 orang, Pengatur (IIC) : 18 orang, Pengatur Muda Tk.I (IIb) : 3 orang,
- Pejabat Struktural : 18 orang
Eselon IIa : 0 orang, eselon IIb : 0 orang, eselon IIIa : 1 orang, eselon IIIb : 4 orang, Eselon IVa : 13 orang,

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Siswa/Pendidik yg diselenggarakan oleh Masy& Pemberian Penghargaan kpd Siswa/Pendidik yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional	174.250.000	173.800.000
2	Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Pemuda	120.325.000	111.172.500
3	Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Baris-berbaris (LBB)	30.862.000	26.462.000
4	Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan dan Even Sumpah Pemuda	19.775.000	19.175.000
5	Pembinaan dan Pel Kepemimpinan Pemuda Pelajar	21.575.000	16.200.000
6	Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurukuler PMR dan Pramuka	20.750.000	18.170.000
7	Fasiilitasi Penyelenggaraan AUBADE	46.950.000	44.706.000
8	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	52.550.000	40.005.000
9	Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan latihan (PASKIBRAKA)	266.225.000	240.753.500

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba			
1	Sosiialisasi Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	36.475.000	23.940.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			
2	Pembinaan dan pemusatan latihan Atlet Pelajar yang maju mewakili Kab. Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional	470.412.000	461.614.000
3	Penyelenggaraan POPDA SD,SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Tingkat Eks.Karesidenan, Provinsi/Nasional	266.125.000	262.069.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Perumusan Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga :
- Kebijakan, diarahkan untuk :
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah, pemuda dan olahraga.
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan Kepemudaan dan Olahraga cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Masalah :
Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal
- Solusi :
Memberikan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana lembaga non formal melalui Bantuan Penguatan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)

7. Urusan Penanaman Modal

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Kegiatan :

- 1) Penyusunan Buku Profil Investasi
- 2) Promosi Investasi
- 3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- 4) Binwasdal perizinan dan penanaman modal
- 5) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah

➤ Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

- Kegiatan :

- 1) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- 2) Pemeliharaan Jaringan LAN dan Web site
- 3) Pendataan Perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Jepara

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Penanaman Modal Kabupaten Jepara diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Realisasi PMDN tahun 2018 sebesar 2.217.628.445.661,- sedangkan tahun 2017 sebesar 111.420.550.872 sehingga ada kenaikan sebesar 1,890,23 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 25 orang

- Kualifikasi pendidikan : S2 : 12 orang, S1 : 7 orang, D3 : 2 orang, D2 : - orang, D1 : - orang, SLTA : 4 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 5 orang, Penata Tk. I (III/d) : 6 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : - orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang dan Pengatur Muda (II/a) : - orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
1	Penyusunan Buku Profil Investasi	44.820.000	44.245.000
2	Promosi Investasi	42.500.000	42.500.000
3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	R7.500.000	6.970.750
4	Binwasdal perizinan dan penanaman modal	20.000.000	19.607.000
5	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	39.565.000	38.985.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi			
1	Peningkatan Keg Pe-mantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	10.125.000	7.753.000
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	38.050.000	35.779.610

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah:
 - Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
 - Terbatasnya sarana prasarana perizinan
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
 - Meningkatkan sarana prasarana perizinan
- Program, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
 - Terbatasnya sarana prasarana perizinan
- Solusi :
 - Penambahan SDM yang berkualitas
 - Mengikutsertakan diklat teknis terkait perizinan dan penanaman modal
 - Memaksimalkan pegawai dan sarana prasarana yang telah ada
 - Mengajukan penambahan sarana dan prasarana

8. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Pengembangan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Koperasi melalui perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Struktur Pembiayaan KSP/USP yang Bersumber dari APBN/APBD I
 - 2) Sistem Informasi Koperasi

- 3) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan hukum dan Perubahan anggaran dasar
 - 4) Pelatihan Akuntansi dan Uji Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi
 - 5) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi
 - 6) Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Melalui Identifikasi Koperasi
 - 7) Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - 8) Advokasi dan Pengawasan Koperasi
 - 9) Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian
- **Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**
- **Kegiatan :**
- 1) Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil (MUK) dan Manajemen Keuangan Bagi UMKM
 - 2) Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Desain Produk UMKM
 - 3) Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Keterampilan Usaha
 - 4) Identifikasi dan Validasi Data UMKM
- **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
- **Kegiatan :**
- 1) Pelatihan Kemasan (Packaging)
 - 2) Sosialisasi dan Evaluasi IUMK
 - 3) Pelatihan Pemasaran Melalui E-Commerce Bagi Pelaku Usaha Kecil
 - 4) Fasilitasi Sertifikat Halal
 - 5) Fasilitas Pameran Produk Unggulan Daerah
- **Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Kecil Menengah**
- **Kegiatan :**
- 1) Temu Kemitraan dan Jaringan Bisnis UMKM dengan Pengusaha
- **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
- **Kegiatan :**
- 1) Sistem Informasi Koperasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Koperasi melalui perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Struktur Pembiayaan KSP/USP yang Bersumber dari APBN/APBD I
 - 3) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan hukum dan Perubahan anggaran dasar

- 4) Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian
- 5) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi
- 6) Advokasi dan Pengawasan Koperasi
- 7) Pelatihan Akuntansi dan Uji Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi
- 8) Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Melalui Identifikasi Koperasi
- 9) Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Koperasi dan UKM Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu, :

- 1. Jumlah Koperasi Aktif
Di Kabupaten Jepara ada 645 koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 525 buah. Sehingga capaian kinerjanya adalah 81 %.
- 2. Usaha Makro dan Mikro
Dari 79.112 seluruh usaha mikro yang ada di Jepara, ada 78.505 usaha mikro yang aktif sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,23 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 36 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 11 orang, S1 : 10 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 10 orang, SMP : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
1	Sistem Informasi Koperasi	44.750.000	43.642.412

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Monitoring dan Evaluasi Koperasi melalui perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Struktur Pembiayaan KSP/USP yang Bersumber dari APBN/APBD I	7.500.000	7.356.876
3	Peningkatan Kualitas Organisasi Badan hkm & Perub angrn dasar	30.944.000	30.993.500
4	Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian	20.625.000	20.625.000
5	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi	20.000.000	19.978.470
6	Advokasi dan Pengawasan Koperasi	19.200.000	19.194.888
7	Pelatihan Akuntansi & Uji Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi	31.000.000	30.993.500
8	Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Melalui Identifikasi Koperasi	25.362.000	25.294.714
9	Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	21.287.000	21.130.680
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			
1	Pelat Kewirausahaan Manajemen Ush Kecil (MUK) & Manajemen Keuangan bg UMKM	24.825.000	24.775.000
2	Pelat Ket & Pengemb Desain Produk UMKM	27.100.000	27.100.000
3	Pembinaan & Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Ket Usaha	124.700.000	124.288.630
4	Identifikasi dan Validasi Data UMKM	30.325.000	30.025.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
1	Pelatihan Kemasan (Packaging)	27.650.000	27.650.000
2	Sosialisasi dan Evaluasi IUMK	35.600.000	35.200.000
3	Pelatihan Pemasaran Melalui E-Commerce bg Pelaku Usaha Kecil	23.925.000	23.923.500
4	Fasilitasi Sertifikat Halal	43.325.000	43.325.000
5	Fasilitas Pameran Produk Unggulan Daerah	135.050.000	134.723.196
Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Kecil Menengah			
1	Temu Kemitraan dan Jaringan Bisnis UMKM dengan Pengusaha	47.125.000	47.125.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
1	Sistem Informasi Koperasi	44.750.000	43.642.412
2	Monitoring & Evaluasi Koperasi melalui perkuatan Jaringan Kelembagaan & Struktur Pembiayaan KSP/USP yg Bersumber dari APBN/APBD I	7.500.000	7.356.876
3	Peningkatan Kualitas Organisasi Badan hukum dan Perubahan anggaran dasar	30.944.000	30.993.500
5	Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian	20.625.000	20.625.000
6	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi	20.000.000	19.978.470
7	Advokasi dan Pengawasan Koperasi	19.200.000	19.194.888

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
8	Pelatihan Akuntansi dan Uji Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi	31.000.000	30.993.500
9	Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Melalui Identifikasi Koperasi	25.362.000	25.294.714
10	Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	21.287.000	21.130.680

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM yang menggunakan Informasi Tehnologi
 - Akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya akses pemasaran bagi pruduk UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi masih rendah sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan Pra Koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang telah berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UMKM
 - Peningkatan pemanfaatan sumberdaya local
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang menggunakan Informasi Teknologi
 - Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya Akses Pemasaran bagi Produk UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi Kelompok UMKM masih rendah , sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan pra koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi
- Solusi :
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pengelola UKM, Koperasi maupun Tenaga Kerja sehingga mampu meningkatkan kualitas manajemen baik koperasi maupun UMKM dan meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga dapat menembus akses pemasaran yang lebih luas baik dalam neger i maupun luar negeri melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan desain produk, pelatihan kewirausahaan, manajemen UMKM, Workshop, pelatihan, study banding bagi pengurus dan anggota koperasi
 - Mengupayakan tambahan modal bagi koperasi dan kelompok UMKM baik dari pemerintah daerah maupun bantuan-bantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
 - Pelatihan dan pengenalan peralatan tepat guna serta fasilitasi peralatan produksi UMKM bagi kelompok UMKM dan fasilitasi sertifikat halal
 - Identifikasi dan validasi data UMKM setiap tahun

- Penyuluhan pembentukan koperasi dan fasilitasi pembentukan koperasi dan pembuatan Badan Hukum Koperasi
- Perlu diupayakan pembinaan secara maksimal bagi koperasi non aktif terkait akifitas usaha yang dikelola
- Membangun jaringan kemitraan antara koperasi besar dan koperasi kecil melalui jaringan retail atau jaringan unit jasa keuangan syariah maupun jaringan koperasi simpan pinjam.
- Peningkatan SDM koperasi melalui pelatihan IT dan Uji kompetensi untuk pengurus maupun pengelola koperasi melalui lembaga sertifikasi kompetensi
- Fasilitasi pelatihan pemasaran melalui E-Commerce bagi usaha kecil.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional
- 2) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- 3) Pelayanan dan Pengelolaan Akta Pencatatan Sipil
- 4) Penunjang Pelayanan Pencatatan Perkawinan
- 5) Fasilitasi Kerjasama Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
- 6) Pengelolaan ware House Data Kependudukan
- 7) Penataan Dokumen Kependudukan
- 8) Pembuatan Back Up Data Peristiwa Penting
- 9) Pengelolaan Sistem dan Informasi Administrasi Kependudukan
- 10) Pembangunan Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan
- 11) Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan

12) Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

c. **Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 3 IKK, yaitu :

1. Kepemilikan KTP
Prosentase kepemilikan KTP adalah 91,49 % yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 778.748 jiwa dari 851.189 jiwa jumlah penduduk wajib memiliki KTP.
2. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 467.696 orang dibagi dengan jumlah penduduk Jepara sebanyak 1.168.261 jiwa. Jadi per 1000 penduduk Jepara, yang memiliki akte kelahiran sebanyak 58 orang.
3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara mulai tahun 2005.

d. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

- Jumlah pegawai : 29 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 10 orang, S1 : 10 orang, SLTA : 8 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV / c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 5 orang, Penata Tk I (III/d) : 9 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk I (III/b) : 8 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 1 Orang, Pengatur (II/c) : 3 orang.

e. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Surat Ket Kependudukan Lainnya Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nas	1.231.105.000	1.209.854.329

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Penyusunan Profil Perkemb Kependudukan	37.200.000	33.725.000
3	Pelayanan &Pengelolaan Akta Pencatatan Sipil	361.675.000	317.681.660
4	Penunjang Pelayanan Pencatatan Perkawinan	26.437.000	23.682.000
5	Fasilitasi Kerjasama Kependudukan dan Inovasi Pelayanan.	25.000.000	23.631.500
6	Pengelolaan Ware House Data Kependudukan.	32.600.000	27.628.509
7	Penataan Dokumen Kependudukan	61.175.000	55.590.800
8	Pembuatan Back Up Data Peristiwa Penting	53.300.000	48.220.000
9	Pengelolaan Sistem dan Informasi Administrasi Kependudukan.	477.937.000	438.419.024
10	Pembangunan Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.	47.425.000	45.374.000
11	Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan.	38.850.000	35.928.000
12	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik).	1.771.176.000	1.719.054.260

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data, dokumen kependudukan (*administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*), yang dimulai dari :
- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- Kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Kependudukan masih perlu untuk ditingkatkan.
 - Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang administrasi kependudukan, mengurus Dokumen Kependudukan hanya untuk kebutuhan mendesak.
 - Data kependudukan bersifat dinamis dan sering terjadi perubahan.
 - Masyarakat masih ada yang enggan untuk melaporkan setiap adanya perubahan baik perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, bahkan pada saat melaporkan adanya perubahan, masyarakat tidak memberikan data yang dimiliki dengan benar dan lengkap sehingga menyebabkan data base kependudukan kurang akurat terutama peristiwa kematian.
 - Sebagian masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan melalui jasa calo / makelar menyebabkan adanya biaya untuk mengurus dokumen tersebut padahal menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dalam pasal 79 A) menyatakan untuk kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
 - Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen Kependudukan melalui :
 - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - Langsung ke masyarakat (pertemuan di Kecamatan / Desa);
 - Melalui media cetak : Booklet, Leaflet, Banner;
 - Melalui media elektronik (lewat radio).
 - Memasang pengumuman di papan pengumuman, melalui banner / spanduk yang berisi : Pengurusan Dokumen Kependudukan Gratis / Tidak dipungut Biaya, Datang Sendiri, Pelayanan On line Disukcapil.
 - Mendekatkan pelayanan dengan masyarakat melalui pelayanan keliling / jemput bola (stelsel aktif) ke desa – desa, tempat – tempat strategi, Sekolah – Sekolah.
 - MOU / Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Bersalin dan Bidan –

- Bidan yang menangani persalinan untuk menerbitkan akta kelahiran baru.
- Komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan :
 - o Pelayanan terintegrasi, dengan 18 Inovasi Pelayanan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (pelayanan terintegrasi).
 - o Penyederhanaan sistem pelayanan yang tersambung dalam sistem SIAK (pelayanan online, informasi adminduk).
 - Menindaklanjuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (adanya kebijakan / edaran dari Pusat terkait Dokumen Kependudukan) :
 - o Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ), terkait dengan perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - o KTP – el Berlaku Seumur Hidup (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016), masih dipedomani.
 - o Mencatat Pelaporan Kematian yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili (Surat Edaran Nomor 472.12/2701/DUKCAPIL tanggal 17 Maret 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian), masih dipedomani.
 - o Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP – el (Surat Kemendagri Nomor 471.13/9686/Dukcapil tanggal 14 September 2016)
 - o Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP – el (Surat Edaran Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL tanggal 20 Februari 2018), masih dipedomani.
 - o Validasi setiap adanya perubahan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
 - Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan guna meningkatkan pelayanan (kebutuhan anggaran).
 - Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, mengikutsertakan sumber daya manusia setiap ada bimtek, mengusulkan tambahan personil.
 - Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan : baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Sarana dan Prasarana serta pemeliharannya yang masih kurang, terutama sarana dan prasarana untuk pelayanan yang sudah diatas lima tahun (sarana elektronik / komputer).
 - Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbatas.
 - Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga kegiatan yang ada bersifat rutin, jika ada inovasi terkait pelaksanaan kegiatan / pelayanan harus betul – betul menyesuaikan anggaran.
- Solusi :
 - Dialokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharannya. Jika sarana dan prasarana sudah tidak layak dilakukan penghapusan barang.
 - Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan melalui Bimtek dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada serta mengusulkan tambahan personil.
 - Merencanakan dan mengusulkan kegiatan yang betul – betul sesuai dengan Kebutuhan / menunjang kegiatan baik untuk operasional Dinas maupun untuk pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat ataupun yang bersifat insidentil.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

10. Urusan Tenaga Kerja

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan DBH CHT Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT dalam Bidang Penjahitan dan Tata Rias/Salon bagi ibu Rumah

- Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT)Sistem Informasi Koperasi
- 2) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Konseling) bagi Pencari Kerja Dan Sosialisasi Peluang Kerja Dalam dan Luar Negeri ke Bursa Kerja Khusus di SMK se Kab. Jepara (DBHCHT)
 - 3) Pembinaan Calon Tenaga Kerja Keluar Negeri (DBHCHT)
 - 4) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan DBH CHT Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidag Tata Boga bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT)
 - 5) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan IMTA
 - 6) Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan AK On Line dan Bursa Kerja On Line Serta Pembuatan Informasi Pasar Kerja
 - 7) Pameran Bursa Kerja/Job Fair dan Kelompok Binaan
 - 8) Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri dan TKI di Luar Negeri melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah(AKD) Angar Kerja Negara(AKAN)
 - 9) Kegiatan Surveillance Implemantanse ISO 9001, 2015 Untuk Pelayanan Informasi Pasar Kerja
 - 10) fasilitasi pengawasan dan pengendalian permasalahan TKI di Luar Negeri
 - 11) Bursa Kerja On Line (BKO) dan Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - 12) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Bidang Terapan Tehnologi Tepat Guna bagi Pencari Kerja
 - 13) Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Bidang Kewirausahaan Melalui Pembentukan Tenaga Kerja mandiri (TKM) & Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)
 - 14) Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja masyarakat melalui wirausaha baru bagi TKI Purna
 - 15) Pembinaa dan pengawasan Inspeksi Tenaga Kerja Asing
 - 16) Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 17) Pemagang Calon Tenaga Kerja
 - 18) Bimbingan teknis penyusunan skala upah dan menunjang kegiatan dewan pengupahan
 - 19) pembinaan dan pemantauan THR serta sosialisasi UMK Kab.Jepara
 - 20) Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan

- 21) Bimbingan Teknis Tantang Peraturan Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja
- 22) Pembinaan dan Pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit
- 23) Penyelesaian perselisihan PHI dan PHK
- 24) Pembinaan K3 Pengujian Lingkungan Kerja dan Kegiatan Bulan k3
- 25) Pembentukan Koperasi Karyawan di Perusahaan
- 26) Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tentu (PKWTT) dari perusahaan
- 27) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ditempat Kerja
- 28) Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- 29) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT bagi Buruh Rokok Mantan Buruh dan Pencari Kerja (DBHCHT)

➤ **Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Perusahaan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan ada 2 IKK,yaitu :

- a. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh
Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 31.142 orang dari jumlah total pekerja buruh sebanyak 86.199 orang, atau 36,12 %.
- b. Pencari Kerja yang ditempatkan
Jumlah pekerja yang ditempatkan/telah mendapat pekerjaan pada tahun 2018 sebanyak 6.350 orang dari total jumlah pekerja yang mendaftar yaitu 17.957 orang atau 35 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 36 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 11 orang, S1 : 10 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 10 orang, SMP : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur

(II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
PROGAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
1	Pembinaan Kemampuan & Ket DBHCHT Kerja Masy di Lingk IHT dlm Bid Penjahitan & Tata Rias/ Salon bg ibu RT & Pencari Kerj (DBHCHT)	460.000.000	450.451.253
2	Penyuluhan & Bimb Jbtn (Konseling) bagi Pencari Kerja & Sosialisasi Peluang Kerja dlm & Luar Neg ke Bursa Kerja Khusus di SMK se Kab. Jepara (DBHCHT)	10.000.000	9.927.500
3	Pembinaan Calon Tng Kerja Keluar Negeri (DBHCHT	10.000.000	9.370.000
4	Pembinaan Kemamp & Ket DBH CHT Kerja Masy di Lingk IHT dlm bid Tata Boga bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT	100.000.000	96.905.500
5	Peningk Sarana Prasarana Pelayanan IMTA	15.000.000	15000.000
6	Pemeliharaan & Peningk Sarana Prasarana pelayanan AK On Line & Bursa Kerja On Line Serta Pembuatan Informasi Pasar Kerja	25.000.000	23.310.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
7	Pameran Bursa Kerja/Job Fair dan Kelompok Binaan	155.400.000	155.200.000
8	Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri &TKI di Luar Negeri melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah(AKD) Antar Kerja Negara(AKAN)	5.900.000	5.900.000
9	Kegiatan Surveillance Implementansi ISO 9001, 2015 Untuk Pelayanan Informasi Pasar Kerja	45.700.000	44.900.000
10	fasilitasi pengawasan dan pengendalian permasalahan TKI di Luar Negeri	10.550.000	10.461.262
11	Bursa Kerja On Line (BKO) dan Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)	48.400.000	45.265.708
12	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Bidang Terapan Teknologi Tepat Guna bagi Pencari Kerja	275.640.000	263.987.500
13	Pembinaan Kemampuan Keterampilan Kerja Masyarakat di Bidang Kewirausahaan Melalui Pembentukan Tenaga Kerja mandiri (TKM) & Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)	18.270.000	17.770.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
14	Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja masyarakat melalui wirausaha baru bagi TKI Purna	15.850.000	15.500.000
15	Pembinaa dan pengawasan Inspeksi Tenaga Kerja Asing	33.730.000	28.490.000
16	Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tng Kerja	19.600.000	17.100.000
17	Pemagang Calon Tenaga Kerja	40.730.000	39.845.000
18	Bimbingan teknis penyusunan skala upah dan menunjang kegiatan dewan pengupahan	18.050.000	18.049.992
19	pembinaan dan pemantauan THR serta sosialisasi UMK Kab.Jepara	16.725.000	16.725.000
20	Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan	11.450.000	11.450.000
21	Bimibingan Teknis Tantang Peraturan Ketenagakerjaan bagi Pegusaha dan Pekerja	30.500.000	30.500.000
22	Pembinaan dan Pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit	26.175.000	26.174.500
23	Penyelesaian perselisihan PHI & PHK	10.000.000	10.000.000
24	Pembinaan K3 Pengujian Lingkungan Kerja dan Kegiatan Bulan k3	12.250.000	12.249.775
25	Pembentukan Koperasi Karyawan di Perusahaan	13.450.000	13.450.000
26	Pembinaan Perjanjian	10.000.000	10.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu tdk Tentu (PKWTT) dr perush		
27	Pencegahan & Pe-nanggulangan HIV/AIDS ditmpt Kerja	8.450.000	7.945.000
28	Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	22.950.000	22.943.000
29	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT bagi Buruh Rokok Mantan Buruh dan Pencari Kerja (DBHCHT)	1.500.000.000	1.447.839.600
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA			
1	Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Perusahaan	13.400.000	12.900.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga Kerja adalah :
 - Tingginya pencari kerja
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan sumberdaya manusia
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program peningkatan kerja

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan : baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Tingginya angka pengangguran
 - Tingginya angka pencari kerja
- Solusi :
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia
 - Fasilitasi pelatihan pemasaran melalui E-Commerce bagi usaha kecil

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

11. Urusan Pangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya pangan Lokal
 - 2) Festival Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu Non Beras dan Makanan Khas Daerah
 - 3) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah
 - 4) Rakor Dewan Ketahanan Pangan
 - 5) Pemberdayaan Kelompok Pengolah Pangan
 - 6) Perintisan Desa Mandiri Pangan
 - 7) Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
 - 8) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
 - 9) Sosialisasi dan Pelatihan Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan serta Pelatihan di bid. Ketahanan Pangan
 - 10) Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan
 - 11) Pembinaan dan Pengawasan Makanan di Lingkungan Sekolah
 - 12) Identifikasi Mutu Harga Pangan, Pola Distribusi Pangan dan Survey PPH
 - 13) Penyusunan Database Kerawanan Pgn, Pen. Daerah Rwn Pgn & Ktrsd Pgn

14) Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pangan, ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

1. Regulasi ketahanan pangan kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada dan sebagainya telah dimiliki oleh Kabupaten Jepara yaitu:
 - PP No. 68 Th. 2002 tentang Ketahanan Pangan
 - UU No. 18 Thun 2012 tentang Pangan
 - Perpres No. 22 Tahun 2009 Tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Permentan no. 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganerkaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Pergub No. 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pemganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Prov. Jateng
 - Perbub No. 39 Tahun 2009 Tentang percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kab. Jepara
 - Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Acara Pertemuan/Rapat/Pelatihan
2. Ketersediaan pangan utama pertahun Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebesar 124,19 kg per orang per tahun. Ini diperoleh dari jumlah ketersediaan pangan utama per tahun yaitu 151.988 ton dibagi jumlah penduduk sebesar 1.168.261 orang.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 124 orang
- Kualifikasi pendidikan
Sekolah Dasar (1 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (0 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (23 orang); Diploma 3 (22 orang); Diploma IV (1 orang)
Strata 1 (63 orang); Strata 2 (15 orang).
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (3 orang); Pembina/IV-a (19 orang); Penata Tk I/III-d (16 orang); Penata/III-c (20 orang); Penata Muda Tk I/III-b

- (13 orang); Penata Muda/III-a (25 orang); engatur Tk I/II-d (8 orang); Pengatur / II-c (15 orang); Pengatur Muda Tk I/II-b (3 orang); Pengatur Muda / II-a (3 orang); Juru Muda /I-b (1 orang), Pejabat Struktural : 54 orang
- Pejabat Fungsional : 70 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Pembangunan & Pengemb Sumber Daya pangan Lokal	158.750.000	157.460.000
2	Festv Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu Non Beras & Makanan Khas Daerah	155.697.500	154.494.000
3	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan & Lingk Sekolah	133.400.000	131.893.000
4	Rakor Dewan Ketahanan Pangan	24.691.000	23.706.000
5	Pemberdayaan Kelompok Pengolah Pangan	138.425.000	137.575.000
6	Perintisan Desa Mandiri Pangan	265.825.000	265.587.500
7	Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	206.625.000	205.846.500
8	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	70.725.000	70.557.000
9	Sosialisasi & Pelatihan Mutu, Gizi &Keamanan Pangan serta Pelat di bid. Ketahanan Pangan	40.150.000	40.035.000
10	Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan	22.137.000	22.137.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
11	Pembinaan dan Pengawasan Makanan di Lingkungan Sekolah	60.575.000	60.035.000
12	Identifikasi Mutu Harga Pangan, Pola Distribusi Pangan & Survey PPH	42.900.000	42.900.000
13	Penyusunan Database Kerawanan Pgn, Pen. Daerah Rwn Pgn & Ktrsd Pgn	38.150.000	38.150.000
14	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin	109.865.000	106.650.400

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan kemampuan ketahanan pangan yang dimulai dari identifikasi permasalahan :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pemerintahan adalah:
 - Kurangnya SDM yang ada terhadap penguasaan aplikasi teknologi yang berbasis komputer dan internet;
 - Pola konsumsi masyarakat Jepara pada umumnya yang cenderung menganggap beras/nasi sebagai makanan pokok dan gandum sebagai makanan tambahan yang disukai, sehingga sangat tergantung pada kedua komoditi tersebut, padahal masih banyak produk pangan lokal yang sesuai dengan B2SA namun belum diberdayakan secara maksimal.
 - Lahan pertanian yang cenderung berkurang karena alih fungsi (perumahan dan kegiatan usaha) menyebabkan berkurangnya jumlah produksi gabah, sehingga perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan cadangan pangan khususnya gabah melalui program pemberdayaan kelompok – kelompok tani.
- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Menunjang pelayanan teknis Distannak
 - Menunjang pengelolaan pendapatan SKPD Distannak
 - Validasi data pertanian
 - Penyusunan perencanaan dan evaluasi Distannak
 - Peningkatan ketahanan Pangan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan pangan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing level pegawai sehingga pekerjaan terkadang selesai tidak sesuai target,
 - Kurangnya tenaga administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan keuangan dan peng-SPJ-an serta pelaporan.
- Solusi
 - Menumbuhkan kembali motivasi kerja melalui antara lain pemberian reward dan punishment
 - Memaksimalkan pegawai yang ada

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Juara Umum Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMMI
- Penyaji Terbaik Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII
- Penyaji Unggulan Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DP3AP2KB

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.**

- Kegiatan :

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Gender (SIGA

- 2) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3) Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

➤ **Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Kgiatan TP. PKK Kabupaten dan Dharma Wanita
- 2) Advokasi Jejaring Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara
- 3) Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA).
- 4) Fasilitasi Lomba dan peringatan dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga.
- 5) Sosialisasi UU Perlindungan Anak.
- 6) Advokasi dan Sosialisasi PUHA.
- 7) Penanganan KDRT dan Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.
- 8) Road show PUG se Kabupaten Jepara dan Advokasi ARG bagi SPM.

➤ **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

- **Kegiatan :**

- 1) Menunjang Kegiatan Fasilitasi Event Pemberdayaan Perempuan Oleh Organisasi Non Pemerintah
- 2) Peningkatan pemberdayaan perempuan dlm pembangunan (P3P) dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG) .

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 4, yaitu :

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Dari jumlah pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu sebanyak 58.502 orang, jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sebanyak 4.013 orang atau sekitar 6,85 %
2. Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas
Masalah pendidikan dasar sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara

- sebanyak 443.919 orang atau 99,82 % dari jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang mencapai 444.716 Orang.
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan
 Dari 58.502 angkatan kerja perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 5.733 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 9,79 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 11 org, S1 = 4 org, D3 = 4 org, SLTA = 3 org,
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) =6 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 org, Penata Muda (III/a) = 2 org, Pengatur Tk. I (II/d) = - org, Pengatur (II/c) = 1 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 org, Pengatur Muda (II/a) = 1 org.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.			
1	Pengembangan Sistem Informasi Gender (SIGA).	42,437,500	42,437,000
2	Perumusan Kebijakan PeningkKualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22,750,000	22,750,000
3	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi	32,137,000	32,112,000
Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.			
1	Fasilitasi Kgiatan TP. PKK Kabupaten dan Dharma Wanita	558,825,000	531,850,131

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Advokasi Jejaring Pengarusatamaan Gender di Kab Jepara	49,950,000	49,944,000
3	Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	25,550,000	25,550,000
4	Fasilitasi Lomba & peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga.	40,112,000	39,520,000
5	Sosialisasi UU Perlindungan Anak.	29,575,000	28,400,000
6	Advokasi dan Sosialisasi PUHA.	33,525,000	32,061,000
7	Penanganan KDRT dan Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.	204,787,000	191,185,000
8	Road show PUG se Kab Jepara & Advokasi ARG bagi SPM.	23,800,000	23,650,000
9	Pemberdayaan Forum Anak Menuju Kab Layak Anak.	31,700,000	31,400,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
1	Menunjang Kegiatan Fasilitasi Event Pemberdayaan Perempuan Oleh Organisasi Non Pemerintah	86,765,000	86,737,500

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia.

Sasaran Pembangunan Nasional saat ini diantaranya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomidan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. Sebagai bagian dari program pembangunan kependudukan, Keluarga Berencana (KB) memiliki makna sangat strategis , komprehensif dan fundamental dalam rangka tercapainya pengendalian penduduk, kesejahteraan serta pembangunan keluarga.

- **Masalah ,**

- Permasalahan terkait Bidang PP/ PA:
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak serta perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- **Kebijakan :**
 - Meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak
 - Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
 - Meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
 - Meningkatkan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan
 - Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
 - Menurunkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama usia subur
- **Program,** yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
 - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - Masih tingginya KDRT maupun kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara;
- Solusi, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan usaha-usaha pencegahan pernikahan dini dengan sosialisasi melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK KRR;
 - Menambahkan kegiatan dan materi untuk menggali potensi remaja, sehingga mampu mengembangkan diri dan akhirnya mereka tidak terjebak pada pernikahan dini;
 - Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak pendidikan formal untuk membentuk PIK KRR dengan melibatkan guru Bimbingan dan Konseling;

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak Kategori Pratama.
- Juara Favorit Duta Genre Putri Tingkat Nasional a.n Febby Cynthia.
- Anugerah Parahita Ekapraya Tk Utama
- Daffa Award untuk forum anak jepara kategori pelopor lingkungan utama

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DP3AP2KB

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Keluarga Berencana

- Kegiatan :

- 1) Penggerakan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA)
- 2) Kampung KB
- 3) Sosialisasi Desimilasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan
- 4) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Kependudukan
- 5) Pemberdayaan Koalisi Kependudukan dan fabsedu
- 6) Peningkatan Pendidikan Kependudukan bagi Masyarakat
- 7) Peningkatan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengendalian Kependudukan dan KB

- 8) Pendataan Keluarga KB/KS
- 9) Penunjang Kegiatan PLKB
- 10) Pelatihan Petugas Pelayanan Pasca Persalinan (Baru)
- 11) Sosialisasi Peran Serta Pria dalam ber KB dan Pembentukan Prio Utomo
- **Program Pelayanan Kontrasepsi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyediaan Obat dan Bahan Pendamping Alkon
 - 2) Pelayanan KB-KR
- **Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**
 - **Kegiatan :**
 - 1) KIE Program KB
- **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri.**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD, Akseptor Lestari,dan PKB/ PLKB
 - 2) Jambore Institusi Masyarakat
 - 3) Pemberdayaan Petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
- **Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Penunjang Kegiatan PIK Remaja
 - 2) Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- **Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Sosialisasi Pencegahan Resiko TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR
- **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT Bagi Kelompok UPPKS
 - 2) Pemberdayaan Kelompok UPPKS
 - 3) Pemberdayaan Kelompok TRIBINA Keluarga BKB, BK, BKL

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pengendalian penduduk merupakan permasalahan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya adalah :

1. Prevalensi Peserta KB Aktif

Pada tahun 2018, di Kabupaten Jepara terdapat 216.969 pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut, ada 136.841 pasangan yang menjadi peserta program KB aktif atau sekitar 63,07 %.

2. Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/Kelurahan

Di Kabupaten Jepara, ada 195 desa/kelurahan. Sedangkan PLKB/PKB sejumlah 48 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 0,25 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 11 org, S1 = 4 org, D3 = 4 org, SLTA = 3 org,
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) = 6 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 org, Penata Muda (III/a) = 2 org, Pengatur Tk. I (II/d) = - org, Pengatur (II/c) = 1 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 org, Pengatur Muda (II/a) = 1 org.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Keluarga Berencana.			
1	Pengembangan Sistem Inform Gender (SIGA)	42,437,500	42,437,000
2	Penggerakan Ke- langsungan Hidup Ibu, Bayi & Anak (KHIBA)	21,000,000	20,719,560
3	Kampung KB	57,750,000	57,750,000
4	Sosialisasi Desimilasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan	56,050,000	49,105,000
5	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Kependudukan	15,839,000	15,839,000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6	Pemberdayaan Koalisi Kependudukan dan fabsedu	21,450,000	21,449,500
7	Peningkatan Pendk Kependudukan bagi Masyarakat	22,200,000	19,600,000
8	Peningkatan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengendalian Kependudukan dan KB	29,375,000	26,695,500
9	Pendataan Keluarga KB/KS	77,350,000	73,184,000
10	Penunjang Kegiatan PLKB	43,625,000	42,941,000
11	Pelatihan Petugas Pelayanan Pasca Persalinan (Baru)	44,905,000	37,857,500
12	Sosialisasi Peran Serta Pria dlm berKB & Pembentukan Prio Utomo	31,500,000	31,125,000
Program Pelayanan Kontrasepsi			
1	Penyediaan Obat dan Bahan Pendamping Alkon	43,905,000	43,395,000
2	Pelayanan KB-KR	417,987,000	397,994,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			
1	KIE Program KB	37,825,000	37,124,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri.			
1	Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD, Akseptor Lestari,dan PKB/ PLKB	68,560,000	62,735,000
2	Jambore Institusi Masy	89,087,500	84,887,500
3	Pemberdayaan Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD)	208,965,000	208,258,500

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			
1	Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bg Rmj Penunjang Kegiatan PIK Remaja	32,500,000	32,499,206
2	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	313,700,000	307,290,000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			
1	Sosialisasi Pencegahan Resiko TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	45,750,000	44,847,500
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
1	Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT Bagi Kelompok UPPKS	38,525,000	38,525,000
2	Pemberdayaan Kelompok UPPKS	79,955,000	78,769,000
3	Pemberdayaan Kelompok TRIBINA Keluarga BKB, BK, BKL	108,257,000	108,033,205

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia.

Kinerja makro urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator diantaranya rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif. Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Jepara selama tahun 2018 tercatat sebanyak 151.979 peserta. Berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan, sebagian besar peserta KB aktif menggunakan Suntik sebagai metode kontrasepsi sebanyak 116.300 (76,59%). Selain itu beberapa alat kontrasepsi yang banyak diminati oleh peserta KB yaitu Pil

sebanyak 13.356 (8,78 %), Implant 16.137 (10,67%), MOW 2.694 (1,77%), IUD 2.358 (1,55%), Kondom 593 (0,39%), MOP 551 (0,36%). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia yang dimulai dari :

- **Masalah ,**

- Permasalahan terkait Bidang KS :
 - o Belum tersosialisasikan secara luas tentang KRR di seluruh desa di Kabupaten Jepara (195 desa)
 - o Belum terpenuhinya biaya operasional di kelompok BKR untuk remaja di setiap desa harus terbentuk Bina keluarga Remaja.
 - o Belum terbentuknya PIK jalur pendidikan dan masyarakat di setiap desa.
 - o Belum terakomodirnya pembentukan PIK di desa, dari 195 desa baru terbentuk 44 kelompok PIK.
 - o Belum terpenuhinya kegiatan operasional PIK jalur pendidikan dan masyarakat.
 - o Belum terpenuhinya operasional peningkatan kegiatan Tribina di masing–masing desa di Kabupaten Jepara.
 - o Belum terpenuhinya pelayanan konseling di jalur pemerintah dan masyarakat dengan minimnya tenaga konseling dan operasional anggaran sangat rendah.
 - o Pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan kompatibel dengan target yang belum tercapai.
- Permasalahan terkait Bidang KB dan Dalduk :
 - o Kurangnya media Advokasi KIE
 - o Tidak sinkronisasi data kependudukan dan KB.
 - o Rendahnya tingkat pendidikan.
 - o Masih banyaknya peserta KB non MKJP.
 - o Masih banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan.
 - o Masih tingginya angka DO.
 - o Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK.
 - o Masih kuatnya keyakinan masyarakat mengenai paham banyak anak banyak rejeki.
 - o Masih rendahnya tingkat kemakmuran (orang miskin banyak)

- **Kebijakan :**

- Menurunkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama usia subur

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber KB
- Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan keluarga sejahtera
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Keluarga Berencana.
 - Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
 - Program Pelayanan Konstrasepsi.
 - Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
 - Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
 - Program Peningkatan Pelayanan KB – KS.
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah :
 - Tingginya peserta KB Non MKJP di Kabupaten Jepara (84%);
 - Cakupan peserta KB yang belum merata di semua desa atau wilayah, yang dalam istilah kami, disebut desa legok KB;
 - Tingginya angka pernikahan dini yang berkontribusi pada kehamilan usia muda atau usia di bawah 21;
 - Keterbatasan jenis Alat Kontrasepsi (Alkon) IUD dilarenakan Kabupaten Jepara mengandalkan dropping alkon IUD dari BKKBN;
 - Belum terealisasinya pelayanan KB MKJP secara reguler di beberapa Faskes Tingkat Pertama karena keterbatasan tenaga medis yang terlatih;
 - Cakupan pelayanan KB yang dibiayai oleh BPJS masih sedikit;
 - Masih tingginya KDRT maupun kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara;
 - Belum bersinerginya kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dengan institusi pendidikan formal (sekolah, madrasah) sehingga kegiatan tersebut belum berjalan dengan

- optimal dan berkelanjutan;
- Keterbatasan akses kegiatan PIK KRR non akademik dikarenakan kegiatan harus berjalan di malam hari;
- Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang belum menggunakan KB MKJP, sehingga sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk ber-MKJP;
- Keterbatasan permodalan dan pemasaran UPPKS, sehingga setelah anggota UPPKS dilatih dan mulai membentuk usaha dapat berkembang menjadi unit usaha kecil yang mandiri.
- Solusi, diarahkan untuk :
 - Penekanan penggerakan kepada masyarakat tentang KB dengan alat kontrasepsi MKJP, dengan reward tertentu bagi yang menggunakan KB MKJP khususnya IUD;
 - Menambah personel Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sehingga cakupan peserta KB merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara;
 - Meningkatkan usaha-usaha pencegahan pernikahan dini dengan sosialisasi melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK KRR;
 - Menambahkan kegiatan dan materi untuk menggali potensi remaja, sehingga mampu mengembangkan diri dan akhirnya mereka tidak terjebak pada pernikahan dini;
 - Koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) untuk meminta tenaga kesehatan yang terlatih di Faskes pertama pelayanan KB khususnya untuk MKJP;
 - Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak pendidikan formal untuk membentuk PIK KRR dengan melibatkan guru Bimbingan dan Konseling;
 - Memberikan kemudahan akses atau memberikan media KIE gratis untuk anggota UPPKS yang bersedia ber- KB MKJP;
 - Bekerjasama dengan SKPD terkait mengenai masalah permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS, sehingga kelompok yang sudah terwadahi di DP3AP2KB diberikan perhatian lebih dalam mendapatkan fasilitas tersebut.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

1. Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak Kategori Pratama.
2. Juara Favorit Duta Genre Putri Tingkat Nasional a.n Febby Cynthia.
3. Anugerah Parahita Ekapraya Tk Utama

4. Daffa Award untuk Forum Anak Jepara kategori pelopor lingkungan utama

14. Urusan Perhubungan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERHUBUNGAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Kegiatan :

- 1) Pembuatan SIM Pelabuhan Penyeberangan
- 2) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Jepara
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
- 4) Pembuatan Marka Jalan
- 5) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
- 6) Pembangunan Halte
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
- 8) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
- 9) Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan
- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelabuhan Penyeberangan Jepara
- 11) Rehab Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara

➤ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
- 2) Pemeliharaan Marka Jalan
- 3) Rehab Shelter/halte
- 4) Pemeliharaan Traffic Light
- 5) Pemeliharaan Warning Light
- 6) Pemeliharaan RPPJ

➤ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kegiatan :

- 1) Operasional Patroli Kemanan dan Keselamatan Laut
- 2) Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan
- 3) Pemeliharaan Dermaga KMC Kartini I
- 4) Docking Kapal Patroli
- 5) Pembuatan Taman Lalu Lintas
- 6) Pembinaan Angkutan Umum

- 7) Pemeliharaan, Kalibrasi dan Tera Ulang Alat Uji Mekanik Kendaraan Bermotor
 - 8) Rehab Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 9) Operasional Terminal
 - 10) Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkungan Terminal Kelet
 - 11) Perawatan dan Upgrade SIM Angkutan dan SIM PKB
 - 12) Pengadaan Kompresor Angin
 - 13) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Terminal di Kab. Jepara
 - 14) Pengadaan fasilitas pendukung pengendalian dan pengawasan angkutan
- **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perawatan rambu laut
 - 2) Pengadaan rambu laut
 - 3) Rehap berat ponton
 - **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan
 - 2) Survey Kinerja Jaringan Jalan Di Kabupaten Jepara
 - 3) Pembuatan Zona Selamat Sekolah
 - 4) Pengadaan Alat Pendukung Keselamatan LLAJ
 - 5) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
 - 6) Car Free Day
 - **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Optimalisasi dan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum Ilegal
 - 3) Pembayaran Rekening PJU dan Penataan KWH Meter Jaringan Penerangan Jalan Umum Swadaya Yang di Legalkan
 - 4) Penyusunan Database dan DED PJU se Kabupaten Jepara
 - 5) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - 6) Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya di Kabupaten Jepara (Banprov)

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Urusan Perhubungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya adalah

- Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat yang ada adalah 786 buah untuk melayani sekitar 1.088.061 penumpang angkutan darat, sehingga capaian kinerja ini adalah sebesar 0,07 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 75 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 = 10 org, S1 = 14 org, D4 = 3 org, D3 = 7 org, SLTA = 35 org, SLTP = 3 org, SD = 2 org
 - Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina Tk I (Ivb) = 1 org, Pembina (IV/a) = 6 org, Penata Tk. I (III/d) =12 org, Penata (III/c) = 3 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 8 org, Penata Muda (III/a) = 8 org, Pengatur Tk. I (II/d) = 2 org, Pengatur (II/c) = 23 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 6 org, Pengatur Muda (II/a) = 2 org, I/d = 1 org, I/c = 2 org
- Jumlah pejabat Struktural : 16 orang
Jumlah pejabat fungsional : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
1	Pembuatan SIM Pelabuhan Penyeberangan	75.000.000	73.000.000
2	Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Jepara	150.000.000	148.685.000
3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	150.000.000	149.688.900
4	Pembuatan Marka Jaln	75.000.000	74.182.400
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	175.000.000	173.065.850

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6	Pembangunan Halte	75.000.000	72.623.300
7	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	130.000.000	129.265.000
8	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	75.000.000	74.088.000
9	Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan	150.000.000	148.400.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelabuhan Penyeberangan Jepara	75.000.000	74.650.000
11	Rehab Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara	74.675.000	74.161.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ			
1	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	49.518.000	48.799.800
2	Pemeliharaan Marka Jalan	50.000.000	49.377.150
3	Rehab Shelter/halte	50.000.000	49.749.850
4	Pemeliharaan Traffic Light	194.025.000	193.589.800
5	Pemeliharaan Warning Light	49.700.000	49.440.600
6	Pemeliharaan RPPJ	49.700.000	48.050.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
7	Operasional Patroli Kemanan dan Keselamatan Laut	42.937.500	34.779.000
8	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	99.675.000	99.408.000
9	Pemeliharaan Dermaga KMC Kartini I	76.350.000	75.150.000
10	Docking Kapal Patroli	30.000.000	29.175.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
11	Pembuatan Taman Lalu Lintas	950.000.000	818.907.600
12	Pembinaan Angkutan Umum	50.000.000	40.357.030
13	Pemeliharaan, Kalibrasi dan Tera Ulang Alat Uji Mekanik Kendaraan Bermotor	71.795.000	68.182.485
14	Rehab Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000	144.578.900
15	Operasional Terminal	437.155.000	405.145.900
16	Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkungan Terminal Kelet	150.000.000	148.487.900
17	Perawatan & Upgrade SIM Angktn & SIM PKB	50.000.000	42.333.200
18	Pengadaan Kompresor Angin	45.000.000	42.630.500
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Terminal di Kab. Jepara	300.000.000	295.848.600
20	Pengadaan Fasilitas Pendukung Pengendalian dan Pengawasan Angkutan	50.000.000	48.777.300
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Perawatan Rambu Laut	50.000.000	49.075.000
2	Pengadaan Rambu Laut	150.000.000	148.000.000
3	Rehab Berat Ponton	250.000.000	246.213.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
1	Pengendalian dan Pengawasan	175.000.000	174.830.276
2	Survey Kinerja Jaringan Jalan Di Kabupaten Jepara	40.000.000	39.762.500
3	Pembuatan Zona Selamat Sekolah	50.000.000	45.144.300

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
4	Pengadaan Alat Pendukung Keselamatan LLAJ	97.445.000	94.921.266
5	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas	50.000.000	49.360.640
6	Car Free Day	75.000.000	73.969.000
Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			
1	Optimalisasi dan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum	382.265.000	381.987.000
2	Monitoring dan Evaluasi Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum Ilegal	63.425.000	63.423.900
3	Pembayaran Rekening PJU dan Penataan KWH Meter Jaringan Penerangan Jalan Umum Swadaya Yang di Legalkan	18.189.525.000	17986.778.322
4	Penyusunan Database dan DED PJU se Kabupaten Jepara	99.525.000	97.375.900
5	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	1.075.550.000	1.068.942.469
6	Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya di Kabupaten Jepara (Banprov)	17.000.000.000	16123.773.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan perhubungan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan perhubungan melalui optimalisasi dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang mendukung pada peningkatan pelayanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran transportasi untuk mendorong pengembangan potensi daerah yang dimulai dari :

- **Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi urusan perhubungan adalah :**
 - Masih kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
 - Masih kurangnya kesadaran berlalu lintas
 - Pengguna jasa perhubungan masih kurang kesadaran dalam ikut menjaga fasilitas perlengkapan jalan.
- **Kebijakan, diarahkan untuk :**
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana serta fasilitas perhubungan yang berbasis pada pelayanan masyarakat.
 - Peningkatan peran transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan
 - Peningkatan kapasitas aparatur transportasi yang kompeten dan bertanggung jawab.
 - Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
- **Program, yaitu yang digunakan untuk pencapaian sasaran :**
 - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Program peningkatan pelayanan angkutan
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Keberadaan Angkutan Online
 - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ilegal
 - Kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas yang masih rendah

- Kendala pengelolaan perparkiran (pemilik toko melarang, lingkungan minta bagi hasil, juru parkir sudah tua, rebutan lahan titik parkir, dll)
- Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang parkir di tempat yang tidak seharusnya
- Solusi :
 - Pemda Jepara (Dishub) akan mengatur keberadaan angkutan online sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
 - Dishub bersama dinas/instansi terkait akan melakukan monitoring evaluasi dan penertiban lampu PJU ilegal
 - Sosialisasi pentingnya pengaturan jalan untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas
 - Sosialisasi perparkiran melalui fórum (TMMD, FGD, Petinggi/Lurah), sosialisasi langsung di lapangan pada juru parkir maupun pemilik lahan
 - Sosialisasi tempat parkir yang benar dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar sesuai aturan yang berlaku

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2018 Kategori Kabupaten Dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi Sebagai Pemenang Pilar 3 Pengendara Yang Berkeselamatan (Saver User)
- Sebagai Pemenang Pilar 5 Penanganan Pra & Pasca Kecelakaan (Pre and Crash Response)
- Sertifikasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor "Akreditasi B" yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Internet Acces Dedicated
- 2) Penunjang LPSE
- 3) Dashboard Assesment untuk Kepala Daerah
- 4) Pengelolaan Domain dan Aplikasi E-Gov Desa
- 5) Sistem Keamanan Informasi dan Jaringan

- 6) Pengembangan dan perawatan Aplikasi E-gov Kabupaten Jepara (lanjutan)
- 7) Pengembangan dan Pendampingan Legal Software
- 8) Sistem Integrasi data Kabupaten
- **Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengelolaan Media Center
- **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perawatan dan pemeliharaan jaringan intranet
 - 2) Pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi
 - 3) Perawatan Alat Komunikasi Radio Pemda
 - 4) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat
 - 5) Pertunjukan Media Tradisional
 - 6) Perawatan dan Perluasan Jaringan Telp VOIP ke Dinas/Instansi
 - 7) Local Traffic Management Center
 - 8) Peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak Server NOC Jepara
 - 9) Operasional Liputan
 - 10) Pembuatan Kalender 2019
 - 11) Pertemuan Forum Informasi Koordinasi dan Kehumasan (FKIK)
 - 12) Kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online
 - 13) Pengadaan Papan Baca
 - 14) Dialog interaktif di RSPD Kartini
 - 15) Pembuatan dokumentasi foto dan film
 - 16) Pelayanan Informasi
 - 17) Penempelan Kliping Koran
 - 18) Pembuatan dan pemasangan baliho
 - 19) Penunjang Kegiatan RSPD
 - 20) Penerbitan majalah Gelora Bumi Kartini
 - 21) Pengelolaan Website
 - 22) Jepara Photograph Competition
 - 23) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui spot dan dialog Radio [DBHCHT]
 - 24) Kolom Bupati di Media Cetak
 - 25) Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental
 - 26) Fasilitasi Kegiatan PWI
 - 27) Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
 - 28) Penerbitan Majalah Media Pelajar

29) Penunjang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

c. **Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika ada 2 IKK :

- 1. Web site milik Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Jepara sudah memiliki web site sebanyak 49.
- 2. Pameran/Expo
Sedangkan pameran expo selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu : Miratex Expo Mataram 2018, CJIBF Jakarta 2018, Bumi Kartini Expo, Javanese Creation, IFEX, Inacraft, Apkasi, Trade Expo Indonesia (TEI), Warisan, Gelar Produk Daerah, Kedutaan Expo.

d. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

- Jumlah pegawai : 34 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 11 orang, D3= 1 orang, SMA = 14 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 8 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 4 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 2 orang, Pengatur (II/c) = 6 orang, PengaturPengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

e. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
1	Internet Acces Dedicated	700.000.000	664.900.000,-
2	Penunjang LPSE	173.850.000	160.114.923,-
3	Dashboard Assesment untuk Kepala Daerah	47.420.000	42.370.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
4	Pengelolaan Domain & Aplikasi E-Gov Desa	33.775.000	24.332.106,-
5	Sistem Keamanan Informasi dan Jaringan	50.00.000,-	47.700.000,-
6	Pengembangan dan perawatan Aplikasi E-gov Kabupaten Jepara (lanjutan)	154.890.000,-	147.394.414,-
7	dan Pendampingan Legal Software	30.875.000,-	R 27.602.535,-
7	Sistim Integrasi data Kabupaten	113.415.000,-	107.268.900,-
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa			
1	Pengelolaan Media Center	32.500.000,-	29.850.839,-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
1	Perawatan dan pemeliharaan jaringan intranet	160.275.000,-	157.960.800,-
2	Pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi	84.870.000,-	81.968.374,-
3	Perawatan Alat Komunikasi Radio Pemda	39.450.000,-	38.900.000,-
4	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat	17.857.500,-	12.372.400,-
5	Pertunjukan Media Tradisional	47.250.000,-	46.614.535,-
6	Perawatan dan Perluasan Jaringan Telp VOIP ke Dinas/Instansi	0,-	0,-
7	Local Traffic Management Center	68.225.000,-	67.205.000,-
8	Peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak Server NOC Jepara	57.225.000,-	55.720.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
9	Operasional Liputan	30.300.000,-	30.300.000,-
10	Pembuatan Kalender 2019	30.000.000,-	30.000.000,-
11	Pertemuan Forum Informasi Koordinasi dan Kehumasan (FKIK)	42.500.000,-	42.247.235,-
12	Kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online	33.375.000,-	379.379.015,-
13	Pengadaan Papan Baca	35.000.000,-	34.750.000,-
14	Dialog interaktif di RSPD Kartini	31.150.000,-	28.317.000,-
15	Pembuatan dokumentasi foto dan film	82.500.000,-	80.232.084,-
16	Pelayanan Informasi	230.700.000,-	208.262.884,-
17	Penempelan Kliping Koran	49.682.000,-	49.647.017,-
18	Pembuatan dan pemasangan baliho	98.000.000,-	97.701.810,-
19	Penunjang Kegiatan RSPD	344.525.000,-	327.781.837,-
20	Penerbitan majalah Gelora Bumi Kartini	282.275.000,-	276.571.000,-
21	Pengelolaan Website	114.880.000,-	109.195.225,-
22	Jepara Photograph Competition	16.250.000,-	15.842.000,-
23	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui spot dan dialog Radio [DBHCHT]	51.000.000,-	50.247.526,-
24	Kolom Bupati di Media Cetak	60.500.000,-	59.745.681,-
25	Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental	10.000.000,-	9.990.000,-
26	Fasilitasi Keg PWI	29.242.500	Rp 29.032.100
27	Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati dan Sekda	39.750.000,-	39.701.635,-

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
28	Penerbitan Majalah Media Pelajar	39.050.000,-	38.693.810,-
29	Penunjang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	43.325.000,-	37.995.366,-

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya komunikasi dan informatika dengan dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:
 - Kinerja pemerintahan serta informasi pembangunan daerah belum optimal karena masyarakat kurang mengakses informasi publik.
 - Sarana dan parasarana informasi, komunikasi dan informatika yang dimiliki pemerintah daerah belum maksimal.
 - SDM yang membidangi serta menjalankan urusan informasi, komunikasi dan informatika masih kurang.
 - Dukungan teknologi kurang maksimal
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan akses infomasi publik di berbagai media terhadap kegiatan dan kinerja pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui tentang pembangunan yang sedang di kerjakan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan informasi, komunikasi dan informatika baik secara internal maupun eksternal.
 - Meningkatkan kinerja pegawai serta memberdayakan SDM yang membidangi informasi, komunikasi dan informatika secara maksimal, baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada.
 - Memaksimalkan dukungan teknologi yang sudah ada.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Pengembangan Data/Informasi

- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program Kerjasama dengan Media Massa
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya SDM operasional liputan sehingga informasi kinerja dan pembangunan pemerintah daerah belum optimal kepada masyarakat
 - Kurangnya SDM pengelola informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
 - Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar SDM pengelola komunikasi dan informatika
 - Kurangnya dukungan anggaran pemerintah daerah
- Solusi :
 - Memaksimalkan SDM yang sudah ada agar informasi kinerja dan pembangunan pemerintah daerah dapat optimal diterima oleh masyarakat
 - Memaksimalkan SDM yang sudah ada agar dapat melayani setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
 - Melakukan optimalisasi, sinkronisasi, dan meningkatkan koordinasi antar SDM yang ada
 - Mengoptimalkan anggaran yang sudah ada atau mengajukan dukungan anggaran yang diperlukan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

16. Urusan Pertanahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Koordinasi dan penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan**

- Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Pertanahan ada 3 IKK yaitu :

- 1. Luas Lahan Bersertifikat
Urusan pertanahan dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara. dari seluruh bidang tanah di Kabupaten Jepara yaitu ; 100.413,19 ha baru sekitar 28.279,55 ha yang bersertifikat atau sekitar 28,16 %.
- 2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Adapun kasus tanah yang muncul pada tahun 2018 adalah sebanyak 12 kasus dan dapat diselesaikan semuanya. Dengan demikian capaian kinerja cakupannya mencapai 100 %.
- 3. Penyelesaian Ijin Lokasi
Pada tahun 2018 terdapat 4 ijin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jepara dari 4 permohonan ijin lokasi. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 4 orang, S1= 4 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 2 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Koordinasi dan penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan			
1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	45.920.000	44.492.346

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Mengidentifikasi permasalahan
Mengidentifikasi permasalahan pertanahan yang ada.

- Kebijakan :
Kebijakan diarahkan untuk memberikan fasilitasi guna membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- Program :
Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan urusan pertanahan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Terbatasnya anggaran fasilitasi permasalahan pertanahan.
- Solusi :
Pemenuhan anggaran fasilitasi.

17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Desa
- 2) Penunjang Pendampingan Desa dan Tenaga Administrasi Pelaporan

➤ **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan LKMD
- 2) Updating Data dan Peningkatan Peran Pokjandal Posyandu
- 3) Fasilitasi Keikutsertaan Dalam Gelar Pameran Ekonomi Kerakyatan
- 4) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
- 5) Fasilitasi Pembuatan Sistem Informasi Desa (SID) dan Web Desa
- 6) Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

- **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengembangan Pasar Desa
 - 2) Fasilitasi Pengembangan UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa)
 - 3) Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG (Teknologi Tepat Guna) serta Pengembangan Posyantek
 - 4) Fasilitasi Pengembangan BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa)
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Data Swadaya Masyarakat
 - 2) Pengembangan Desa Mandiri Energi Biogas berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 3) Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4) Penyusunan Analisis Tingkat Kesulitan Geografis Desa
 - 5) Pembinaan dan Pengelolaan sarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) dan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)
 - 6) Penunjang Kegiatan TMMD, Karya Bhakti, TMKK dan KB Kes
 - 7) TMMD (BANPROV)
- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan APBDes
 - 2) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Desa)
 - 3) Fasilitasi Pelaksanan ADD dan DD
- **Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan**
 - **Kegiatan**
 - 1) Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada 2 IKK, yaitu :

1. PKK aktif

Dari 195 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jepara terdapat PKK aktif sejumlah 195 atau 100%.

2. Posyandu

Dari 1.122 posyandu yang berada di Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 terdapat 1.122 posyandu aktif. Sehingga capaian kinerjanya 100%.

d. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

- Jumlah Pegawai : 31 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 15 Orang, S1 sebanyak 10 Orang, SLTA sebanyak 6 Orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 4 orang, Penata Tk I (III/d) sebanyak 6 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 2 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 2 orang dan Pengatur Muda (II/a) sebanyak 2 orang.
- Pejabat Struktural : Eselon II.b = 1 orang, Eselon III.a = 1 orang, Eselon III.b = 2 Orang, Eselon IV.a = 9 Orang.

e. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
1	Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus Desa	33.789.000	33.756.700
2	Penunjang Pendampingan Desa & Tng Administrasi Pelaporan	612.470.000	603.970.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan LKMD	90.725.000	89.856.000
2	Updating Data dan Peningkatan Peran Pokjanal Posyandu	84.450.000	84.407.000
3	Fasilitas Keikutsertaan Dalam Gelar Pameran Ekonomi Kerakyatan	17.685.000	12.685.000
4	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	730.307.000	721.914.350

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Fasilitasi Pembuatan Sistem Informasi Desa (SID) dan Web Desa	25.700.000	25.621.400
6	Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	49.825.000	49.123.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
1	Pengembangan Pasar Desa	37.050.000	36.446.100
2	Fasilitasi Pengembangan UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan CPPD (cadangan Pangan Pemerintah Desa)	39.137.000	38.795.450
3	Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG (Teknologi Tepat Guna) serta Pengembangan Posyantek	79.250.000	79.232.950
4	Fasilitasi Pengembangan BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa)	76.150.000	76.148.812
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Penyusunan Data Swadaya Masyarakat	30.950.000	30.785.000
2	Pengembangan Desa Mandiri Energi Biogas berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.375.000	34.549.100
3	Penunjang Pelaks Prog Pemberdayaan Masy Desa	129.700.000	124.196.900
4	Penyusunan Analisis Tk Kesulitan Geografis Ds	57.600.000	57.295.000
5	Penunjang Kegiatan TMMD Karya Bhakti, TMKK dan KB Kes	R96.440.000	96.113.950
6	TMMD (BANPROV)	501.600.000	499.053.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
7	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) dan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)	33.475.000	33.474.650
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan APBDes	153.275.000	151.972.753
2	Evaluasi Pemberdayaan Masy (Lomba Desa)	33.685.000	32.967.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan ADD dan DD	86.080.000	84.104.000
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan			
1	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	34.925.000	34.898.200

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Jepara, dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan perdesaan dan mendorong terciptanya pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga/Kelompok Masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa.

- Masalah yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan terbatasnya modal usaha & pemasaran hasil produk
 - Belum optimalnya upaya peningkatan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Jepara

- Kebijakan :
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Membina dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa melalui BUMDesa
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis pelayanan dan keterpaduan program pembangunan perdesaan
- Program :
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara terhadap PMKS
 - Rendahnya cakupan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik dan mental
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap eks penyandang sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
 - Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Belum meratanya informasi pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/masyarakat
 - Belum optimalnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan terbatasnya modal usaha & pemasaran hasil produksi
 - Belum optimalnya upaya peningkatan aparaturnya pemerintah desa di Kabupaten Jepara
- Solusi :
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri

- Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
- Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
- Membina dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa melalui BUMDesa
- Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis pelayanan dan keterpaduan program pembangunan perdesaan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

18. Urusan Sosial

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

- **Kegiatan :**

- 1) Asistensi Keluarga Miskin (AKM) menunjang Kesejahteraan Sosial
- 2) Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Pelatihan dan Ketrampilan Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pemberdayaan Masyarakat (DBHCHT)
- 4) Menunjang Kegiatan Pelayanan PMKS

➤ **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 2) Usaha Kesejahteraan sosial bagi penyandang eks kusta
- 3) Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik

➤ **Program Pembinaan Anak Terlantar**

- **Kegiatan :**

- 1) Bimbingan dan Latihan Ketrampilan Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak Kurang Beruntung di dalam dan Luar Panti (DBHCHT)

- 2) Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
 - 3) Jambore Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Anak Panti
- **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Menunjang Hari Disabilitas Internasional (HDI)
 - **Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Bimbingan motivasi lanjut usia di panti jompo dan lanjut usia terlantar
 - 2) Menunjang penanganan anak yatim, yatim piatu dan anak panti asuhan
 - 3) Pembinaan dan Penanganan Serta Penyantunan Anak Dalam Panti
 - 4) Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)
 - **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
 - **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - 3) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Orsos dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dibidang Kesos
 - 4) Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (DBHCHT)
 - 5) Pembentukan dan Pembinaan Terhadap Karang Taruna, Paguyuban PSM, IPSM dan FPKT Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jepara
 - 6) Fasilitasi Kegiatan PWRI Cabang Jepara
 - 7) Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Jepara
 - 8) Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), Kartu Indonesia

- Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung
- 9) Fasilitasi Kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Jepara
 - 10) Fasilitasi Kegiatan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kabupaten Jepara
 - 11) Pengembangan Sistem Informasi Desa (BANPROV)
- **Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang**
- **Kegiatan :**
- 1) Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Veteran dan Janda Veteran
 - 2) Bimbingan dan Penyuluhan Sosial dalam rangka Pelestarian Nilai Kepahlawanan bagi Pelajar/Generasi Muda
 - 3) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya yaitu :

1. Sarana Sosial
Di Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 terdapat sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll sebanyak 33 buah.
2. Prosentase Penyandang Cacat
Dari 83 penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang ada di Jepara, semuanya telah menerima jaminan sosial. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %
3. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pada tahun 2018, di Kabupaten Jepara dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan yaitu sebanyak 176.791 orang, baru bisa diberikan bantuan social sebanyak 46.176 orang atau 26,12 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 31 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 15 Orang, S1 sebanyak 10 Orang, SLTA sebanyak 6 Orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 4 orang, Penata Tk I (III/d)

sebanyak 6 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 2 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 2 orang dan Pengatur Muda (II/a) sebanyak 2 orang.

- Pejabat Struktural : Eselon II.b = 1 orang, Eselon III.a = 1 orang, Eselon III.b = 2 Orang, Eselon IV.a = 9 Orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Asitensi Keluarga Miskin (AKM) menunjang Kesejahteraan Sosial	29.360.000	28.865.000
2	Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	747.625.000	746.487.761
3	Menunjang Kegiatan Pelayanan PMKS	142.700.000	139.876.000
4	Pelatihan dan Ketrampilan Anggota Kube dalam rangka pemberdayaan Masyarakat (DBHCHT)	450.000.000	445.596.837
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	113.090.000	111.330.000
2	Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Eks Kusta	70.650.000	70.423.000
3	Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik	62.600.000	58.168.708

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pembinaan Anak Terlantar			
1	Bimbingan dan Latihan Ketrampilan Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak Kurang Beruntung di dalam dan Luar Panti (DBHCHT)	325.000.000	323.166.500
2	Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum	18.787.000	18.787.000
3	Jambore Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Anak Panti	40.062.000	39.630.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			
1	Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Menunjang Hari Disabilitas Internasional (HDI)	189.175.000	187.355.396
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo			
2	Bimb motivasi lanjut usia di panti jompo dan lanjut usia	111.705.000	111.302.000
3	Pemb & Penanganan Serta Penantuan Anak dlm Panti	135.255.000	134.769.000
4	Fasilitasi KOMDA LANSIA	36.250.000	32.808.000
5	Menunjang Penanganan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Anak Panti Asuhan	86.525.000	86.454.500
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba & Penyakit Sosial Lainnya)			
1	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	35.800.000	35.650.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	303.800.000	303.728.000
2	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.750.000	19.168.000
3	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Orsos dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dibidang Kesos	29.250.000	29.074.500
4	Pelatihan Kemampuan & Ket Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dlm Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (DBHCHT)	125.000.000	119.952.500
5	Pembentukan dan Pembinaan Terhadap Karang Taruna, Paguyuban PSM, IPSM dan FPKT Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jepara	118.400.000	111.689.000
6	Fasilitasi Kegiatan PWRI Cabang Jepara	17.170.000	16.986.500
7	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Jepara	22.050.000	21.909.000
8	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu	125.927.000	123.513.766

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Keluarga Sejahtera (KKS) serta kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung		
9	Fasilitasi Kegiatan Pekerja Sosial Masy (IPSM) Kab Jepara	18.550.000	14.829.167
10	Fasilitasi Keg Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kab Jepara	35.050.000	32.550.000
11	Pengembangan Sistem Informasi Desa (BANPROV)	62.790.000	62.650.000
Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang			
1	Penyelenggaraan Bimbingan Sos & Peningk Kesejahteraan bagi Veteran dan Janda Veteran	24.675.000	23.550.000
2	Bimbingan dan Penyuluhan Sosial dalam rangka Pelestarian Nilai Kepahlawanan bagi Pelajar/ Generasi Muda	12.970.000	12.255.000
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara	64.230.000	63.546.850

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Jepara, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Masalah yang dihadapi adalah:
 - Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara terhadap PMKS
 - Rendahnya cakupan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik dan mental

- Belum optimalnya pembinaan terhadap eks penyandang sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
- Kebijakan :
 - Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana.
- Program :
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara terhadap PMKS
 - Rendahnya cakupan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik dan mental
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap eks penyandang sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
 - Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Belum meratanya informasi pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/masyarakat
 - Belum optimalnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan terbatasnya modal usaha & pemasaran hasil produksi

- Belum optimalnya upaya peningkatan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Jepara
- Solusi :
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Membina dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa melalui BUMDesa
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis pelayanan dan keterpaduan program pembangunan perdesaan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

19. Urusan Budaya

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Nilai Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Seni dan Budaya

➤ **Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Museum RA Kartini, BCB dan Benda Bersejarah
- 2) Apresiasi Perfilman Jepara
- 3) Pembinaan penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Pendataan, pembinaan, pemeliharaan, sosialisasi dan penggantian BCB
- 5) Gebyar Kartini
- 6) Pengadaan Koleksi Ukir Jepara
- 7) Pelestarian Budaya Tradisional
- 8) Lanjutan Penataan Lingkungan Museum R.A. Kartini

➤ **Program Pengembangan Keragaman Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Pentas Duta Seni di TMII

- 2) Fasilitasi Kegiatan Kesenian, Pentas Hiburan, Kesenian Tradisional, dan Festival serta lomba di Bidang Kesenian
- **Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**
- **Kegiatan :**
- 1) Festival dan Parade Seni Budaya
 - 2) Pemeliharaan dan Perawatan Gedung DKD Kabupaten Jepara
 - 3) Operasional Sarana Prasarana dan Obyek Wisata di Karimunjawa
 - 4) Event Sail Indonesia
 - 5) Dukungan Event Budaya se Jawa Tengah
 - 6) Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah (DKD
 - 7) Fasilitasi Pengembangan Lintas Budaya di Karimunjawa

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kebudayaan, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya ada 3 yaitu :

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Sepanjang tahun 2018, Pemerintah kabupaten Jepara telah menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 11 kali.
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki 1 sarana penyelenggaraan seni budaya.
3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 40 buah, ada 5 buah yang sudah dilestarikan atau sebesar 12,5%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 34 orang
- Kualifikasi pendidikan :
S2 = 12 orang, S1 = 6 orang, D3 = 6 orang, D1 = 0 orang, SLTA = 9 orang, SMP = 1.
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 7 orang, Penata Tk I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk I (III/b) : 6 orang, Penata Muda (III/a) : 7 orang, Pengatur Tk I (II/d) : 1 orang, Pengatur

(II/c) : 2 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Nilai Budaya			
1.	Fasilitasi Seni dan Budaya	1.209.737.000	1.206.867.480
Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya			
1.	Pemeliharaan Museum RA Kartini, BCB & Benda Bersejarah	90.912.000	82.792.809
2.	Apresiasi Perfilman Jepara	1.500.000	0
3.	Pembinaan penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME	21.000.000	20.635.840
4.	Pendataan, pembinaan, pemeliharaan, sosialisasi dan penggantian BCB	93.400.000	81.066.440
5.	Gebyar Kartini	110.000.000	108.682.500
6.	Pengadaan Koleksi Ukir Jepara	40.000.000	39.890.000
7.	Pelestarian Budaya Tradisional	873.202.000	862.004.250
8.	Lanjutan Penataan Lingkungan Museum R.A. Kartini	200.000.000	198.250.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
1.	Pentas Duta Seni di TMII	230.000.000	222.908.825
2.	Fasilitasi Kegiatan Kesenian, Pentas Hiburan, Kesenian Tradisional, dan Festival serta lomba di Bidang Kesenian	719.125.000	610.066.535

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya			
1.	Festival dan Parade Seni Budaya	109.900.000	109.712.500
2.	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung DKD Kab Jepara	22.018.000	20.445.070
3.	Operasional Sarana Prasarana dan Obyek Wisata di Karimunjawa	130.398.000	123.181.951
4.	Event Sail Indonesia	125.000.000	111.217.872
5.	Dukungan Event Budaya se Jateng	36.500.000	36.425.000
6.	Fasilitasi Dewan Kes Daerah (DKD)	18.500.000	6.974.000
7.	Fasilitasi Pengembangan Lintas Budaya di Karimunjawa	68.430.000	66.570.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana, sumber daya manusia pelaku wisata dan seni / budaya yang berujung pada meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Jepara baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah :
 - Kualitas sumber daya bidang seni / budaya masih rendah.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung kepariwisataan
 - Meningkatkan kualitas sumber daya bidang seni / budaya
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program pengembangan nilai budaya.
- Program pengelolaan kekayaan nilai budaya.
- Program pengelolaan keragaman Budaya.
- Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Terlalu banyak kegiatan / event budaya dan pariwisata yang dapat diikuti baik lokal maupun nasional dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.
- Solusi
 - Mengikuti sebagian kegiatan / event yang dapat memberikan nilai tambah (benefit) paling besar bagi kemajuan kepariwisataan Jepara.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

20. Urusan Statistik

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyusunan Data Statistik Sektoral Berbasis Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Statistik ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Kebutuhan data statistik sangat diperlukan dalam pembangunan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara telah menyusun Buku "Jepara Dalam Angka" pada setiap tahun anggarannya meskipun masih terdapat keterlambatan dalam penerbitan.

2. Buku “PDRB Kabupaten”
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan dalam perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara telah menyusun “Buku PDRB” dalam setiap tahunnya.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 34 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 11 orang, D3= 1 orang, SMA = 14 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 8 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 4 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 2 orang, Pengatur (II/c) = 6 orang, PengaturPengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah			
1	Penyusunan Data Statistik Sektoral Berbasis Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara	227.650.000	212.393.185

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Perencanaan pembangunan urusan statistik di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya dengan dimulai dari :
- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik antara lain :
 - SDM yang membidangi serta menjalankan urusan statistik masih kurang.
 - Banyak data statistik yang masih tumpang tindih

- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kinerja pegawai serta memberdayakan SDM yang membidangi urusan statistik baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada.
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal lainnya
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya SDM pengelola data statistik
 - Kurangnya sinkronisasi data antar instansi
- Solusi :
 - Memaksimalkan SDM yang sudah ada
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data statistik antar instansi pemerintah

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

21. Urusan Kearsipan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**
 - **Kegiatan :**
 - 1) BinteK dan Pembinaan Kearsipan
 - 2) Publikasi Kearsipan
 - 3) Pembinaan arsip bagi BUMD/ organisasi/ koperasi/ swasta/ tempat ibadah

➤ **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Publik**

- **Kegiatan :**

- 1) Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 2) Pembenahan Arsip OPD dan UPT OPD
- 3) Pembenahan Arsip Desa

➤ **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Penelusuran Arsip Bernilai Guna Tinggi
- 2) Penyelamatan, Pengamanan dan Pelestarian Arsip Daerah
- 3) Pengadaan Peralatan Teknis Kearsipan
- 4) Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dokumen/Arsip Pertanahan Desa/Kelurahan
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 6) Penyusutan Arsip
- 7) Pengembangan Arsip Alih Media
- 8) Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Kearsipan, Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) IKK-nya ada 2, yaitu :

1. Penerapan Pengelola Arsip
Dari 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara, sudah semuanya menerapkan pengelolaan arsip secara baku, atau nilai IKK-nya sudah 100%.
2. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan
Pada tahun 2018, Kabupaten Jepara telah melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu sebanyak 6 kali.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 26 orang
- Kualifikasi pendidikan :
Kualifikasi pendidikan : S2= 4 orang, S1= 6 orang, D3= 6 orang, D2 = - orang, D1 = - orang, SLTA= 9 orang
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang ,Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) =3 orang, Penata Tk I (III d) 5 orang, Penata (IIIc) 3 orang, Penata Muda Tk I (IIIb) 3 orang, Penata Muda (III a) 6 orang, Pengatur

Tk I (II d) ada 2 orang, Pengatur (II c) 1 orang, Pengatur Muda Tk I (II b) 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			
1	Sosialisasi Perda ttg Penyelenggaraan Kearsipan	12.000.000	11.278.000
2	Pembenahan Arsip OPD dan UPT OPD	29.009.000	28.642.400
3	Pembenahan Arsip Ds	18.789.000	18.334.200
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Daerah			
1	Penelusuran Arsip Bernilai Guna Tinggi	23.715.000	23.059.900
2	Penyelamatan, Pengamanan dan Pelestarian Arsip Daerah	36.825.000	36.735.000
3	Pengadaan Peralatan Teknis Kearsipan	11.250.000	9.985.000
4	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dokumen/Arsip Pertanahan Ds/Kel	18.750.000	17.578.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	157.280.000	154.795.400
6	Penyusutan Arsip	8.750.000	8.630.000
9	Pengembangan Arsip Alih Media	14.575.000	13.528.000
10	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif	8.852.000	8.536.600

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan adalah:
 - Tidak ada SDM yang secara khusus mengelola arsip
 - Tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan arsip
 - Tidak tersedianya sarana dan prasarana kearsipan
 - Tidak ada ruang penyimpanan arsip
 - Kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan.
 - Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
 - Pengembangan kearsipan dan perpustakaan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah.
 - Kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan.
 - Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya Arsip.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan pengelolaan arsip pada OPD / UPT OPD / Kecamatan / Desa / Kelurahan / Sekolah / BUMN / Organisasi
 - Memfasilitasi aplikasi sistem kearsipan berbasis TIK bagi OPD, Dinas/Instansi
 - Mengoptimalkan bimbingan teknis pengelolaan arsip
 - Mengoptimalkan layanan kearsipan untuk diakses masyarakat
 - Mengoptimalkan pameran kearsipan
 - Meningkatkan upaya Penelusuran, penyelamatan ,pelestarian dan pengamanan dokumen arsip bernilai guna
 - Meningkatkan cakupan jumlah arsip yang diselamatkan.
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Terwujudnya tertib arsip pada OPD / UPT / Kecamatan / Desa / Kelurahan/ Sekolah / BUMN / BUMD / Organisasi.
 - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Program Pengembangan Kearsipan Daerah
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana prasarana yang digunakan di Kearsipan dan Perpustakaan cukup memadai, ruang layanan nyaman dilengkapi AC serta terdapat fasilitas Wi-Fi Area free akses, kondisi sarana prasarana yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara secara keseluruhan juga baik, karena terdapat anggaran pemeliharaan sarana prasarana setiap tahun.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan Urusan Kearsipan.
 - Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan.
 - Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan
 - Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah
 - Rendahnya minat masyarakat dalam mengakses arsip, terutama arsip yang memiliki nilai historis.
- Solusi :
 - Meningkatkan SDM Arsiparis melalui memperbanyak kegiatan – kegiatan pelatihan, bimbingan teknis.
 - Melakukan evaluasi guna menyusun konsep pembinaan kearsipan yang efektif.
 - Meningkatkan sarana prasarana kearsipan dan penambahan anggaran guna pengembangan kearsipan.
 - Melaksanakan upaya promosi pelayanan kearsipan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat “Best of The Best” Perpustakaan Daerah Kabupaten / Kota terbaik se Indonesia.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat “Perpustakaan Terbaik” se Indonesia dalam melakukan Transformasi perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

22. Urusan Perpustakaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

- Kegiatan :

- 1) Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Daerah dan Bantuan Untuk Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah
- 2) Pelayanan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, Warung Baca, Taman Baca dan Rumah Belajar
- 3) Pameran Buku
- 4) Lomba dan Promosi Perpustakaan
- 5) Pengolahan dan pelestarian koleksi perpustakaan daerah
- 6) Bintek Perpustakaan
- 7) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan organisasi kepastakawanan
- 8) Pengelolaan otomasi Perpustakaan
- 9) Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa Program Perpustakaan Seru
- 10) Seminar nasional perpustakaan dan bedah buku
- 11) Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perpustakaan, ada 2 IKK, yaitu :

1. Koleksi Buku

Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Jepara, melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki koleksi buku sejumlah 82.936 eksemplar dengan 39.923 judul buku atau capaian IKK-nya sebesar 48,14%

2. Pengunjung Perpustakaan

Dalam perkembangannya, perpustakaan yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara bukan lagi sekedar sebagai tempat unyuk meminjam buku saja, tetapi sudah menjadi tempat untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Selama tahun 2018, dari 1.223.198 orang penduduk Jepara, populasi yang harus dilayani yaitu sebanyak 860.596 orang. Sedangkan masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 168.527 orang atau 19,6 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 26 orang
- Kualifikasi pendidikan :
Kualifikasi pendidikan : S2= 4 orang, S1= 6 orang, D3= 6 orang, D2 = - orang, D1 = - orang, SLTA= 9 orang
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang ,Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) =3 orang, Penata Tk I (III d) 5 orang, Penata (IIIc) 3 orang, Penata Muda Tk I (IIIb) 3 orang, Penata Muda (III a) 6 orang, Pengatur Tk I (II d) ada 2 orang, Pengatur (II c) 1 orang, Pengatur Muda Tk I (II b) 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
1	Pengadaan Bahan Pustaka utk Perpusda & Bantuan Utk Perpus Masyarakat & Sekolah	236.330.000	234.335.000
2	Pelayanan Perpus Umum & Perpustakaan Keliling, Warung Baca, Taman Baca dan Rumah Belajar	319.207.000	258.463.498
3	Pameran Buku	57.500.000	53.729.290
4	Lomba dan Promosi Perpustakaan	44.150.000	43.362.500
5	Pengolahan dan pelestarian koleksi perpustakaan daerah	26.725.000	26.595.000
6	Bintek Perpustakaan	42.950.000	41.619.000
7	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan organisasi kepustakawanan	21.876.000	21.542.000
8	Pengelolaan otomasi Perpustakaan	65.925.000	63.132.160

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
9	Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa Program Perpus Seru	113.337.000	108.225.000
10	Seminar nas perpus dan bedah buku	57.912.000	53.729.290
11	Sosialisasi Perda ttg Penyelenggaraan Perpustakaan	69.912.000	68.950.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan dan Perpustakaan adalah:
 - Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
 - Pengembangan kearsipan dan perpustakaan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah.
 - Budaya baca masyarakat Kabupaten Jepara masih rendah
 - Kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan.
 - Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan pengelolaan arsip pada OPD / UPT OPD / Kecamatan / Desa / Kelurahan / Sekolah / BUMN / Organisasi
 - Memfasilitasi aplikasi sistem kearsipan berbasis TIK bagi OPD, Dinas/Instansi
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan pembinaan serta pengembangan perpustakaan berbasis TIK
 - Memfasilitasi Bimbingan teknis Perpustakaan serta promosi perpustakaan
 - Menambah Jumlah bahan bacaan dan koleksi lainnya di perpustakaan

- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan urusan perpustakaan baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan Urusan Perpustakaan :
 - Budaya literasi masyarakat masih rendah.
 - Pengembangan minat dan kebiasaan membaca belum menjadi prioritas di Kecamatan, Desa dan Sekolah sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya Perpustakaan Masyarakat, Desa, Kecamatan, Tempat Ibadah, Khusus, dan Sekolah, ditambah lagi belum adanya anggaran untuk pengelolaan perpustakaan.
 - Sarana dan prasarana perpustakaan serta kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan masih kurang.
- Solusi :
 - Pengembangan perpustakaan sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
 - Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan dan penambahan anggaran guna pengembangan perpustakaan.
 - Meningkatkan SDM perpustakaan melalui memperbanyak kegiatan – kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan perpustakaan dan pengelola perpustakaan.
 - Melaksanakan lomba – lomba dan promosi perpustakaan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

b) Ringkasan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERIKANAN

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelelangan Ikan
 - 2) Peningkatan Sanitasi Pelelangan Ikan
 - 3) Peningkatan Promosi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan
 - 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat
 - 5) Pelatihan Pengolahan dan Bantuan Peralatan Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan Kab Jepara
 - 6) Pemberdayaan Pembudidaya Rumput Laut dan Kerang Mutiara
- **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitasi Alat Pengamanan Bagi Nelayan
 - 2) Penanganan Nelayan Korban Bencana Alam Laut
 - 3) Pemberdayaan Nelayan Melalui Pelatihan Teknis
 - 4) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
 - 5) Pemasangan Rumah Ikan
 - 6) Peningkatan Kesadaran Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Produk Pengolahan Hasil Perikanan
 - 2) Peningkatan Jalan Produksi TPI Pailus
- **Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 - 2) Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)
- **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan dan Optimalisasi BBI dan BBU
 - 2) Pengembangan Pakan Mandiri Melalui Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)
 - 3) Pengembangan Budidaya Air Tawar
 - 4) Pengembangan Budidaya Air Payau
 - 5) Pengembangan Backyard Hatchery (HSRT)
 - 6) Pengembangan Mina Padi Di Kab. Jepara

7) Bantuan Saprodi Perikanan Budidaya

➤ **Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya**

- **Kegiatan :**

1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI/BBU

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dinilai berdasarkan 2 IKK, yaitu :

1. Produksi Perikanan

Kabupaten Jepara mempunyai wilayah laut dan darat, sehingga jumlah produksi ikan yang diperoleh selama tahun 2018 sebesar 29,067,75 ton melebihi target daerah yaitu 28.987,78 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,27 %.

2. Konsumsi Ikan

Kenaikan produksi ikan dibarengi pula dengan kenaikan jumlah konsumsi ikan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Jepara adalah 22,10 kg/kapita/th melebihi target daerah sebesar 20,5 kg/kapita/th jadi indikator konsumsi ikan sebesar 107,80 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 31 orang

- Kualifikasi pendidikan

S2 : 6 orang, S1: 15 orang, D4: 1 orang, D3: 1 orang, SLTA : 7 orang, SMP : 1 orang

- Pangkat dan Golongan :

Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IVb) : 1 orang, Pembina (IVa) : 4 orang, Penata Tk.I (IIIId) : 11 orang, Penata (IIId) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (IIId) : 4 orang, Penata Muda (IIIa) : 2 orang, Pengatur Tk.I (IIId) : 1 orang, Pengatur (IIc) : 2 orang, Juru (I/d) : 1 orang,

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelelangan Ikan	1.600.000.000	1.585.922.438
2	Peningkatan Sanitasi Pelelangan Ikan	428.875.000	423.402.156
3	Peningkatan Promosi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan	213.375.000	197.986.659
4	Fas Pengembangan Usaha Garam Rakyat	69.475.000	61.314.136
5	Pelatihan Pengolahan & Bantuan Peralatan Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan Kab Jepara	69.500.000	59.197.024
6	Pemberdayaan Pem budidaya Rmpt Laut & Kerang Mutiara	105.675.000	105.263.600
Program Pengembangan Perikanan Tangkap			
8	Fasilitasi Alat Pengamanan Bagi Nelayan	72.500.000	28.928.400
9	Penanganan Nelayan Korban Bencana Alam Laut	66.300.000	66.300.000
10	Pemberdayaan Nelayan Melalui Pelatihan Teknis	68.150.000	68.150.000
11	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil	73.900.000	70.990.000
12	Pemasangan Rumah Ikan	74.400.000	-
13	Peningkatan Kesadaran Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	53.585.000	53.476.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			
16	Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Produk Pengolahan Hasil Perikanan	33.825.000	31.845.000
21	Peningkatan Jalan Produksi TPI Pailus	419.050.000	410.576.000
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air Tawar			
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya	643.595.000	640.105.000
24	Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	87.525.000	86.125.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan			
28	Peningkatan & Opti malisasi BBI & BBU	145.612.500	144.702.781
29	Pengembangan Pakan Mandiri Melalui GERPARI	30.100.000	29.490.000
30	Pengembangan Budidaya Air Tawar	-	-
31	Pengembangan Budidaya Air Payau	-	-
32	Pengembangan Backyard Hatchery (HSRT)	30.825.000	27.773.000
33	Pengembangan Mina Padi Di Kab. Jepara	-	-
34	Bantuan Saprodi Perikanan Budidaya	187.850.000	186.965.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Proses Perencanaan pembangunan Perikanan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan guna meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :
- Identifikasi permasalahan :
Permasalahan yang masih dan akan terus dihadapi pada sector perikanan adalah :

- Penurunan Daya Dukung Lingkungan Budidaya terutama pada kawasan Pertambakan (budidaya air payau) terutama di Kec. Kedung
- Tingkat SDM pelaku perikanan yang masih rendah yang terus diupayakan peningkatan kualitas SDM dari tahun ke tahun
- Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diarahkan :
 - Mengupayakan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, optimal, dan efektif.
 - Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
 - Mengupayakan mengembangkan sisten hukum, mekanisme hukum dan kelembagaan secara proporsional.
 - Mengupayakan peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.
 - Mengupayakan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan SDM perikanan.
 - Mengupayakan penerapan iptek dan manajemen profesional pada setiap rantai usaha bidang perikanan
 - Mengupayakan Rerehabilitasi Ekosistem perairan tawar.
 - Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan untuk pelayanan masyarakat
 - Mengupayakan peningkatan pemanfaatan sistem informasi perikanan secara terpadu (SIPT)
 - Mengupayakan menanamkan wawasan perikanan pada seluruh masyarakat, utamanya generasi muda.
 - Mengupayakan mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi pasar perikanan.
- Program yang dilaksanakan sebagai penjabaran kebijakan dan pencapaian sasaran :
 - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
 - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan urusan perikanan cukup baik dan memadai

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Pelaksanaan kegiatan bantuan yang menyangkut bibit/pakan sangat tergantung dengan musim sehingga waktu pelaksanaan menyesuaikan musim.
 - Sosiokultur di masyarakat yang bisa memicu konflik antar kelompok dalam penyaluran bantuan sarana prasarana penangkapan terutama kelompok-kelompok nelayan.
 - Aturan Mekanisme revolving yang berbenturan antara pusat dengan daerah
 - Secara makro permasalahan pada sektor perikanan yang perlu dengan penanganan dengan serius dan terus menerus adalah : penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menurunnya daya dukung kawasan pertambakan, SDM masyarakat perikanan.
- Solusi
 - Jadwal ulang terhadap pelaksanaan pemberian bantuan bibit dan pakan di tahun-tahun mendatang.
 - Diharapkan ada tindak lanjut dari permasalahan yang sudah terjadi.
 - Sikap bijaksana dan pembinaan terus menerus dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

2. Urusan Pangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

- Kegiatan :

- 1) Pameran Produk unggulan pertanian dan peternakan
- 2) Menunjang Agroexpo, Festival Jateng dan Promosi Hasil Perkebunan

- 3) Pengembangan Penanganan Pasca Panen dan Sekolah Lapang Pengolah Hasil Perkebunan (SLPHP)
- **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Sekolah lapang tanaman hortikultura
 - 2) Pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan
 - 3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
 - 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi P3A
 - 5) Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Organik
 - 6) Pembinaan dan Penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)
 - 7) Validasi Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
 - **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Produksi dan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pendampingan PUAP
 - 3) Membangun Partisipasi Petani dalam Asuransi Tani
 - 4) Menunjang Pelaksanaan Upsus Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka mendukung swasembada pangan
 - 5) Pemberdayaan Petani Hortikultura
 - 6) Pengembangan Tanaman Perkebunan Unggulan dan Potensial di Kab. Jepara
 - 7) Fasilitasi Pembenihan, Pembibitan Pertanian, Peternakan
 - 8) Pelestarian Komoditas Hortikultura Unggul Kabupaten Jepara
 - 9) Pembangunan Sumber Sumber Air Mendukung Pertanian (DAK REGULER)
 - **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**
 - **Kegiatan**
 - 1) Menunjang Kegiatan Penyuluh DKPP
 - 2) Pendampingan THL-TBPP
 - 3) Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Validasi Data Kelompok Tani

- 4) Pembinaan Organisasi Profesi Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Pertanian tingkat pencapaian kinerjanya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK):

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar
Produktivitas tanaman padi pada tahun 2018 sebesar 53,12 kwintal /ha atau 0,523 ton/ha, ini diperoleh dari jumlah produksi luas areal tanaman padi 44.579 ha.
2. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Sektor Pertanian memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebesar 14 % atau Rp. 3.606.395,02,- dari total PDRB Rp. 25.865.317,87,-

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 124 orang
- Kualifikasi pendidikan
Sekolah Dasar (1 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (23 orang); Diploma 3 (22 orang); Diploma IV (1 orang) Strata 1 (63 orang); Strata 2 (15 orang).
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (3 orang); Pembina/IV-a (19 orang); Penata Tk I/III-d (16 orang); Penata/III-c (20 orang); Penata Muda Tk I/III-b (13 orang); Penata Muda/III-a (25 orang); engatur Tk I/II-d (8 orang); Pengatur / II-c (15 orang); Pengatur Muda Tk I/II-b (3 orang); Pengatur Muda / II-a (3 orang); Juru Muda /I-b (1 orang)
- Pejabat Struktural : 54 orang
Pejabat Fungsional : 70 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan			
1	Pameran Produk unggulan pertanian dan peternakan	108.725.000	108.505.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Menunjang Agroexpo, Festival Jateng dan Promosi Hasil Perkebunan	176.800.000	176.574.939
3	Pengembangan Penanganan Pasca Panen & Seklh Lapang Pengolah Hsl Perkebunan (SLPHP)	59.520.000	59.084.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			
1	Sekolah lapang tanaman hortikultura	65.780.000	65.680.000
2	Pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan	55.750.000	55.283.000
3	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	72.975.000	70.640.000
4	Pembinaan dan pengembangan organisasi P3A	61.175.000	60.921.050
5	Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Organik	74.475.000	74.075.000
6	Pembinaan dan Penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	161.687.000	159.687.000
7	Validasi Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan	218.150.000	195.920.00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Pembinaan & Pengembangan Produksi & Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida	116.675.000	116.090.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pendampingan PUAP	47.800.000	47.100.000
3	Membangun Partisipasi Petani dalam Asuransi Tani	40.375.000	40.375.000
4	Menunjang Pelaksanaan Upsus Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka mendukung swasembada pangan	180.700.000	175.431.000
5	Pemberdayaan Petani Hortikultura	90.950.000	90.831.000
6	Pengembangan Tanaman Perkebunan Unggulan dan Potensial di Kab. Jepara	229.250.000	228.150.000
7	Fasilitasi Pembenihan, Pembibitan Pertanian, Peternakan	115.230.000	115.230.000
8	Pelestarian Komoditas Hortikultura Unggul Kabupaten Jepara	33.450.000	31.464.364
9	Pembangunan Sumber Sumber Air Mendukung Pertanian (DAK REGULER)	3.052.813.000	3.027.500.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			
1	Menunjang Kegiatan Penyuluh DKPP	261.625.000	253.096.847
2	Pendampingan THL-TBPP	135.350.000	20.590.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Validasi Data Kelompok Tani	31.890.000	31.890.000
4	Pembinaan Orgss Profesi Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.900.000	8.214.700

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian sehingga diharapkan ketersediaan pangan dan bahan pangan dapat terjamin dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Proses perencanaan ini dimulai dari:

- Identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian dan peternakan minimal dalam kurun waktu satu tahun berjalan, yaitu:
 - Masih belum optimalnya penyediaan cadangan pangan utama di Kabupaten Jepara,;
 - Masih belum optimalnya kinerja pemerintah dalam menyediakan cadangan pangan di Kabupaten Jepara;
 - Masih belum optimalnya penyediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah;
 - Masih rendahnya diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Masyarakat Jepara;
 - Kurangnya stabilnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dipengaruhi oleh musim, pola tanam dan hama penyakit;
 - Kurangnya penerapan teknologi oleh petani sehingga produktivitas pertanian belum optimal;
 - Kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluh mengenai teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan terbaru
 - Masih rendahnya alih teknologi pertanian;
 - Terbatasnya sarana prasarana pengolahan pertanian dan peternakan;

- Kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian yang belum memadai
- Kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
- Kurangnya sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung produktivitas pertanian
- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Pameran Produk unggulan pertanian dan peternakan
 - Menunjang Agroexpo, Festival Jateng dan Promosi Hasil Perkebunan
 - Pengembangan Penanganan Pasca Panen dan Sekolah Lapang Pengolah Hasil Perkebunan (SLPHP)
 - Sekolah lapang tanaman hortikultura
 - Pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
 - Pembinaan dan pengembangan organisasi P3A
 - Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Organik
 - Pembinaan dan Penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)
 - Validasi Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
 - Pembinaan dan Pengembangan Produksi dan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida
 - Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pendampingan PUAP
 - Membangun Partisipasi Petani dalam Asuransi Tani
 - Menunjang Pelaksanaan Upsus Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka mendukung swasembada pangan
 - Pemberdayaan Petani Hortikultura

- Pengembangan Tanaman Perkebunan Unggulan dan Potensial di Kab. Jepara
- Fasilitasi Pembenihan, Pembibitan Pertanian, Peternakan
- Pelestarian Komoditas Hortikultura Unggul Kabupaten Jepara
- Pembangunan Sumber Sumber Air Mendukung Pertanian (DAK REGULER)
- Menunjang Kegiatan Penyuluh DKPP
- Pendampingan THL-TBPP
- Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Validasi Data Kelompok Tani
- Pencegahan, Penyidikan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Puskesmas
- Optimalisasi Peran dan Fungsi RPH
- Pengendalian Mutu Produk Bahan Pangan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Pangan Asal Hewan (HBAH) yang ASUH
- Sinkronisasi Birahi dan Embrio Transfer
- Menunjang Swasembada Daging Sapi/ Kerbau (PSDSK)
- Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan
- Fasilitasi Pelayanan IB dan Kelembagaan Profesi IB
- Sekolah Lapang Peternakan
- Pendampingan Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Kab. Jepara.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan pangan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya tenaga teknis dan tenaga administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam capaian kinerja dan pencairan keuangan dan peng-SPJ-an serta pelaporan.
 - Pelaksanaan pekerjaan ada yang di akhir tahun karena menunggu musim hujan/musim tanam tiba.
- Solusi
 - Memaksimalkan tenaga/staf yang ada
 - Menunggu musin hujan/musim tanam tiba karena berkaitan dengan iklim seperti penanaman hijauan pakan ternak dll.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Juara Umum Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMMI
- Penyaji Terbaik Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII
- Penyaji Unggulan Tingkat Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII

3. Urusan Pariwisata

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemilihan Duta Wisata
- 2) Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi
- 3) Pameran dan Promosi Pariwisata
- 4) Penunjang Pelaksana Event Pariwisata

➤ **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Anjungan Jepara di Puri Maerokoco
- 2) Penataan dan Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Kabupaten
- 3) Pembangunan Pelistrikan dan Penerangan Objek Wisata
- 4) Penataan Jalan dan Areal Parkir
- 5) Pengembangan Sarana Prasarana di Karimunjawa
- 6) Pengembangan Saka Pariwisata
- 7) Penunjang operasional TIC
- 8) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
- 9) Operasional Pekan Sawalan, Natal dan Tahun Baru di Objek Wisata
- 10) Pentas Seni di Obyek Wisata Kab. Jepara
- 11) Pemeliharaan dan perbaikan obyek wisata Kab. Jepara
- 12) Perencanaan, Pengawasan, dan Biaya Umum Kegiatan Banprov dan Dana Transfer Lainnya
- 13) Penunjang Pengembangan Benteng Portugis
- 14) Pelatihan peningkatan berbahasa asing (guide)
- 15) Penataan Obyek Wisata Pulau Panjang
- 16) Penunjang dan Operasional Pengembangan Infrastruktur dan Daya tarik Wisata

- 17) Penataan Kawasan Obyek Wisata Pantai Bandengan (DAK Reguler)
- 18) Penataan Dermaga Wisata Obyek Wisata Pantai Bandengan Kab. Jepara (Banprov)
- 19) Penataan Lingkungan Obyek Wisata Pantai Bandengan Kab. Jepara (Banprov)

➤ **Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang Pelaku Wisata di Jepara
- 2) Pembinaan dan fasilitasi Desa Wisata
- 3) Pembinaan Seni dan Pengembangan Seni Budaya di Jepara
- 4) Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pariwisata dinilai berdasarkan 2 IKK, yaitu :

1. Kunjungan Wisata

Pada tahun 2018, sektor pariwisata Jepara berkembang dengan cukup baik. Destinasi wisata berkembang secara baik, termasuk Karimunjawa yang berkembang sangat pesat. Ini bisa dilihat dari jumlah wisatawan mengunjungi Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 2.190.231 orang.

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jepara sebesar 12,66 % atau Rp. 3.276.522,17 dari total PDRB Rp. 25.865.317,87

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 34 orang
- Kualifikasi pendidikan :
S2 = 12 orang, S1 = 6 orang, D3 = 6 orang, D1 = 0 orang, SLTA = 9 orang, SMP = 1.
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c)= 1 orang, Pembina (IV/a) = 7 orang, Penata Tk I (III/d) = 3 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk I (III/b) = 6 orang, Penata Muda (III/a) = 7 orang, Pengatur Tk I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 2 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 3 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
1.	Pemilihan Duta Wisata	200.000.000	199.287.334
2.	Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi	98.250.000	95.718.300
3.	Pameran dan Promosi Pariwisata	500.000.000	486.496.626
4.	Penunjang Pelaksana Event Pariwisata	1.352.915.000	1.327.866.163
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1.	Pemeliharaan Anjungan Jepara di Puri Maerokoco	32.700.000	29.949.948
2.	Penataan & Pengembangan Kwsn Obyek Wisata Kab	26.506.146.000	26.099.293.338
3.	Pemb Pelistrikan dan Penerangan Objek Wisata	486.170.000	484.505.000
4.	Penataan Jalan dan Areal Parkir	20.000.000	19.698.000
5.	Pengembangan Sarana Prasarana di Karimunjawa	45.000.000	29.940.000
6.	Pengembangan Saka Pariwisata	41.275.000	39.047.300
7.	Penunjang operasional TIC	57.862.000	54.598.961
8.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	79.125.000	77.904.868
9.	Operasional Pekan Sawalan, Natal dan Tahun Baru di Objek Wisata	372.125.000	366.459.750
10.	Pentas Seni di Obyek Wisata Kab. Jepara	127.500.000	115.000.000
11.	Pemeliharaan dan perbaikan obyek wisata Kab. Jepara	1.354.040.000	1.341.968.512

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
12.	Perencanaan, Pengawasan, dan Biaya Umum Kegiatan Banprov dan Dana Transfer Lainnya	67.025.000	65.961.465
13.	Penunjang Pengembangan Benteng Portugis	200.000.000	199.620.000
14.	Pelatihan peningkatan berbhs asing (guide)	36.462.000	36.354.000
15.	Penataan Obyek Wisata Pulau Panjang	200.000.000	198.918.000
16.	Penunjang & Ops Pengembangan Infrastruktur dan Daya tarik Wisata	63.190.000	56.849.800
17.	Penataan Kwsn Obyek Wst Pantai Bandengan (DAK Reguler)	2.161.910.000	2.045.045.000
18.	Penataan Dermaga Wisata Obyek Wisata Pantai Bandengan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	985.000.000
19.	Penataan Lingkungan Obyek Wisata Pantai Bandengan Kab. Jepara (Banprov)	3.000.000.000	2.955.000.000
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.			
1.	Penunjang Pelaku Wisata di Jepara.	81.887.000	77.311.960
2.	Pembinaan dan fasilitasi Desa Wisata	50.375.000	50.140.701
3.	Pembinaan Seni dan Pengembangan Seni Budaya di Jepara	31.020.000	30.848.714
4.	Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara	10.000.000	9.273.400

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan

kualitas sarana prasarana, sumber daya manusia pelaku wisata dan seni / budaya yang berujung pada meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Jepara baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata dan Kebudayaan adalah :
 - Sarana dan prasarana kepariwisataan masih terbatas dan kurang sesuai yang diharapkan.
 - Kurangnya kreatifitas dalam kegiatan promosi.
 - Sumber daya manusia pendukung kepariwisataan masih kurang memadai.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan baik kuantitas maupun kualitas
 - Meningkatkan kegiatan promosi
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung kepariwisataan
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Terlalu banyak kegiatan / event budaya dan pariwisata yang dapat diikuti baik lokal maupun nasional dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.
- Solusi
 - Mengikuti sebagian kegiatan / event yang dapat memberikan nilai tambah (benefit) paling besar bagi kemajuan kepariwisataan Jepara.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

4. Urusan Perindustrian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan validasi data bagi IKM di Kabupaten Jepara
- 2) Pelatihan pengembangan teknologi dan desain bagi IKM di Kab. Jepara

➤ **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

- **Kegiatan :**

- 1) Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kab. Jepara (DBHCHT)
- 2) Bimbingan teknis dan peningkatan kewirausahaan bagi IKM di lokasi TMMD dan P2MBG
- 3) Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk pengolahan makanan di Kab. Jepara (DBHCHT)

➤ **Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan PLTS komunal di wilayah Karimunjawa
- 2) Bimbingan teknis pengembangan IKM yang berkualitas dan kemampuan teknis guna mendukung kemampuan berusaha
- 3) Bimbingan teknis penguatan kelembagaan dan identifikasi sentra berdasar pada OVOP

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Industri, Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerjanya dinilai dari 2 IKK, :

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara yaitu sebesar 34,57 % atau Rp. 8,940,26,- dari total PDRB Rp. 25.865.317,87,- (dalam jutaan rupiah)

2. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri Kabupaten Jepara pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,36 %. Pada tahun 2017 sebanyak 19.576 industri menjadi 19.464 industri tahun 2018.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 110 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2=13 orang, S1=11 orang, D3=3 orang, SMA=65 orang, SMP=13 orang, SD=5 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina TK I (IV/b) = 2 orang, Pembina (IV/a) = 5 orang, Penata TK I (III/d) = 11 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda TK I (III/b) = 10 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur TK I (II/d) = 3 orang, Pengatur (II/c) = 53 orang, Pengatur Muda TK I (II/b) = 3 orang, (Pengatur Muda (II/a)= 9 orang, Juru Tingkat I (I/d) = 0 orang, Juru (I/c) = 6 orang, Juru Muda TK I (I/b) = 0 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi			
1.	Peningkatan validasi data bagi IKM di Kabupaten Jepara	239.400.000	208.391.258
2.	Pelatihan pengembangan teknologi & desain bagi IKM di Kab. Jepara	150.000.000	137.258.380
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
4.	Peningkatan validasi data bagi IKM di Kabupaten Jepara	239.400.000	208.391.258
1.	Pelat pengembangan teknologi & desain bagi IKM di Kab. Jepara	150.000.000	137.258.380
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			
3.	Pemeliharaan PLTS komunal di wiL Karimunjawa	269.250.000	258.719.630
4.	Bimbingan teknis pengemb IKM yg berkualitas & kemamp teknis guna mendkg kemampuan berusaha	99.425.000	92.352.296

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5.	Bimtek penguatan kelembagaan dan identifikasi sentra berdasar pada OVOP	164.940.000	120.935.868

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang perindustrian :

- Perumusan Masalah :
 - Masih rendahnya kualitas SDM
 - Kualitas produksi yang masih rendah
 - Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha
 - Sistem perhitungan kubikasi bahan baku yang merugikan IKM
 - Kurangnya bahan baku kayu dan harga yang selalu meningkat
 - Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan
 - Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan SDM IKM
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masih rendahnya kualitas SDM
 - Kualitas produksi yang masih rendah
 - Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha
 - Sistem perhitungan kubikasi bahan baku yang merugikan IKM
 - Kurangnya bahan baku kayu dan harga yang selalu meningkat
 - Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan
 - Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan.

- Solusi
 - Peningkatan SDM IKM

i. Hal lain yang perlu dilaporkan -

-

5. Urusan Perdagangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Publikasi informasi harga sembako
- 2) Pembinaan legalitas dan kegiatan usaha perdagangan
- 3) Pembinaan konsumen
- 4) Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
- 5) Penunjang dan operasional UPTD Kemetrolagian
- 6) Operasional dan evaluasi Produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan Fasilitasi HaKI
- 7) Pengawasan barang beredar dan bahan berbahaya

➤ **Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**

- **Kegiatan :**

- 1) Pameran misi dagang dalam dan luar negeri
- 2) Pengembangan informasi dan promosi produk ekspor

➤ **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan SDM Pelaku Ekspor

➤ **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang dan operasional resi gudang
- 2) Pemeliharaan dan penataan lingkungan gedung JTTC Rengging
- 3) Jepara Expo
- 4) Penunjang pameran produk potensi Jepara

➤ **Program Peningkatan Sarana Perdagangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
- 2) Pengelolaan SCJ dan pujasera Ngabul
- 3) Fasilitasi dan penataan PKL

- 4) Pengadaan tanah relokasi pasar Bangsri

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Perdagangan, Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya ada 2 yaitu :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Sektor Perdagangan memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara yaitu sebesar 16,89 % atau sekitar Rp. 4.370.734,02,- dari total PDRB Rp. 25.865.317,87,- (dalam jutaan rupiah)
2. Ekspor bersih perdagangan
Pada tahun 2018 ekspor bersih perdagangan Kabupaten Jepara sebesar 347.409.178,75 USD.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 110 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2=13 orang, S1=11 orang, D3=3 orang, SMA=65 orang, SMP=13 orang, SD=5 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina TK I (IV/b) = 2 orang, Pembina (IV/a) = 5 orang, Penata TK I (III/d) = 11 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda TK I (III/b) = 10 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur TK I (II/d) = 3 orang, Pengatur (II/c) = 53 orang, Pengatur Muda TK I (II/b) = 3 orang, (Pengatur Muda (II/a)= 9 orang, Juru Tingkat I (I/d) = 0 orang, Juru (I/c) = 6 orang, Juru Muda TK I (I/b) = 0 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1.	Publikasi informasi harga sembako	32.500.000	31.529.000
2	Pembinaan legalitas dan kegiatan unit usaha perdagangan	21.580.000	21.339.133
3	Pembinaan konsumen	38.600.000	37.815.262

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
4	Pembinaan & pengawasan alat ukur, takar, timbang& perlengkapannya (UTTP)	136.510.000	116.663.019
5	Penunjang dan operasional UPTD kemetrollogian	658.952.000	593.931.972
6	Operasional & evaluasi Produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan Fasilitas HaKI	34.440.000	29.182.258
7	Operasional & evaluasi Produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan Fasilitas HaKI	34.440.000	29.182.258
8	Operasional & evaluasi Produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan Fasilitas HaKI	34.440.000	29.182.258
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional			
1	Pameran misi dagang dalam dan luar negeri	1.091.576.000	1.061.830.266
2	Pengembangan informasi dan promosi produk ekspor	52.480.000	43.016.399
Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor			
1	Peningkatan SDM pelaku ekspor	87.585.000	59.823.500
Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
1	Penunjang dan operasional resi gudang	101.041.000	100.368.122
2	Pemeliharaan dan penataan lingkungan gedung JTTC Rengging	66.252.500	40.049.858
3	Jepara Expo	270.700.000	261.296.976
4	Penunjang pameran produk potensi Jepara	185.365.000	177.330.000
Program peningkatan Sarana Perdagangan			
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	3.994.110.000	3.805.820.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Pengelolaan SCJ dan pugasera Ngabul	138.850.000	138.850.000
3	Fasilitasi & penataan PKL	200.000.000	197.889.000
4	Pengadaan tanah relokasi pasar Bangsri	100.000.000	93.803.345

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang perdagangan :

- Perumusan Masalah :
 - Kurangnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
 - Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera ulang
 - Keterbatasan sarana dan prasarana kemetrologian
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Memantau kegiatan perdagangan
 - Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan
 - Membuka pangsa pasar
 - Perbaikan pasar yang kurang bagus kualitasnya
 - Pendataan dan perbaikan sarana berdagang bagi PKL
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
 - Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera ulang
- Keterbatasan sarana dan prasarana kemetrolagian
- Masih rendahnya kesadaran pedagang pada K3 pasar dan kewajiban pembayaran restibusi.
- Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif
- Solusi
 - Memantau kegiatan perdagangan
 - Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan
 - Membuka pangsa pasar
 - Perbaiki pasar yang kurang bagus kualitasnya
 - Pendataan dan perbaikan sarana berdagang bagi PKL

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

6. Urusan Transmigrasi

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi ke luar Jawa

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Di Kabupaten Jepara dari 5 orang jumlah transmigran yang ada, semuanya adalah transmigran swakarsa. Jadi capaian Kinerja Urusan Transmigrasi sebesar 100 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 36 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 11 orang, S1 : 10 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 10 orang, SMP : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur

(II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Transmigrasi Umum			
	Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi keLuar Jawa	81.950.000	81.874.345

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di bidang Transmigrasi di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Transmigrasi adalah :
 - Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi ke luar Jawa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Transmigrasi Umum

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
- 2) Solusi :

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Jepara (BAPPEDA)

2. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Data/Informasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Sharing Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara
- 2) Penyusunan Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Jepara
- 3) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2018
- 4) Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Jepara
- 5) Upgrade SIM E-Musrenbang, Evaluasi RKPD dan SIM Terpadu

➤ **Program Kerjasama Pembangunan**

- **Kegiatan :**

- 1) Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Fungsi Iptek Pusat dan Daerah
- 2) Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Masyarakat
- 3) Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas)
- 4) Pengembangan Pusat Peragaan Iptek (Science Center) Kab. Jepara
- 5) Fasilitasi jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.
- 6) Pengembangan Sanggar Iptek Masyarakat (SIM) Kab. Jepara Berbasis Teknologi.
- 7) Desiminasi Teknologi Terapan
- 8) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jepara
- 9) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Jepara

➤ **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Musrenbang untuk Menjaring Aspirasi Masyarakat
- 2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD, Kegiatan DAK, Dekonsentrasi dan Sektoral APBD Prov/APBN Tahun 2018

- 3) Penyusunan RKPD 2019, Perubahan RKPD 2018 dan RA RKPD 2020
 - 4) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 - 5) Penyusunan KUA, PPAS 2019 dan Perubahan KUA, PPAS 2018
 - 6) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - 7) Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Banprov)
 - 8) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Banprov)
 - 9) Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
- **Kegiatan :**
- 1) Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pangan Gizi Kabupaten Jepara
 - 2) Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah/Lokal
 - 3) Fasilitasi FEDEP
 - 4) Penguatan Kelembagaan FEDEP (Banprov)
- **Program Perencanaan Sosial dan Budaya**
- **Kegiatan :**
- 1) Koordinasi dan Perencanaan Program Kesehatan dan Masalah Sosial
 - 2) Koordinasi dan Perencanaan Program Pendidikan dan Olah Raga dan Budaya
 - 3) Koordinasi dan Asistensi Perencanaan program TMMD Sengkuyung I, II dan karya bakti tahun 2019
 - 4) Koordinasi Sustainable Development Goals
 - 5) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Jepara
 - 6) Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsive Gender
 - 7) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - 8) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Umum
 - 9) Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Desa Unggulan dan Desa Berdikari
 - 10) Pengelolaan dan Updating Data SIM kemiskinan Kab. Jepara
 - 11) Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Jepara
 - 12) Koordinasi dan Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika
- **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
- **Kegiatan :**
- 1) Menunjang Kegiatan dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

- 2) Menunjang Kegiatan dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah
 - 3) Fasilitasi Anggaran-anggaran dari Provinsi dan Pusat
 - 4) Penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Lanjutan
 - 5) Studi Kelayakan Jalan Coastal Road
 - 6) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW
 - 7) Penghitungan Batas Sempadan Pantai Kabupaten Jepara
 - 8) Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis di Kabupaten Jepara
- **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**
- **Kegiatan :**
- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara (Banprov)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 42 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 22 orang, S1 : 13 orang, D4 : 1 org, D3 : 1 orang, SLTA : 7 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 13 orang, Penata Tk. I (III/d) : 8 orang, Penata (III/c) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 orang, Penata Muda (III/a) : 6 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : - orang, Pengatur (II/c) : 6 orang.
- Pejabat Struktural : 19
- Pejabat Fungsional : 4 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pengembangan Data/Informasi			
1	Sharing Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara	54.740.000	45.690.990
2	Penyusunan Data & Informasi Kinerja Pemb Kab Jepara	53.450.000	47.613.500
3	Evaluasi Pelaksanaan Pemb Kab Jepara Tahun 2018	54.450.000	52.666.741
4	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Jepara	73.425.000	68.970.440

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
5	Upgrade SIM E-Musrenbang, Evaluasi RKPD & SIM Terpadu	149.175.000	148.410.800
Program Kerjasama Pembangunan			
1	Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Fungsi Iptek Pusat dan Daerah	155.262.000	134.595.390
2	Pengembangan Kreatifitas & Inovasi Teknologi Masyarakat	73.487.000	70.803.760
3	Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas)	97.122.000	87.715.967
4	Pengembangan Pusat Peragaan Iptek (Science Center) Kab. Jepara	82.387.000	78.405.200
5	Fasilitasi jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jepara.	86.062.000	75.250.575
6	Pengembangan Sanggar Iptek Masyarakat (SIM) Kab. Jepara Berbasis Teknologi.	170.750.000	166.557.153
7	Desiminasi Teknologi Terapan	72.537.000	65.745.990
8	Pengembangan Sistem Inov Daerah (SIDA) Kab. Jepara	42.825.000	40.685.818
9	Rencana Induk Penelitian & Pengembangan di Kab. Jpr	99.325.000	98.123.200
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Pelaksanaan Musrenbang utk Menjaring Aspirasi Masy	173.153.000	171.047.338
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD, Keg DAK, Dekonsentrasi dan Sektor APBD Prov/APBN Tahun 2018	83.437.000	78.660.112
3	Penyusunan RKPD 2019, Perubahan RKPD 2018 dan RA RKPD 2020	200.000.000	192.908.348
4	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	210.425.000	194.471.430
5	Penyusunan KUA, PPAS 2019 & Perubahan KUA, PPAS 2018	500.000.000	439.056.988

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
6	Penyusunan Renval	41.875.000	30.211.100
7	Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Banprov)	50.000.000	38.748.480
8	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Banprov)	50.000.000	48.963.300
9	Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	40.000.000	36.983.060
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
1	Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pangan Gizi Kabupaten Jepara	298.425.000	279.410.900
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah/Lokal	83.866.000	82.035.980
3	Fasilitasi FEDEP	53.987.000	52.138.430
4	Penguatan Kelembagaan FEDEP (Banprov)	80.000.000	78.648.601
Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
1	Koordinasi dan Perencanaan Program Kes & mslh Sosial	62.825.000	61.006.782
2	Koordinasi dan Perencanaan Program Pendidikan dan Olah Raga dan BUdaya	27.375.000	24.592.490
3	Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Program TMMD Sengkuyung I, II, II dan Karya Bakti Tahun 2019	62.100.000	60.537.830
4	Koordinasi Suistanable Development Goals	24.025.000	21.682.396
5	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Program TKPKD Kab. Jepara	210.305.000	184.466.065
6	Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	61.925.000	56.785.700
7	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	34.337.000	30.280.150

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
8	Fasilitasi & Koordinasi Perenc Pemerintahan Umum	103.100.000	98.839.300
9	Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Desa Unggulan dan Desa Berdikari	30.712.000	29.796.200
10	Pengelolaan & Updating Data Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Daerah	79.250.000	75.501.680
11	Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Jepara	162.862.000	157.839.376
12	Koordinasi dan Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika	151.750.000	137.428.200
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
1	Menunjang Kegiatan dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	282.725.000	272.050.770
2	Menunjang Kegiatan dan Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	214.384.000	206.484.875
3	Fasilitasi Anggaran-Anggaran dari Provinsi dan Pusat	90.400.000	86.848.830
4	Penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan) Lanjutan	340.875.000	315.787.300
5	Studi Kelayakan Jln Coastal Road	198.425.000	194.287.300
6	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RTRW)	198.425.000	195.651.580
7	Penghitungan Batas Sempadan Pantai Kabupaten Jepara	123.425.000	112.695.840
8	Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis di kabupaten Jepara	248.425.000	231.770.760

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			
1	Pengembangan Sistem SIPD (Banprov)	50.000.000	38.686.700

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :
- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada fungsi Perencanaan adalah:
 - Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel
 - Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas
 - Masih belum optimalnya integrasi perencanaan, baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral
 - Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif
 - Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi pembangunan, sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan
 - Banyaknya aturan dari pusat/provinsi yang menunjuk Bappeda sebagai koordinator program/kegiatan yang tidak sesuai tupoksi Bappeda
 - Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
 - Melibatkan perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah
 - Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perencana
 - Meningkatkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
 - Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
 - Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Pengembangan Data/Informasi
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Program Perencanaan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya koordinasi internal Bappeda
 - Belum adanya SOP terkait perencanaan maupun pelayanan Bappeda
 - Belum optimalnya pemanfaatan data untuk keperluan perencanaan
 - Kurang meratanya beban kerja pada bidang-bidang di Bappeda sehingga kinerja di Bappeda secara keseluruhan menjadi kurang maksimal
- Solusi :
 - Penambahan personil di Bappeda yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan pembangunan daerah atupun dengan meningkatkan kualitas SDM Bappeda melalui pendidikan, pelatihan, workshop, lokakarya dan sebagainya
 - Penguatan koordinasi antar bagian maupun bidang di Bappeda melalui Focus Group Discussion
 - Penyusunan SOP terkait perencanaan dan pelayanan
 - Penyusunan Basis Data terpadu
 - Melakukan pendistribusian staf ke bidang bidang sesuai beban kerja, sehingga lebih merata beban kerjanya.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH (BPKAD) KAB. JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pengembangan Data/Informasi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan DKB dan DPB serta dokumen perencanaan barang
- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan APBD perubahan tahun 2018 dan penyusunan APBD tahun 2019

- 2) Penyusunan dan penelaahan RKAP 2018,RKA 2019,DPPA 2018 dan DPA 2019
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan perencanaan dan evaluasi BPKAD
- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Intensifikasi pajak daerah
 - 2) Pengelolaan pendapatan OPD BPKAD
 - 3) Pengadaan dan operasional cetak PBB
 - 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pajak daerah
 - 5) Pengawasan dan pembinaan pajak daerah
 - 6) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan pusat
 - 7) Koordinasi peningkatan pendapatan
 - 8) Percepatan pelunasan PBB P-2
 - 9) Bimbingan teknis bagi aparat pemungut PBB P-2
 - 10) Pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak daerah
 - 11) Intensifikasi dan pengelolaan PAD
 - 12) pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKED) online
 - 13) upgrade dan pemilihan program penyusun APBD
 - 14) upgrade aplikasi pengendalian anggaran
 - 15) pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengelolaan keuangan daerah
 - 16) sosialisasi,monitoring,perencanaan dan penyusunan anggaran
 - 17) penyusunan pedoman dan sisdur penganggaran daerah.
 - 18) pengelolaan kas daerah
 - 19) pengadaan dan pemeliharaan sarpras retribusi daerah
 - 20) pemberian penghargaan dan bantuan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
 - 21) penatausahaan pencairan dana dan pengelolaan gaji pns sekabupaten jepara
 - 22) penatausahaan verifikasi pengeluaran APBD
 - 23) penatausahaan dan penyelesaian kerugian daerah
 - 24) sosialisasi,pembinaan dan evaluasi belanja daerah
 - 25) penyusunan dan pembuatan laporan keuangan tahun 2017
 - 26) pelatihan penyusunan laporan keuangan
 - 27) pengelolaan SIMKEU daerah
 - 28) penyusunan laporan keuangan triwulan,semester dan prognosis
 - 29) penyusunan buku standarisasi harga
 - 30) pengelolaan pensertifikatan tanah tanah milik pemda
 - 31) pengelolaan administrasi pemanfaatan aset daerah

- 32) mapping dan papanisasi tanah milik/dikuasai pemda dikecamatan sekabupaten jepara
- 33) penyusunan/pembuatan administrasi barang daerah
- 34) pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah
- 35) monitoring peningkatan sdm dan pembinaan bagi pengurus / penyimpanan barang
- 36) pengelolaan sim barang milik daerah
- 37) sensus BMD
- 38) penyusunan sisdur pengelolaan keuangan
- 39) penatausahaan pengeluaran PPKD
- 40) pengadaan kendaraan dinas
- 41) penyusunan buku standar biaya

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 91 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 23 orang, S1 : 48 orang, D3 : 6 orang, SLTA : 11 orang,SLTP : 2 org, SD : 1 org.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 2 orang, Pembina (IV/a) : 6 orang, Penata Tk. I (III/d) : 15 orang, Penata (III/c) : 10 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 orang, Penata Muda (III/a) : 8 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang, Juru Tk.I : 1 org
- Pejabat Struktural : 19
- Pejabat Fungsional : 4 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Program dan Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Pelayanan Teknis Kantor	1.383.064.000	1.140.797.231
II	Program Pengembangan Data/Informasi		
	1. Penyusunan DKB dan DPB serta dokumen perencanaan barang	22.075.000	22.028.500
III	Program Perencanaan Pemb Daerah		
	1. Penyusunan APBD perubahan tahun 2018 dan penyusunan APBD tahun 2019	827.468.000	812.855.300
	2. Penyusunan dan penelaahan RKAP 2018,RKA 2019,DPPA 2018	348.440.000	274.860.500

	dan DPA 2019		
IV	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD		
	1. Penyusunan perencanaan dan evaluasi BPKAD	38.275.000	33.577.500
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	1. Intensifikasi pajak daerah	847.500.000	748.615.650
	2. Pengelolaan pendapatan OPD BPKAD	213.516.000	213.005.000
	3. Pengadaan dan operasional cetak PBB	240.000.000	236.620.000
	4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pajak daerah	1.164.500.000	1.037.590.000
	5. Pengawasan dan pembinaan pajak daerah	123.000.000	95.733.750
	6. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan pusat	75.000.000	70.167.591
	7. Koordinasi peningkatan pendapatan	120.675.000	119.723.486
	8. Percepatan pelunasan PBB P-2	1.672.000.000	1.613.812.250
	9. Bimbingan teknis bagi aparat pemungut PBB P-2	100.000.000	98.924.000
	10. Pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak daerah	79.190.000	74.280.975
	11. Intensifikasi dan pengelolaan PAD	150.730.000	139.068.488
	12. pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKED) online	150.000.000	148.600.000
	13. upgrade dan pemilihan progam penyusun APBD	65.000.000	64. 945.000
	14. upgrade aplikasi pengendalian anggaran	65.000.000	64.744.000
	15. pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengelolaan keuangan daerah	74.400.000	70.520.000
	16. sosialisasi, monitoring, perencanaan dan penyusunan anggaran	138.071.000	104.014.250
	17. penyusunan pedoman dan sisur penganggaran daerah.	98.845.000	89.595.800
	18. pengelolaan kas daerah	256.487.000	254.476.894
	19. pengadaan dan pemeliharaan sarpras retribusi daerah	95.875.000	94.890.000
	20. pemberian penghargaan & bantuan kegi kemasyarakatan dan pembangunan	255.500.000	195.653.900
	21. penatausahaan pencairan dana dan pengelolaan gaji pns sekabupaten jepara	282.082.000	276.945.642
	22. penatausahaan verifikasi pengeluaran APBD	68. 035.000	63. 567.386
	23. penatausahaan dan penyelesaian kerugian daerah	69.637.000	66.637.400
	24. sosialisasi, pembinaan dan evaluasi belanja daerah	82.652.000	79.368.600
	25. penyusunan dan pembuatan	266.561.000	264. 527.480

	laporan keuangan tahun 2017		
26.	pelatihan penyusunan laporan keuangan	49.487.000	40.919.000
27.	pengelolaan SIMKEU daerah	169.810.000	163.757.500
28.	penyusunan laporan keuangan triwulan,semester dan prognosis	105.880.000	101.043.000
29.	penyusunan buku standarisasi harga	90.500.000	79.396.500
30.	pengelolaan pensertifikatan tanah tanah milik pemda	261.200.000	174.076.060
31.	pengelolaan administrasi pemanfaatan aset daerah	90.025.000	75.496.829
32.	mapping dan papanisasi tanah milik/dikuasai pemda dikecamatan sekabupaten jepara	94.000.000	93.231.000
33.	penyusunan/pembuatan administrasi barang daerah	149.393.000	143.098.760
34.	pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah	116.375.000	113.585.000
35.	monitoring peningkatan sdm dan pembinaan bagi pengurus / penyimpanan barang	27.837.000	27.714.810
36.	pengelolaan sim barang milik daerah	151.507.000	142.421.500
37.	sensus BMD	317.995.000	311.590.000
38.	penyusunan sisdur pengelolaan keuangan	39.312.000	28.871.000
39.	penatausahaan pengeluaran PPKD	39.564.000	38.621.550
40.	pengadaan kendaraan dinas	949.725.000	805.400.000
41.	penyusunan buku standar biaya	74.750.000	68.686.500

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM dimulai dari :

- **Masalah,** yaitu permasalahan yang dihadapi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :
 - Komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel telah membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 8 tahun berturut turut mulai tahun 2010 - 2016. Kredit poin ini merupakan tantangan bagi PD sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan APBD.
 Dengan diraihnya predikat “ WAJAR TANPA PENGECUALIAN ” dari BPK tentang pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Jepara tahun 2010 - 2017 merupakan tantangan yang cukup berat bagi PD dimana PD sebagai entitas akuntansi di dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran daerah.
 - Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual secara penuh, yang menggantikan SAP

berbasis kas menuju akrual, dimana menurut PP No. 24 tahun 2005 pelaksanaannya dimulai tahun 2015. Namun Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen kuat, bahwa SAP berbasis akrual secara penuh telah di laksanakan mulai tahun 2014.

Komitmen Pimpinan Daerah dan Pimpinan PD juga di tunjang dengan SDM yang ada sangat menunjang pelaksanaan SAP.

- Masih perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan Petugas Akuntansi dalam penerapan Sistem Accrual Basic, melalui kegiatan Pelatihan atau Bintel secara berkala.
- Masih perlunya peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berkaitan dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan PBB-P2 menjadi pajak daerah.
- Kurangnya kesiapan operator aparatur desa dalam aplikasi program SIAPDES, yaitu aplikasi penerapan data base PBB-P2 online. Sebagai solusinya, BPKAD Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan Bintel bagi Aparatur Pemungut PBB P2 dalam setiap tahunnya.
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Harus ada komitmen yang kuat dari Pimpinan PD dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Accrual di setiap PD.
 - Peningkatan kualitas Petugas Akuntansi melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan secara berkelanjutan dalam penerapan Sistem Accrual Basic.
 - Meningkatkan kinerja pengelola keuangan di setiap PD.
 - Menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Badan Akun Standar (BAS) sebagai pedoman Pengelola Keuangan Akuntansi Pemda.
 - Menyiapkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan PBB-P2, khususnya aparatur desa sebagai ujung tombak pemungut PBB-P2.
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Pengembangan Data/Informasi.
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD.
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Dengan adanya pengalihan kewenangan PBB P2 menjadi pajak daerah, tentunya diperlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi khususnya yang bertugas sebagai : Penilai Aset tanah ; Operator Consule dan Juru sita.
 - Kesiapan aparatur desa dalam menyiapkan diri dalam aplikasi SIAPDES, yaitu entry data WP di desa dan kelurahan secara online.
 - Belum optimalnya pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.
 - Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
 - Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang menunggak.
 - Terbatasnya SDM Pengelola Pendapatan.
 - Masih kurangnya pemahaman dalam penerapan kebijakan akuntansi utamanya terhadap kapitalisasi aset yang berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan daerah.
- Solusi :
 - Melakukan pengiriman PNS yang ada untuk mengikuti : diklat ; bintek ; workshop yang terkait dengan penilaian aset tanah dan operator consule melaksanakan pembekalan bagi petugas pungut secara berkala.
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola kegiatan APBD Kabupaten Jepara khususnya dalam hal perencanaan kegiatan agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga diharapkan terdapat efisiensi dan efektivitas kegiatan dan keuangannya.
 - Optimalisasi aparatur pengelola pendapatan baik pajak dan retribusi, khususnya sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum dikelola dengan baik, sehingga diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - Perlunya regulasi yang baku tentang adanya sanksi hukum bagi penunggak pajak. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan PBB-P2 menjadi pajak daerah, sangat diperlukan adanya penambahan personil (SDM) yg proporsional guna mendukung tugas baru ini.

- Mengadakan on the job training bagi pengelola keuangan di setiap PD tentang proses Perencanaan Penganggaran yang berbasis kinerja dan Pengelolaan Administrasi keuangan.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi PNS tersebar se Kabupaten Jepara
- 2) Penyelenggaraan dan pengiriman diklat kader dan kepemimpinan tersebar se Kabupaten Jepara
- 3) Pengiriman diklat teknis, fungsional, rakor dan raker di berbagai bidang
- 4) Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I, II dan III
- 5) Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas
- 6) Peningkatan kapasitas kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu
- 7) Pengiriman PNS mengikuti Bintek dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa

➤ **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

- Kegiatan :

- 1) Pengiriman PNS mengikuti Bintek dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa
- 2) Rakor bidang kepegawaian
- 3) Penataan dan koordinasi administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil
- 4) Pengelolaan tertib administrasi pensiun, Batas Usia Pensiun atas permintaan sendiri, janda atau duda
- 5) Pengelolaan dan koordinasi administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS serta administrasi peninjauan masa kerja
- 6) Penilaian prestasi kerja pegawai

- 7) Validasi, updating data taperum PNS dan penataan jabatan non struktural antar SKPD dan antar daerah
- 8) Uji kompetensi mutasi PNS luar daerah ke Kabupaten Jepara
- 9) Penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Penyusunan formasi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 10) Penataan pegawai dalam jabatan struktural, promosi, mutasi, dan sumpah PNS
- 11) Evaluasi penataan, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional PNS
- 12) Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan struktural dan penyusunan buku standar kompetensi jabatan
- 13) Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun dan pembaharuan Kartu Tanda Pengenal PNS
- 14) Pelaporan kepegawaian berbasis Informasi Teknologi, website BKD dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- 15) Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Kartu Pegawai Elektronik Kabupaten Jepara
- 16) Penataan dan pengelolaan file arsip kepegawaian
- 17) Membangun karakter dan pembinaan disiplin PNS

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 38 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 15 orang, S1 : 8 orang, D4 : 2 org, D3 : 3 orang, SLTA : 9 orang, SD : 1 org.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 6 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 10 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : - orang, Pengatur (II/c) : 5 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 org, Pengatur Muda (II/a) : 3 org.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pengelolaan adm Lap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	31.750.000	11.903.079

2	Penyelenggaraan & pengiriman diklat kader & kepemimpinan tersebar se Kabupaten Jepara	745.539.000	724.434.120
3	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, rakor, raker diberbagai bidang	434.038.000	397.100.398
4	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi PNS tersebar se Kabupaten Jepara	629.607.000	602.635.811
5	Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan ujian dinas	50.450.000	37.778.000
6	Penyeleng diklat prajabatan gol I, II dan III	75.000.000	71.542.500
7	Pengiriman PNS mengikuti bintek dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang & jasa pemth	75.000.000	74.919.000
8	Rakor bidang kepegawaian	17.885.000	15.932.000
9	Uji kompetensi mutasi PNS luar daerah ke kabupaten jepara	19.425.000	17.951.000
10	Validasi dan updating data taperum PNS dan penataan jabatan non structural antar OPD dan antar daerah	32.700.000	30.923.500
11	Peningkatan kapasitas, kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu	372.417.000	114.090.000
12	Pengelolaan tertib administrasi pensiun, batas usia pensiun (BUP), atas permintaan sendiri, janda atau duda	128.350.000	126.270.605
13	Penataan dan koordinasi administrasi kenaikan pangkat & gaji berkala pegawai negeri sipil	86.135.000	82.642.100
14	Penataan pegawai dalam jabatan structural, promosi, mutasi dan sumpah PNS	169.127.000	123.746.440
15	Penilaian prestasi kerja	11.700.000	11.700.000
16	Penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta penyusunan formasi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	305.767.000	235.362.115

17	Pengelolaan dan koordinasi administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS serta administrasi peninjauan masa kerja	10.190.000	10.190.000
18	Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan structural dan penyusunan buku standar kompetensi jabatan	301.337.000	277.724.656
19	Evaluasi penataan, pengangkatan & kenaikan jbtn fungsional PNS	21.660.000	21.571.000
20	Pelaporan kepegawaian berbasis informasi teknologi dan pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian dan pengelolaan daftar hadir online	99.617.000	98.014.986
21	Pengelolaan system aplikasi pelayanan kepegawaian dan kartu pegawai elektronik	41.080.000	39.965.334
22	Penataan dan pengelolaan file arsip kepegawaian	64.825.000	56.262.760
23	Membangun karakter dan pembinaan disiplin PNS	115.275.000	109.517.000
24	Pembaharuan KTP dan pengusulan Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen	36.202.000	34.980.401

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan Pembangunan Kepegawaian di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (PNS) yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepegawaian adalah :
 - Jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan diklat PNS masih terbatas. Sampai saat ini telah lebih dari 13 tahun BKD Kabupaten Jepara belum memiliki gedung diklat yang representative sehingga kalau menyelenggarakan diklat yang memerlukan peserta perlu menginap maka masih menyewa gedung/ aula Undip Teluk Awur.
 - Kurangnya tempat penyimpanan file kepegawaian (tata naskah) PNS se Kabupaten Jepara.

- **Kebijakan,**

Kebijakan yang ditempuh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan latihan teknis, fungsional, kader dan kepemimpinan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan pengetahuan.
- Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dalam pelayanan aparatur pada seluruh kegiatan manajemen kepegawaian.

- **Program,**

Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :

- Sampai saat ini telah 14 tahun lebih BKD Kabupaten Jepara belum memiliki gedung diklat yang representative sehingga penyelenggaraan diklat masih menggunakan ruang rapat BKD, ruang rapat I atau ruang rapat II Setda Jepara yang kurang mendukung jika digunakan untuk keperluan diklat dan jika memerlukan peserta diklat perlu menginap atau dikarantina maka masih menyewa gedung/ aula Undip Teluk Awur
- Kurangnya tempat penyimpanan file kepegawaian (tata naskah) PNS se Kabupaten Jepara.

- Solusi :

- Kebutuhan pembangunan gedung diklat sangat mendesak, perlu pengusulan melalui dana APBD untuk segera dibangun gedung Diklat yang representative agar dapat menampung dan digunakan sebagai sarana penunjang diklat baik yang memerlukan peserta diklat untuk diasramakan maupun pelaksanaan diklat-diklat lain yang tanpa perlu mengasramakan peserta. Hasil evaluasi Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, untuk asrama yang selama ini dipakai Kabupaten Jepara (Asrama Undip Teluk Awur) sudah tidak memenuhi syarat dan diwajibkan membangun sendiri.

- Saat ini hanya tersedia 1 ruangan berukuran 9 x 5 m, sehingga jarak antara almari hanya sekitar 40 cm dan masih 6.000 file arsip yang belum tertata sesuai dengan ketentuan yaitu Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS, sehingga perlu dilakukan penambahan 1 ruangan lagi dengan ukuran 9 x 5 m untuk menempatkan almari penyimpanan arsip (rak arsip) yang mampu menampung file kepegawaian sebanyak 10.000 PNS.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- INSPEKTORAT

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

- Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan reguler
- 2) Koordinasi pengawasan dan saber pungi
- 3) Monitoring pemeriksaan di luar pkpt
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan kasus
- 5) Review laporan keuangan daerah kabupaten jepara
- 6) Gelar pengawasan daerah
- 7) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- 8) Evaluasi lkjip

➤ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

- Kegiatan :

- 1) Pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/seminar bidang pengawasan

➤ Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

- Kegiatan :

- 1) Pengembangan Jaringan Sistem Aplikasi Informasi Pengawasan
- 2) Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 35 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 14 orang, S1 : 13 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 6 orang.

- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 3 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang.
- Pejabat Struktural : 4
- Pejabat Fungsional : 19 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			
1	Pelaksanaan pemeriksaan reguler	479.275.000	461.421.000
2	Koordinasi pengawasan dan saber pungli	179.725.000	117.967.209
3	Monitoring pemeriksaan di luar pkpt	73.900.000	62.309.000
4	Pelaksanaan pemeriksaan kasus	64.450.000	51.328.000
5	Review laporan keuangan daerah kabupaten jepara	84.239.000	79.113.964
6	Gelar pengawasan daerah	43.215.000	39.390.500
7	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	253.650.000	212.002.050
8	Evaluasi lkjip	57.200.000	57.083.192
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN			
1	Pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/seminar bidang pengawasan	122.500.000	94.429.130
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN			
1	Pengembangan jaringan sistem aplikasi informasi pengawasan	60.071.000	53.875.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	134.600.000	103.360.680

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Jepara dan RPJMD Kabupaten Jepara, perencanaan pembangunan direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan capaian kinerja yang harus dipenuhi dalam setiap tahunnya. Sehingga nanti pada akhir tahun 2022, capaian kinerja yang di harapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Jepara dan RPJMD Kabupaten Jepara dapat terpenuhi.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kurangnya tenaga Auditor di bidang pengawasan untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima.
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana
- Solusi :
 - Pengangkatan Sumber Daya Manusia, tenaga Auditor/Pengawas.
 - Penambahan Sarana Prasarana dengan penganggaran Tahun 2018



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
 - ❖ Bagian Umum
 - ❖ Bagian Tata Pemerintahan
 - ❖ Bagian Hukum
 - ❖ Bagian Organisasi
 - ❖ Bagian Perekonomian
 - ❖ Bagian Pemerintahan Desa
 - ❖ Bagian Pembangunan
 - ❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Program dan Kegiatan :

❖ Bagian Umum

➤ Program Pelayanan Publik

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan di Lingkungan Setda
- 2) Menunjang kegiatan festival daerah dan kesadaran bela negara
- 3) Sewa peralatan transportasi penunjang kegiatan tamu
- 4) Perawatan jaringan air dan listrik
- 5) Perawatan sound system, genset dan AC
- 6) Pengadaan souvenir cinderamata tamu daerah

➤ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

- Kegiatan :

- 1) Pengadaan inventaris kantor & perlengkapan rumah tangga kepala daerah kabupaten
- 2) Menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan kesekretariatan daerah
- 3) Perawatan rutin kendaraan dinas di lingkungan setda
- 4) Penyelenggaraan jamuan resmi dan harian pemda kabupaten jepara
- 5) Menunjang pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
- 6) Perawatan taman di lingkungan kantor dan dinas Bupati
- 7) Seremonial dan Protokoler

❖ Bagian Tata Pemerintahan

➤ Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan

- Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Keterangan Petanggungjawaban Bupati
- 3) Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
- 4) Menunjang DESK PILGUB dan Wagub Prov Jateng
- 5) Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 6) Monitoring Evaluasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN)
- 7) Rakor Bidang Pemerintahan
- 8) Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan

❖ **Bagian Hukum**

➤ **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- **Kegiatan :**

- 1) Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum

➤ **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengembangan SJDI dan Produk Hukum Berbasis TIK
- 2) Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Rp. Daerah
- 3) Penyusunan dan Pembaharuan Produk Hukum Daerah
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Ranham Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019
- 5) Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Monitoring hasil Pelaksanaannya

➤ **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Bimbingan, Pembinaan, Pelatihan dan Pengiriman Peserta Lomba Kadarkum di Tingkat Provinsi Jawa Tengah

❖ **Bagian Organisasi**

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi KORPRI

➤ **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyusunan LKj IP
- 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama
- 3) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
- 4) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

❖ **Bagian Perekonomian**

➤ **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Kesekretariatan BUMD

➤ **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Krida Pembangunan

- 2) Fasilitas Koordinasi Pengendalian & Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Makanan Berbahaya
- **Program Kerjasama Pembangunan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Koordinasi Tanggungjawab Sosial (TSP)
- **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitas Kegiatan Bidang Kerajinan
 - 2) Fasilitas Pelaksanaan Pasar Murah
- **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitas Kegiatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
 - 2) Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Koordinasi dan Monitoring Sekretariat DBHCHT
- **Program Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Koordinasi TPID
- **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitas dan Koordinasi keg. Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitas Kegiatan Bidang Perkoperasian
- ❖ Bagian Pemerintahan Desa
- **Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembinaan Bendahara Barang Desa
- **Program Penataan dan Peraturan Perundang undangan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitas, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa Desa
 - 2) Klarifikasi Peraturan Desa

- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitasi, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa Desa
- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitasi Pemilihan Petinggi
 - 2) Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Aparat Kecamatan dan Pemerintahan Desa
 - 3) Bintek Anggota BPD
 - 4) Pembekalan Petinggi dan BPD
 - 5) Fasilitasi Kegiatan PPD dan ABPEDSI Kab. Jepara
 - 6) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
 - 7) Pembinaan Perangkat Desa se Kabupaten Jepara
 - 8) Fasilitasi, Bimbingan Konsultasi dan Evaluasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Desa
 - 9) Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
 - 10) Pembinaan Administrasi Desa
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa
- ❖ Bagian Pembangunan
- **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Bintek / Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa
 - 2) Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bagi OPD dan Desa
 - 3) Pembinaan Kepada Penyedia Barang/Jasa tentang Perubahan Regulasi Baru Dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - 4) Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersebar se-Kabupaten Jepara
 - 5) Peningkatan Kapasitas, Maintenance Sistem Informasi ULP dan Monev
 - 6) Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan
 - 7) Penunjang Sarana dan Prasarana ULP
 - 8) Penyusunan Juknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara

- ❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat
- **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Bidang Kesra
 - 2) Penunjang Bantuan Pendidikan dan Koordinasi di Bidang Pendidikan
 - 3) Fasilitasi GOPTKI
 - 4) Fasilitasi Dian Dharma
 - 5) Fasilitasi Dewan Pendidikan Jepara
- **Program Pendidikan Keagamaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Bidang Kesra
 - 2) Fasilitasi Lomba Bidang Pendidikan agama Islam (PAI)
- **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembinaan penghuni panti asuhan dan sosial se Kabupaten Jepara
 - 2) Pembinaan Penyandang Cacat
- **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Rakor Peningkatan Kesehatan Lingkungan Desa
 - 2) Fasilitasi Penunjang Kegiatan Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional pada Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
 - 3) Rakor Peningkatan Pemberdayaan Lansia
- **Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyelenggaraan Manasik Haji dan Haji
 - 2) Pembinaan PPAI di desa se Kabupaten Jepara
 - 3) Penyelenggaraan Hisab Rukyah Daerah
 - 4) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat
 - 5) Fasilitasi Festival Anak Soleh
 - 6) Penyelenggaraan Istighotsah, Mujahadah, dan Khataman Quran
 - 7) Penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan khotib
 - 8) Penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ
 - 9) Pelaksanaan Safari Jumat dan safari romadhon
 - 10) Fasilitasi Musabaqoh Qiroatil Kutubs
 - 11) Pembinaan Nadzir dan Takmir Masjid
 - 12) Fasilitasi BAMAG
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Fasilitasi Pembinaan Olahraga dan Pramuka

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ **Bag Umum**

- Jumlah Pegawai : 32 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 13 orang, D3: 2 orang, SLTA : 13 orang, SLTP : 0 orang, SD : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 8 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang, Pengatur (II/c) : 9 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda (II/a) : 3 orang, Juru (I/c) : 1 orang

❖ **Bagian Tata Pemerintahan**

- Jumlah Pegawai : 8 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 4 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 org, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 2 orang.

❖ **Bagian Hukum**

- Jumlah pegawai : 10 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2=3 orang, S1=6 orang, SD= 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Penata Tk I (IIIId)= 2 orang, Penata (III/c) = 5 orang, Penata Muda Tk. I (IIIb)= 1 orang, Pengatur Muda (Iia)= 1 orang

❖ **Bagian Organisasi**

- Jumlah Pegawai : 12 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2= 3 orang, S1= 4 orang, D3= 1 orang SLTA= 3 orang, SLTP= 1 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = - orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang, Penata Tk.I (III/d) = 2 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 2 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = orang.

❖ **Bagian Perekonomian**

- Jumlah Pegawai : 13 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 = 7 orang, S1 = 6 orang

- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IVb) = 1 orang, Pembina (Iva) = 1 orang, Penata Tk. I (IIIId) = 8 orang, Penata Muda Tk. I (IIIb) = 2 orang, Penata Muda (IIIa) = 1 orang
- ❖ **Bagian Pemerintahan Desa**
- Jumlah pegawai : 9 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2=2 orang, S1=5 orang, SLTA= 2 orang
 - Pangkat dan golongan, Pengatur Tk. I (II/c) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang Penata (III/c) = 1 orang, Penata Tk. I (III/d) = 2 orang, Pembina Tk. I (IV/b) =1 orang
- ❖ **Bagian Pembangunan**
- Jumlah pegawai : 13 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 5 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 3 orang.
 - Pangkat dan golongan : Pembina TK.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk.I (III/d) : 1 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 1 orang, Pengatur Tk. I (IIId) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 3 org, Pengatur Muda Tk. Pengatur Muda (IIa) : 1 org.
- ❖ **Bagian Kesejahteraan Rakyat**
- Jumlah pegawai : 11 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2= 3 orang, S1= 2 orang, D3= 0 orang, D2 = 0 orang, D1 = 0 orang, SLTA= 6 orang, SMP = 0 orang
 - Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 0, Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) =1 orang, Penata Tk. I (III/d) = 3 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 0 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 orang, pengatur (II/c) = 2 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) =2 orang, pengatur muda (II/a) = 0 orang, I/d = 0 orang, I/c =0 orang, I/b =0 orang dan I/a =0 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

❖ Bagian Umum

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Publik			
1	Pengelolaan Kebersihan & Keamanan di Lingk Setda	800.000.000	795.281.600
2	Menunjang Keg Festival Daerah & Kesadaran Bela Negara	474.125.000	439.409.601
3	Sewa Peralatan Transportasi Penunjang Kegiatan Tamu	49.000.000	11.835.163
	Perawatan Jaringan Air dan Listrik	140.837.000	119.100.062
4	Perawatan Sound System, Genset dan AC	110.000.000	126.870.000
5	Pengadaan Souvenir Cinderamata Tamu Daerah	295.000.000	294.690.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			
1	Pengadaan inventaris kantor & perlengk RT Kepala Daerah Kabupaten	988.000.000	943.218.795
2	Menunjang Penyelenggaraan Pemth dan Kesekretariatan Daerah	1.407.100.000	1.241.271.714
3	Perawatan Rutin Kendaraan Dinas di Lingkungan Setda	499.450.000	498.872.125
4	Penyelenggaraan Jamuan Resmi dan Harian Pemda Kabupaten Jepara	1.139.725.000	853.331.606
5	Menunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.429.260.000	1.880.177.839
6	Perawatan Taman di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati	324.554.000	320.287.986
7	Seremonial dan Protokoler	127.500.000	126.870.000

❖ Bagian Tata Pemerintahan

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Pemerintahan			
1	Penyusunan & Pembuatan LPPD	72.897.500	71.895.137
2	Penyusunan & Pembuatan LKPJ	93.700.000	81.918.782
3	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	45.920.000	44.492.364
4	Menunjang DESK PILGUB dan Wagub Prov Jateng	81.750.000	81.074.680
5	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kec	18.200.000	15.307.908
6	Monitoring Evaluasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN)	21.097.500	21.084.804
7	Rakor Bidang Pemerintahan	32.970.000	31.263.440
8	Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan	391.815.000	376.903.613

❖ Bagian Hukum

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			
1	Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum	113.750.000	80.906.840
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
1	Pengembangan SJDI dan Produk Hukum Berbasis TIK	151.775.000	149.900.527
2	Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Rp. Daerah	25.245.000	21.737.096
3	Penyusunan dan Pembaharuan Produk Hukum Daerah	Rp.224.169.500	214.427.174
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Ranham Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019	29.037.500	24.335.820
5	Sosialisasi Peraturan di Bid Cukai	50.000.000	49.019.200

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Monitoring hasil Pelaksanaannya	72.250.000	70.006.038
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Bimbingan, Pembinaan, Pelatihan dan Pengiriman Peserta Lomba Kadarkum di Tingkat Provinsi Jawa Tengah	55.225.000	55.091.360

❖ Bagian Organisasi

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
1	Fasilitasi KORPRI	76.825.000,00	76.621.629,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Penyusunan LKj IP	68.700.000,00	67.803.828,00
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	32.900.000,00	32.599.132,00
3	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Ev Jabatan	35.290.000,00	34.955.399,00
4	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	23.225.000,00	22.924.752,00

❖ Bagian Perekonomian

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
1	Fasilitasi Kesekretariatan BUMD	25.135.000	24.275.470
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
1	Fasilitasi Pelaksanaan Krida Pembangunan	70.475.000	62.245.543
2	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian & Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Makanan Berbahaya	52.075.000	38.009.707
Program Kerjasama Pembangunan			
1	Penunjang Koordinasi Tanggungjawab Sosial (TSP)	30.325.000	21.350.026

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
1	Fasilitasi Keg Bidang Kerajinan	114.205.000	104.315.329
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah	246.875.000	236.460.163
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
1	Fasilitasi Kegiatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	6.715.000	5.636.971
2	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	8.675.000	8.414.340
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
1	Koordinasi dan Monitoring Sekretariat DBHCHT	38.975.000	36.304.449
Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport			
1	Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	30.862.000	28.407.280
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1	Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Koordinasi TPID	58.012.000	50.045.250
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
1	Fasilitasi dan Koordinasi keg. Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru	354.325.000	317.785.800
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
1	Fasilitasi Kegiatan Bidang Perkoperasian	21.053.000	16.252.151

❖ Bagian Pemerintahan Desa

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
1	Pembinaan Bedhr Barang Desa	70.474.000	65.020.000
Program Penataan dan Peraturan Perundang undangan			
1	Fasilitasi, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa Desa	39.812.000	33.683.680

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Klarifikasi Peraturan Desa	19.125.000	19.125.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
3	Fasilitasi, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa	19.512.000	18.528.280
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			
1	Fasilitasi Pemilihan Petinggi	400.592.000	385.585.843
2	Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dg Aparat Kec & Pemerintahan Desa	62.040.000	54.782.553
3	Bintek Anggota BPD	79.662.000	71.786.269
4	Pembekalan Petinggi dan BPD	26.607.000	25.215.720
5	Fasilitasi Kegiatan PPD dan ABPEDSI Kab. Jepara	27.280.000	26.094.562
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	36.780.000	34.135.954
7	Pembinaan Perangkat Desa se Kabupaten Jepara	56.735.000	52.552.512
8	Fasilitasi, Bimbingan Konsultasi dan Evaluasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Desa	17.595.000	16.315.500
9	Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa	19.875.000	19.310.696
10	Pembinaan Administrasi Desa	26.367.000	23.101.571
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa	58.352.000	52.208.246

❖ Bagian Pembangunan

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
1	Bintek / Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa	133.125.000	129.445.000
2	Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bagi OPD dan Desa	93.975.000	66.154.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
3	Pembinaan Kepada Penyedia Barang/Jasa tentang Perubahan Regulasi Baru Dalam Pengadaan Barang/Jasa	75.100.000	66.756.109
4	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersebar se-Kab Jepara	109.320.000	95.757.352
5	Peningkatan Kapasitas, Maintenance Sistem Informasi ULP dan Monev	169.725.000	163.424.300
6	Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan	131.840.000	120.240.639
7	Penunjang Sarana dan Prasarana ULP	100.000.000	98.061.027
8	Penyusunan Juknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara	117.825.000	86.796.818

❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Penunjang Bidang Kesra	98.500.000	90.949.200
2.	Penunjang Bantuan Pendidikan & Koordinasi di Bidang Pendk	224.150.000	222.691.000
3.	Fasilitasi GOPTKI	100.000.000	99.739.924
4.	Fasilitasi Dian Dharma	50.000.000	49.819.320
5.	Fasilitasi Dewan Pendidikan	43.520.000	42.835.680
6.	Fasilitasi Badan Koordinasi TPQ	31.700.000	31.665.200
7.	Fasilitasi Lomba Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	59.787.000	58.223.460
8.	Pembinaan Penghuni Panti Asuhan & Sosial Se Kab Jepara	49.657.000	46.035.720
9.	Pembinaan Penyandang Cacat	49.605.000	47.262.880
10.	Rakor Peningkatan Kesehatan Lingkungan Desa	32.961.000	32.391.880
11.	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional pada Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	14.900.000	10.374.600
12.	Rakor Peningkatan Pemberdayaan Lansia	46.875.000	44.447.600
13.	Penyelenggaraan Manasik Haji	1.042.430.000	1.019.726.555

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	dan Haji		
14.	Pembinaan PPAI di desa se Kabupaten Jepara	145.042.000	127.086.000
15.	Penyelenggaraan Hisab Rukyah Daerah	36.805.000	36.804.320
16.	Fasilitasi Keagamaan Masy	814.110.000	581.702.890
17.	Fasilitasi Anak Soleh	41.795.000	41.175.520
18.	Penyelenggaraan Istighotsah, Mujahadah dan Khataman Quran	425.680.000	401.333.560
19.	Penyelenggaraan Pembekalan dan Pelatihan Khotib	44.080.000	30.254.400
20.	Penyelenggaraan MTQ,STQ dan MHQ	345.860.000	336.147.906
21.	Terselenggaranya Safari Jumat dan Safari Ramadhan	794.735.000	741.923.260
22.	Fasilitasi Musabaqoh Qiroatil Kutubs	119.292.000	101.566.000
23.	Pembinaan Nadzir dan Takmir Masjid	59.150.000	43.611.622
24.	Fasilitasi BAMAG	29.937.000	23.402.000
25.	Fasilitasi Pembinaan Olahraga dan Pramuka	201.332.000	180.435.290

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas dari aparatur Negara dan sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Perumusan masalah, yaitu:
 - Pembuatan/penyusunan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa masih belum optimal, terdapat perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan di lapangan.
 - Proses pengadaan barang/jasa (pengadaan langsung) belum termonitoring secara baik.
 - Pemahaman mengenai peraturan pengadaan barang/jasa yang baru belum sepenuhnya optimal di lingkup OPD dan Penyedia Barang/Jasa.
 - Masih banyaknya Aparatur Negara yang belum memahami setiap aturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga masih ada Pejabat yang digugat di Pengadilan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- Permasalahan hukum sifatnya insidentil yang jumlahnya tidak sama setiap tahunnya sehingga anggaran yang disediakan kadang-kadang kurang jika pada tahun tersebut banyak kasus yang butuh penanganan /penyelesaian baik di Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan di PTUN.
- Terkait dengan seringnya Peraturan Perundang-undangan yang berubah- ubah seiring dengan penyesuaian dinamika perkembangan demokrasi dan reformasi birokrasi sehingga diperlukan percepatan penyesuaiaan peraturan di tingkat kabupaten yang didukung dengan SDM dan sarana yang memadai.
- Belum optimalnya sumberdaya manusia untuk mengimbangi percepatan dinamika berbangsa dan bernegara pada umumnya dan perubahan peraturan perundang- undangan pada khususnya, sehingga diperlukan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Memberi pembinaan dan monitoring pelaksanaan penyusunan administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Membuat aplikasi yang menunjang proses pengadaan barang/jasa (pengadaan langsung) yang berinduk di ULP serta dapat dimonitoring proses pelaksanaannya
 - Melakukan sosialisasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa terbaru kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa.
 - Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparatur daerah dalam memahami setiap aturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - Menghimpun, mempelajari dan menganalisa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan permasalahan hukum yang timbul
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.
 - Meningkatkan kesadaran Masyarakat yang sadar dan patuh Hukum.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana produk hukum daerah
 - Meningkatkan SDM dan PAD

- Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan permasalahan hukum yang timbul
- Meningkatkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang patuh hukum
- Meningkatkan kuantitas SDM yang memadai
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Munculnya permasalahan hukum bersifat insidental sehingga tidak dapat diprediksi jumlah permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam setiap tahunnya
 - Masih kurangnya perhatian terhadap pentingnya JDIIH dari setiap SKPD padahal JDIIH sangat penting dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena terkait tersedianya produk hukum sebagai landasan acuan / dasar pelaksanaan tugas
 - Masih adanya SKPD dalam menyusun dan meminta asmanan kepada Bupati dan Sekda tidak melalui Bagian Hukum (disesuaikan dengan PP 50 Tahun 2007) sehingga produk hukum / perjanjian yang dihasilkan ada potensi muncul permasalahan di kemudian hari
 - Masih belum optimalnya penyusunan administrasi pengadaan barang/jasa di Desa.
 - Informasi pengadaan barang/jasa di masing-masing OPD belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
 - Pemahaman mengenai peraturan pengadaan barang/jasa yang baru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya optimal.
- Solusi :
 - Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Melakukan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan kepada SKPD berkaitan manfaat dan fungsi sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum
- Optimalisasi dari Bagian Hukum sebagai filter setiap naskah perjanjian dan Penyebarluasan informasi PP 50 Tahun 2007.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (sharing dan konsultasi)
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui aplikasi yang berinduk di ULP, sehingga semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dimonitoring.
- Melaksanakan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (sharing dan konsultasi)
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui aplikasi yang berinduk di ULP, sehingga semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dimonitoring.
- Melaksanakan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- SEKRETARIAT DPRD KAB. JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Produk Hukum
- **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pembuatan Buku Risalah
 - 2) Pembuatan Buku Laporan Alat Kelengkapan Dewan
 - 3) Menunjang Pelaksanaan Pemda
 - 4) Workshop Penguatan Anggota DPRD
 - 5) Menunjang Kegiatan DPRD
 - 6) Pembuatan Buku Keputusan DPRD
 - 7) Pengadaan Souvenir Cenderamata Tamu Daerah
 - 8) Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning Service
 - 9) Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga

➤ **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- 2) Kerjasama dengan Media Cetak, Radio dan Elektronika
- 3) Pembuatan Dokumentasi, Foto, CD Kegiatan DPRD

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 42 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 8 orang, S1 = 8 orang, D3 = 2 orang, SLTA = 23 orang, SLTP = 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = - orang, Pembina Tk.1 (IV/b) = 3 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata Tk.1 (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 6 orang, Penata Muda Tk.1 (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a)) = 1 orang, Pengatur Tk.1 (II.d) = 2, Pengatur (II/c) = 17 orang, Pengatur Muda Tk.1 (II/b) = 3 orang, Pengatur Muda (II/a) = - orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
1	Penyusunan Produk Hukum	4.220.900.000	3.099.952.842
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
1	Pembuatan Buku Risalah	75.000.000	68.713.500
2	Pembuatan Buku Laporan Alat Kelengkapan Dewan	69.940.000	49.874.249
3	Menunjang Pelaksanaan Pemd	13.954.317.000	13.163.951.831
4	Workshop Penguatan Anggota DPRD	3.554.307.000	3.253.332.387
5	Menunjang Kegiatan DPRD	4.234.150.000	3.441.923.000
6	Pembuatan Buku Keputusan DPRD	26.400.000	22.450.500
7	Pengadaan Souvenir Cinderamata Tamu Daerah	75.000.000	52.567.500
8	Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning Service	202.500.000	184.900.000
9	Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga	40.000.000	3.147.650

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	150.900.000	108.450.000
2	Kerjasama dengan Media Cetak, Radio dan Elektronika	315.000.000	235.915.000
3	Pembuatan Dokumentasi, Foto, CD Kegiatan DPRD	47.500.000	29.179.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pada Sekretariat DPRD diawali dengan Renja, Pengisian RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, KUA, PPAS, lantas RAPBD, untuk Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan tidak diikuti karena semua kegiatan di Sekretariat DPRD lokasinya tingkat Kabupaten

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Volume kegiatan DPRD yang padat, serta administrasi keuangan yang menyertai setiap kegiatan membuat jadwal kerja pegawai Sekretariat DPRD Kab. Jepara sangat padat. Juga mengenai ketepatan administrasi serta penggunaan anggaran yang harus extra hati-hati, dikarenakan pegawai Sekretariat DPRD yang harus bertugas membantu semua bentuk administrasi dari kegiatan legislatif.
- Solusi :
 - Penambahan tenaga pegawai keuangan dan administrasi.
 - Bekerja sesuai aturan PerUndang-undangan yang berlaku.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN DONOROJO

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Donorojo
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**

- **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- **Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjantal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 20 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 1 orang, S1 : 7 orang, SLTA : 12 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 3 orang, Pengatur (II/c) : 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec. Donorojo	31.900.000	31.900.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	70.952.000	69.635.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjantal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	34.610.000	34.545.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Donorojo antara lain :
 - Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
 - Terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
 - Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
 - Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
 - Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
 - Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - Wilayah Kecamatan Donorojo yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
 - Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kurang maksimal
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Donorojo yaitu :
 - Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan
 - Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
 - Melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kesejahteraan ASN dan keluarganya.
 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor
 - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam Pemilu Kepala Daerah/ Negara

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya dana yang tersedia dan SDM yang berkualitas di Kecamatan Donorojo
- Solusi :
 - Penambahan dana dan SDM yang berkualitas



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KELING

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta peaksanaan Musrenbang Kec. Keling
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Keling
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- **Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 22 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 5 orang, SLTA = 14 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk.I (III/d) = 3 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk. I = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 2 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 9 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Keling	23.737.000	23.287.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Keling	54.137.000	32.967.500
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	83.720.000	50.441.500
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	35.820.000	23.777.500

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pelayanan di Kecamatan Keling dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pelaksana teknis kewilayahan adalah :

- Masalah Pelayanan Administrasi Kantor
- Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
- Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada aspek prioritas.
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.
 - Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.
 - Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
 - Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Pelayanan Administrasi Kantor
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masalah Pelayanan Administrasi Kantor
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Solusi :
 - Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada aspek prioritas.
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan

Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.

- Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.
- Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
- Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KEMBANG

2. Program dan Kegiatan :

- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Kembang**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi
- **Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang kegiatan TP-PKK, Pokjantal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)
 - 2) Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan Dana Desa
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan pembinaan Kecamatan Kembang)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 28 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 1 orang, S1 : 4 orang, SLTA : 22 orang, SLTP : 1 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang, Penata Muda (III/a) : 2 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1

orang, Pengatur (II/c) : 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 7 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang, Juru (I/c) : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Kembang			
1	Perencanaan dan evalusai	24.019.000	24.019.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec.Donoroyo	45.014.000	. 42.752.800
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	75.750.000	74.280.000
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	50.000.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Kembang antara lain :
 - Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
 - Terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
 - Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
 - Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
 - Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

- Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Wilayah Kecamatan Donorojo yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
- Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kurang maksimal
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kembang yaitu :
 - Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan
 - Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
 - Melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kesejahteraan ASN dan keluarganya.
 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor
 - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam Pemilu Kepala Daerah/ Negara

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya dana yang tersedia dan SDM yang berkualitas di Kecamatan Kembang
- Solusi :
 - Penambahan dana dan SDM yang berkualitas



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN BANGSRI

2. Program dan Kegiatan :

- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Bangsri**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta peaksanaan Musrenbang Kec. Keling
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan teknis kantor Kecamatan Keling
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 25 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 5 orang, D4 : - orang, D3 : 1 orang, SLTA : 15 orang, SLTP : 1 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 12 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Perencanaan dan Evaluasi	28.160.000	28.060.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Perencanaan dan Evaluasi	28.160.000	28.060.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan teknisKecamatan Bangsri	37.675.000	36.219.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	84.189.000	81.043.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	35.187.000	32.531.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pelayanan di Kecamatan Kembang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pelaksana teknis kewilayahan adalah :
 - Masalah Pelayanan Administrasi Kantor
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada aspek prioritas.
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.
 - Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan tehnologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.

- Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
- Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Pelayanan Administrasi Kantor
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masalah Pelayanan Administrasi Kantor
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Solusi :
 - Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada aspek prioritas.
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.
 - Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.
 - Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
 - Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN MLONGGO

2. Program dan Kegiatan :

- **Program peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta peaksanaan Musrenbang Kec. Mlonggo
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan umum dan pembinaan Kecamatan Keling
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 3) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 29 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 5 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 20 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 4 orang, Penata (III/c) : 5 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 5 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISAS I (Rp)
Program Peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD			
1	Perencanaan & Evaluasi Pelaks Musrenbang Kec. Mlonggo	23.025.000	19.883.500
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan	53.950.000	48.720.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISAS I (Rp)
Program Peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD			
1	Perencanaan & Evaluasi Pelaks Musrenbang Kec. Mlonggo	23.025.000	19.883.500
	Mlonggo		
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	37.695.000	32.310.000
2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masy, ADD dan DD	69.585.000	58.080.300
3	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	37.713.000	34.342.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada fungsi Pemerintahan di Kecamatan adalah:
 - Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Desa;
 - Masih lemahnya koordinasi dan pembinaan antara Desa dengan Kecamatan;
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;
 - Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;
 - Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan Desa;
 - Kurangnya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Desa;
 - Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;

- Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif
- Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Mlonggo.
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima;
 - Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan;
 - Pemanfaatan teknologi dalam proses pelaksanaan pelayanan di masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa dalam perencanaan pembangunan;
 - Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan maupun desa;
 - Peningkatan pemberdayaan Posyandu dan kegiatan-kegiatan bidang sosial yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak;
 - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Kantor
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan** :
 - Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Desa;
 - Masih lemahnya koordinasi dan pembinaan antara Desa dengan Kecamatan;
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;
 - Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;

- Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan desa;
- kurangnya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Desa;
- Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
- Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif;
- Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Mlonggo.

• **Solusi :**

- Memaksimalkan kemampuan dengan jumlah pegawai yang ada;
- Lebih seringnya pembinaan kepada desa oleh pihak kecamatan dengan pendekatan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di desa;
- Perlunya partisipasi masyarakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan baik di desa dan kecamatan;
- Perlunya penambahan personil di Kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang IT, Pelayanan Umum dan Perencanaan pembangunan daerah;
- Perlunya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kecamatan, Desa melalui pendidikan, pelatihan, workshop, lokakarya dan sebagainya dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
- Memaksimalkan anggaran yang ada dan permohonan tambahan anggaran di tahun berikutnya;
- Perlunya sistem informasi pelayanan yang berbasis web dalam rangka percepatan pelayanan di masyarakat dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
- Perlunya data-data dilapangan yang akurat sehingga bisa digunakan untuk analisa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN PAKIS AJI

2. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
- **Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aji
- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemberdayaan KWT Dalam Rangka Pemanfaatan Pekarangan

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 21 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 3 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 15 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 9 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 Orang.

4. Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan	70.975.000	68.936.500
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	72.545.000	69.693.740
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	35.117.000	35.116.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan			
1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aji	23.512.000	23.353.600
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			
1	Pemberdayaan KWT Dalam Rangka Pemanfaatan Pekarangan	17.425.000	17.273.280

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pelaksanaan APBD di Kantor Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum, pemberdayaan dan evaluasi dari sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Pakis Aji (Karyawan dan Perangkat serta Masyarakat Desa) yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada :
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia) Pada Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Belum adanya ruang lactasi yang layak/memadai bagi ibu menyusui sehingga kurangnya kenyamanan dalam pelayanan
 - Masih kurangnya peralatan operasional pelayanan berupa beberapa perangkat komputer dan kelengkapannya (Banyak yang rusak)
 - Masih adanya beberapa Desa yang belum bisa tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD / DD sehingga menghambat proses realisasi pencairan ADD/DD
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan kompetensi SDM Pegawai dalam menguasai tugas pokok dan fungsinya di Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Meningkatkan Kenyamanan, Kelancaran, Ketepatan dan Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakis Aji dalam memperoleh pelayanan
 - Pendampingan dan Pengawasan terhadap Desa dalam pelaksanaan anggaran ADD / DD

- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program pelayanan administrasi perkantoran dalam hal pemenuhan kebutuhan rutin kantor Kecamatan Pakis Aji serta pelayanan umum dan pembinaan dalam hal kelancaran, kenyamanan, ketepatan dan kepuasan dalam melayani masyarakat
 - Program Peningkatan Keberberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam pendampingan dan Pengawasan Desa dalam melaksanakan anggaran ADD/DD

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia) Pada Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Masih kurangnya peralatan operasional pelayanan berupa beberapa perangkat komputer dan kelengkapannya (Banyak yang rusak), belum adanya Mesin Digital Atrian dan Ruang Khusus Ibu Menyusui (Ruang Lactasi)
- Solusi :
 - Melaporkan ke Bupati Jepara melalui BKD Kabupaten Jepara dalam hal kekurangan staf yang kosong di Kantor Kecamatan Pakis Aji dan permintaan diklat / pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan kompetensi SDM di Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Merencanakan secara bertahap untuk belanja modal computer yang tertuang dalam RKA / DPA APBD Kecamatan Pakis Aji
 - Mengajukan tambahan anggaran ke Bupati Jepara untuk peningkatan ruang pelayanan umum menjadi satu atap / satu pintu



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pelayanan Administrasi Kantoran

- **Kegiatan :**
 - 1) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Karangkebagusan
 - 2) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Demaan

- 3) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Bulu
 - 4) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Kauman
 - 5) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Jobokuto
 - 6) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Ujungbatu
 - 7) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Panggang
 - 8) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Pengkol
 - 9) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Bapangan
 - 10) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Potroyudan
 - 11) Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Saripan
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan
 - **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aji
 - **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjantal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 85 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 11 orang, S1 : 30 orang, D3 : 2 orang, D2 : 0 orang, D1 : 1 orang, SLTA : 37 orang, SLTP : 3 Orang, SD : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 30 orang, Penata (III/c) : 25 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 2 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang, Pengatur (II/c) : 16 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 Orang, Juru : 1 Orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Kantor			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Jepara	246.933.000	240.924.201
2	Menunjang Pelyn Umum di Kel Karangkebagusan	58.687.000	53.734.790
3	Menunjang Pelayanan Umum di Kel Demaan	92.799.000	89.905.624
4	Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Bulu	78.787.000	76.844.097
5	Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Kauman	79.120.000	74.236.251
6	Menunjang Pelayanan Umum di Kel Jobokuto	86.151.000	84.859.870
7	Menunjang Pelayanan Umum di Kel Ujungbatu	67.362.000	66.659.344
8	Menunjang Pelayanan Umum di Kel Panggang	87.149.000	86.170.107
9	Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Pengkol	74.628.000	73.183.614
10	Menunjang Pelayanan Umum di KelBapangan	77.709.000	74.445.431
11	Menunjang Pelayanan Umum di Kel Potroyudan	99.757.000	99.144.796
12	Menunjang Pelayanan Umum di Kelurahan Saripan	57.706.000	57.340.272
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan	70.112.000	68.621.727
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	Musrenbang Tingkat Kec	23.512.000	22.686.500
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			
1	Penunjang Kegi Pemberdaya an Masyarakat, ADD dan DD	75.047.000	74.753.807
2	Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanal, Posyandu dan TK. Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	37.872.000	36.317.751

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada fungsi Pemerintahan di Kecamatan adalah:
 - Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Kelurahan;
 - Masih lemahnya koordinasi dan pembinaan antara Desa dan kelurahan dengan Kecamatan;
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;
 - Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;
 - Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan;
 - Belum tersedianya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Kelurahan;
 - Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
 - Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif
 - Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Jepara
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima;
 - Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan;
 - Pemanfaatan teknologi dalam proses pelaksanaan pelayanan di masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan;
 - Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan maupun desa/kelurahan;
 - Peningkatan pemberdayaan Posyandu dan kegiatan-kegiatan bidang sosial yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak;
 - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelayanan Administrasi Kantor

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan :

- Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Kelurahan;
- Masih lemahnya koordinasi dan pembinaan antara Desa dan kelurahan dengan Kecamatan;
- Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;
- Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;
- Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan;
- Belum tersedianya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Kelurahan;
- Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
- Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif;
- Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Jepara.

• Solusi :

- pegawai yang ada;
- Lebih seringnya pembinaan kepada desa dan kelurahan oleh pihak kecamatan dengan pendekatan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di desa/kelurahan;
- Perlunya partisipasi masyarakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan baik di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Perlunya penambahan personil di Kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang IT, Pelayanan Umum dan Perencanaan pembangunan daerah;
- Perlunya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kecamatan, Desa/Kel melalui pendidikan, pelatihan,

- workshop, lokakarya dan sebagainya dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
- Memaksimalkan anggaran yang ada dan permohonan tambahan anggaran di tahun berikutnya;
 - Perlunya sistem informasi pelayanan yang berbasis web dalam rangka percepatan pelayanan di masyarakat dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
 - Perlunya data-data lapangan yang akurat sehingga bisa digunakan untuk analisa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN TAHUNAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tahunan
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 25 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, S1 = 7 orang, D3 = 0 orang, SLTA = 16 orang, SLTP = 0 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 6 orang,

Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 10 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang , Pengatur Muda (II/a) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	9.204.000	212.529.455
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Tahunan	74.287.000	71.195.912
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	73.940.000	65.697.009
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	37.955.000	35.806.804

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perbup No 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, maka dalam rangka transparansi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jepara perlu dilaksanakan mekanisme Perencanaan Pembangunan yang partisipatif. Adapun masalah, kebijakan dana program antara lain :

- Masalah, yang sering menjadi kendala dibidang Pemerintahan adalah :
 - Masih kurangnya personel Kecamatan yang secara Sumber Daya Manusia berkualitas
 - Belum optimalnya Penyerapan Usulan Pembangunan oleh SKPD

- Belum optimalnya Pemerataan Program SKPD dengan usulan dari Desa
- Masih kurangnya Dana APBD untuk sarana dan prasarana Kantor
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dengan cara mengikuti Diklat – diklat yang ada dilingkungan Pemda
 - Meningkatkan penyerapan usulan oleh SKPD
 - Meningkatkan pemerataan program sehingga mencakup merata di semua Desa
 - Meningkatkan Dana APBD untuk sarana dan prasarana kantor
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Program MusrenbangDes lebih di intensifkan
 - Program Sosialisasi Program SKPD terkait dengan Desa
 - Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Program Peningkatan Keberberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam pendampingan dan Pengawasan Desa dalam melaksanakan anggaran ADD/DD

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia)
- **Solusi :**
 - Melaporkan ke Bupati Jepara melalui BKD Kabupaten Jepara dalam hal kekurangan staf yang kosong.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN BATEALIT

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Batealit

- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Batealit
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Batealit
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
 - 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, S1 = 3 orang, SLTA = 17 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 3 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 1 org, Pengatur (II/c) = 9 org, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Batealit	225.689.000	222.984.263
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Batealit	20.025.000	20.017.600
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Batealit	45.745.000	44.996.400

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	65.022.000	64.370.602
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	33.637.000	33.547.928

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana Pemerintahan
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pembangunan pendidikan masyarakat
 - Belum optimalnya pembangunan kesehatan masyarakat
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan
 - Program peningkatan SDM Aparatur Pemerintah
 - Program peningkatan pendidikan masyarakat
 - Program peningkatan kesehatan masyarakat
 - Program peningkatan pembangunan infrastruktur
 - Program peningkatan pembangunan desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Sulitnya mencari rekanan pengadaan barang dan jasa serta kurangnya sumber daya aparatur
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - Administrasi desa kurang lengkap dan tidak tepat waktu
- Solusi :
 - Menunjuk rekanan yang representatif dan Mengangkat pegawai harian lepas
 - Memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media (papan pengumuman, media sosial, dan pos pengaduan)
 - Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan, hasil dan manfaat dari Musrenbangcam dan Musrenbangdes
 - Pendampingan dan pembinaan perangkat desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN PECANGAAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Pecangaan
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
 - 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 3) Pelayanan Umum dan pembinaan Kecamatan Pecangaan

- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pecangaan

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 25 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 1 orang, S1 = 4 orang, D3 : 2 org, SLTA = 18 orang, SLTP : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 2 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 2 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Pecangaan	401.770.000	386.099.027
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Pelayanan Umum & Pem binaan Kec Pecangaan	24.365.000	23.912.900
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	59.662.000	53.951.375
2	1. Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu & Tim Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	36.537.000	32.022.940

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
 - Belum optimalnya Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
 - Belum optimalnya partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
 - Belum optimalnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Belum optimalnya Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan
- **Kebijakan**, diarahkan untuk
 - Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
 - Mengembangkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Desa.
 - Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Meningkatkan Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Permasalahan : pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat dan aparat Kecamatan belum optimal
- Solusi :
 - memantapkan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dan Desa serta instansi terkait.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KEDUNG

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :

- 1) Rehab Rumah Dinas Camat
- 2) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Kedung

➤ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,

- Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kedung

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Kegiatan :

- 1) Pembangunan Mushola

➤ Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

- Kegiatan :

- 1) Pelayanan umum dan pembinaan Kecamatan Kedung

➤ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
- 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 29 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 4 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 20 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 org
Pembina (IV/a) : 1 org, Penata Tk. I (III/d) : 7 org, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda (III/a) : 2 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 3 orang, Pengatur (II/c) = 13 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Kedung	182.722.000	157.733.109
2	Rehab Rumah Dinas Camat	73.880.000,00	71.820.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Perencanaan dan evaluasi Kecamatan Kedung	20.025.000,-	19.112.000,-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Kedung	50.637.000,00	49.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Keg Pemberdaya an Masy, ADD dan DD	70.115.000	36.896.950
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	37.362.000	32.365.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan urusan pemerintahan di Kantor Kecamatan Kedung dilakukan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Proses perencanaan dimulai dari:

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan di Kantor Kecamatan Kedung adalah:
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi kantor
 - Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat
 - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di tingkat desa
 - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kantor

- Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
- Meningkatkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa (Musrenbang)
- Meningkatkan kualitas pembinaan kepada masyarakat
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
 - Program peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat
 - Program peningkatan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa (Musrenbang)
 - Program peningkatan pembinaan kepada masyarakat

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:
 - Kurang tertibnya masyarakat mengenai administrasi kependudukan
 - Administrasi pemerintah desa belum tertib
 - Masih kurangnya sarana pendukung kantor
 - Kurangnya pegawai
 - Tidak terakomodirnya usulan-usulan dari desa pada Musrenbangkab
 - Terjadinya abrasi di pantai di beberapa desa
- Solusi:
 - Memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Melakukan pembinaan administrasi kepada pemerintah desa
 - Pengadaan sarana prasarana pendukung
 - Mengangkat tenaga harian lepas
 - Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten pada saat Musrenbangkab
 - Mengusulkan program pencegahan abrasi



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KALINYAMATAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**

- 1) Tersedianya pelayanan teknis dan sarana parsarana Kantor Kec.Kalinyamatan
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kalinyamatan
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Kalinyamatan
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 1. Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
 2. Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyyyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 26 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 7 orang, SLTA : 16 orang
- Pangkat dan golongan : orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 4 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 .orang, Penata Muda (III/a) : 2 .orang, Pengatur (II/c) 9 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 Orang, Pengatur (II/a): 1 Orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kec Kalinyamatan	233.677.500	228.306.000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec	22.877.500	21.698.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum & Pembinaan Kec Kalinyamatan	22.877.500	21.698.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD & DD	81.102.500	71.586.500
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecn (TK-PKK)	35.555.000	30.044.900

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi adalah :
 - Rendahnya partisipasi masyarakat.
 - Belum optimalnya layanan pada masyarakat, antara lain disebabkan karena kurang memudahinya sarana dan prasarana yang ada.
 - Pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa belum optimal.
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Memantapkan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan , Dinas Instansi tingkat Kecamatan dan Desa.
 - Menyelenggarakan system administrasi Pemerintahan.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Terwujudnya system penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa yang harmonis.
 - Terwujudnya ketentraman dan ketertiban secara berlanjut.
 - Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Akuntabilitas pelaksanaan program yang optimal.

- Mampu meningkatkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- Peningkatan dan penataan layanan surat menyurat pembangunan desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kurang tercukupinya pengadaan barang yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Terbatasnya jumlah karyawan/staf dalam menangani pekerjaan dimana beban tugas pekerjaan yang semakin bertambah.
- Solusi :
 - Mohon adanya penambahan anggaran untuk dapat digunakan dalam pengadaan barang yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Mohon adanya penambahan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas-tugas



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN WELAHAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Welahan
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Welahan
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Welahan
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

- 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perluasan Ruang PKK dan Gudang untuk Kantor Bersama PKK, Dharma wanita, PKH dan Gudang Penyimpanan Inventaris Kantor Kec. Welahan

3. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**
 - Jumlah pegawai : 31 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S1 = 9 orang, SLTA = 21 orang, SLTP : 1 orang
 - Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 6 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c)= 9 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda (II/a) = 2 orang

4. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Batealit	225.689.000	222.984.263
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD			
2	Pelayanan Umum dan Pembinaan KecBatealit	20.025.000	20.017.600
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Batealit	5.745.000	44.996.400
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	65.022.000	64.370.602

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	33.637.000	33.547.928

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Welahan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan aparatur dan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan kualitas pelayananan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kebutuhan dari masing-masing Desa sangat bervariasi dan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan luas wilayah.

- Belum adanya tanda/ papan nama kecamatan
 - Kurangnya kursi tunggu masyarakat di ruang pelayanan
 - Kurangnya komputer dan printer
 - Kurangnya lemari untuk penataan arsip
 - Kursi ruang camat dan ruang sekcam sudah tidak layak
 - Belum adanya kanopi di tempat wudlu musholla
 - Belum adanya lemari kk dan ktp
- Solusi :
 - Alokasi bantuan agar tidak disamaratakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi wilayah yang ada di masing-masing Desa
 - Penganggaran dana untuk pembuatan neonbox/ papan nama kecamatan
 - Penganggaran dana untuk pengadaan kursi tunggu masyarakat di ruang pelayanan
 - Penganggaran dana untuk pengadaan komputer dan printer
 - Penganggaran dana untuk pengadaan lemari untuk penataan arsip
 - Penganggaran dana untuk pengadaan kursi ruang camat dan ruang sekcam
 - Penganggaran dana untuk pengadaan kanopi di tempat wudlu musholla
 - Penganggaran dana untuk pengadaan lemari kk dan ktp



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN MAYONG

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Mayong
- **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemeliharaan dan Penataan Ari-Ari RA Kartini
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
 - 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Mayong
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mayong

- 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**
- Jumlah pegawai : 30 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 = 1 orang, S1 = 8 orang, D3 : 3 orang, SLTA = 17 orang, SLTP : 1 orang
 - Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 4 orang, Pengatur (II/c) = 4 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 6 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kec Mayong	208.477.000	205.370.977
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
2	Pemeliharaan & Penataan Ari-Ari RA Kartini	5.900.000	5.900.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembin Kec Mayong	69.000.000	68.850.000
2	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Batealit	45.745.000	44.996.400
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masy, ADD dan Dana Desa	59.775.000	58.084.008

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	38.487.000	37.575.120
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kec Mayong	21.245.000	21.231.500

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Mayong, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pembangunan pendidikan masyarakat
 - Belum optimalnya pembangunan kesehatan masyarakat
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Program pengembangan destinasi wisata
 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kebutuhan dari masing-masing Desa sangat bervariasi dan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan luas wilayah
- Solusi :
 - Alokasi bantuan agar tidak disamaratakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi wilayah yang ada di masing-masing Desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN NALUMSARI

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Nalumsari
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Nalumsari
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Nalumsari
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
 - 2) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 36 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 6 orang, D3 : 1 orang, D2 : 0 orang, D1 : 0 orang, SLTA : 24 orang SLTP : 1 Orang.

- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 0 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 3 .orang, Penata Muda (III/a) : 1 .orang, Pengatur Tk.I (II/d) : - Orang: Pengatur (II/c) :19 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1Orang, Pengatur (II/a): 1 Orang .

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Batealit	225.689.000	222.984.263
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Batealit	20.025.000	20.017.600
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec Batealit	45.745.000	44.996.400
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa	65.022.000	64.370.602
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	33.637.000	33.547.928

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Nalumsari, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya aparat penegak hukum menyebabkan menurunnya ketertiban masyarakat.
 - Kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya belum optimal.
 - Belum optimalnya layanan pada masyarakat antara lain disebabkan karena kurang memudahkannya sarana dan prasarana yang ada.
 - Persepsi tentang daerah dan Desa yang masih sangat beragam.
 - Pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa belum optimal.
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Memantapkan koordinasi antara pemerintah Kecamatan , Dinas Instansi tingkat kecamatan dan Desa.
 - Menyelenggarakan system administrasi Pemerintahan.
 - Melaksanakan Waskat
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan
 - Program peningkatan SDM Aparatur Pemerintah
 - Program peningkatan pendidikan masyarakat
 - Program peningkatan kesehatan masyarakat
 - Program peningkatan pembangunan infrastruktur
 - Program peningkatan pembangunan desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kinerja pegawai yang masih rendah.
 - Kurangnya Disiplin Pegawai
- Solusi :
 - Agar ada penambahan pegawai Satpol PP
 - Penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KARIMUNJAWA

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- 6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan
- 7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan
- 8) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

➤ Kegiatan :

- Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Karimunjawa
- Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Karimunjawa
- Pemeliharaan dan Penunjang Kapal
- Pengamanan Wilayah
- Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Karimunjawa
- Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
- Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa
- Penunjang PLTD

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 30 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 2 orang, SLTA = 23 orang, SLTP : 1 orang, SD : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 5 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 10 orang, Pengatur muda Tk. I (II/a) : 4 orang, Juru (I/c) : 2 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Kegiatan	Alokasi	Realisasi
1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Karimunjawa	394.769.500	288.757.640
2	Renval & Pelaks Musren bang Kec Karimunjawa	20.825.000	17.634.600
3	Pemeliharaan dan Penunjang Kapal	18.325.000	12.478.000
4	Pengamanan Wilayah	65.400.000	44.897.000
5	Pelayanan Umum &Pembinaan Kec Karimunjawa	66.295.000	15.111.000
6	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	33.867.500	18.157.000
7	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	58.850.000	44.373.880
8	Penunjang PLTD	623.625.000	538.756.870

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam urusan pemerintahan umum di kabupaten jepara diarahkan untuk pelayanan masyarakat secara optimal, dengan permasalahan antara lain:

- Masalah yang dihadapi dalam pemerintahan umum antara lain:
 - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 - Belum lancarnya transportasi antar pulau di karimunjawa
 - Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan masyarakat
 - Masih perlu peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah
- Kebijakan diarahkan untuk:
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat
 - Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Setiap tahun pada musim baratan kecamatan karimunjawa sering terputus jalur transportasinya laut dengan kabupaten jepara sehingga bahan pokok sulit di dapat.
 - Komunikasi yang kadang mengalami gangguan, sehingga terasa terisolir
- Solusi :
 - Persiapan sebelum musim baratan sudah dilaksanakan antara lain stok bahan pokok dan sembako untuk menghadapi musim baratan.
 - Penambahan jaringan komunikasi, apabila salah satu mengalami gangguan ada alternatif yang digunakan

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Perangkat Daerah Pelaksana

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Jepara (BAKESBANGPOL).

2. Program dan Kegiatan :

- Program :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air
 - Program Perencanaan Sosial dan Budaya
 - Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

➤ Kegiatan :

- 1) Bina Kesbang
- 2) Deteksi Dini Pemilihan Gubernur Pra , Pelaksanaan Dan Pasca
- 3) Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini masyarakat
- 5) Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
- 6) Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila bagi kalangan Pelajar , Mahasiswa dan Masyarakat
- 7) Forum Komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat
- 8) Pelayanan Teknis Kantor
- 9) Pelestarian Nilai Nilai kepahlawanan dan Keperintisan
- 10) Pencegahan dan penyalagunaan Narkotika
- 11) Pendidikan politik bagi masyarakat
- 12) Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
- 13) Pengawasan dan monitoring Orang asing
- 14) Pengiriman peserta pelatihan ormas
- 15) Penunjang kegiatan penanganan gangguan keamanan
- 16) Penyelenggaraan PPBN
- 17) Penyusunan dan perencanaan dan evaluasi
- 18) Sosialisasi dan pembinaan ormas
- 19) Sosialisasi P4GN dan perinagtaan HANI

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional :

- Jumlah pegawai PNS : 18 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 8 orang, D3= 2 orang, SLTA= 6 orang, SLTP= 1 orang, SD= 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Pembina (IV/a) = 5 orang, Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 1 orang, Penata Muda (IIIa) 1 orang Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda Juru (I/c) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1	52.955.000	44.140.000
2	40.800.000	33.269.500
3	50.500.000	50.210.000
4	49.187.500	38.468.000
5	40.060.000	39.970.000

NO	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
6	27.870.000	16.973.500
7	113.840.000	108.850.000
8	713.380.500	665.136.002
9	283.965.000	261.004.500
10	27.412.000	27.284.000
11	82.380.000	77.985.000
12	32.635.000	32.206.000
13	25.800.000	22.505.000
14	35.337.500	31.008.000
15	25.000.000	24.646.000
16	54.350.000	48.854.000
17	70.155.000	69.750.000
18	25.767.500	24.859.500
19	125.900.000	119.830.943
20	87.712.500	84.631.000
21	35.000.000	32.477.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
 - Masalah kondusifitas wilayah yang berkaitan dengan ipoleksosbudhankam.
 - Kesadaran Bela Negara, rasa cinta tanah air dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan.
 - Keberadaan Ormas dan LSM
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air
 - Menciptakan kondusifitas wilayah
 - Pembinaan terhadap Ormas dan LSM
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Program peningkatan kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya).

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik dan memadai.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pengembangan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.
 - Masih terjadi tindakan pelanggaran hukum akibat kasus narkoba.
 - Munculnya isu-isu politik dalam masyarakat
 - Adanya peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang Ormas, LSM dan Partai Politik
- Solusi :
 - Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan Pendidikan Kader Bela Negara
 - Melaksanakan kegiatan sosialisasi narkoba dan test urine dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
 - Melaksanakan deteksi dini dan pemantauan secara intensif terhadap isu-isu yang muncul, dengan bekerja sama dengan instansi terkait agar kondusifitas wilayah tetap terjaga.
 - Melakukan pembinaan terhadap Ormas dan LSM dan Partai Politik

D. Indikator Kinerja Kunci

I. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Aspek ketentraman dan Ketertiban Umum daerah mempunyai 5 (lima) fokus penilaian yaitu :

- 1). Peraturan Tentang Ketertiban Penataan Ruang
Fokus Peraturan tentang Ketertiban penataan ruang dinilai melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu :
 - Keberadaan Perda IMB
Terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Retribusi IMB.

- Rasio Rumah Ber IMB
Rasio rumah ber IMB dapat dilihat dari pembagian antara jumlah rumah yang ber IMB dengan jumlah rumah seluruhnya, dimana total jumlah rumah di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 sebanyak 328.724 rumah sedangkan yang ber IMB sebanyak 80.052 rumah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 24,35 %.
 - Keberadaan PERDA RT/RW
Berkaitan dengan Perda RTRW, Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2031
- 2). Peraturan tentang Kependudukan
Fokus Peraturan tentang kependudukan dinilai dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu :
- Pengurusan E-KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP berjumlah 899.976 orang dari jumlah penduduk wajib KTP sejumlah 851.189 orang, sehingga IKK-nya 105,73 %.
 - Biaya KTP
Sedangkan biaya KTP gratis / tidak dipungut, didasarkan pada Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 3). Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum).
Fokus Personil Satpol PP dinilai dari 1 (satu) indikator Kinerja Kunci yaitu :
- Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jumlah personil satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah 150 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jepara sampai akhir tahun 2018 adalah 1.168.261 orang. hal ini menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 2 orang satpol PP.
- 4). Kebijakan Bidang Penanganan PSK dan PKL
Fokus ini dinilai dari :
- Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pelacuran.

- Perda No 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
 - Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 5). Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
Fokus ini dinilai dari :
- Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten yaitu:
 - Perda no. 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

b. Keselarasan dan Efektivitas hubungan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan Otonomi daerah

Aspek ini mempunyai 4 (Empat) fokus penilaian yaitu :

1. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah
Yaitu dinilai dari :
 - Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 tahun 2007.
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 pada tanggal 25 Maret 2018.
2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja
Fokus penilaian penyampaian laporan kepada pemerintah melalui :
 - Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini telah menyampaikan laporan Keuangan 2018 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2019.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) tahun 2018 kepada kementrian PAN dan RB disampaikan tepat waktu
3. Implementasi Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Dinilai dari 1 (satu) IKK yaitu :
 - Urusan Yang Sudah Diterapkan SPM-nya Berdasarkan Pedoman Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah.

Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2018 adalah sebanyak 6. u

4. Hubungan antar daerah

Fokus Hubungan antar daerah dinilai dari :

- Kerjasama dengan daerah lain
Kerjasama dengan daerah lain dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain . Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018 berjumlah 9 MOU.

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah.

Aspek ini mempunyai 6 (enam) fokus yaitu :

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Fokus ini dinilai dari :

- Kesesuaian Prioritas Pembangunan
Bahwasanya Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya melaksanakan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan program pembangunan nasional dimana jumlah pembangunan daerah (RKPD) sebanyak 7 prioritas, sedangkan prioritas pembangunan nasional sebanyak 5 prioritas, sehingga capaian kinerjanya adalah 140 %.

2. Kewenangan

Fokus Kewenangan daerah dinilai dari :

- Urusan Wajib yang Diselenggarakan Daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dimana pemerintah telah menetapkan 24 urusan wajib. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Jepara telah melaksanakan urusan wajib sebanyak 23 urusan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,83 %.

3. Keuangan

Fokus keuangan daerah dinilai dari :

- Waktu Penetapan PERDA APBD 2018.
Perda APBD Kabupaten Jepara tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan Perda Nomor 20 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018.

- Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - Belanja Untuk Pelayanan Dasar.
Belanja pelayanan dasar APBD tahun 2018 antara lain :
 1. Urusan Pendidikan Rp. 703.607.439.407,-
 2. Urusan Kesehatan Rp. 369.922.369.809,-
 3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Rp. 354.002.144.411,-
 4. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Rp. 31.720.037.401,-
 5. Urusan Trantibun & Linmas Rp. 10.711.782.921
 6. Urusan Sosial Rp. 10.790.159.212 ,-
Jumlah Total Belanja : Rp. 2.300.574.959.827,-
Sehingga IKK-nya sebanyak 63,36 %
 - Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan.
Belanja untuk urusan pendidikan Rp. 703.607.439.407 dan kesehatan sebesar 369.922.369.809 atau 46,66 %
4. Pelayanan Publik
- Fokus Pelayanan publik dinilai dari :
- Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Jepara Menerbitkan Peraturan Daerah No. 59 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.
5. Kepegawaian
- Fokus Kepegawaian dapat dinilai dari :
- Rasio PNS Terhadap Penduduk
Jumlah PNS Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebanyak 8.025 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebanyak 1.168.261 orang sehingga Indikator Kinerja Kuncinya sebesar 0,0068 per 1.000 penduduk.
 - Sistem Informasi Kepegawaian
Selain standar kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui BKD juga telah menggunakan sistem Informasi kepegawaian yang

berupa : SIMPEG, SAPK dan Aplikasi Sistem Informasi Mutasi Pegawai Non Jabatan Struktural.

6. Kelembagaan

Fokus Kelembagaan dinilai dari :

- Penataan Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan PP 8/2016.

Perda Kelembagaan :

- Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- Perda nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara,
- Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Umum Daerah),
- Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara,
- Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kab Jepara Tahun 2016 No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kab Jepara No 11).
- Perda nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara,
- Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara,
- Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara,
- Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara.

Jumlah Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- ❖ Bagian (Setda) : 8 unit
- ❖ Setwan : 1 unit
- ❖ Inspektorat : 1 unit

- ❖ Dinas : 8 unit
- ❖ Satpol PP & Damkar : 1 unit
- ❖ Badan : 5 unit
- ❖ Rumah Sakit : 1 unit
(UPT. Dinas Kesehatan)
- ❖ Kecamatan : 16 unit

d. Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Aspek efektivitas hubungan antara Pemda dan DPRD mempunyai 2 (dua) fokus yaitu :

1. Produk Peraturan Perundang - undangan

- PERDA yang ditetapkan.

Terkait dengan produk peraturan perundangan, pada tahun 2018 terdapat 13 (tiga belas) Perda yang ditetapkan yaitu:

- a) Perda No. 1 th.2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b) Perda No.2 th. 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022
- c) Perda No.3 th. 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah
- d) Perda No.4 th. 2018 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang izin Gangguan
- e) Perda No.5 th. 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi izin gangguan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan
- f) Perda No.6 th. 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033
- g) Perda No.7 th. 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

- h) Perda No.8 th. 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- i) Perda No.9 th. 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018
- j) Perda No.10 th. 2018 Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha
- k) Perda No.11 th. 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
- l) Perda No.12 th. 2018 Tentang Perusahaan Umum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara
- m) Perda No.13 th. 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019

- RAPERDA yang Diajukan Tahun Berjalan.
Adapun Raperda yang disetujui Legislatif pada tahun berjalan 2018 sebanyak 13 Raperda dari 17 Raperda yang diusulkan sehingga IKK-nya adalah 76 %.

e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan

Aspek ini mempunyai 1 (satu) fokus yaitu Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD.

Fokus ini dinilai dari :

- Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti oleh DPRD.
Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 berjumlah 34 Keputusan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah sebanyak 34 Keputusan sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.

f. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan

Aspek ini mempunyai 2 (dua) fokus yaitu :

1. Tindaklanjut Keputusan Bupati

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Keputusan Bupati yang Ditindaklanjuti
Dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku, Kepala Daerah (Bupati) membuat kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan Peraturan

perundang undangan tersebut.

Bupati Jepara pada tahun 2018 telah menetapkan 502 Keputusan Bupati dan kesemuanya ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerjanya 100 %.

2. Tindak lanjut Peraturan Bupati

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Peraturan Bupati yang Ditindaklanjuti

Adapun Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 62 Perbup dari total 62 Perbup yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya 100 %.

g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Peraturan Perundang-undangan

Aspek ini meliputi 1 (satu) fokus yaitu Perda yang dibatalkan

- Selama tahun 2018 tidak ada Perda yang dibatalkan.

h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan public yang strategis dan relevan untuk daerah

Aspek ini meliputi 2 (dua) fokus, yaitu :

1. Perda tentang Konsultasi Publik.

Tidak Ada

2. Media informasi Pemda yang dapat Diakses oleh Publik.
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diakses oleh publik melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemda, yaitu :

Website Pemerintah Kabupaten Jepara :
www.jepara.go.id

- Website Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara :
www.jdih.jeparakab.go.id

- Website LPSE : www.lpse.jeparakab.go.id

i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil

Aspek ini meliputi 3 (tiga) fokus yaitu :

1. Serapan Dana Perimbangan

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan.

Pada tahun 2018 jumlah dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 1.339.634.292.620,- Sedangkan target yang direncanakan sebesar Rp. 1.355.376.807.000,-atau 98,8 %.

2. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Belanja Publik terhadap DAU

Belanja publik adalah belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2018 yang dialokasikan kepada semua Dinas teknis. Dalam hal ini Realisasi belanja publik Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 1.062.789.292.790,-sedangkan DAU sebesar Rp 984.914.973.687,-atau 107,9%.

3. Alokasi Belanja pada APBD

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Belanja Langsung terhadap total APBD.

Adapun prosentase belanja Langsung terhadap total APBD adalah 46,2 % yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp. 1.062.789.292.790,-dari total APBD sebesar Rp. 2.300.574.959.827,-

j. Intensitas, Efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Aspek ini meliputi 1 (satu) fokus yaitu :

- Besaran pendapatan Asli daerah (PAD)

Fokus ini dinilai dari besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD.

Besaran PAD terhadap pendapatan APBD adalah sebesar 15,60 % yang diperoleh dari besaran PAD tahun 2018 yaitu Rp. 369.332.890.700,- terhadap total pendapatan APBD yaitu Rp. 2.255.846.248.157,-

k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD

Aspek ini terdiri dari 4 (empat) fokus yaitu :

1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lap Keu)

Fokus ini dinilai dari :

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Jenis Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun 2017 dan tahun 2018 adalah WTP.

2. Besaran SILPA

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio SILPA terhadap total Pendapatan
Realisasi SILPA tahun 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 107.258.899.330,- sedangkan jumlah pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.255.846.248.157,-. Sehingga IKK-nya adalah 4,75 %.

3. Realisasi Belanja

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Jumlah realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 2.300.574.959.827,- sedangkan total Anggaran belanja APBD tahun 2018 sebesar Rp. 2.410.277.498.000,-

4. Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Temuan BPK RI yang Ditindaklanjuti
Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Jepara sampai dengan akhir tahun 2018 terdapat 12 temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 11 temuan shg IKK-nya 92 %.

l. Pengelolaan Potensi Daerah

Aspek ini terdiri dari 2 (dua) fokus yaitu :

1. Peta potensi Daerah

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Realisasi PAD 2018 Terhadap Potensi PAD
Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 369.332.890.700,- sedangkan potensi daerah yang dalam hal ini disesuaikan dengan target daerah yaitu sebesar RP. 350.307.839.000,- sehingga capaian kinerja untuk aspek ini adalah 110,3 %.

- Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan PAD diperoleh dari kenaikan/Penurunan PAD 2018 dibagi PAD tahun lalu, dimana PAD tahun 2017 adalah sebesar Rp. 325.530.346.533,- sedangkan PAD tahun 2018 sebesar Rp. 369.332.890.700,- sehingga terjadi kenaikan 13,45 %.

m. Terobosan/inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) fokus yaitu :

1. Penghargaan

Penghargaan yang diterima pemda dari Pemerintah selama tahun 2018 sebanyak 19 penghargaan :

- Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN 2 Pendosawalan
- Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN Jinggotan
- Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN 2 Bumiharjo
- Penghargaan Proklam Utama (Nasional) : Poktan Sreni Jaya Dukuh Gupit Desa Bategede
- Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak Kategori Pratama.
- Juara Favorit Duta Genre Putri Tingkat Nasional a.n Febby Cynthia
- Anugerah Parahita Ekapraya Tk Utama
- Daffa Award untuk forum anak jepara kategori pelopor lingkungan utama
- Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Sertifikasi ISO 9001:2015 dari Kementerian Ketenagakerjaan
- Indonesia Road Safty Award (IRSA) Tahun 2018 sebagai Pemenang Pilar 5
- Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre & Crash Response) Kategori Exelent City sebagai Pemenang Pilar 3
- Pengendara Yang Berkeselamatan (Saver User)
- Sertifikasi Akreditasi "B" Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor
- Penghargaan Central Java's Potential Investment Challenge 2018 dari KERIS Jateng
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat "Best of The Best" Perpustakaan

Daerah Kabupaten / Kota terbaik se Indonesia.

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat “Perpustakaan Terbaik” se Indonesia dalam melakukan Transformasi perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Opini Dari BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Daerah. Yaitu : WAJAR TANPA PENGECUALIAN di Tahun 2010 – 2018
- Juara Umum Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII
- Penyaji Terbaik Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII
- Penyaji Unggulan Terbaik Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII

2. Pengadaan barang dan jasa

Fokus ini dinilai dari :

- Keberadaan E-Procurement

Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018 Pemkab Jepara telah melaksanakan E-Procurement sesuai dengan Perbup Nomor 83 Tahun 2011 ttg pembentukan Tim ULP Secara Elektronik Kab. Jepara dan Perbup No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara

3. Daya Saing Daerah

Fokus ini dinilai dari :

- Jumlah Persetujuan Investasi

Jumlah ijin investasi tahun 2018 sebanyak 521 ijin.

II. Tataran Pelaksana Kebijakan

A. Administrai Umum

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Aspek Kebijakan tehnik penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur dengan 2 fokus yaitu :

1. Program Nasional (yang melekat di Kementrian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD, yaitu diukur dari :
 - Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :

NO	OPD	Program Nas yg dilaks OPD	Jumlah Prog Nas	Capai an Kinrja
1	Dinas Kesehatan	9	8	88,9 %
2	BPKAD	1	1	100 %
3	Disdukcapil	4	4	100 %
4	Dinas Perikanan	5	5	100 %
5	DLH	1	1	100 %
6	Bakesbangpol	1	1	100 %
7	BKD	1	1	100 %
8	DPMPTSP	2	2	100 %
9	RSUD RA. Kartini	1	1	100 %
10	Satpol PP & Damkar	2	2	100 %
11	Inspektorat	3	3	100 %
12	Setwan	2	2	100 %
13	Setda	4	4	100 %
14	BPBD	1	1	100 %
15	Dishub	1	1	100 %
16	Disperkim	5	5	100 %
17	Bappeda	1	1	100 %
18	Kec.Welahan	1	1	100 %
19	Kec.Mayong	1	1	100 %
20	Kec. Kalinyamatan	2	2	100 %
21	Kec.Jepara	1	1	100 %
22	Kec. Donorojo	1	1	100 %
23	Kec. Nalumsari	1	1	100 %
24	Kec. Batealit	1	1	100 %
25	Kec. Pakis Aji	1	1	100 %
26	Kec. Mlonggo	1	1	100 %
27	Kec. Pecangaan	1	1	100 %
28	Ke. Kembang	1	1	100 %
29	Kec. Kedung	1	1	100 %
30	Kec. Tahunan	1	1	100 %
31	Kec. Bangsri	1	1	100 %
32	Kec. Karimunjawa	1	1	100 %
33	Kec. Keling	1	1	100 %

34	Disdikpora	3	3	100 %
		3	3	100 %
35	DKPP	1	1	100 %
		2	2	100 %
36	Disperindag	3	3	100 %
		3	3	100 %
37	DPU-PR	4	4	100 %
38	Disparbud	4	4	100 %
		2	2	100 %
39	Diskarpus	1	1	100 %
		1	1	100 %
40	Diskop UKM Nakertrans	3	3	100 %
		3	3	100 %
		1	1	100 %
41	Diskominfo	2	2	100 %
		2	2	100 %
		1	1	100 %
42	DP3AP2KB	3	3	100 %
		8	8	100 %
43	Dinsosperma des	2	2	100 %
		1	1	100 %

2. Kesesuaian dengan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah c/q Departement /LPND,yaitu diukur dengan 1 IKK:
- Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP), yaitu SOP yang telah dilaksanakan oleh semua OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

NO	SKPD	SOP Yang ditetapkan	Ada / tidak ada
1	Dinas Kesehatan	31	Ada
2	BPKAD	4	Ada
3	Disdukcapil	50	Ada
4	Dinas Perikanan	14	Ada
5	DLH	2	Ada
6	Bakesbangpol	1	Ada
7	BKD	33	Ada
8	DPMPTSP	22	Ada
9	RSUD RA. Kartini	1437	Ada

10	Satpol PP & Damkar	20	Ada
NO	SKPD	SOP Yang ditetapkan	Ada / tidak ada
11	Inspektorat	11	Ada
12	Setwan	10	Ada
13	Setda	18	Ada
14	BPBD	30	Ada
15	Dishub	22	Ada
16	Disperkim	7	Ada
17	Bappeda	1	Ada
18	Kec.Mayong	2	Ada
19	Kec. Kalinyamatan	12	Ada
20	Kec.Jepara	22	Ada
21	Kec. Donorojo	10	Ada
22	Kec. Nalumsari	5	Ada
23	Kec. Batealit	3	Ada
24	Kec. Pakis Aji	9	Ada
25	Kec. Mlonggo	8	Ada
26	Kec. Pecangaan	1	Ada
27	Ke. Kembang	1	Ada
28	Kec. Kedung	2	Ada
29	Kec. Tahunan	2	Ada
30	Kec. Bangsri	1	Ada
31	Kec. Karimunjawa	2	Ada
32	Kec. Keling	22	Ada
33	Kec. welahan	1	Ada
34	Disdikpora	5	Ada
		1	Ada
35	DKPP	10	Ada
		10	Ada
36	Disperindag	1	Ada
		1	Ada
37	DPU-PR	1	Ada
		0	Ada
38	Disparbud	4	Ada
		2	Ada
39	Diskarpus	4	Ada
		20	Ada
40	Diskop UKM Nakertrans	1	Ada
		2	Ada
		1	Ada

41	Diskominfo	6	Ada
		6	Ada
		6	Ada
42	DP3AP2KB	1	Ada
		1	Ada
43	Dinsospermades	6	Ada
		14	Ada

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan 1 fokus yaitu jumlah Perda yang harus dilaksanakan OPD menurut Permen, yaitu diukur melalui 1 IKK : Jumlah Perda Pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen.

Adapun Perda yang ada di masing-masing OPD sebagai berikut

1. Dinas Kesehatan
 - Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak beryodium
 - Perda No. 25 Tahun 2011tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Baru Lahir, Bayi dan anak Balita
 - Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perijinan Bidang Kesehatan
 - Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabuapten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS
2. BPKAD
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Dinas Perikanan
 - Perda No.1 tahun 2010 tentang Pengelolaan tempat Pelelangan Ikan
 - Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
5. Dinas Lingkungan Hidup
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
6. Bakesbangpol
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
7. BKD
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
8. DPMPTSP
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
9. RSUD RA.Kartini
 - Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
 - Perda Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Jepara Tahun Anggaran 2018

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

10. Satpol PP & Damkar

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

11. Inspektorat

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 40 Thn 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara.

12. Sekretariat DPRD

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

13. Sekretariat Daerah

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

15. Dinas Perhubungan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 7/2001 tentang retribusi ijin trayek
- Perda No. 9/2001 tentang retribusi izin usaha angkutan
- Perda No. 7/2008 tentang retribusi perijinan perhubungan laut dan penyeberangan
- Perda No. 9/2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
- Perda No. 9/2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Perda No. 10/2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan
- Perda No. 22/2011 tentang retribusi terminal
- Perda No. 23/2011 tentang retribusi tempat khusus parkir
- Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/200 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

16. DISPERKIM

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018

- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/200 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

17. BAPPEDA

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kab. Jepara Tahun 2005-2025
- Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

18. Kec. Welahan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

19. Kec. Mayong

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Tahun Anggaran 2018

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

20. Kec. Kalinyamatan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

21. Kec. Jepara

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Perda 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Perda 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

22. Kec. Donorojo

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Jepara

- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

23. Kec. Nalumsari

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

24. Kec. Batealit

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

25. Kec. Pakis Aji

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

26. Kec. Mlonggo

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun

Anggaran 2018

- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

27. Kec. Pecangaan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

28. Kec. Kembang

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

29. Kec. Kedung

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

30. Kec. Tahunan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

31. Kec. Bangsri

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

32. Kec. Karimunjawa

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

33. Kec. Keling

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018

- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

34. Disdikpora

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 1 th.2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

35. DKPP

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa
- Perda No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Perda No,. 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

36. Disperindag

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa
- Perda No. 13 Th. 2011 Tentang Perizinan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

37. DPU-PR

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

38. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa
- Perda No 26 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi

39. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

40. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

41. Diskop UKM Nakertrans

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

42. DP3AP2KB

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Perda No 1 Tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan daerah
- Perbup no. 42 tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan
- Perbup no.39 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah dan Desa

43. Dinsospermades

- Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

c. Penataan Kelembagaan Daerah

Aspek Penataan Kelembagaan diukur dengan 1 fokus yaitu : Pengisian struktur Jabatan dengan 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Rasio struktur Jabatan dan eselonering yang terisi

NO	OPD	Juml Jabtn yg terisi	Jabtn yang shrsny ada	Cap Kinrja (%)
1	BKD	13	13	100
2	Bakesbangpol	11	11	100
3	BPBD	5	5	100
4	BPKAD	20	20	100
5	Bappeda	19	21	90,48
6	Diskarpus	9	10	90
7	Disdukcapil	16	17	94,12
8	Dinkes	41	42	97,62
9	DKPP	23	23	100
10	Diskominfo	12	12	100
11	Diskop Ukm Nakertrans	16	16	100
12	Dinas Lingkungan Hidup	16	17	94,12
13	Disparbud	14	14	100
14	DPU-PR	27	27	100
15	DP3AP2KB	13	14	92,86
16	DPMPTSP	12	13	92,31
17	Disdikpora	38	52	73,08
18	Dinas Perhubungan	16	16	100
19	Dinas Perikanan	17	17	100
20	Disperindag	16	16	100
21	Disperkim	12	12	100
22	Diskop UKM Nakertrans	14	14	100
23	Inspektorat	7	8	87,5

24	Kecamatan Bangsri	9	9	100
25	Kecamatan Batealit	9	9	100
26	Kecamatan Donorojo	9	9	100
27	Kecamatan Jepara	58	64	90,63
28	Kecamatan Kalinyamatan	9	9	100
29	Kecamatan Karimun Jawa	9	9	100
30	Kecamatan Kedung	9	9	100
31	Kecamatan Keling	9	9	100
32	Kecamatan Kembang	9	9	100
33	Kecamatan Mayong	9	9	100
34	Kecamatan Mlonggo	8	9	88,89
35	Kecamatan Nalumsari	9	9	100
36	Kecamatan Pakis Aji	9	9	100
37	Kecamatan Pecangaan	9	9	100
38	Kecamatan Tahunan	9	9	100
39	Kecamatan Welahan	8	9	88,89
40	Rsu Ra Kartini	23	23	100
41	SATPOL PP & DAMKAR	14	14	100
42	Sekretariat Daerah	36	38	94,74
43	Sekretariat DPRD	11	13	84,62

2. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD pada Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi :

NO	OPD	Keberadaan Jab fungsional	Jumlh PNS OPD	Cap Kinrja (%)
1	BPKAD	1	59	2
2	BAPPEDA	2	42	5
3	DISKARPUS	5	27	19
4	DINKES	746	928	80
5	DKPP	54	124	44
6	DISKOMINFO	1	34	3
7	DISKOP UKM NAKERTRANS	3	36	8
8	DISDIKPORA	4.414	4930	90
9	DISHUB	5	75	7
10	Dinsospermades	1	31	3
11	Inspektorat	14	35	40
12	Rsu Ra Kartini	304	452	67
	TOTAL	5.550	6.773	82

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah diukur dengan 1 fokus yaitu : Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait, yaitu diukur melalui 3 IKK, yaitu :

1. Rasio PNS Kabupaten 2018

NO	SKPD	Jml PNS OPD	Total PNS Kab	Capaian Kinerja (%)
1	BKD	38	8.025	0,47
2	BAKESBANGPOL	18	8.025	0,22
3	BPBD	12	8.025	0,15
4	BPKAD	59	8.025	0,74
5	BAPPEDA	42	8.025	0,52
6	DISKARPUS	27	8.025	0,34
7	DISDUKCAPIL	28	8.025	0,35
8	DINKES	928	8.025	11,56
9	DKPP	124	8.025	1,55
10	DISKOMINFO	34	8.025	0,42
11	DISKOP UKM NAKERTRANS	36	8.025	0,45
12	DLH	72	8.025	0,90
13	DISPARBUD	34	8.025	0,42
14	DPU-PR	142	8.025	1,77
15	DP3AP2KB	23	8.025	0,29
16	DPMPTSP	25	8.025	0,31
17	DISDIKPORA	4.930	8.025	61,43
18	DISHUB	75	8.025	0,93
19	Dinas Perikanan	31	8.025	0,39
20	DIPERINDAG	111	8.025	1,38
21	DISPERKIM	27	8.025	0,34
22	DINSOSPERMA DES	31	8.025	0,39
23	Inspektorat	35	8.025	0,44
24	Kec. Bangsri	25	8.025	0,31
25	Kec. Batealit	23	8.025	0,29
26	Kec. Donorojo	20	8.025	0,25
27	Kec. Jepara	85	8.025	1,06
28	Kecamatan Kalinyamatan	26	8.025	0,32
29	Kecamatan Karimunjawa	30	8.025	0,37
30	Kec. Kedung	29	8.025	0,36
31	Kec. Keling	22	8.025	0,27
32	Kec. Kembang	28	8.025	0,35
33	Kec. Mayong	30	8.025	0,37
34	Kec. Mlonggo	26	8.025	0,32

35	Kec. Nalumsari	35	8.025	0,44
36	Kec. Pakis Aji	21	8.025	0,26
37	Kec Pecangaan	25	8.025	0,31
38	Kec.Tahunan	25	8.025	0,31
39	Kec.n Welahan	30	8.025	0,37
40	Rsu Ra Kartini	452	8.025	5,63
41	SATPOL PP & DAMKAR	48	8.025	0,60
42	SETDA	114	8.025	1,42
43	SETWAN	42	8.025	0,52
44	Sekretariat Kpu	7	8.025	0,09

2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

NO	OPD	Jml Pjbt yg memenuhi persyaratan Diklatpim	total Pjbt OPD yg ada	Capaian Kinerja (%)
1	BKD	11	13	84,62
2	BAKESBANGPOL	10	11	90,91
3	BPBD	4	5	80,00
4	BPKAD	14	20	70,00
5	BAPPEDA	19	19	100,00
6	DISKARPUS	7	9	77,78
7	DISDUKCAPIL	15	16	93,75
8	DINKES	18	41	43,90
9	DKPP	18	23	78,26
10	DISKOMINFO	10	12	83,33
11	DISKOP UKM NAKERTRANS	12	16	75,00
12	DLH	14	16	87,50
13	DISPARBUD	13	14	92,86
14	DPU-PR	18	27	66,67
15	DP3AP2KB	10	13	76,92
16	DPMPTSP	11	12	91,67
17	DISDIKPORA	23	38	60,53
18	Dinas Perhubungan	12	16	75,00
19	Dinas Perikanan	15	17	88,24
20	DIPERINDAG	13	16	81,25
21	DISPERKIM	9	12	75,00
22	DINSOSPERMADES	13	14	92,86
23	Inspektorat	6	7	85,71
24	Kec. Bangsri	5	9	55,56
25	Kec. Batealit	6	9	66,67
26	Kec. Donorojo	7	9	77,78

27	Kec. Jepara	21	58	36,21
28	Kecamatan Kalinyamatan	6	9	66,67
29	Kecamatan Karimun Jawa	7	9	77,78
30	Kec. Kedung	5	9	55,56
31	Kec. Keling	8	9	88,89
32	Kec. Kembang	8	9	88,89
33	Kec. matan Mayong	5	9	55,56
34	Kec. Mlonggo	3	8	37,50
35	Kec. Nalumsari	9	9	100,00
36	Kec. Pakis Aji	4	9	44,44
37	Kec Pecangaan	5	9	55,56
38	Kec.Tahunan	6	9	66,67
39	Kec.n Welahan	5	8	62,50
40	Rsu Ra Kartini	18	23	78,26
41	SATPOL PP & DAMKAR	12	14	85,71
42	SETDA	32	36	88,89
43	SETWAN	9	11	81,82
44	Sekretariat KPU	3	3	100,00
	TOTAL	479	665	72,03

3. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

NO	OPD	Jml Pjbt yg memenuhi persyaratan kepangktn	total Pjbt SKPD yg ada	Cap Kinerj (%)
1	BKD	13	13	100
2	BAKESBANGPOL	11	11	100
3	BPBD	5	5	100
4	BPKAD	20	20	100
5	BAPPEDA	19	21	90,48
6	DISKARPUS	9	10	90
7	DISDUKCAPIL	16	17	94,12
8	DINKES	41	42	97,62
9	DKPP	23	23	100
10	DISKOMINFO	12	12	100
11	DISKOP UKM NAKERTRANS	16	16	100
12	DLH	16	17	94,12
13	DISPARBUD	14	14	100
14	DPU-PR	27	27	100
15	DP3AP2KB	13	14	92,86
16	DPMPTSP	12	13	92,31
17	DISDIKPORA	38	52	73,08

18	Dinas Perhubungan	16	16	100
19	Dinas Perikanan	17	17	100
20	DIPERINDAG	16	16	100
21	DISPERKIM	12	12	100
22	DINSOSPERMADES	14	14	100
23	Inspektorat	7	8	87,5
24	Kec. Bangsri	9	9	100
25	Kec. Batealit	9	9	100
26	Kec. Donorojo	9	9	100
27	Kec. Jepara	58	64	90,63
28	Kecamatan Kalinyamatan	9	9	100
29	Kecamatan Karimun Jawa	9	9	100
30	Kec. Kedung	9	9	100
31	Kec. Keling	9	9	100
32	Kec. Kembang	9	9	100
33	Kec. matan Mayong	9	9	100
34	Kec. Mlonggo	8	9	88,89
35	Kec. Nalumsari	9	9	100
36	Kec. Pakis Aji	9	9	100
37	Kec Pecangaan	9	9	100
38	Kec.Tahunan	9	9	100
39	Kec.n Welahan	8	9	88,89
40	Rsu Ra Kartini	23	23	100
41	SATPOL PP & DAMKAR	14	14	100
42	SETDA	36	38	94,74
43	SETWAN	11	13	84,62
	TOTAL	662	697	94,98

e. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada aspek Perencanaan Pembangunan Daerah
ini ada 3 Fokus yaitu :

1. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah

NO	OPD	Ada/tdk Dok Perenc. Pemb	Jumlah	Capaian Kinerja (%)
1	BKD	Ada	3	100
2	BAKESBANGPOL	Ada	3	100
3	BPBD	Ada	3	100
4	BPKAD	Ada	3	100

5	BAPPEDA	Ada	3	100
6	DISKARPUS	Ada	3	100
7	DISDUKCAPIL	Ada	3	100
8	DINKES	Ada	3	100
9	DKPP	Ada	3	100
10	DISKOMINFO	Ada	3	100
11	DISKOP UKM NAKERTRANS	Ada	3	100
12	DLH	Ada	3	100
13	DISPARBUD	Ada	3	100
14	DPU-PR	Ada	3	100
15	DP3AP2KB	Ada	3	100
16	DPMPTSP	Ada	3	100
17	DISDIKPORA	Ada	3	100
18	Dinas Perhubungan	Ada	3	100
19	Dinas Perikanan	Ada	3	100
20	DIPERINDAG	Ada	3	100
21	DISPERKIM	Ada	3	100
22	DINSOSPERMA DES	Ada	3	100
23	Inspektorat	Ada	3	100
24	Kec. Bangsri	Ada	3	100
25	Kec. Batealit	Ada	3	100
26	Kec. Donorojo	Ada	3	100
27	Kec. Jepara	Ada	3	100
28	Kecamatan Kalinyamatan	Ada	3	100
29	Kecamatan Karimunjawa	Ada	3	100
30	Kec. Kedung	Ada	3	100
31	Kec. Keling	Ada	3	100
32	Kec. Kembang	Ada	3	100
33	Kec. matan Mayong	Ada	3	100
34	Kec. Mlonggo	Ada	3	100
35	Kec. Nalumsari	Ada	3	100
36	Kec. Pakis Aji	Ada	3	100
37	Kec Pecangaan	Ada	3	100
38	Kec.Tahunan	Ada	3	100
39	Kec.n Welahan	Ada	3	100
40	Rsu Ra Kartini	Ada	3	100
41	SATPOL PP & DAMKAR	Ada	3	100
42	SETDA	Ada	3	100
43	SETWAN	Ada	3	100
44	Sekretariat KPU	Ada	3	100

2. Sinkronisasi program RENJA OPD dengan program RKPD :
 ➤ Jumlah Program RKPD yang diakomodir dlm RENJA OPD

NO	OPD	Jml Program RKPD yg diakomo dir dlm RENJA OPD	Jml Program dalam RENJA OPD Yang ditetpkan	Cap Kiner ja (%)
1	Dinas Kesehatan	15	15	100
2	BPKAD	5	5	100
3	Disdukcapil	5	5	100
4	Dinas Perikanan	8	8	100
5	DLH	8	8	100
6	Bakesbangpol	22	22	100
7	BKD	5	5	100
8	DPMPTSP	4	4	100
9	RSUD RA. Kartini	1	1	100
10	Satpol PP & Damkar	8	8	100
11	Inspektorat	6	6	100
12	Setwan	5	5	100
13	Setda	12	12	100
14	BPBD	5	5	100
15	Dishub	9	9	100
16	Disperkim	7	7	100
17	Bappeda	10	10	100
18	Kec.Welahan	5	5	100
19	Kec.Mayong	5	5	100
20	Kec. Kalinyamatan	5	5	100
21	Kec.Jepara	4	4	100
22	Kec. Donorojo	6	6	100
23	Kec. Nalumsari	5	5	100
24	Kec. Batealit	4	4	100
25	Kec. Pakis Aji	5	5	100
26	Kec. Mlonggo	3	3	100
27	Kec. Pecangaan	4	4	100
28	Kec. Kembang	5	5	100

29	Kec. Kedung	5	5	100
30	Kec. Tahunan	5	5	100
31	Kec. Bangsri	6	6	100
32	Kec. Karimunjawa	4	4	100
33	Kec. Keling	6	6	100
34	Disdikpora	3	3	100
		2	2	100
35	DKPP	1	1	100
		12	12	100
36	Disperindag	3	3	100
		4	4	100
37	DPU-PR	14	14	100
		3	3	100
38	Disparbud	5	5	100
		4	4	100
39	Diskarpus	3	3	100
		1	1	100
40	Diskop UKM Nakertrans	3	3	100
		2	2	100
		1	1	100
41	Diskominfo	5	5	100
		1	1	100
42	DP3AP2KB	3	3	100
		11	11	100
43	Dinsospermad es	9	9	100
		8	8	100

3. Sinkronisasi Program RKA OPD dengan Program RENJA OPD:

NO	OPD	Jml Program RENJA RKPD yg di akomodir dlm RKA OPD	Jml Program dalam RKA OPD	Capaian Kinerja (%)
1	Dinas Kesehatan	15	15	100
2	BPKAD	5	5	100
3	Disdukcapil	4	4	100

4	Dinas Perikanan	8	8	100
5	DLH	8	8	100
6	Bakesbangpol	22	22	100
7	BKD	5	5	100
8	DPMPTSP	4	4	100
9	RSUD RA. Kartini	1	1	100
10	Satpol PP & Damkar	10	10	100
11	Inspektorat	5	5	100
12	Setwan	5	5	100
13	Setda	12	12	100
14	BPBD	5	5	100
15	Dishub	9	9	100
16	Disperkim	7	7	100
17	Bappeda	10	10	100
18	Kec.Welahan	5	5	100
19	Kec.Mayong	5	5	100
20	Kec. Kalinyamatan	5	5	100
21	Kec.Jepara	4	4	100
22	Kec. Donorojo	6	6	100
23	Kec. Nalumsari	5	5	100
24	Kec. Batealit	4	4	100
25	Kec. Pakis Aji	5	5	100
26	Kec. Mlonggo	3	3	100
27	Kec. Pecangaan	4	4	100
28	Ke. Kembang	5	5	100
29	Kec. Kedung	5	5	100
30	Kec. Tahunan	6	6	100
31	Kec. Bangsri	6	6	100
32	Kec. Karimunjawa	4	4	100
33	Kec. Keling	6	6	100
34	Disdikpora	3	3	100
		2	2	100
35	DKPP	1	1	100
		12	12	100
36	Disperindag	3	3	100
		4	4	100
37	DPU-PR	14	14	100
		3	3	100
38	Disparbud	5	5	100
		4	4	100

39	Diskarpus	3	3	100
		1	1	100
40	Diskop UKM Nakertrans	3	3	100
		2	2	100
		1	1	100
41	Diskominfo	5	5	100
		1	1	100
42	DP3AP2KB	3	3	100
		11	11	100
43	Dinsospermades	9	9	100
		8	8	100

4. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggarannya :
- Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD

NO	OPD	Jml Prog RENJA RKPD yg di akomo dir dlm RKA OPD	Jml Program dalam RKA OPD	Cap Kinrja (%)
1	Dinas Kesehatan	15	15	100
2	BPKAD	5	5	100
3	Disdukcapil	4	4	100
4	Dinas Perikanan	8	8	100
5	DLH	8	8	100
6	Bakesbangpol	22	22	100
7	BKD	5	5	100
8	DPMPTSP	4	4	100
9	RSUD RA. Kartini	1	1	100
10	Satpol PP & Damkar	10	10	100
11	Inspektorat	4	4	100
12	Setwan	5	5	100
13	Setda	12	12	100
14	BPBD	5	5	100
15	Dishub	9	9	100

16	Disperkim	7	7	100
17	Bappeda	9	9	100
18	Kec.Welahan	5	5	100
19	Kec.Mayong	5	5	100
20	Kec. Kalinyamatan	5	5	100
21	Kec.Jepara	4	4	100
22	Kec. Donorojo	6	6	100
23	Kec. Nalumsari	5	5	100
24	Kec. Batealit	4	4	100
25	Kec. Pakis Aji	5	5	100
26	Kec. Mlonggo	3	3	100
27	Kec. Pecangaan	4	4	100
28	Ke. Kembang	5	5	100
29	Kec. Kedung	5	5	100
30	Kec. Tahunan	6	6	100
31	Kec. Bangsri	6	6	100
32	Kec. Karimunjawa	4	4	100
33	Kec. Keling	6	6	100
34	Disdikpora	3	3	100
		2	2	100
35	DKPP	1	1	100
		12	12	100
36	Disperindag	3	3	100
		4	4	100
37	DPU-PR	14	14	100
		3	3	100
38	Disparbud	5	5	100
		4	4	100
39	Diskarpus	3	3	100
		1	1	100
40	Diskop UKM Nakertrans	3	3	100
		2	2	100
		1	1	100
41	Diskominfo	5	5	100
		1	1	100
42	DP3AP2KB	3	3	100
		11	11	100
43	Dinsosperma des	9	9	100
		8	8	100

f. Pengelolaan Keuangan Daerah

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan 4 fokus yaitu:

- Alokasi Anggaran, diukur melalui 1 IKK, yaitu Anggaran Perangkat Daerah Terhadap total Belanja APBD :

NO	OPD	Alokasi Angrn OPD (Rp.)	Total APBD (Rp.)	Cap. Kinrj (%)
1	DINKES	54.855.552.000	2.410.277.489.000	17,35
2	BPKAD	20.584.285.797	2.410.277.489.000	17,35
3	Disdukcapil	7.630.408.000	2.410.277.489.000	3,2
4	Dinas Perikanan	8.451.809.000	2.410.277.489.000	0,50
5	DLH	26.459.964.000	2.410.277.489.000	0,01
6	Bakesbangpol	3.942.809.000	2.410.277.489.000	1,63
7	BKD	7.547.574.000	2.410.277.489.000	3,13
8	DPMPTSP	3.689.564.000	2.410.277.489.000	1,53
9	RSUD RA. Kartini	150.450.258.000	2.410.277.489.000	62
10	Satpol PP & Damkar	7.779.225.000	2.410.277.489.000	0,003
11	Inspektorat	5.893.890.000	2.410.277.489.000	2,44
12	Setwan	36.686.729.000	2.410.277.489.000	15,2
13	Setda	32.119.335.000	2.410.277.489.000	1,69
14	BPBD	3.010.358.000	2.410.277.489.000	1,24
15	Dishub	43.934.500.000	2.410.277.489.000	1,82
16	Disperkim	33.944.516.000	2.410.277.489.000	1,40
17	Bappeda	10.829.727.000	2.410.277.489.000	4,4
18	Kec.Welahan	2.922.136.000	2.410.277.489.000	1,2
19	Kec.Mayong	2.676.566.000	2.410.277.489.000	1,11
20	Kec. Kalinyamatan	2.578.059.000	2.410.277.489.000	1,06
21	Kec.Jepara	9.261.611.000	2.410.277.489.000	3,84
22	Kec. Donorojo	2.083.011.000	2.410.277.489.000	0,86
23	Kec. Nalumsari	2.608.168.000	2.410.277.489.000	1,08
24	Kec. Batealit	2.284.339.000	2.410.277.489.000	0,009
25	Kec. Pakis Aji	2.299.327.000	2.410.277.489.000	0,1
26	Kec. Mlonggo	2.560.582.000	2.410.277.489.000	0,11
27	Kec. Pecangaan	2.632.452.318	2.410.277.489.000	0,10

28	Ke. Kembang	2.608.168.000	2.410.277.489.000	0,0010
29	Kec. Kedung	2.717.248.000	2.410.277.489.000	0,0011
30	Kec. Tahunan	2.552.770.000	2.410.277.489.000	0,0010
31	Kec. Bangsri	2.563.409.000	2.410.277.489.000	0,10
32	Kec. Karimunjawa	7.090.376.000	2.410.277.489.000	0,29
33	Kec. Keling	2.474.399.000	2.410.277.489.000	0,10
34	Disdikpora	134.323.120.000	2.410.277.489.000	55,7
		1.886.000.000	2.410.277.489.000	0,78
35	DKPP	1.464.790.000	2.410.277.489.000	0,60
		8.514.710.000	2.410.277.489.000	3,53
36	Disperindag	28.786.389.000	2.410.277.489.000	12
		28.786.389.000	2.410.277.489.000	12
37	DPU-PR	246.519.100.238	2.410.277.489.000	10,2
38	Disparbud	41.665.257.000	2.410.277.489.000	17,3
		3.565.244.000	2.410.277.489.000	1,5
39	Diskarpus	461.898.700	2.410.277.489.000	0,19
		1.053.226.448	2.410.277.489.000	0,43
40	Diskop UKM Nakertrans	740.293.000	2.410.277.489.000	0,30
		2.989.870.000	2.410.277.489.000	1,23
		81.874.345	2.410.277.489.000	0.033
41	Diskominfo	4.336.361.500	2.410.277.489.000	0,18
		227.650.000	2.410.277.489.000	0,009
		175.175.000	2.410.277.489.000	0,007
42	DP3AP2KB	1.264.020.000	2.410.277.489.000	0,52
		10.320.494.000	2.410.277.489.000	4,3
43	Dinsosperma des	10.834.323.000	2.410.277.489.000	4,5

- Besaran Belanja Modal, diukur melalui 1 IKK, yaitu :
Belanja Modal Terhadap total Belanja OPD

NO	OPD	Bel Modal (Rp.)	Total Bel OPD (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	DINKES	8.646.729.00	54.855.552.000	15,76
2	BPKAD	1.988.223.000	20.584.285.797	9,65
3	Disdukcapil	332.894.000	7.630.408.000	4,36
4	Dinas Perikanan	2.215.402.892	8.343.508.974	26,55

5	DLH	8.635.504.000	26.459.964.000	0,32
6	Bakesbangpol	62.149.840	3.570.904.678	1,7
7	BKD	63.400.000	7.547.574.000	0,84
8	DPMPTSP	185.780.000	3.689.564.000	5,03
9	RSUD RA. Kartini	11.304.292.089	152.206.434.277	7,43
10	Satpol PP & Damkar	73.039.000	7.750.408.653	0,0094
11	Inspektorat	67.200.000	5.893.890.000	1,14
12	Setwan	1.989.675.772	32.155.017.256	6
13	Setda	1.413.431.000	32.119.335.000	4,4
14	BPBD	109.822.426	2.961.374.268	3,7
15	Dishub	20.013.360.600	48.558.179.951	41,22
16	Disperkim	6.479.338.000	33.944.516.000	19,08
17	Bappeda	474.657.557	10.400.147.765	4,97
18	Kec.Welahan	177.737.250	2.914.379.690	2,89
19	Kec.Mayong	41.334.100	2.746.226.144	1,5
20	Kec. Kalinyamatan	44.550.000	2.600.412.965	1,71
21	Kec.Jepara	179.791.113	9.267.817.253	1,94
22	Kec. Donorojo	37.200.000	2.083.011.000	1,8
23	Kec. Nalumsari	21.550.000	455.439.000	4,73
24	Kec. Batealit	4.427.195	2.270.065.765	0,2
25	Kec. Pakis Aji	59.100.000	2.313.141.699	2.55
26	Kec. Mlonggo	32.394.000	32.450.000	99,8
27	Kec. Pecangaan	286.263.680	2.632.452.318	10,19
28	Ke. Kembang	21.550.000	2.608.168.000	0,008
29	Kec. Kedung	29.666.000	2.717.248.000	32,6
30	Kec. Tahunan	18.400.000	2.552.770.000	0,72
31	Kec. Bangsri	17.500.000	384.294.000	4,55
32	Kec. Karimunjawa	41.500.000	7.090.376.000	0,58
33	Kec. Keling	50.250.000	2.383.625.032	2,10
34	Disdikpora	38.525.752.000	25.200.000	98.40
		39.149.892.000	39.149.892.000	0.06
35	DKPP	7.125.000	1457.026.400	0,48
		110.789.000	7.617.165.122	1,45
36	Disperindag	7.887.534.000	28.786.389.000	27
		7.887.534.000	28.786.389.000	27
37	DPU-PR	246.519.100.238	369.960.450.000	66
38	Disparbud	26.265.068.877	45.230.501.000	58,1
		651.252.500	45.230.501.000	1,43
39	Diskarpus	231.382.138	441.955.000	57,21
		177.307.160	441.995.000	40,11

40	Diskop UKM Nakertrans	4.471.541.000	8,911,473,000	2,41
		214.550.000	8,911,473,000	2,57
		0	8,911,473,000	0
41	Diskominfo	563.131.802	4.144.974.350	13,6
			212.393.185	0
			168.407.375	0
42	DP3AP2KB	41.100.000	12.568.637.000	1,4
		1.529.070.000	12.568.637.000	29,6
43	Dinsosperma des	185.470.000	8.012.379.000	2,31

- Besaran Belanja Pemeliharaan, diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu : Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang & jasa

NO	OPD	Total Belanja Pemeliharaan (Rp.)	Total Belanja Barang & Jasa (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Dinas Kesehatan	85.082.000	46.016.323.000	0,18
2	BPKAD	505.525.460	7.471.542.582	6,76
3	Disdukcapil	112.483.000	4.876.225.000	2,31
4	Dinas Perikanan	185.151.950	3.068.198.232	6,03
5	DLH	1.083.793.000	11.688.249.000	0,092
6	Bakesbangpol	96.634.500	1.582.104.233	6,10
7	BKD	76.050.000	3.592.871,000	2,1
8	DPMPTSP	55.325.000	910.753.000	6,07
9	RSUD RA.Kartini	2.581.437.779	130.316.925.688	0,019
10	Satpol PP & Damkar	8.390.000	2.832.965.631.000	0,003
11	Inspektorat	78.199.000	1.222.554.000	4,33
12	Setwan	268.719.500	25.888.518.333	1
13	Setda	1.265.634.000	18.764.696.000	6,74
14	BPBD	48.263.631	1.845.961.547	2,6
15	Dishub	1.844.351.066	22.210.062.652	8,30
16	Disperkim	75.102.000	24.702.527.000	81
17	Bappeda	128.686.100	4.916.285.843	1,7
18	Kec.Welahan	22.844.300	255.167.544	8,95
19	Kec.Mayong	49.975.875	320.484.000	15,6
20	Kec.	34.773.500	291.222.000	11,94

	Kalinyamatan			
21	Kec.Jepara	173.786.498	891.862.079	19,5
22	Kec. Donorojo	16.206.000	295.052.000	5,5
23	Kec. Nalumsari	11.908.000	254.310.000	4,7
24	Kec. Batealit	23.722.800	327.339.598	7,24
25	Kec. Pakis Aji	8.341.500	286.365.982	2.91
26	Kec. Mlonggo	325.687.000	367.379.000	88,7
27	Kec. Pecangaan	38.297.510	252.995.572	15,13
28	Kec Kembang	11.908.000	254.310.000	0,046
29	Kec. Kedung	72.760.000	369.042.000	97,2
30	Kec. Tahunan	58.800.000	348.828.000	16.85
31	Kec. Bangsri	6.220.000	248.809.000	2,49
32	Kec. Karimunjawa	120.159.270	1.176.706.000	10,21
33	Kec. Keling	56.574.000	337.980.000	16,73
34	Disdikpora	67.482.662.00 0	86.911.962.000	77.64
		1.860.800.000	86.911.962.000	2.14
35	DKPP		1.364.551.400	0
		98.683.000	7.262.625.542.0 00	0,1
36	Disperindag	3.916.485.000	11.278.725.000	35
		3.916.485.000	11.278.725.000	35
37	DPU-PR	76.755.544.80 6	94.646.949.456	81
38	Disparbud	860.713.656	17.448.553.000	4,93
		52.111.000	17.448.553.000	0,29
39	Diskarpus	129.857.116	161.656.000	80,32
		31.466.000	161.656.000	19,46
40	Diskop UKM Nakertrans	70.800.000	4.471.541.000	15,01
		0	4.471.541.000	0
		0	4.471.541.000	0
41	Diskominfo	94.020.600	3.731.758.588	2,52
		0	0	0
42	DP3AP2KB	0	1.570.170.000	0
		72.400.000	1.570.170.000	4,6
43	Dinsosperma des	185.538.000	7.713.034.000	2,41

- Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD :

NO	OPD	Total Belanja Pemeliharaan (Rp.)	Total Belanja OPD (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	85.082.000	54.855.552.000	0,15
2	BPKAD	505.525.460	20.584.285.797	2,45 %
3	Disdukcapil	112.483.000	7.630.408.000	1,47
4	Dinas Perikanan	185.151.950	8.343.508.974	2,22
5	DLH	1.083.793.000	26.459.964.000	0,040
6	Bakesbang pol	96.634.500	3.570.904.678	2,70
7	BKD	76.050.000	7.547.574.000	1,01
8	DPMPTSP	55.325.000	3.689.564.000	1,49
9	RSUD RA. Kartini	2.581.437.779	152.206.434.277	0,017
10	Satpol PP & Damkar	8.390.000	7.752.477.407	0,0010
11	Inspektorat	78.199.000	5.893.890.000	1,32
12	Setwan	268.719.500	32.155.017.256	0,8
13	Setda	1.265.634.000	32.119.335.000	3,94
14	BPBD	48.263.631	3.010.358.000	1,6
15	Dishub	1.844.351.066	48.558.179.951	3,80
16	Disperkim	75.102.000	33.944.516.000	0,22
17	Bappeda	128.686.100	10.400.147.765	0,97
18	Kec. Welahan	22.844.300	2.914.379.690	0,79
19	Kec.Mayong	49.975.875	2.746.266.144	1,82
20	Kec. Kalinyamatan	291.222.000	2.600.412.965	11,19
21	Kec.Jepara	173.786.498	9.261.611.000	1,88
22	Kec. Donorojo	16.206.000	2.083.011.000	0,08
23	Kec. Nalumsari	11.908.000	455.439.000	2,61
24	Kec. Batealit	23.722.800	2.270.065.765	1,04
25	Kec. Pakis Aji	8.341.500	2.313.141.699	0,36
26	Kec. Mlonggo	37.902.000	35.614.500	94
27	Kec. Pecangaan	38.297.510	2.632.452.000	1,45

28	Kec. Kembang	11.908.000	455.439.000	0,26
29	Kec. Kedung	72.760.000	369.042.000	97,2
30	Kec. Tahunan	58.800.000	58.800.000	2,30
31	Kec. Bangsri	6.220.000	384.294.000	1,61
32	Kec. Karimnjava	120.159.270	7.090.376.000	1,69
33	Kec. Keling	56.574.000	2.383.625.032	2,37
34	Disdikpora	67.482.662.000	86.911.962.000	77,64
		1.860.800.000	86.911.962.000	2.14
35	DKPP		1.364.551.4000	0
		98.683.542	7.262.625.542.000	0,13
36	Disperindag	3.916.485.000	28.786.389.000	14
		3.916.485.000	28.786.389.000	14
37	DPU-PR	76.755.544.806	369.960.450.000	20,75
38	Disparbud	860.713.656	45.230.501.000	1,9
		52.111.000	45.230.501.000	0,11
39	Diskarpus	129.857.116	2.802.108.307	4,63
		31.466.000	2.802.108.307	1,12
40	Diskop UKM Nakertrans	70.800.000	8.911.473.000	0,79
		0	8.911.473.000	0
		0	8.911.473.000	0
41	Diskominfo	94.020.600	4.144.974.350	2,3
		0	212.393.185	0
			168.407.375	
42	DP3AP2KB	0	12.568.637.000	0
		72.400.000	12.568.637.000	0,57
43	Dinsosperma des	185.538.000	8.012.379.000	2,32

- Laporan Keuangan OPD, diukur melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Laporan Keuangan OPD (LRA, Neraca, CALK) :
 1. Dinas Kesehatan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 2. BPKAD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

3. DISDUKCAPIL
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
4. DINAS PERIKANAN
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
5. DLH
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
6. Bakesbangpol
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
7. BKD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
8. DPMPTSP
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
9. RSUD RA Kartini
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
10. Satpol PP dan Damkar
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
11. INSPEKTORAT
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

12. SETWAN
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
13. SETDA
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
14. BPBD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
15. DISHUB
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
16. DISPERKIM
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
17. BAPPEDA
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
18. Kec. Welahan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
19. Kec. Mayong
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
20. Kec. Kalinyamatan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

21. Kec. Jepara
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
22. Kec. Donorojo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
23. Kec. Nalumsari
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
24. Kec. Batealit
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
25. Kec. Pakisaji
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
26. Kec. Mlonggo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
27. Kec. Pecangaan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
28. Kec. Kembang
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
29. Kec. Kedung
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

30. Kec. Tahunan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
31. Kec. Bangsri
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
32. Kec. Karimunjawa
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
33. Kec. Keling
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
34. Disdikpora
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
35. DKPP
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
36. Disperindag
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
37. DPU-PR
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
38. Disparbud
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 39. Diskarpus
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
- 40. Diskominfo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
- 41. Diskop UKM Nakertrans
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
- 42. DP3AP2KB
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
- 43. Dinsospermades
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aspek Pengelolaan Barang milik Daerah diukur dengan 2 fokus yaitu :

- Manajemen asset OPD, diukur melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Inventarisasi barang/ Aset OPD.

NO	OPD	Ada/Tidak ada Inventarisasi barang/Aset OPD	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	4	Ada
2	BPKAD	4	Ada
3	Disdukcapil	4	Ada
4	Dinas Perikanan	4	Ada
5	DLH	3	Ada
6	Bakesbangpol	4	Ada

7	BKD	4	Ada
8	DPMPTSP	4	Ada
9	RSUD RA. Kartini	4	Ada
10	Satpol PP & Damkar	4	Ada
11	Inspektorat	4	Ada
12	Setwan	4	Ada
13	Setda	4	Ada
14	BPBD	4	Ada
15	Dishub	4	Ada
16	Disperkim	4	Ada
17	Bappeda	4	Ada
18	Kec.Welahan	4	Ada
19	Kec.Mayong	4	Ada
20	Kec. Kalinyamatan	4	Ada
21	Kec.Jepara	4	Ada
22	Kec. Donorojo	4	Ada
23	Kec. Nalumsari	4	Ada
24	Kec. Batealit	4	Ada
25	Kec. Pakis Aji	4	Ada
26	Kec. Mlonggo	4	Ada
27	Kec. Pecangaan	4	Ada
28	Ke. Kembang	4	Ada
29	Kec. Kedung	4	Ada
30	Kec. Tahunan	4	Ada
31	Kec. Bangsri	4	Ada
32	Kec. Karimunjawa	4	Ada
33	Kec. Keling	4	Ada
34	Disdikpora	4	Ada
		4	Ada
35	DKPP	4	Ada
		4	Ada
36	Disperindag	4	Ada
		4	Ada
37	DPU-PR	4	Ada
		4	Ada
38	Disparbud	4	Ada
		4	Ada
39	Diskarpus	4	Ada
		4	Ada

40	Diskop UKM	4	Ada
		4	Ada
		4	Ada
41	Diskominfo	4	Ada
		4	Ada
42	DP3AP2KB	4	Ada
		4	Ada
43	Dinsospermades	4	Ada
		4	Ada

- Penggunaan Aset Perangkat Daerah, ditentukan dengan 1 IKK yaitu jumlah barang yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah.

NO	SKPD	Jml Aset yg tdk di gunaka n OPD (Rp.)	Jumlah aset yang dikuasai OPD(Rp.)	Cap Kinerja
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	0	31.737.364.016	0 %
2	BPKAD	0	74.024.414.200	0 %
3	Disdukcapil	0	8.136.897.395	0 %
4	Dinas Perikanan	0	81.323.370.738	0 %
5	DLH	0	115.769.580.042	0 %
6	Bakesbangpol	0	4.436.497.230	0 %
7	BKD	0	3.324.731.609	0 %
8	DPMPTSP	0	2.295.125.783	0 %
9	RSUD RA. Kartini	0	250.997.067.17	0 %
10	Satpol PP & Damkar	0	8.910.711.974	0 %
11	Inspektorat	0	5.360.372.307	0 %
12	Setwan	0	40.889.229.523	0 %
13	Setda	0	182.852.061.321	0 %
14	BPBD	0	8.342.824.445	0 %
15	Dishub	0	116.903.959.992	0 %
16	Disperkim	0	136.670.262.875	0 %
17	Bappeda	0	9.032.677.008	0 %
18	Kec.Welahan	0	3.866.602.397	0 %

19	Kec.Mayong	0	10.393.006.463	0 %
20	Kec. Kalinyamatan	0	9.939.286.832	0 %
21	Kec.Jepara	0	15.173.664.942	0 %
22	Kec. Donorojo	0	3.587.750.186	0 %
23	Kec. Nalumsari	0	2.259.180.649	0 %
24	Kec. Batealit	0	4.004.140.092	0 %
25	Kec. Pakis Aji	0	2.967.102.401	0 %
26	Kec. Mlonggo	0	2.360.447.574	0 %
27	Kec. Pecangaan	0	8.251.170.956	0 %
28	Ke. Kembang	0	3.328.878.867	0 %
29	Kec. Kedung	0	2.176.991.268	0 %
30	Kec. Tahunan	0	1.493.178.973	0 %
31	Kec. Bangsri	0	2.649.182.482	0 %
32	Kec. Karimunjawa	0	3.287.830.509	0 %
33	Kec. Keling	0	1.897.435.393	0 %
34	Disdikpora	0	14.027.441.879	0 %
35	DKPP	0	71.882.614.313	0 %
36	Disperindag	0	354.130.434.668	0 %
37	DPU-PR	0	3.697.009.419.36 2	0 %
38	Disparbud	0	217.804.353.782	0 %
39	Diskarpus	0	14.958.935.407	0 %
40	Diskominfo	0	11.100.055.360	0 %
41	Diskop UKM Nakertrans	0	20.403.314.720	0 %
42	DP3AP2KB	0	16.021.112.910	0 %
43	Dinsosperma des	0	7.733.597.551	0 %

h. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

- Aspek Pemberian fasilitas terhadap Partisipasi masyarakat, diukur dengan 2 fokus yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, diukur melalui 1 IKK, yaitu sarana fasilitas/prasarana informasi :

NO	OPD	Ada/ tdk ada
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	Ada
2	BPKAD	Ada
3	Disdukcapil	Ada
4	Dinas Perikanan	Ada
5	DLH	Ada
6	Bakesbangpol	Ada
7	BKD	Ada
8	DPMPTSP	Ada
9	RSUD RA. Kartini	Ada
10	Satpol PP & Damkar	Ada
11	Inspektorat	Ada
12	Setwan	Ada
13	Setda	Ada
14	BPBD	Ada
15	Dishub	Ada
16	Disperkim	Ada
17	Bappeda	Ada
18	Kec.Welahan	Ada
19	Kec.Mayong	Ada
20	Kec. Kalinyamatan	Ada
21	Kec.Jepara	Ada
22	Kec. Donorojo	Ada
23	Kec. Nalumsari	Ada
24	Kec. Batealit	Ada
25	Kec. Pakis Aji	Ada
26	Kec. Mlonggo	Ada
27	Kec. Pecangaan	Ada
28	Ke. Kembang	Ada
29	Kec. Kedung	Ada
30	Kec. Tahunan	Ada
31	Kec. Bangsri	Ada
32	Kec. Karimunjawa	Ada
33	Kec. Keling	Ada
34	Disdikpora	Ada
		Ada
35	DKPP	Ada
		Ada
36	Disperindag	Ada
		Ada
37	DPU-PR	Ada
		Ada

38	Disparbud	Ada
		Ada
39	Diskarpus	Ada
		Ada
40	Diskominfo	Ada
		Ada
41	Diskop UKM Nakertrans	Ada
		Ada
		Ada
42	DP3AP2KB	Ada
		Ada
43	Dinsospermades	Ada
		Ada

- Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada tahun 2018 :

NO	OPD	Ada/ tdk ada
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	Ada
2	BPKAD	Ada
3	Disdukcapil	Ada
4	Dinas Perikanan	Ada
5	DLH	Ada
6	Bakesbangpol	Ada
7	BKD	Ada
8	DPMPTSP	Ada
9	RSUD RA. Kartini	Ada
10	Satpol PP & Damkar	Ada
11	Inspektorat	Ada
12	Setwan	Ada
13	Setda	Ada
14	BPBD	Ada
15	Dishub	Ada
16	Disperkim	Ada
17	Bappeda	Ada
18	Kec.Welahan	Ada
19	Kec.Mayong	Ada
20	Kec. Kalinyamatan	Ada
21	Kec.Jepara	Ada
22	Kec. Donorojo	Ada

23	Kec. Nalumsari	Ada
24	Kec. Batealit	Ada
25	Kec. Pakis Aji	Ada
26	Kec. Mlonggo	Ada
27	Kec. Pecangaan	Ada
28	Ke. Kembang	Ada
29	Kec. Kedung	Ada
30	Kec. Tahunan	Ada
31	Kec. Bangsri	Ada
32	Kec. Karimunjawa	Ada
33	Kec. Keling	Ada
34	Disdikpora	Ada
		Ada
35	DKPP	Ada
		Ada
36	Disperindag	Ada
37	DPU-PR	Ada
		Ada
38	Disparbud	Ada
		Ada
39	Diskarpus	Ada
		Ada
40	Diskominfo	Ada
		Ada
41	Diskop UKM Nakertrans	Ada
		Ada
		Ada
42	DP3AP2KB	Ada
		Ada
43	Dinsospermades	Ada
		Ada

B. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan ditentukan melalui 6 IKK :
1. Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan.
Ada yaitu Perda No. 2 ahun 2007 tentang RPJPD Kab. Jepara Tahun 2005-2025

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada yaitu Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada, yaitu Perbup No. 24 Tahun 2017 tentang RKPD Kab. Jepara Tahun 2018
4. Penjabaran Program ke dalam RKPD
Dari 144 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018, program RKPD tahun 2018 sebanyak 144 atau capaian kinerjanya 100 %.
5. Sistem Informasi Manajemen Pemda
Sistem Informasi Manajemen Pemda yang dibuat sebanyak 52 buah.
 - SIMPATEN
 - SIMPTSP
 - SIM PERIZINAN ONLINE
 - SEMPEDAL
 - SIM DP3AP2KB
 - <http://siga.jeparakab.go.id/>
 - <http://lpse.jeparakab.go.id/>
 - <http://jdih.jeparakab.go.id/>
 - <http://singmantap.jeparakab.go.id/>
 - <http://imta.jeparakab.go.id/>
 - <http://asmara.jeparakab.go.id/>
 - <http://sibangtanah.jeparakab.go.id/>
 - <http://perijinan.jeparakab.go.id/>
 - <http://skp.jeparakab.go.id/>
 - <http://paten.jeparakab.go.id/>
 - <http://e-presensi.jeparakab.go.id/>
 - <http://simpeg.jeparakab.go.id/>
 - <http://pelayanan.disdukcapil.jeparakab.go.id/>
 - <http://simpad.jeparakab.go.id/>
 - <http://bphtb.jeparakab.go.id/>
 - <http://epbb.jeparakab.go.id/>
 - <http://sakup.jepara.go.id/>
 - <http://stara.jeparakab.go.id/>
 - <http://data.jepara.go.id/>
 - <http://lkh.jeparakab.go.id/>
 - <http://dkk.sikdkkjepara.net/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/arsip/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/e-kohort/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/icd10/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/ifk/>
 - <http://dkk.sikdkkjepara.net/fktp/nakes/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/zika-db/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/phbs/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/simtgic/>
 - <http://64696e6b6573.mi-kes.net/spgdt/>

- http://64696e6b6573.mi-kes.net/jepara_ri/
- <http://sipkdjepara.net/>
- http://hrvplanner.com/gis_jalan_jepara/
- <http://sisda-dpupr-jepara.com/>
- <http://webgis-jalanjepara.com/>
- <https://siangsa.com/>
- <http://cctv.jepara.go.id/>
- SIM Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- SIM Angkutan Jalan
- SIM Perhubungan Laut
- Perhubungan
- SIM e-Musrenbang
- SIM Evaluasi RKPD
- SIM Terpadu
- Pelayanan Online Disdukcapil
- SMS Gateway
- SI KUMIS DI DESA (Aplikasi Mutasi Kependudukan di Desa)

6. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Jepara, pada tahun 2018 sudah ada dan sudah dilaksanakan dengan baik di semua OPD.

C. Urusan Pemerintahan Umum

Aspek tingkat capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum diukur melalui 2 IKK :

1. Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah.
Sepanjang tahun 2018, di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pembinaan politik yaitu :
 - Penyuluhan politik kepada masyarakat,
 - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
 - Koordinasi forum forum politik
2. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 4 kali kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

D. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

• Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Tingkat Capaian Kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci yaitu :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Dari sejumlah 63.368 anak usia 4 – 6 tahun di kab. Jepara terdapat 36.684 anak yang bersekolah pada jenjang Taman kanak-kanak (TK), RA, dan Penitipan Anak sehingga capaian kinerjanya sebesar 58,21 %.
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
 Penduduk Kabupaten Jepara yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 845.250 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 884.900 orang, sehingga IKK-nya mencapai 95,52 %
- Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A.
 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.1
Tabel Indikator APM tingkat SD/MI/Paket A

No	Jenis APM	Uraian	Jumlah
1	SD/MI/ PaketA	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun jenjang SD/MI	107.125
		Jumlah penduduk kel usia 7-12 thn	107.125

- Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.2
Tabel Indikator APM tingkat SMP/MTs/Paket B

No	Jenis APM	Uraian	Jumlah
1	SMP/ MTs/ Paket B	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs	51.112
		Jumlah penduduk kel usia 13-15 tahun	62.650

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.4
Tabel Indikator APS tingkat SD/MI

No	Jenis APS	Uraian	Jumlah
1	SD/MI	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD	28
		Jumlah Siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya	77.805

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.5
Tabel Indikator APS tingkat SMP/MTs

No	Jenis APS	Uraian	Jumlah
1	SMP/MTs	Jml putus sekolah pd tk & jenjang SMP/MTs	19
		Jmlh Siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	22.299

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.7
Tabel Indikator AL tingkat SD/MI

No	Jenis AL	Uraian	Jumlah
1	SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	19.718
		Jml lulusan pd jenjang SD/MI pd thn ajaran sebelumnya	19.718

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.8
Tabel Indikator AL tingkat SMP/MTs

No	Jenis AL	Uraian	Jumlah
1	SMP/M Ts	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	17.924
		Jml lulusan pd jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya	17924

- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Jepara tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.10
Tabel Indikator AM dari SD/MI ke SMP/MTs

No	Jenis AM	Uraian	Jumlah
1	SD/MI ke SMP/M Ts	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	19.716
		Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya	19.763

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D4 tahun 2018 adalah 15.214 orang dari seluruh jumlah guru SD/MI,MTS/SMP, sebanyak 17.863 orang, atau capaian kinerjanya sebesar 85,17 persen.

2. Urusan Kesehatan

Untuk Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

- Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Pada tahun 2018 di Kabupaten Jepara dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan sebanyak 4.483, yang mendapat penanganan definitif sebanyak 4.153 atau capaian kinerjanya sebesar 92,63 %.
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
Pada tahun 2018, dari seluruh sasaran ibu bersalin yaitu sebanyak 19.684 orang, semuanya ditolong/ ditangani oleh tenaga kesehatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Dari 195 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara, sudah melaksanakan Universal Child Immunization (UCI) seluruhnya sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Dari 114 kasus balita gizi buruk, kesemuanya mendapat pelayanan perawatan, sehingga nilai capaian kinerjanya 100 %
- Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC BTA
Selama kurun waktu 2018 diperkirakan terdapat 1.521 penderita baru TBC BTA (+), sedangkan yang dapat ditemukan dan diobati sebesar 1.008 penderita atau capaian kinerjanya 66,27%

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada tahun 2018 di Kabupaten Jepara ditemukan 216 penderita penyakit DBD, dan semua kasus itu dapat ditangani atau capaian kinerjanya sebesar 100 %

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari 619.196 orang masyarakat miskin di Jepara, terdapat 348.163 kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan atau kinerjanya sebesar 56,22 %.

- Cakupan kunjungan bayi

Hal lain yang penting untuk mendapat pelayanan dasar kesehatan adalah bayi lahir yang hidup. Selama tahun 2018 terdapat 19.735 bayi lahir yang hidup di Kabupaten Jepara, akan tetapi yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 19.666 capaian kinerjanya sebesar 98,65 %.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Penanganan Sampah.

Penanganan masalah sampah merupakan permasalahan yang krusial yang sering dihadapi di kabupaten/kota termasuk Jepara. Dari total produksi sampah sebesar 5.640 m³ perhari, hanya sebesar 649,16 m³ perhari yang dapat ditangani atau sebesar 11,51 %.

- Kebersihan.

Jumlah pasar tradisional tergolong baik pada tahun 2018 sebanyak 4 buah dari total 21 buah pasar atau 19,05%.

- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2018 sebesar 1.168.261 jiwa, Sedangkan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah

(TPS) hanya sebesar 576 m³. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 0,49 per 1.000 penduduk. Artinya, setiap 1.000 penduduk yang hanya bisa terlayani 49 orang di TPS.

- **Penegakan Hukum Lingkungan.**
Pemerintah daerah berkewajiban menangani pengaduan kasus pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan jumlah aduan kasus lingkungan yang ada sebanyak 13 kasus dan bisa terselesaikan semuanya sehingga capaian kinerjanya 100 %.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

- **Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik**
Panjang seluruh jalan di Kabupaten Jepara adalah 873 km, sedangkan panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah 575,51 km sehingga panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 67,99 %.
- **Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik**
Irigasi yang baik akan sangat menunjang hasil pertanian, adapun irigasi yang berkondisi baik di Kabupaten Jepara sebesar 6.184 ha dari total 28.247 ha luas irigasi di Kabupaten Jepara atau sebesar 22 %.
- **Rumah tangga per-sanitasi- Perkim**
Jumlah rumah tangga bersanitasi Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah sebanyak 279.238 dari total jumlah rumah tangga sebanyak 317.316 sehingga IKK-nya adalah 0,17 persen.

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian kinerja Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- Kawasan Kumuh

Dari luas wilayah di Kabupaten Jepara yaitu 2.466,701 ha, masih terdapat kawasan kumuh seluas 4,13 Ha, sehingga capaian kinerja untuk urusan ini sebesar 0,17%

- Ruang Terbuka hijau per satuan luas wilayah.

Dari luas wilayah 100.400 ha, luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Jepara adalah 3.802,14 ha.

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pada tahun 2018, dari seluruh jumlah rumah tangga di Kabupaten Jepara yaitu 380.762, rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih sebanyak 343.528 atau sebesar 90,22%.

- Lingkungan Permukiman Kumuh

Dari total luas wilayah di Kabupaten Jepara yaitu 2.466,701 ha, masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 0,41 ha atau sebesar 0,17 %.

- Rumah Layak Huni

Dari jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2018, yaitu sebanyak 289.546 buah, rumah yang masuk kategori layak huni sebanyak 231.107 buah atau sebesar 79,82 %.

6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- Gelanggang/Balai Remaja

Jumlah Gelanggang olahraga yang dimiliki sebanyak 8 buah dibagi jumlah penduduk Jepara sebesar 1.168.261 jiwa, maka capaian nilai IKK-nya adalah 0.001 %

- Lapangan Olahraga

Untuk menunjang kegiatan olahraga, pada tahun 2018 Kabupaten Jepara memiliki lapangan olahraga sebanyak 474 buah.

7. Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Jepara diukur melalui Indikator Kinerja Kunci Realisasi PMDN tahun 2018 sebesar 2.217.628.445.661,- sedangkan tahun 2017 sebesar 111.420.550.872 sehingga ada kenaikan sebesar 1,890,23 %.

8. Urusan Koperasi dan UKM

Tingkat capaian kinerja Urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Jumlah Koperasi Aktif

Di Kabupaten Jepara ada 645 koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 525 buah. Sehingga IKK-nya adalah 81 %.

- Usaha Makro dan Mikro

Dari 79.112 seluruh usaha mikro yang ada di Jepara, ada 78.505 usaha mikro yang aktif sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,23 %.

9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Kepemilikan KTP

Prosentase kepemilikan KTP adalah 91,49 % yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 778.748 jiwa dari 851.189 jiwa jumlah penduduk wajib memiliki KTP.

- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 467.696 orang dibagi dengan jumlah penduduk Jepara sebanyak 1.168.261 jiwa, hasilnya 400,34 orang per 1000 penduduk yang baru memiliki akta kelahiran.

- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara

mulai tahun 2005.

10. Urusan Ketenagakerjaan

Tingkat capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh

Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 31.142 orang dari jumlah total pekerja buruh sebanyak 86.199.000 orang, atau 36,12 %.

- Pencari Kerja yang ditempatkan

Jumlah pekerja yang ditempatkan/telah mendapat pekerjaan pada tahun 2018 sebanyak 6.350 orang dari total jumlah pekerja yang mendaftar yaitu 17.957 orang atau 35 %.

11. Urusan Pangan

Tingkat capaian kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Regulasi Ketahanan Pangan

Kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara dan sebagainya telah dimiliki oleh Kabupaten Jepara yaitu:

- PP No. 68 Th. 2002 tentang Ketahanan Pangan
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Perpres No. 22 Tahun 2009 Tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Permentan no. 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Pergub No. 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Prov. Jateng
- Perbub No. 39 Tahun 2009 Tentang percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kab. Jepara

- Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Acara Pertemuan/Rapat/Pelatihan

- Ketersediaan pangan utama pertahun
Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebesar 124,19 kg per orang per tahun. Ini diperoleh dari jumlah ketersediaan pangan utama per tahun yaitu 151.988 ton dibagi jumlah penduduk sebesar 1.168.261 orang.

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.
Dari jumlah pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu sebanyak 58.502 orang, jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan sebanyak 4013 orang atau sekitar 6,85 %.
- Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 th ke Atas.

Masalah pendidikan dasar sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara sebanyak 443.919 orang atau 99,82 % dari jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang mencapai 444.716 Orang.

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
Dari 58.502 angkatan kerja perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 5.733 orang dengan nilai IKK sebesar 9,79 %.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten

Jepara diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Prevalensi Peserta KB Aktif

Pada tahun 2018, di Kabupaten Jepara terdapat 216.969 pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut, ada 136.841 pasangan yang menjadi peserta program KB aktif atau 63,07 %.

- Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/Kelurahan

Di Kabupaten Jepara, ada 195 desa/kelurahan. Sedangkan PLKB/PKB sejumlah 48 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 4,06 %.

14. Urusan Perhubungan

Tingkat capaian kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Jepara diukur melalui 1 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat yang ada adalah 786 buah untuk melayani sekitar 1.088.061 penumpang angkutan darat, sehingga capaian kinerja ini adalah sebesar 0,07 %.

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tingkat capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Web site milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2018 sudah memiliki web site sebanyak 49 website, yaitu :

- jepara.go.id
- satpolpp-damkar.jepara.go.id
- setwan.jepara.go.id
- inspektorat.jepara.go.id
- bpbd. jepara.go.id
- bakesbangpol.jepara.go.id
- bappeda.jepara.go.id
- bpkad.jepara.go.id
- bkd.jepara.go.id
- bagianhukum.jepara.go.id
- bagiankesra.jepara.go.id
- bagianorganisasi.jepara.go.id
- bagianpembangunan.jepara.go.id

- bagianperekonomian.jepara.go.id
 - bagiantapem.jepara.go.id
 - bagianpemdes.jepara.go.id
 - bagianumum.jepara.go.id
 - diskominfo.jepara.go.id
 - dishub.jepara.go.id
 - disparbud.jepara.go.id
 - disperkim.jepara.go.id
 - diskarpus.jepara.go.id
 - dinas-perikanan.jepara.go.id
 - disdikpora.jepara.go.id
 - dpmpptsp.jepara.go.id
 - disperindag.jepara.go.id
 - dlh.jepara.go.id
 - diskopukmnakertrans.jepara.go.id
 - dpupr.jepara.go.id
 - dinkes.jepara.go.id
 - dp3ap2kb.jepara.go.id
 - dinsospermades.jepara.go.id
 - disdukcapil.jepara.go.id
 - jepara.jepara.go.id
 - kedung.jepara.go.id
 - pakisaji.jepara.go.id
 - batealit.jepara.go.id
 - mlonggo.jepara.go.id
 - bangsri.jepara.go.id
 - keling.jepara.go.id
 - kembang.jepara.go.id
 - donorojo.jepara.go.id
 - welahan.jepara.go.id
 - mayong.jepara.go.id
 - nalumsari.jepara.go.id
 - kalinyamatan.jepara.go.id
 - karimunjava.jepara.go.id
 - pecangaan.jepara.go.id
 - tahunan.jepara.go.id
- Pameran/Expo
Sedangkan pameran expo selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu :
 - Miratex Expo Mataram 2018
 - CJIBF Jakarta 2018
 - Bumi Kartini Expo

- Javanes Creation
- IFEX
- Inacraft
- Apkasi
- Trade Expo Indonesia (TEI)
- Warisan
- Gelar Produk Daerah
- Kedutaan Expo

16. Urusan Pertanahan

Tingkat capaian kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Jepara diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- **Luas Lahan Bersertifikat**
 Urusan pertanahan dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara. dari seluruh bidang tanah di Kabupaten Jepara yaitu ; 100.413,19 ha baru sekitar 28.279,55 ha yang bersertifikat atau sekitar 28,2 %.
- **Penyelesaian Kasus Tanah Negara**
 Adapun kasus tanah yang muncul pada tahun 2018 adalah sebanyak 12 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 12 kasus dengan demikian capaian kinerja 100 %
- **Penyelesaian Ijin Lokasi**
 Pada tahun 2018 terdapat 4 ijin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jepara dari 4 permohonan ijin lokasi dan semuanya selesai, sehingga capaian kinerjanya 100 persen.

17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tingkat capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- **PKK aktif**
 Dari 195 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jepara terdapat PKK aktif sejumlah 195 atau 100%.
- **Posyandu**
 Dari 1.122 posyandu yang berada di Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 terdapat 1.122 posyandu aktif. Sehingga capaian kinerjanya

100%.

18. Urusan Sosial

Tingkat capaian kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Jepara diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- **Sarana Sosial**
Di Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 terdapat sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll sebanyak 33 buah.
- **Prosentase Penyandang Cacat**
Dari 83 penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang ada di Jepara, semuanya telah menerima jaminan sosial. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
- **PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**
Pada tahun 2018, di Kabupaten Jepara dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan yaitu sebanyak 176.791 orang, baru bisa diberikan bantuan social sebanyak 46.176 orang atau 26,12 %.

19. Urusan Kebudayaan

Tingkat capaian kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Jepara diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- **Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**
Sepanjang tahun 2018, Pemerintah kabupaten Jepara telah menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 11 kali.
- **Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**
Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki 8 sarana penyelenggaraan seni budaya.
- **Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**
Dari total benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 40 buah, ada 5 buah yang sudah dilestarikan atau sebesar 12,5%.

20. Urusan Statistik

Tingkat capaian kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
Kebutuhan data statistik sangat diperlukan dalam pembangunan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara telah menyusun Buku “Jepara Dalam Angka” pada setiap tahun anggarannya meskipun masih terdapat keterlambatan dalam penerbitan.
- Buku “PDRB Kabupaten”
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan dalam perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara telah menyusun “Buku PDRB” dalam setiap tahunnya.

21. Urusan Kearsipan

Tingkat capaian kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Penerapan Pengelola Arsip
Dari 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara, sudah semuanya menerapkan pengelolaan arsip secara baku, atau nilai IKK-nya sudah 100%.
- Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan
Pada tahun 2018, Kabupaten Jepara telah melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu sebanyak 6 kali.

22. Urusan Perpustakaan

Tingkat capaian kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Jepara diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- Koleksi Buku
Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Jepara,

melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki koleksi buku sejumlah 82.936 eksemplar dengan 39.923 judul buku atau capaian IKK-nya sebesar 48,14 %.

- **Pengunjung Perpustakaan**
Dalam perkembangannya, perpustakaan yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara bukan lagi sekedar sebagai tempat unyuk meminjam buku saja, tetapi sudah menjadi tempat untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Selama tahun 2018, dari 1.223.198 orang dalam populasi yang harus dilayani, jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 168.527 orang atau 13,8 %.

- **Urusan Pilihan**

- 1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Untuk urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- **Produksi Perikanan**
Kabupaten Jepara mempunyai wilayah laut dan darat, sehingga jumlah produksi ikan yang diperoleh selama tahun 2018 sebesar 29,067,75 ton melebihi target daerah yaitu 28.987,78 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,27 %.
- **Konsumsi Ikan**
Kenaikan produksi ikan dibarengi pula dengan kenaikan jumlah konsumsi ikan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Jepara adalah 22,10 kg/kapita/th melebihi target daerah sebesar 20,5 kg/kapita/th jadi indikator konsumsi ikan sebesar 107,80 %.

- 2. Urusan Pertanian**

Untuk urusan Pertanian di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- **Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar.**
Produktivitas tanaman padi pada tahun 2018 sebesar 53,12 kwintal/ha. Ini diperoleh dari jumlah produksi luas areal tanaman padi 44.579 ha dengan produksi tanaman padi /bahan pangan utama lokal lainnya sebanyak 2.372.670

kwintal

- Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Sektor Pertanian memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara tahun 2016 yaitu sebesar 1,39 % atau sekitar Rp. 3.606.395,02* *dari total PDRB Rp. 25.865.317,87* *.

3. Urusan Pariwisata

Untuk urusan Pariwisata di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- Kunjungan Wisata
Pada tahun 2018, sektor pariwisata Jepara berkembang dengan cukup baik. Destinasi wisata berkembang secara baik, termasuk Karimunjawa yang berkembang sangat pesat. Ini bisa dilihat dari jumlah wisatawan mengunjungi Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 2.190.231 orang.
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Sektor pariwisata memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jepara sebesar 12,7 % atau sekitar Rp. 3.276.522,17,- dari total PDRB Rp. 25.865.317,87,-

4. Urusan Perindustrian

Untuk urusan Perindustrian di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Sektor Industri memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara yaitu sebesar 34,57 % atau sekitar Rp. 8.940.259,- dari total PDRB Rp25.865.317,87,-
- Pertumbuhan Industri
Pertumbuhan industri Kabupaten Jepara pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,36 %. Pada tahun 2017 sebanyak 19.576 industri menjadi 19.464 industri tahun 2018.

5. Urusan Perdagangan

Untuk urusan Perdagangan di Kabupaten Jepara diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Sektor Perdagangan memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara yaitu

sebesar 13,49 % atau sekitar Rp. 3.226.680,25,- dari total PDRB Rp. 23.903.616,74,-.

- Ekspor Bersih Perdagangan
Pada tahun 2018 ekspor bersih perdagangan Kabupaten Jepara sebesar 347.409.178,75 USD.

6. Urusan Transmigrasi

Untuk urusan Transmigrasi di Kabupaten Jepara diukur melalui 1 Indikator Kinerja Kunci, yaitu

- Transmigrasi swakarsa.
Jumlah transmigran yang berasal dari Jepara pada tahun 2018 sebanyak 5 orang. Semuanya adalah transmigran swakarsa, sehingga nilai IKK-nya adalah 100 %.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

❖ DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

1. Dasar Hukum

- a. DIPA No. 024-03.3. 039022/2018
- b. 443.22/455/3
- c. – (DIPA ikut Provinsi)
- d. DIPA No. 024-03.3. 039022/2018
- e. DIPA No. 024-03.3. 039022/2018

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- b. Global Fund (GF)
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng

3. Program dan Kegiatan

Program :

- a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan :
 - Pertemuan Forum Germas
 - Advokasi Pemda untuk memasukkan Menu Kesehatan dalam Kebijakan Pemda terkait Pemanfaatan Dana desa
 - Rakor Pokjanal Posyandu
 - Pertemuan Evaluasi Implementasi Kampanye Germas
 - Penggerakan Massa Germas dalam 6 Lokus
 - Program Pelayanan Kesehatan
- b. Program Pelayanan Kesehatan
 - Kegiatan :
 - VCT Mobile untuk Test HIV
 - Pembelian BHP untuk Tes HIV
 - Program Pelayanan Kesehatan
- c. Program Kesehatan Ibu dan Anak
 - Kegiatan :
 - Kesehatan Keluarga
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Kegiatan :
 - Pembinaan Gizi Masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Kegiatan :
 - Pembinaan Gizi Masyarakat

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

a. Sumber dana APBN	Rp.	22.360.000,-
	Rp.	24.140.000,-
	Rp.	20.404.000,-
	Rp.	10.445.000,-
	Rp.	80.300.000,-
b. Sumber dana GF	Rp.	15.680.000,-
	Rp.	13.318.000,-
c. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	31.388.000,-
d. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	38.380.000,-
e. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	85.430.000,-

6. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 61 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 15 org, S1 : 31 org, D4 : 2 org, D3 : 8 org, SLTA : 5 org,
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 3 org, Pembina (IV/a) : 12 org, Penata Tk. I (III/d) :18 org, Penata (III/c) : 10 org, Penata Muda Tk. I (III/b) : 13 org, Penata Muda (III/a) : 3 org, Pengatur (II/c) : 2 org.

8. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan :

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

9. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : -
- Solusi : -

❖ DKPP

1. Dasar Hukum

Dokumen DIPA yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementrian Pertanian RI

3. Program dan Kegiatan

- a. Program Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan :

- Pengembangan Kawasan Buah Komoditas Klengkeng di Kabupaten Jepara

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan

- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Terlaksananya peningkatan di bidang pertanian

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

a. Sumber dana APBN TP	Rp.	115.280.000,-
b. Sumber dana APBN TP	Rp.	1.969.114.000,-

6. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- **Jumlah Pegawai : 23 orang**
- **Kualifikasi** pendidikan : S2 = 11 org, S1 = 4 org, D3 = 4 org, SLTA = 3 org,
- **Pangkat** dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) = 6 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 org, Penata Muda (III/a) = 2 org, Pengatur Tk. I (II/d) = - org, Pengatur (II/c) = 1 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 org, Pengatur Muda (II/a) = 1 org.

8. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan :

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

9. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan

- Menunggu kepastian rasionalisasi anggaran dari Kementrian pada bulan juli 2018
- Petani penerima kegiatan Peningkatan Produksi buah dan Florikultur belum terbiasa menanam kelengkeng sehingga perlu pendampingan petugas teknis.

- b. Solusi
- Komunikasi dengan petugas perencanaan dan keuangan Ditjen PSP, sehingga jika DIPA-P disahkan bisa langsung dilaksanakan.
 - Mengoptimalkan petugas PPL untuk melakukan pendampingan terkait teknis budidaya.

❖ **DP3AP2KB**

1. Dasar Hukum

- a. DIPA Nomor : SP DIPA – 068.01.2.017621/2017 tahun 2017

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

3. Program dan Kegiatan

- a. Dukungan Manajemen Pengelolaan Program KKBPK di Provinsi Jawa Tengah
- b. Layanan Perkantoran
- c. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
- d. Kesertaan ber-KB melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB-KR yang sesuai dengan standar pelayanan
- e. Pembinaan Pembangunan Keluarga di seluruh Tingkat Wilayah
- f. Penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK

4. Sumber dan jumlah anggaran

- Sumber Anggaran : APBN Rp. 2.087.618.500,-

5. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

- DP3AP2KB Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- **Jumlah Pegawai : 23 orang**
- **Kualifikasi pendidikan** : S2 = 11 org, S1 = 4 org, D3 = 4 org, SLTA = 3 org,
- **Pangkat dan Golongan** : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) = 6 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 org, Penata Muda (III/a) = 2 org, Pengatur Tk. I (II/d) = - org, Pengatur (II/c) = 1 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 org, Pengatur Muda (II/a) = 1 org.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Desa se Kabupaten Jepara
- Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 142.3.4 / 43 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa Untuk desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 412.5.2 / 0338 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018

2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk kabupaten/kota.

- Alokasi Dana Desa (ADD)

3. Sumber dan jumlah anggaran

- Sumber Dana ADD : APBD Kabupaten Jepara
Jumlah Anggaran : Rp. 102.641.172.000,-
Realisasi : Rp. 102.641.172.000,-

4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama :

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan kerjasama dengan :

- a. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- b. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan
- c. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
- d. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
- e. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan
- f. Pemerintah Kabupaten Sijunjung Prov. Sumatra Barat
- g. Pemerintah Kabupaten Demak
- h. Pemerintah Kabupaten Demak
- i. Pemerintah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora (se-Pakudjembara)

2. Dasar Hukum :

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor :489/20/PERJ/HMS-V/2017, Nomor : 475.1/1034
- b. Perjanjian Kerjasama Nomor : 20/Mou/DISNAKERTRANS/2016, Nomor : 26/2016
- c. Perjanjian Kerjasama Nomor : 22 TAHUN 2015, , Nomor : 43/PK/11/2015
- d. Perjanjian Kerjasama Nomor : 437/D.NAKERTRANS/TU/2014, Nomor : 23/2014
- e. Perjanjian Kerjasama Nomor : 475.1/421/Tektra.IV/2013, Nomor : 18/2013
- f. Perjanjian Kerjasama Nomor : 139/II/Pem.OTDA/2018
- g. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Demak nomor 415.4/PKS/23/X/2017 25 Tahun 2017 tentang Pembangunan Dan/Atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Demak Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
- h. Perjanjian Kerjasama Kab Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora Npmor : 556/1242.1, 556/591.1,556/2482,556/892, 556/1531

3. Bidang Kerjasama :

- a. Penyelenggaraan transmigrasi
- b. Penyelenggaraan transmigrasi
- c. Penyelenggaraan transmigrasi
- d. Penyelenggaraan transmigrasi
- e. Penyelenggaraan transmigrasi

- f. Penyelenggaraan transmigrasi
- g. Pemeliharaan batas daerah
- h. Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan se wilayah Pakudjembra

4. Nama kegiatan :

- a. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- b. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- c. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- d. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- e. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- f. Penjajagan dan kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa
- g. Pembangunan Dan/Atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Demak Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- h. Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembra.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah :

- a. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- b. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- c. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- d. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- e. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- f. Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kab. Jepara
- g. Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara
- h. Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

- DISKOP UKM NAKERTRANS
 - Jumlah Pegawai : 36 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 :11 orang, S1: 10 orang, D3 :4 orang, SMA : 10 orang, SMP : 1 orang.
 - Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) :1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata TK. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b): 7 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang, Pengatur Muda (II/a) :1 orang

- Bag. Tata Pemerintahan Setda Jepara
 - Jumlah pegawai : 8 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2= 5 orang, S1= 5 orang.
 - Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a)= 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 1 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 2 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- a. Anggaran kegiatan Transmigrasi bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebesar Rp. 81.950.000,-

8. Jangka Waktu Kerjasama :

- a. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- b. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- c. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- d. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- e. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- f. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- g. 5 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi
- h. 1 tahun
- i. 1 tahun

9. Hasil (Output) dari kerjasama :

- a. Terjalinnya kerjasama antar daerah yaitu terselenggaranya pengiriman transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi/ UPT Sepunggur Kecamatan Tanjung Selor Timur, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
- b. Terjalinnya kerjasama antar daerah yaitu terselenggaranya pengiriman transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi Jud I/Nganti, Kecamatan Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatra Selatan
- c. Terjalinnya kerjasama antar daerah yaitu terselenggaranya pengiriman transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi UPT Simpang Tiga SP. 5 Kecamatan Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatra Selatan
- d. Terjalinnya kerjasama antar daerah yaitu terselenggaranya pengiriman transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi UPT Gajah Mati SP 7 Kawasan gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatra Selatan
- e. Terjalinnya kerjasama antar daerah yaitu terselenggaranya pengiriman transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi UPT Tanabang SP. 2 Kecamatan Muara Kuang , Kab. Ogan Ilir, Prov.

Sumatra Selatan

- f. Kejelasan kondisi tugu/pilar batas antara Kabupaten Jepara dengan kabupaten tetangga
- g. Media promosi bersama, setiap tahun mengadakan Pentas Kesenian, setiap bulan mengadakan rapat koordinasi serta tersusunnya paket wisata se Pakudjembara.

10. Permasalahan dan solusi :

- a. Permasalahan :
 - Jumlah calon peserta transmigran sangat banyak, sedangkan kuota ada sangat sedikit sehingga animo masyarakat untuk bertransmigrasi tidak bisa terserap.
- b. Solusi:
 - Berupaya menjalin kerjasama yang baik dengan daerah penempatan supaya animo masyarakat untuk bertransmigrasi dapat terserap, dan program penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten jepara dapat berjalan baik dengan peningkatan jumlah pengiriman transmigran sesuai yang diharapkan

11. Hal-hal yang perlu dilaporkan

- Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih relative tinggi.
- Bahwa hubungan dan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Jepara dengan kabupaten lokasi transmigrasi masih terkoordinasi dan berjalan baik

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

❖ DISKOP UKM NAKERTRANS

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. CV. MUTIARA PASIVIX
JL Patiunus No 62 RT 09 RW 03 Jobokuto Jepara
- b. CV. MAHAMMI KARYA
Jl. Patimura SCJ Plasa Lantai 2 No. 2 Jepara
- c. CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Jl. S. Parman No. 47 B Semarang
- d. CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Jl. S. Parman No. 47 B Semarang
- e. CV. FAMILY ASIH
Ds. Mantingan Rt 06 Rw 02 Tahunan Jepara
- f. CV. FAMILY ASIH
Ds. Mantingan Rt 06 Rw 02 Tahunan Jepara

- g. CV. SETIYA KARYA
Ds. Mantingan Rt 06 Rw 02 Tahunan Jepara

2. Dasar Hukum :

- a. SP. No. 027/2697/DISKOP/2018
Tanggal : 29 Oktober 2018
- b. SPMK.No. 027/466/DISKOP/III/2018.
Tanggal : 22 MARET 2018
- c. SP. No. 027.6/03/PPK-PNL-LAP/V/2018
Tanggal : 7 Mei 2018
- d. SP. No. 027.7/03/PPK-PNL-BLK/XI/2018
Tanggal : 21 Nopember 2018
- e. SP. No. 050/12/SPK/.PL-BLK/09/X/2018.
Tanggal : 10 Oktober 2018
- f. SP. No. 050/12/SPK/.PL-BLK/04/III/2018.
Tanggal : 12 Maret 2018.
- g. SP. No. 050/12/SPK/.PL-BLK/10/XI/2018.
Tanggal : 30 Oktober 2018

3. Bidang Kerjasama :

- a. Pengadaan Kursi Lipat
- b. Belanja Modal Peralatan kantor
- c. Pengadaan Printer
- d. Pengadaan Komputer dan Projektor
- e. Pengadaan Peralatan Tata Boga
- f. Pengadaan Peralatan Las Listrik
- g. Pengadaan Peralatan Las Listrik

4. Nama Kegiatan :

- a. Pelayanan Teknis Kantor
- b. Pelayanan Teknis Kantor
- c. Kegiatan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Bagi Buruh Rokok Dan Mantan Buruh Dan Pencari Kerja (DBHCHT)
- d. Kegiatan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Bagi Buruh Rokok Dan Mantan Buruh Dan Pencari Kerja (Dbhcht)Ri Kerja (DBHCHT)
- e. Kegiatan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Bagi Buruh Rokok Dan Mantan Buruh Dan Pencari Kerja (Dbhcht)Ri Kerja (DBHCHT)
- f. Kegiatan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Bagi Buruh Rokok Dan Mantan Buruh Dan Pencari Kerja (Dbhcht)Ri Kerja (DBHCHT)

- g. Kegiatan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Bagi Buruh Rokok Dan Mantan Buruh Dan Pencari Kerja (DBHCHT).

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :

- Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

- DISKOP UKM NAKERTRANS
 - Jumlah Pegawai : 36 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 = 11 org, S1 = 11 org, D3 = 4 org, SLTA = 10 org, SMP : 1 Org
 - Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 org, Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 4 orang, Penata Tk. I (III/d) = 10 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 7 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- a. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 17.550.000,-
- b. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 153.100.000,-
- c. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 9.300.480,-
- d. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 23.750.980
- e. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 43.500.000
- f. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 14.520.000
- g. Anggaran bersumber dari APBD Rp. 75.700.000,-

8. Jangka waktu Kerjasama

- a. 15 HKL (29 Oktober 2018 S/D 12 Nopember 2018)
- b. 30 HKL (22 Maret 2018 s.d 20 April 2018)
- c. 14 HKL (7 Mei 2018 s/d 24 Mei 2018)
- d. 20 HKL (21 Nopember 2018 s/d 10 Desember 2018).
- e. 8 HKL (10 Oktober 2018 s/d 17 Oktober 2018
- f. 8 HKL (12 Maret 2018 s/d 19 Maret 2018
- g. 8 HKL (30 Oktober 2018 s/d 06 Nopember 2018

❖ **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

2. Dasar Hukum

- litbang yasa iptek nuklir bidang pertanian di Kabupaten Jepara nomor B-197/BATAN/DK/KS 00 01/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018

3. Bidang Kerjasama :

- Pemanfaatan hasil litbangyasa iptek nuklir bidang pertanian

4. Nama Kegiatan :

- Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PHLIN) Bidang Pertanian

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

- Jumlah PNS : 124 orang
- Kualifikasi Pendidikan PNS :
Sekolah Dasar (1 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (23 orang); Diploma 3 (22 orang); Diploma IV (1 orang) , Strata 1 (63 orang); Strata 2 (15 orang).
- Pangkat/Golongan :
Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (3 orang); Pembina/IV-a (19 orang); Penata Tk I/III-d (16 orang); enata/III-c (20 orang); Penata Muda Tk I/III-b (13 orang); Penata Muda/III-a (25 orang); Pengatur Tk I/II-d (8 orang); Pengatur / II-c (15 orang); Pengatur Muda Tk I/II-b (3 orang); Pengatur Muda / II-a (3 orang); Juru Muda /I-b (1 orang)

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- Anggaran bersumber dari APBN Rp. 75.000.000,-

8. Jangka waktu Kerjasama

- 9 Bulan (Maret s/d November 2018)

❖ **BAPPEDA**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muria Kudus
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

2. Dasar Hukum :

- a. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Bappeda dengan Ketua Lemlit UMK Nomor 050/0589, 105/Lemlit.UMK/B.07.20/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kegiatan Pendampingan Penyusunan Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) Kabupaten Jepara.
- b. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Bappeda dengan LPPM UNNES Nomor 052/2/PPK/Litbang/2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang Tenaga Ahli untuk pengembangan hasil inovasi masyarakat yang ditunjuk oleh Bappeda Kab. Jepara.
- c. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bappeda dengan Ketua LPPM UNNES Nomor 052/3/PPK/LITBANG/2018 , 212/UN37.3.1/KS/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- d. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bappeda dengan Ketua LPPM UNS Nomor 050/1390 , 1884a/UN27.21/KS/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang pelaksanaan kegiatan Desiminasi Teknologi Terapan di Kabupaten Jepara
- e. Perjanjian Kerjasama antara Bappeda dengan LPPM UNISNU Nomor 050/1385 , 120/LPPM/UNISNU/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan IPTEK dan Inovasi di Kabupaten Jepara

3. Bidang Kerjasama :

- Perjanjian Kerjasama tentang Program Dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Iptek Dan Inovasi Di Kabupaten Jepara.

4. Nama Kegiatan :

- a. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Jepara
- b. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
- c. Fasilitasi Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- d. Desiminasi Teknologi Terapan di Kabupaten Jepara
- e. Pengembangan Sanggar Iptek Masyarakat di Kabupaten Jepara berbasis Teknologi

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :

- Bappeda Kabupaten Jepara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

- Jumlah PNS : 42 orang
- Kualifikasi Pendidikan PNS :
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (7 orang); Diploma 3 (1 orang); Diploma IV (1 orang) , Strata 1 (13 orang); Strata 2 (22 orang).
- Pangkat/Golongan :
Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (1 orang); Pembina/IV-a (13 orang); Penata Tk I/III-d (8 orang); Penata/III-c (4 orang); Penata Muda Tk I/III-b (4 orang); Penata Muda/III-a (6 orang); Pengatur / II-c (6 orang).

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- Anggaran bersumber dari APBN Rp. 445.661.000,-

8. Jangka waktu Kerjasama

- 1 Tahun

❖ **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

COCA COLA FOUNDATION INDONESIA

2. Dasar Hukum :

- Kerjasama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara dengan Coca Cola Foundation Indonesia dalam Perjanjian kemitraan Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi tertanggal 1 Maret 2016

3. Bidang Kerjasama :

- Kerjasama tentang pengembangan layanan perpustakaan

Daerah dan Perpustakaan Desa berbasis teknologi informasi di
26 Perpustakaan Desa

4. Nama Kegiatan :

- Program PERPUSERU

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :

- Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 26 orang dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 12 orang, sedangkan perempuan 14 orang.
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 9 orang.
- Untuk Pangkat / Golongan ruang : Pembina Tk I (IV b) 1 orang, Pembina (IV a) ada 3 orang, Penata Tk I (III d) 5 orang, Penata (IIIc) 3 orang, Penata Muda Tk I (IIIb) 3 orang, Penata Muda (III a) 6 orang, Pengatur Tk I (II d) ada 2 orang, Pengatur (II c) 1 orang, Pengatur Muda Tk I (II b) 3 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- Bantuan berupa Hibah Sarana Prasarana IT berupa 18 unit komputer dan perangkat internet untuk Pelayanan Perpustakaan Desa, serta Pelatihan Peningkatan SDM bagi Pengelola Perpustakaan Desa, Perangkat, dan Relawan perpustakaan

8. Jangka waktu Kerjasama

- 1 Maret 2016 – Juli 2018

9. Hasil dari Kerjasama :

- Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM Pegawai Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara melalui pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan, Pelatihan Komputer dan Internet, Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Internet Program Kunang-Kunang, Pelatihan Training dan Mentoring serta peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Desa, perangkat desa, perwakilan PKK, dan karang taruna melalui pelatihan Komputer dan internet dasar dan pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan kepada 26 desa Juga

telah dibantukan kepada 26 Desa relikasi program Perpuseru tersebut di atas, masing – masing desa 3 unit komputer dan perangkat akses internet

- Perpustakaan dikembangkan sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Telah dilakukan pendampingan dari Fasilitator Perpustakaan baik dari pihak CCFI maupun dari Perpustakaan Daerah Kab. Jepara
- Di Perpustakaan Desa sudah melakukan kegiatan – kegiatan pelatihan dan pembelajaran gratis kepada masyarakat dan masyarakat telah mendapat impact dari kegiatan tersebut, antara lain dapat menghasilkan produk yang dapat di jual.

10. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Alokasi anggaran dari Pemerintah Desa untuk Perpustakaan Desa belum maksimal
- Solusi :
 - Melakukan advokasi ke pemangku kebijakan di Pemerintah Desa guna mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan dengan Program PerpuSeru.

❖ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- PT. Taspen Cabang Utama Semarang

2. Dasar Hukum :

- Perjanjian kerjasama (MoU) nomor : FEB 03/C.04/022015 NOMOR : 6 / 2015 tanggal 14/05/2015 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pelayanan Proaktif

3. Bidang Kerjasama :

- Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pelayanan Proaktif

4. Nama Kegiatan :

- Perjanjian kerja sama Pemkab Jepara dengan PT. Taspen Utama Cabang Semarang tentang Implementasi Sistem

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :

- BPKAD Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 91 orang
- Kualifikasi pendidikan
S-2 : 23 orang, S1 : 48 orang,, D-3 : 6 orang, SLTA : 11 orang, SLTP : 2 orang, SD : 1 orang
- Pangkat dan golongan :
Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang, Pembina (IV/a): 6 orang' Penata Tingkat I (III/d) : 15 orang, Penata (III/c) : 10 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b): 9 orang, Penata Muda (III/a) : 8 orang, Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 orang, Pengatur (II/c): 5 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang, Juru Tk. I (I/d) : 1 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- -

8. Jangka waktu Kerjasama

- -

9. Hasil dari Kerjasama :

Terlaksananya Sistem Cepat Dan Prima Pelayanan Elektronik Sp2d (E-Sp2d) Secara Host To Host Di Kabupaten Jepara

❖ **DINAS KESEHATAN**

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA.
- b. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG
- c. RSUD RA.KARTINI JEPARA
- d. RSUD RA.KARTINI JEPARA
- e. RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA
- f. RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA
- g. BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus
- h. RSUD DR.KARIADI SEMARANG
- i. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2. Dasar Hukum

- a. Perjanjian Kerjasama (MoU). 441.9/861/2015 dan, Nomor. HK.05.01/II.2.2/00065/2015, tanggal 2 JANUARI Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017.
- b. Perjanjian Kerjasama (MoU), 019.6/5992/2015 DAN Nomor. 390/1/01387/2017 tanggal 3 JANUARI Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017.
- c. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 040/201/2014, Nomor. 17/2013, tanggal 31 DESEMBER Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017 (RSUD RA. Kartini)
- d. Nota Kesepahaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu. (RSUD RA. Kartini)
- e. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 440/ 0058/2014, Nomor. III.7/05/RSI/I/2014 tanggal 31 DESEMBER Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017
- f. Nota Kesepahaman Nomor III.06/40/RSI/VII/2017 tentang Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu
- g. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 1 Tahun 2018, Nomor. 2110/KTR/VI-07-0118 tanggal 5 Januari Tahun 2018 tentang Cakupan Semesta jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Jepara
- h. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 440/1433, Nomor. KS.01.01 /I.IV/55/ 2017 tanggal 3 JANUARI Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017
- i. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor.441.92/13867/5, Nomor.14/KTR/VI-07/0818, Nomor 441.92/3603.2/IV/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2018

3. Bidang Kerjasama

- a. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017.
- b. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2018.
- c. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2018.

- d. Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- e. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2018
- f. Nota Kesepahaman Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu
- g. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan cakupan peserta JKN bagi Penduduk Jepara Kabupaten Jepara
- h. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2018

4. Nama Kegiatan

- a. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSOP.PROF.DR.SOEHARSO SURAKARTA, , tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018.
- b. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018
- c. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2018. (RSU. RA. Kartini)
- d. Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu. (RSU. RA. Kartini)
- e. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018.
- f. Nota Kesepahaman Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu
- g. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus tentang Cakupan Semesta jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Jepara.
- h. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSUP.DR.KARIADI SEMARANG tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018
- i. Perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2018

5. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 61 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 15 orang, S1= 31 orang, D4= 2 orang, D3= 8 orang, SLTA= 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 3 orang, Pembina (IV/a)= 12 orang, Penata Tk. I (III/d) = 18 orang, Penata (III/c) = 10 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 13 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, pengatur (II/c) = 2 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2018
Rp. 15.307.835;

8. Jangka Waktu Kerjasama

- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun
- 1 (satu) Tahun

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.
- Terlaksananya Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu tahun 2018
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.
- Terlaksananya Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu tahun 2018.
- Terlaksananya cakupan peserta JKN Bagi Penduduk Kabupaten Jepara

- h. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018
- i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2018

10. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .

11. Hal – hal yang perlu dilaporkan

- Selama tahun 2018 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA sebanyak 2 orang dengan perincian :
 - Rawat Inap 2 orang.
 - Pelayanan dan Perawatan di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA baik.
 - Dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
 - Total biaya untuk RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak Rp. 15.307.835;
- Selama tahun 2018 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSU.RA.KARTINI JEPARA sebanyak 5.952 orang dengan perincian : Rawat Jalan 1.623 orang Rawat Inap 4.329 orang , data klaim baru sampai bulan Desember
- Selama tahun 2018 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA sebanyak 300 orang dengan perincian Rawat Jalan 144 orang, Rawat Inap 156 orang.
- Selama tahun 2018 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSUP DR.KARIADI SEMARANG sebanyak 20 orang dengan perincian : Rawat Jalan 15 orang, Rawat Inap 5 orang

❖ RSUD RA. KARTINI JEPARA

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

2. Dasar Hukum

- Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor : 440/713/2018 dan Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/2534/2018, tanggal 5 Februari Tahun 2018 tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2018.

3. Bidang Kerjasama

- Perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining

Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2018.

4. Nama Kegiatan

- Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2018.

5. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 61 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 15 orang, S1= 31 orang, D4= 2 orang, D3= 8 orang, SLTA= 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 3 orang, Pembina (IV/a)= 12 orang, Penata Tk. I (III/d) = 18 orang, Penata (III/c) = 10 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 13 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, pengatur (II/c) = 2 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran dari kegiatan JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) Kab. Jepara tahun 2018
Rp. 325.000.000 ; **Realisasi Rp. 262.300.000;**

8. Jangka Waktu Kerjasama

- 1 (SATU) Tahun

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bayi baru lahir tahun 2018.

10. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masih banyak sampel yang rusak/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dikirim ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
 - Masih terdapat sampel yang tidak dapat diperiksa karena dianggap tidak memenuhi syarat dan feed back tidak sesuai (dalam lembaran feed back tertulis sampel tidak tembus, padahal sampel yang dikirim adalah sampel yang tembus)
 - Pelayanan baik, akan tetapi proses tagihan lama

- Solusi :
 - Pelatihan pengambilan sampel SHK bagi bidan
 - Peningkatan komunikasi dengan pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam proses tagihan klaim pemeriksaan SHK.

11. Hal – hal yang perlu dilaporkan

- Selama tahun 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan SHK bagi 4622 dari 5000 sampel yang direncanakan.
- Total biaya untuk RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG dalam kurun waktu tahun 2018 sebanyak Rp. 262.300.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

❖ BAGIAN UMUM SETDA JEPARA

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara

2. Dasar Hukum

- Perjanjian kerjasama (MOU) Nomor . 04 tanggal 4 Januari 2018

3. Bidang Kerjasama

- Perjanjian kerjasama tentang Pengiriman surat dinas

4. Nama Kegiatan

- Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara tentang Pengiriman Surat Dinas

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Bagian Umum Setda Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 32 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 13 orang, D3: 2 orang, SLTA : 13 orang, SLTP : 0 orang, SD : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 8 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang, Pengatur (II/c) : 9

orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda (II/a) : 3 orang, Juru (I/c) : 1 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Rp. 12.005.899.000

8. Jangka Waktu Kerjasama

1 Tahun (04 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

Terlaksananya pengiriman surat dinas tepat waktu kepada alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang digunakan

10. Permasalahan dan Solusi

-

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

❖ **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Forum Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
- Pengawasan dan Monitoring Orang Asing
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK)
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
- Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan Keperintisan
- Pendidikan Wawasan Kebagngsaan (PWK) amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
- Penyelenggaraan PPBN
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila bagi kalangan Pelajar, Mahasiwa, dan Masyarakat.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
- Pemutakhiran data Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
- Fasilitasi FKUB
- Perencanaan dan Evaluasi

2. Materi Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Peta Potensi Kerawanan Konflik
 - Kasus Krusial

- AGHT stabilitas di daerah
 - Data dan fakta peristiwa teraktual terkait ipoleksosbudhankam
 - Laporan kecamatan
 - Aduan masyarakat
 - Situasi dan kondisi keamanan daerah
- Monitoring Orang Asing
 - Data dan Fakta peristiwa teraktual terkait aktivitas orang asing.
 - Informasi masyarakat pengusaha dan pengrajin meubel.
 - Kejadian dan kasus terkait tenaga kerja orang asing.
 - Pemantauan warga negara asing baik keberadaannya dan aktivitas warga negara asing.
 - Laporan hotel/resort/homestay.
 - Aduan masyarakat.
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Data dan Fakta Gangguan Keamanan dan Konflik.
 - Pembentukan Posko PGK dan operasionalnya.
 - Laporan Gangguan Keamanan dan Konflik.
 - Koordinasi berkaitan dengan langkah-langkah antisipasi gangguan kemanan dalam negeri.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Data dan fakta kelompok aliran kepercayaan masyarakat.
 - Informasi terkini seputar perkembangan kegiatan aliran kepercayaan masyarakat.
 - Laporan kegiatan rutin aliran kepercayaan masyarakat.
 - Aduan masyarakat.
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
 - Informasi dari masyarakat.
 - Peran FKDM dalam kewaspadaan dini permasalahan di masyarakat.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Pelaksanaan Peringatan HANI Tk. Kabupaten
 - Dampak negatif narkoba terhadap kesehatan
 - Narkoba dilihat dari sudut pandang agama
 - Pendidikan Politik bagi Masyarakat

- Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu
- Demokrasi politik dan pemilihan yang cerdas dalam pilkada, pilpres.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Verifikasi pengajuan Bantuan Parpol
 - Peraturan perundang-undangan mengenai Parpol
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Konflik yang terjadi di skala tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan daerah.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Lokasi pelaksanaan sosialisasi
 - Materi yang dibahas
 - Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Terlaksananya pemutakhiran/up date data Organisasi Kemasyarakatan
 - Permasalahan dalam ormas
 - Database Ormas
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan Organisasi Kemasyarakatan ke pelatihan keormasan tingkat propinsi
 - Peraturan / Ketentuan baru tentang ormas
 - Jadwal pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Perencanaan Daerah
 - Hasil FGD
- Fasilitasi FKUB
 - Faham Radikalisme
 - Faham Sesat
 - Kerukunan Agama

- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan
 - Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
 - Sasaran Kegiatan
 - Sasaran Audience
 - Materi yang dibutuhkan
 - Narasumber
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Bantuan yang tepat di Kades
 - Materi yang dipaparkan serta pemateri yang menyajikan
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
 - Situasi dan kondusifitas wilayah
- Penyelenggaraan PPBN
 - Pelaksanaan pelatihan Kesadaran Bela Negara bagi perangkat desa se Kabupaten Jepara.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Terlaksananya Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Waktu pelaksanaan kegiatan.
 - Materi yang dipaparkan saat sosialisasi.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penginputan Renja SKPD
 - Penginputan Evaluasi RKPD
 - Pembuatan RKA dan DPA SKPD
 - Pembuatan Laporan LKPJ, LPPD, LkIP, PK

3. Instansi Vertikal yang terlibat

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP Jepara
 - Satpol PP Provinsi

- Monitoring Orang Asing
 - Imigrasi
 - Polres Jepara
 - Disdukcapil
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disnakertrans
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP
 - Pertanahan
 - Dinas Perhubungan
 - DPUPR
 - Pemerintahan Umum
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Kemenag
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dinpora
 - MUI/FKUB
 - Kejaksaan
 - Disdukcapil
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Camat
 - Petinggi / lurah
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Akademisi Tokoh Agama
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - DKK Kabupaten
 - Polres (Sat Narkoba)
 - Kemenag
 - BNN Provinsi Jawa Tengah
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - KPU
 - Pemerintahan Umum

- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - DPPKAD
 - Inspektorat
 - Bagian Hukum
 - KUP
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Forkompinda
 - Kecamatan
 - Kesbang Provinsi
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Kemendagri
 - Kesbang Provinsi
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Kesbang Provinsi
 - Ormas Tingkat Pusat
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Bappeda Kabupaten
- Fasilitasi FKUB
 - Kemenag
 - MUI
 - Forkopimda
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disparbud
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Dikpora

- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - UNDIP
 - UNISNU
- Penyelenggaraan PPBN
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara
 - Bagian Pemerintahan
 - UNDIP
 - UNISNU
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dikpora
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Bappeda Jepara
 - Bag .Pembangunan

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- Kegiatan Bina Kesbang Jumlah Anggaran Rp. 52.955.000,- Realisasi Rp. 44.140.000,-
- Kegiatan Deteksi Dini Pemilihan Gubernur Pra, Pelaksanaan dan Pasca Jumlah Anggaran Rp. 40.800.000,- Realisasi Rp. 33.269.500,-
- Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Ormas Jumlah Anggaran Rp. 50.500.000,- Realisasi Rp. 50.210.000,-
- Kegiatan Fasilitasi Forum Lintas Pelaku Jumlah Anggaran Rp. 40.060.000,- Realisasi Rp. 39.970.000,-
- Kegiatan Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 113.840.000,- Realisasi Rp. 108.850.000,-
- Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Baesbangpol Jumlah Anggaran Rp. 713.380.500,- Realisasi Rp. 665.136.002,-

- Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jumlah Anggaran Rp. 82.380.000,- Realisasi Rp. 77.985.000,-
- Kegiatan Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah Jumlah Anggaran Rp. 283.9654.000,- Realisasi Rp. 261.004.500,-
- Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Orang Asing Jumlah Anggaran Rp. 35.337.500,- Realisasi Rp. 31.008.000,-
- Kegiatan Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Jumlah Anggaran Rp. 54.350.000,- Realisasi Rp. 48.854.628,-
- Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Jumlah Anggaran RP. 25.800.000,- Realisasi Rp. 22.505.000,-
- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 49.187.500,- Realisasi Rp. 38.468.000,-
- Kegiatan Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI Jumlah Anggaran Rp. 87.712.500,- Realisasi Rp. 84.631.000,-
- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Bakesbangpol Jumlah Anggaran Rp. 25.767.500,- Realisasi Rp. 24.859.500,-
- Kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 32.635.000,- Realisasi Rp. 32.206.000,-
- Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan Jumlah Anggaran Rp. 27.412.500,- Realisasi Rp. 27.284.000,-
- Kegiatan Penyelenggaraan PPBN Jumlah Anggaran Rp. 70.155.000,- Realisasi Rp. 69.750.000,-
- Kegiatan Fasilitas Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai pancasila bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 27.870.000,- Realisasi Rp. 16.973.500,-
- Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM Jumlah Anggaran Rp. 125.900.000,- Realisasi Rp. 119.830.943,-
- Kegiatan Sosialisasi Pelatihan LPJ Bantuan Banpol Jumlah Anggaran Rp. 35.000.000,- Realisasi Rp. 32.477.000,-

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 20 orang
- Kualifikasi pendidikan :
S2= 8 orang, S1= 4 orang, D3= 1 orang, SLTA= 5 orang, SLTP= 1 orang, SD= 1 orang
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) =

1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Pengatur Muda (II/a) = 2 orang, Juru Muda (I/a) = 1 orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - 6 kali Rapat Kominda
 - 36 kali Rapat Tim Pemantau Wilayah
 - 6 kali koordinasi ke Provinsi
- Monitoring Orang Asing
 - 1 kali rakor Tim Pengawas Orang Asing
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - 1 kali rakor Tim PGK
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - 1 kali rakor Tim PAKEM
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - 1 kali rakor tim FKDM
 - 3 kali FKDM tingkat desa
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - 6 kali sosialisasi dan Rapat anggota Kegiatan HANI
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - 5 kali Rapat Koordinasi
 - 5 kali sosialisasi bagi 250 orang
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - 1 kali sosialisasi untuk 20 orang
 - 1 kali pelatihan penyusunan SPJ bantuan Parpol
 - Verifikasi bantuan keuangan 10 Partai Politik dan Pengiriman LPJ
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - 2 kali sosialisasi tingkat kabupaten untuk 200 orang

- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - 11 kali sosialisasi
 - 4 kali forum silaturahmi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Ormas
 - 20 kali Fasilitasi Ormas
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Terdatanya 120 buku Ormas dan Monitoring kegiatan Ormas
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - 9 kali koordinasi dan pelatihan keormasan tingkat provinsi
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - 12 kali Rakor bidang Pemerintahan sosial budaya, Ekonomi, Prasarana wilayah, Workshop
 - 21 kali monev desa desa unggulan
- Fasilitasi FKUB
 - 6 kali rapat anggota FKUB
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - 4 kali sarasehan bagi 600 siswa SMP dan SMA
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - 1 kali rapat untuk kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk 60 orang kepala desa baru dan perangkat desa.
- Penyelenggaraan PPBN
 - 5 kali pelatihan Bela Negara
 - 15 pengiriman ke Rindam IV Diponegoro/Tingkat Propinsi
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Koordinasi berkaitan dengan 6 buku dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Evaluasi Renstra, LKPJ /LPPD, LKJip, RKA, DPA, Renja SKPD)

8. Hasil manfaat dan koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah:

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Meningkatkan Jumlah Kasus Krusial dan meningkatnya keamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Jepara.
- Monitoring Orang Asing
 - Terpantaunya aktifitas orang asing, keberadaan orang asing dan meningkatnya keakuratan data aktifitas orang asing di Kabupaten Jepara.
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Meningkatnya antisipasi gangguan keamanan di daerah
 - Tercapainya KAMTIBMAS di wilayah Kabupaten Jepara
 - Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Terpantaunya perkembangan dan aktivitas aliran kepercayaan masyarakat
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Meningkatnya operasional FKDM Kabupaten dan FKDM tingkat Kecamatan dan Desa.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi generasi muda dan siswa sekolah.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Meningkatkan keakuratan data bantuan keuangan kepada partai politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Meningkatnya stabilitas daerah terhadap konflik sosial kemasyarakatan.

- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Meningkatnya pengetahuan aturan-aturan tentang keormasan, terbinanya dan terfasilitasinya kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Ketersediaan data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jepara
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas tentang aturan-aturan keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan
 - Meningkatnya operasional Forum Lintas Pelaku (FLP) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Jepara
- Fasilitasi FKUB
 - Meningkatnya operasional forum kerukunan umat beragama.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kepada siswa sekolah.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Meningkatnya pengetahuan tentang NKRI secara luas.
- Penyelenggaraan PPBN
 - Meningkatnya kesadaran Bela Negara bagi generasi muda, aparaturnya TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Meningkatnya kesadaran pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Meningkatnya keakuratan data Evaluasi Renstra, Renja, KKPj/LPPD, Laporan Keuangan dan LAKIP.

9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
- Monitoring Orang Asing
 - Melaksanakan pemantauan di kawasan pariwisata, penginapan, dan hotel.
 - Melaksanakan pemantauan tempat usaha unggulan di Kabupaten Jepara
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
 - Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan tokoh agama.
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Menunjang operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) baik tingkat Kabupaten, Kecamatan , dan desa
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap kalangan muda dan pelajar
 - Melaksanakan perayaan untuk memperingati HANI.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar terkait pentingnya berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Memfasilitasi bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Mengadakan sosialisasi tentang konflik sosial terhadap Petinggi dan apart desa.

- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Mengadakan sosialisasi terhadap Ormas, tentang aturan keormasan
 - Pemberian operasionalisasi kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Melakukan Pendataan keberadaan Ormas di Kabupaten Jepara.
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Mengadakan dan mengirim anggota keormasan untuk melaksanakan pelatihan tentang dasar-dasar keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Melaksanakan koordinasi lebih lanjut kepada tim Forum Lintas Pelaku
- Fasilitasi FKUB
 - Melaksanakan operasionalisasi terhadap tim FKUB.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Melaksanakan sarasehan terhadap pelajar dan pemuda mengenai Nilai Kepahlawanan dan keperintisan.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Melaksanakan sosialisasi tentang 4 pilar negara.
- Penyelenggaraan PPBN
 - Melaksanakan pendidikan Bela Negara dasar terhadap Petinggi dan Aparat desa.
 - Serta pemberian fasilitasi terhadap pengiriman ke Rindam Diponegoro.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap pelajar tentang nilai-nilai pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penyusunan data serta pembuatan laporan dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi Sepanjang tahun 2018

Sengketa tanah yang masuk di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2018 ada 12 kasus, yaitu :

- a. Permohonan Tanah Negara Bebas Menjadi Aset Desa Sinanggul
- b. Permohonan tanah lambiran/GG di Kelurahan Demaan
- c. Permohonan pengajuan hak guna pakai tanah di taman Ronggo Mulyo Kelurahan Ujung Batu
- d. Permohonan tanah negara bebas di Desa Karanggondang
- e. Penyelesaian tanah di Desa Suwawal
- f. Penyelesaian tanah LVRI -lanut
- g. Permasalahan program PTSL Tahun 2016 dan Tahun 2017 Desa Petekeyan-lanjut hukum
- h. Permasalahan Tanah di Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan
- i. Permasalahan Tanah PT. Kanindo Makmur Jaya –jalur hukum
- j. Permasalahan program Prona/PTSL yang ada di Desa Karangrandu
- k. Rekomendasi tanah Lambiran dan tanah Perhutani di Dukuh Banyuran Desa Tubanan
- l. Permohonan rekomendasi pensertifikatan tanah wakaf Masjid Jami' AN-NUR Sendang

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)

Dari 12 permasalahan yang masuk, 9 permasalahan sudah terselesaikan. Sementara 3 permasalahan pertanahan berlanjut lewat jalur hukum.

3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

- Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S-2 : 4 orang, S-1 : 4
- Pangkat dan golongan :
Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 2 orang.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Di Kabupaten Jepara, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di tangani oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.

❖ DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

- Bencana yang terjadi : Banjir, Angin Puting Beling, Tanah Longsor, cuaca buruk di laut
- Penanggulangannya : Tidak membuang sampah sembarangan, membuat tanggul disekitar sungai

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber : APBD 2018
- Jumlah anggaran Rp. 287.100.000,- Realisasi Rp. 285.228.757,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- Penebangan pohon yang rawan roboh, pengerukan sungai, pembuatan tanggul

5. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

- DINSOSPERMADES

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 31 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 15 Orang, S1 sebanyak 10 Orang, SLTA sebanyak 6 Orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 4 orang, Penata Tk I (III/d) sebanyak 6 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 2 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 2 orang dan Pengatur Muda (II/a) sebanyak 2 orang.
- Pejabat Struktural : Eselon II.b = 1 orang, Eselon III.a = 1 orang, Eselon III.b = 2 Orang, Eselon IV.a = 9 Orang.

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

- Tagana

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Banjir, tanah longsor

❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

- Bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara Tahun 2018 adalah banjir, tanah longsor, angin putting beliung, kekeringan, kebakaran, Laka Sumur, Tenggelam, Laka Laut.
- Penanggulangannya : Dengan cara evakuasi, Penguatan Tanggul dengan karung plastik dan Bronjong memberi bantuan logistic dan peralatan dapur, memberi bantuan droping air bersih, memberi bantuan sosial kemasyarakatan kejadian bencana dan kejadian khusus dalam bentuk uang.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber : APBD 2018
- Jumlah anggaran Rp. 682.512.000,- Realisasi Rp. 663.574.675,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- Sosialisai dan Pelatihan Mitigasi Bencana
- Bintek SAR dan LATGAB Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi
- Pengembangan Desa Siaga Bencana
- Pelatihan Sekolah Siaga Bencana
- Menunjang Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana
- Pembuatan Peta Rawan Bencana
- Terpasangnya Rambu Jalur Evakuasi

5. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

- BPBD

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 12 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 1 orang, D3 = 2 orang, SMA = 5 orang, SLTP = 1 orang

- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk.I (III/d) = 1 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Honorer = 22 orang.

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

- BPBD Kabupaten Jepara

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Kegagalan Teknologi PLTU
- Gempa Bumi
- Abrasi Daerah Pantai
- Tanah Longsor
- Banjir
- Banjir Bandang
- Angin besar
- Kekeringan
- Kebakaran lahan dan hutan
- Gelombang Ekstrim
- Konflik Sosial
- Kecelakaan Industri
- Kecelakaan Transportasi
- Kejadian Luar Biasa (Epidemi Penyakit)

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

- Minuman alkohol
- Konflik antar warga
- Demonstrasi
- Pelacuran/WTS
- PKL
- PGOT
- K3
- Galian C
- Karaoke

2. Perangkat Daerah yang menangani

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan

- Jumlah pegawai : 48 orang

- Kualifikasi pendidikan : S2= 6 orang, S1 = 18 orang, D4 = 1 orang, D3 = 2 orang, SLTA = 18 orang, SD = 3 Orang, Honorer 2 = SMA
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1, Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata TK.I (III/d) = 9 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 10 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 5 orang, pengatur (II/c) = 13 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) = 2 orang, pengatur muda (II/a) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang

4. Penanggulangan dan kendalanya

- Deteksi dini, menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tersebut melalui camat sebagai perangkat daerah yang ada di wilayah
- Penertiban pelanggaran melalui opstib rutin di wilayah pembinaan secara perusatif bagi para pelanggar

5. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penganggulangan

- Dilakukan pemantauan wilayah/patroli gabungan antara Polri, TNI, dan Satpol PP
- Pengamanan dalam kegiatan yang ditengarai danantisipasi gangguan keamanan di wilayah bersama stekholder terkait

6. Sumber dan Jumlah anggaran

- Pelayanan Teknis Kantor Satpol PP dan Damkar – Rp 526.559.000,-
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi – Rp 21.300.000,-
- Penunjang Pengamanan dan Penanganan Masalah Krusial – Rp 232.243.000,-
- Pengamanan/pemantauan wilayah terpadu Muspida, Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, dan Satpol PP – Rp 1.096.537.000,-
- Pengadaan pakaian seragam piket dan pakaian dinas Satpol PP – Rp 192.320.000,-
- Pembinaan, Pelatihan, dan Kesamaptaan Satpol PP Kabupaten Jepara – Rp 25.400.000,-
- Lomba dan pelatihan PBB dalam rangka HUT Linmas – Rp 40.000.000,-
- Gladi Lapangan dan deville Linmas di Provindi Jateng dan Pelatihan PBB Linmas – Rp 65.075.000,-
- Penyelenggaraan Upacara Bendera – Rp 65.646.000,-
- Penunjang perawatan kesehatan dan santunan kematian anggota Linmas serta pengadaan KTA Linmas – Rp 33.400.000,-

- Penunjang kegiatan korsik dan pengadaan seragam bagi anggota korsik – Rp 47.500.000,-
- Pembinaan pengamanan lingkungan – Rp 32.420.000,-
- Pembinaan, pelatihan anggota Linmas dan pengadaan perlengkapan penunjang tugas anggota Satlinmas – Rp 72.410.000,-
- Penunjang penegakan perda, pengamanan, penegakan, patroli, dan penertiban wilayah – Rp 430.595.000,-
- Penunjang tipiring pelanggaran perda – Rp 31.025.000,-
- Penunjang dan pemeliharaan pemadam kebakaran – Rp 770.909.000,-
- Sosialisasi dan evaluasi APAR serta pembentukan SATLAKAR dan pengadaan sarpras SATLAKAR di wilayah kecamatan – Rp 41.358.000,-
- Pengadaan dan pemeliharaan APAR di OPD se Kabupaten Jepara – Rp 83.255.000,-
- Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekai pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) – Rp 90.000.000,-
- Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Satpol PP Damkar – Rp 20.000.000,-

BAB VI

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/9804/OTDA Tanggal 17 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, untuk urusan wajib terdiri dari 22 (dua puluh dua) urusan sedangkan urusan pilihan meliputi 6 (enam) urusan. Untuk tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Adapun untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi kerjasama daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2018. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, Maret 2019

BUPATI JEPARA

H. AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN III.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
KABUPATEN JEPARA

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada atau tidak ada perda	Ada, yaitu : Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Retribusi IMB	Ada	DPMPTSP
		2	Rasio rumah ber- IMB	Jmlh rmh ber-IMB dibagi Jmlh_ rumah seluruhnya	$80.052 \div 289.547 \times 100 \%$	27,64 %	DPMPTSP
		3	Keberadaan Perda RTRW	Ada/tidak ada perda RTRW	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031	Ada	Bappeda
	Peraturan tentang Kependudukan	4	Pengurusan E- KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP	$899.976 \div 851.189 \times 100 \%$	105.73 %	Disdukcapil
		5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam Perda	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (Pasal 79 A Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya)	Tdk dipungut/ Gratis	Disdukcapil

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Personil Satpol PP(Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum)	6	Rasio personil SATPOL PP terhadap Jumlah penduduk	Jumlah Personil Satpol PP Akhir tahun 2018 dibagi 10.000 Penduduk x100 %	Jumlah Personil Satpol PP Akhir tahun 2018 : 150 orang Jumlah penduduk : 1.168.261 Orang	2 personil Satpol PP per 10.000 penduduk	Satpol PP, BKD
	Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PK atau PMKS	7	Keberadaan Perda Tentang PSK, PKL atau PMKS	Ada atau tidak Perda Tentang PSK, PKL dan PMKS	Ada: 1. Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pelacuran 2. Perda No 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan	Ada	Satpol PP
	Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan Perda Kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten	Ada : Perda no. 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan	Ada	DLH
2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 tahun 2018	Tepat /atau tidak tepat penyampaian LPPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Pengiriman LPPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 disampaikan tepat waktu	Tepat	Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara
	Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8 /2006	Tepat /atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Pengiriman Laporan Keuangan 2018 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2019.	Tepat	BPKAD
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP no. 8 Tahun 2006	Tepat /atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Penyampaian LKjIP tahun 2018 kepada Kementerian PAN & RB disampaikan tepat waktu	Tepat	Bagian Organisasi Setda Jepara

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Urusan Wajib yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan yang terdiri dari : 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan	6 Urusan	Bagian Organisasi Setda Jepara
	Hubungan antar Daerah	13	Kerjasama dengan Daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2016	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, ada 7 MOU yang terdiri dari : 1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kab. Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Demak : Nomor : 25 Tahun 2017 ; Nomor : 415.4/ PKS/23/X/2017 ; Tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Jepara Prov. Jawa Tengah ; 2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kab. Sijunjung Prov. Sumbar dengan Pemerintah Kab. Jepara Nomor : 139/II/Pem.Otda/2018, Nomor : 18 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, fasilitas Perpindahan dan Penempatan serta Pengembangan Satuan	7 MOU	Bag.Tata Pemerintahan Setda

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pemukiman UPT, Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumbar ; 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Jepara dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Nomor :489/20/PERJ/HMS-V/2017, Nomor : 475.1/1034 4. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Jepara dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan Nomor : 20/Mou/DISNAKERTRANS/2016, Nomor : 26/2016 5. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan Nomor : 22 TAHUN 2015, , Nomor : 43/PK/11/2015 6. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan Nomor : 437/D.NAKERTRANS/TU/2014, Nomor : 23/2014 7. Perjanjian Kerjasama antara		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pemkab Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan Nomor : 475.1/421/Tektra.IV/2013, Nomor : 18/2013		
3. KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah Prioritas pembangunan Daerah dibagi jumlah prioritas Pemb. Nasional	$\frac{7}{5} \times 100\%$	140 %	Bappeda
	Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan wajib yang dilaks daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) x 100%	$\frac{23}{24} \times 100\%$	95,83 %	Bappeda
	Keuangan	16	Waktu Penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu Penetapan PERDA APBD thn 2018	Tepat, yaitu : 1. Perda No.20 th. 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Desembe 2017	Tepat	Bag. Hukum SETDA
		17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak ada PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada, yaitu Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Ada	Bag. Hukum SETDA
		18	Belanja untuk Pelayanan Dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja X 100 %	Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2018 :	64,36 %	BPKAD

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Urusan Pendidikan Rp. 703.607.439.407,- 2. Urusan Kesehatan Rp. 369.922.369.809,- 3. Urusan PU & Penataan Ruang Rp. 354.002.144.411,- 4. Urusan Perumahan Rakyat & Kawawan Permukiman Rp. 31.720.037.401,- 5. Urusan Trantibun & Linmas Rp. 10.711.782.921 ,- 6. Urusan Sosial Rp. 10.790.159.212 ,- Jumlah Total Belanja :Rp. 2.300.574.959.827,-		
		19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan Dibagi jumlah total belanja x 100 %	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD tahun 2018 : 1. Urusan Pendidikan Rp. 703.607.439.407,- 2. Urusan Kesehatan Rp. 369.922.369.809,- Jumlah Total Belanja : Rp. 2.300.574.959.827,-	46,66 %	BPKAD
	Pelayanan publik	20	Keberadaan PERBUB tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya Standar Pelayanan Publik	Ada, yaitu : ➤ Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara	Ada	Bag. Hukum SETDA

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah Penduduk	Jumlah PNS Kabupaten Jepara Tahun 2018 sebanyak 8.025 orang Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Thn 2018 sebanyak 1.168.261 penduduk	0,0068	BKD/ Disdukcapil
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidaknya Data Base Kepegawaian	Ada, 1. SIMPEG 2. SAPK 3. Aplikasi Sistem Informasi Mutasi Pegawai Non Jabatan Struktural	Ada	BKD
	Kelembagaan	23	Penataan Perangkat daerah	Jumlah Pembentukan Perangkat daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Perda Kelembagaan : - Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. - Perda nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara. - Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) - Jumlah Perangkat Daerah, sbb : 1. Bagian (Setda) : 8 unit 2. Setwan : 1 unit 3. Inspektorat : 1 unit 4. Dinas : 18 unit 5. Badan : 5 unit	50 unit	Bagian Organisasi Setda Jepara

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. Rumah Sakit : 1 unit (UPT Dinas Kesehatan) 7. Kecamatan : 16 unit		
4. EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan PerUndang-Undangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018	Perda yang ditetapkan dalam tahun 2018 sebanyak 13 Perda yaitu : 1. Perda No. 1 th.2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2. Perda No.2 th. 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupetn Jepara Tahun 2017-2022 3. Perda No.3 th. 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentan Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah 4. Perda No.4 th. 2018 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang izin Gangguan 5. Perda No.5 th. 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi izin gangguan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten	13 Perda	Bag. Hukum SETDA

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan 6. Perda No.6 th. 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033 7. Perda No.7 th. 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 8. Perda No.8 th. 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 9. Perda No.9 th. 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 10. Perda No.10 th. 2018 Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha 11. Perda No.11 th. 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara 12. Perda No.12 th. 2018 Tentang Perusahaan Umum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara 13. Perda No.13 th. 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2018, sebanyak 13 PERDA - RANPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak 17 RANPERDA	76 %	Bag Hukum
5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Pemda	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018x100 %	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda dalam tahun 2018, sebanyak 34 Keputusan - Keputusan DPRD dalam Tahun 2018, sebanyak 34 Keputusan,	100 %	Sekretariat DPRD
6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2018 x 100 %	- Keputusan Bupati Tahun 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak 504 Keputusan - Keputusan Bupati dalam Tahun 2018, sebanyak 504 Keputusan	100 %	Bag. Hukum SETDA
	Tindaklanjut Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2018 x 100 %	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 63 Perbup - Peraturan Bupati dalam Tahun 2018 sebanyak 63 Perbup	100 %	Bag. Hukum SETDA
7. KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi x 100 %	- Perda yang dibatalkan 0 perda - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 0	0 %	Bag. Hukum SETDA
8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASYARAKAT ATAS	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PERBUP tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA/PERBUP	Tidak Ada	Tidak Ada	Bag. Hukum SETDA
	Media informasi pemda yang dapat diakses	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website	Ada atau tidak adanya media informasi pemda yang ditetapkan dengan	- Website Pemerintah Kabupaten Jepara : www.jepara.go.id	Ada	Diskominfo, Hukum SETDA

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	oleh publik		kabupaten, pos, Bag/Biro Humas, leaflet/brosur	Perbup	- Website Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara : www.idih.jeparakab.go.id - Website LPSE : www.lpse.jeparakab.go.id		
9. TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100 %	- Jumlah dana perimbangan yang terserap tahun 2018 Rp. 1.339.634.292.620,- - jumlah dana perimbangan yang direncanakan sesuai APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.355.376.807.000,-	98,8 %	BPKAD
	Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100 %	- Belanja Langsung APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.062.789.292.790,- - DAU Tahun 2018, sebesar Rp. 984.914.973.687,- -	107,9 %	BPKAD
	Alokasi belanja pada APBD	34	Belanja langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja Langsung dibagi APBD x 100 %	- Belanja Langsung APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.062.789.292.790,- - Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 2.300.574.959.827,-	46,2 %	BPKAD
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi Jumlah total pendapatan APBD th 2018 (realisasi) x 100 %	- PAD APBD Tahun 2018, sebesar Rp 369.332.890.700,- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp . 2.255.846.248.157,-	16,37 %	BPKAD

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lap Keu)	36	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Jenis Opini BPK terhadap hasil Lapkeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengtan Opini WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengtan Opini WTP	- Opini Tahun 2017 : WTP - Opini Tahun 2018 : WTP	BPKAD
	Besaran SILPA	37	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA Dibagi Jumlah Pendapatan x 100 %	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp. 107.258.899.330,- - Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 2.255.846.248.157,-	4,75 %	BPKAD
	Realisasi Belanja	38	Rasio realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	Realisasi Belanja 7 dibagi Total Anggaran Belanja APBD x 100 %	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp. 2.300.574.959.827,- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.410.277.498.000,-	95,4 %	BPKAD
	Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yg ditindaklanjuti dibagi temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI yg ditindaklanjuti tahun 2018 sebanyak 11 temuan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018, sebanyak 12 Temuan	92 %	Inspektorat
12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD tahun 2018 terhadap <u>Potensi PAD</u>	Jumlah realisasi PAD tahun 2018 Dibagi PAD th 2017 x 100 % (PAD 2018-PAD 2017 : PAD 2017 x 100%)	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 369.332.890.700,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 Rp. 350.307.839.000,-	105,4 %	BPKAD
	Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD th 2018 dibagi PAD th 2017 x 100 % (PAD th 2018-PAD tahun 2017 : PAD 2017 x 100%)	- Total PAD tahun 2018 ,Sebesar Rp. 369.332.890.700,- Total PAD tahun 2017 ,Sebesar Rp. 325.530.346.533,-	13,45 %	BPKAD

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. TEROBOSAN ATAU INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak 19 Terdiri dari : 1. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN 2 Pendosawalan 2. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN Jinggotan 3. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN 2 Bumiharjo 4. Penghargaan Proklam Utama (Nasional) : Poktan Sreni Jaya Dukuh Gupit Desa Bategede 5. Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak Kategori Pratama. 6. Juara Favorit Duta Genre Putri Tingkat Nasional a.n Febby Cynthia 7. Anugerah Parahita Ekapraya Tk Utama 8. Daffa Award untuk forum anak jepara kategori pelopor lingkungan utama 9. Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 10. Sertifikasi ISO 9001:2015 dari Kementerian Ketenagakerjaan 11. Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2018 sebagai Pemenang Pilar 5 Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre & Crash	Ada 19 Penghargaan	Semua OPD

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Response) Kategori Exelent City sebagai Pemenang Pilar 3 Pengendara Yang Berkeselamatan (Saver User) 12. Sertifikasi Akreditasi "B" Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor 13. Penghargaan Central Java's Potential Investment Challenge 2018 dari KERIS Jateng 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat "Best of The Best" Perpustakaan Daerah Kabupaten / Kota terbaik se Indonesia. 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara meraih predikat "Perpustakaan Terbaik" se Indonesia dalam melakukan Transformasi perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 16. Opini Dari BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Daerah. Yaitu : WAJAR TANPA PENGECUALIAN di Tahun 2010 – 2017 17. Juara Umum Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Nusantara ke-V di TMII 18. Penyaji Terbaik Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII 19. Penyaji Unggulan Terbaik Tk Nasional dalam Rangka Festival Kuliner Khas Nusantara ke-V di TMII		
	Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada	Ada , Yaitu : 1. Perbup No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara	Ada	Bagian Pembangunan
	Daya saing daerah	44	Jumlah Persetujuan Investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada tahun 2018 sebanyak 521 Ijin	Ada 521 Ijin	DPMPTSP

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Urusan yang dilaksanakan

: Urusan Kesehatan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ,: 1. SOP Tentang Pemeriksaan di Labkesda (1 paket) 2. SOP Tentang Perencanaan Kebutuhan ASN 3. SOP Tentang Pelaksanaan Pembuatan Laporan Keuangan 4. SOP Tentang penerimaan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Ada 31 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. SOP Tentang Pelaksanaan pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan 6. SOP Tentang Pelaksanaan Verifikasi SPM 7. SOP Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 8. SOP Tentang Penyusunan RKA Pelayanan Teknis Kantor 9. SOP Tentang Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP Tentang Validasi Data PWS Imunisasi 11. SOP Tentang Pemantauan Laporan SKDR 12. SOP Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Seksi Surveilans dan Imunisasi 13. SOP Tentang Pelaporan Kejadian Luar Biasa 14. SOP Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 15. SOP Tentang Pembuatan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan dan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					16. SOP Tentang Pembuatan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan dan Standar Pelayanan kefarmasian Toko Obat 17. SOP Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Ilegal/Palsu 18. SOP Tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik) 19. SOP Tentang Penetapan Angka Kredit 20. SOP Tentang Rekomendasi Tugas belajar dan Ijin Belajar 21. SOP Tentang Pemberian Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan 22. SOP Tentang Pelaporan Program HIV AIDS 23. SOP Tentang Pelaporan Program Diare 24. SOP Tentang Pelaporan Program Penyakit Tuberkulosis		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					25. SOP Tentang Pelaporan Program ISPA 26. SOP Tentang Pelaporan Program DBD 27. SOP Tentang Audit Maternal Perinatal 28. SOP Tentang Laporan PWS Imunisasi 29. SOP Tentang Pelacakan Gizi Buruk 30. SOP Tentang Penempatan Sumber Daya Manusia 31. SOP Tentang Orientasi Pelaksanaan Pekerjaan		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat daerah menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5Perda yaitu : 1. Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak beryodium 2. Perda No. 25 Tahun 2011tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Baru Lahir, Bayi dan anak Balita	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perijinan Bidang Kesehatan 4. Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabuapten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 5. Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada sebanyak 16	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Adminkes 2. Epidemiolog 3. Nutrisionis 4. Penyuluh Kesmas 5. Sanitarian 6. Pranata Komputer 7. Apoteker 8. Fungsional Umum	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 61 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0.76 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	81,25 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 15 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 15 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 15 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 15 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 15 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 10 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 54.855.552.000 ,- Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	22,75 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 8.646.729.00,- Total Belanja SKPD Rp. 54.855.552.000,-	15,76 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.85.082.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp.46.016.323.000,-	0,18 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 85.082.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 54.855.552.000,-	0,15 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 31.737.354.016,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Penguman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

**BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN**

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: BPKAD

Urusan yang dilaksanakan

: Urusan Pemerintah Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program -	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 2. SOP Penyusunan Renja 3. SOP Penatausahaan PPKD 4. SOP Tentang administrasi perkantoran	Ada 4 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jepara No. 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada sebanyak 20	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada 1 Jenis Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi, yaitu: Pranata Komputer	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 59 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,73 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	70 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 20 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD 7. DPA-OPD	4 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD SKPD, sbnyk 5 Program - Program Renja SKPD yang akomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sbnyk 5 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 5 Program - Program dlmDPA-SKPD sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 20.584.285.797,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	8,54 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.988.223.000,- - Total Belanja SKPD Rp. 20.584.285.797,-	9,65 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 505.525.460,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 7.471.542.582,-	6,76 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 505.525.460,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 20.584.285.797,-	2,45 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 7 Jenis Sbb : 1. LRA 2. CALK 3. Neraca 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris Barang 2. KIB	Ada /Tidak ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. KIR 4. Buku Persediaan barang 5. Buku Mutasi Barang 6. Buku Daftar Pengadaan 7. Buku Extracomptable 8. Buku Daftar Aset Lain 9. Buku Mutasi Semester I tahun 2018		
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 74.024.414.200	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : SOP Bidang Pencatatan Sipil : 1. Pengajuan Akta Kelahiran Baru (usia ≤ 60 hari) 2. Pengajuan Akta Kelahiran Terlambat (usia >60 hari) 3. Pengajuan Akta Perkawinan 4. Pengajuan Akta Perceraian 5. Pengajuan Akta Kematian	50 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. Pengajuan Pencatatan Pengakuan Anak; 7. Pengajuan Pencatatan Pengesahan Anak; 8. Pengajuan Pencatatan Pengangkatan Anak; 9. Pengajuan Pencatatan Perubahan Nama; 10. Pengajuan Kutipan Kedua dan Ralat; 11. Pengajuan Akta Kelahiran Baru (0-60 hari) Online; 12. Pengajuan Akta Kematian Online. SOP Bidang Pendaftaran Penduduk : 1. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Pelayanan Kartu Keluarga Orang Asing Dokumen Kartu Ijin Tinggal Tetap; 3. Pelayanan KTP – el; 4. Pelayanan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) 5. Pengajuan Surat Keterangan Pindah Datang 6. Pelayanan Surat		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Keterangan Pindah Penduduk WNI Keluar Negeri (SKPLN); 7. Pengajuan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP); 8. Pengajuan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP); 9. Pengajuan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); 10. Prosedur Asmanan Pengajuan Kartu Keluarga (KK). 11. Pelayanan Info KTP Online; 12. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP – el) secara on line. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) : 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Akses NIK dan KTP – el; 2. Aplikasi Penggunaan Data Ware House;		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Prosedur Pengajuan Legalisir Dokumen Kependudukan; 4. Pelayanan Pencarian Dokumen Register Akta Capil. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) : 1. Back Up Data Base Aplikasi SIAK Mendagri; 2. Pelayanan Permintaan Data Kependudukan; 3. Pelayanan Sosialisasi Adminduk; 4. Pelayanan Kehumasan; 5. Pelayanan Pemeliharaan Hardware Administrasi Kependudukan di Kantor dan Kecamatan. Bidang Sekretariat : 1. Pengajuan Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil; 2. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala; 3. Kenaikan Pangkat (Reguler) Bagi PNS		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Pemberian Reward dan Punishment Pegawai; 5. Pengelolaan Surat Masuk; 6. Pengelolaan Surat Keluar; 7. Penerimaan Tamu; 8. Pengelolaan BMD/BMN; 9. Pengelolaan Denda Atas Pelanggaran Perda (Denda Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan); 10. Pengajuan Pensiun PNS (BUP); 11. Penatausahaan Tambahan Penghasilan PNS; 12. Penatausahaan dan Penyusunan SPJ; 13. Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran; 14. Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Penerimaan Denda; 15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 16. Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA); 17. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					18. Penyusunan Review / Rencana Kerja (RENJA); 19. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 20. Pemeliharaan Kendaraan Dinas; 21. Pengelolaan Parkir.		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda yaitu : 1. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada sebanyak 17	94.12 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kab	- PNS SKPD, Sebanyak 28 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,35 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 17 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	106.25 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan $\frac{\text{Jml total pejabat OPD yang ada}}{\text{Jml total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	106.25 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD SKPD, sebanyak 5 Program - Program Renja PD yang diakomodir, sebanyak 6 Program	83.33 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 4 Program - Program dalam DPA-SKPD, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD sebesar Rp 7.630.408.000,- - Total APBD sebesar Rp. 2.410.277.498.000,-	3,2 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 332.894.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.630.408.000,-	4.36 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 112.483.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 4.876.225.000,-	2.31 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 112.483.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.630.408.000,-	1.47 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada : 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak : 0 Aset - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak : Rp. 8.136.897.395,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumn 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengum di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Leaflet tentang Dokumen Kependudukan 3. Banner 4. Pengumuman di Mass Media (radio)	Jumlah sebanyak 4 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KK dan KTP-el - Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Akta Pencatatan Sipil. - Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berbasis NIK Nasional. - Indeks Kepuasan terhadap Legalitas / Legalisasi Dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Akta Pencatatan Sipil).	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: DINAS PERIKANAN
: Kelautan dan Perikanan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. SOP Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Hibah 2. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan dan Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. SOP Pemberian Bantuan Kecelakaan Kerja/ Bencana Alam Laut Untuk Nelayan	Ada 14 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. SOP Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) 5. SOP Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) 6. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Permohonan Bagi Hasil Retribusi TPI 7. SOP Rekomendasi SIUP 8. SOP Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan ikan 9. SOP Distribusi/Penjualan Benih Ikan oleh Balai Benih Ikan 10. SOP Prosedur Pelayanan Verifikasi SPJ Barang/Jasa 11. SOP Prosedur Pelayanan Verifikasi SPJ GU/TU 12. SOP Prosedur pelayanan Verifikasi SPP 13. SOP Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegi GU/TU 14. SOP Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan LS		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No.1 tahun 2010 tentang Pengelolaan tempat Pelelangan Ikan 4. Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	100 %	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada sebanyak 17	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 31 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,39 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jml pejabat yg telah mrngikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 17 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sbnyk 8 Program - Program Renja SKPD yang diakomodir, sebanyak 8 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sbnyk 8 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 8 Program - Program dlm DPA-SKPD sebanyak 8 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 8.451.809.000,- - Total Belanja APBD Rp 2.410.277498.000,-	0,50 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 2.215.402.892,- - Total Belanja SKPD Rp. 8.343.508.974,-	26,55 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 185.151.950,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 3.068.198.232,-	6,03 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 185.151.950 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.343.508.974,-	2,22 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 81.323.370.738,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Dinas Lingkungan Hidup

: Lingkungan Hidup

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD $\frac{\text{Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, memiliki SPP (Standar Pelayanan Publik) Kep. Ka. BLH No. 76 Tahun 2011 Tgl.10 Desember 2011 untuk Jenis Pelayanan: 1. Penilaian Dokumen AMDAL 2. Pengarahan Dokumen UKL/UPL	2	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 2 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada sebanyak 17	94,12 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 72 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,90 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	82,35 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 17 orang	94,12 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 8 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 8 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 8 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 8 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp26.459.964.000,- - Total Belanja APBD Rp, 2.410.277.498.000,-	0,01 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp8.635.504.000,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 26.459.964.000,-	0,32 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.1.083.793.000,- Total Belanja Barang dan Jasa OPD,sebesar Rp. 11.688.249.000,-	0,092 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 1.083.793.000,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 26.459.964.000,-	0,040 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 115.769.580.042,-	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan himbauan 2. Leaflet 3. Buku Proklamasi	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Bakesbangpol
: Pemerintahan Umum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ,: 1. SOP Tentang Kepegawaian	Ada 1.SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya,sebanyak 3 Perda yaitu :	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 2. Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada sebanyak 11	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	TidakAda	TidakAda	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD, Sebanyak 18 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,22% %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	90,91 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 22 Program - Jumlah Program Renja diakomodir, sebanyak 22 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 22 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 22 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 22 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 22 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 3.942.809.000,-Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,63 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 62.149.840,- - Total Belanja SKPD Rp. 3.570.904.678,-	1,7 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 96.634.500,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD,sebesar Rp.1.582.104.233,-	6,10 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 96.634.500 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.570.904.678,-	2,70 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 4.436.497.230,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Ada 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, : 1. SOP update data sistem informasi manajemen kepegawaian 2. SOP Penerbitan kartu pegawai elektronik 3. SOP Pelayanan permint data 4. SOP Pengelolaan srt masuk 5. SOP Pengelolaan srt Keluar 6. SOP Penyusunan LKjIP 7. SOP Penyusunan Renja 8. SOP Pengajuan Tamsil	33 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					9. SOP Penyusunan Renstra 10. SOP pengajuan gaji PNS 11. Sop Pelaksanaan ujian dinas 12. SOP Pelaksanaan UKPPI 13. SOP Penyampaian LHKPN 14. SOP pengajuan mutasi keluar kabupaten Jepara 15. SOP Pengajuan CPNS ke PNS 16. SOP Kenaikan gaji berkala Gol I dan II 17. SOP Kenaikan Gaji berkala Gol II 18. SOP kenaikan gaji berkala Gol III 19. SOP kenaikan gaji berkala Gol IV.A 20. SOP kenaikan gaji berkala Gol IV.B 21. SOP Pengajuan kenaikan pangkat 22. SOP Sasaran Kinerja Pegawai(e-SKP) 23. SOP ijin belajar 24. SOP rekomendasi Belajar 25. SOP. Ijin penggunaan Gelar		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					26. SOP Uji Kompetensi Mutasi PNS 27. SOP Pengajuan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen 28. SOP Pengajuan Ijin Cerai 29. SOP Pengajuan Cuti 30. SOP pengangkatan jabatan Administrasi 31. SOP Pangajuan Ijin Perkawinan Lebih dari Seorang 32. SOP pengajuan KTP 33. SOP Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada sebanyak 13	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS BKD, Sebanyak 38 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,47 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ——— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan — x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 13 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD 4. LKjiP 5. Perjanjian Kinerja 6. RKT	6 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 7.547.574,000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	3,13 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 63.400.000,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 7.547.574,000,-	0,84 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.76.050.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD,sebesar Rp 3.592.871,000,-	2,1 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp 76.050.000,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 7.547.574.000,-	1,01 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 4 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Surat Pernyataan	Ada Ada sebanyak 4 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. Kartu Inventaris Barang 3. Kartu Inventaris Ruangan 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 69.482.199,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.324.731.609,-	3,9 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di Mass	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan / website BKD	Jumlah sebanyak 2 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM BKD	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: DPMPTSP

: Penanaman Modal

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD $\frac{\text{Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP tentang IMB 2. SOP tentang IUJK 3. SOP tentang Ijin Lokasi 4. SOP Angkutan 5. SOP HO 6. SOP IMB 7. SOP IUI 8. SOP IUTM 9. SOP Izin IUJK 10.SOP Izin Lokasi 11.SOP Izin Pemanfaatan	23 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					12.SOP Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 13.SOP Izin Prinsip 14.SOP Mesin 15.SOP Pariwisata 16.SOP Pemotongan Ternak 17.SOP Pemotongan Unggas 18.SOP Peternakan Rakyat 19.SOP Reklame 20.SOP SIUP 21.SOP Tanda Daftar Gudang 22.SOP TDP 23.SOP Trayek		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada sebanyak 13	92,31 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 25 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0.031 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	91,67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 12 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Perangkat Daerah dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 3.689.564.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,53 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp.185.780.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 3.689.564.000,-	5,03 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.55.325.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD,sebesar Rp. 910.753.000,-	6,07 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 55.325.000 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 3.689.564.000,-	1,49 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, yaitu : 1. Laporan Persediaan 2. Laporan Barang Daerah	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 2.295.125.783,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Leaflet 2. Website 3. Baliho 4. Radio 5. Buku Profil Investasi	Jumlah 4 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: RSUD RA KARTINI

: Kesehatan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	1437 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 2 Perda - PERDA yg seharusnya 2 Perda 1. Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Jepara	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jml Jabatan yg ada) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 24 - Jabatan yang harus ada sebanyak 24	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional 1. Dokter 2. Dokter gigi 3. Perawat 4. Perawat gigi 5. Bidan 6. Apoteker 7. Asisten Apoteker 8. Nutrisionis 9. Pranata Laboratorium Kesehatan 10. Sanitarian 11. Elektromedis 12. Radiografer 13. Perekam Medis 14. Fisioterapis 15. Okupasi Terapis	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					16. Terapis Wicara 17. Ortosis prostetis 18. Psikolog Klinis 19. Refraksionis Optisi		
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 451 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,56 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 24 orang - Pejabat yang ada sebanyak 24 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 24 .orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD 4. RBA	4 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 1 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 1 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 1 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 1 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 150.450.258.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000 ,-	62 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 11.304.292.089,- - Total Belanja SKPD Rp. 152.206.434.277,-	7,43 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.581.437.779,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD,sebesar Rp. 130.316.925.688,-	0,019 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.581.437.779,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 152.206.434.277,-	0,017 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak.3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD,sebanyak Rp. 250.997.067.147,-	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Ada : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media 5. Ruang Peduli Pelanggan	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada 1. Survey indeks kepuasan masyarakat RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD RA Kartini Jepara tahun 2018	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Satpol PP DAN DAMKAR
: Ketentraman dan Ketertiban Umum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD $\frac{\text{Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 20 : 1. SOP CUTI 2. SOP KGB 3. SOP KP 4. SOP Pengajuan Tamsil 5. SOP Pengelolaan barang inventaris 6. SOP pengurusan SPJ 7. SOP penyusunan LPJ Bend. Pengeluaran 8. SOP Perjalanan Dinas	Ada 20 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					9. SOP Surat Keluar 10. SOP Surat Masuk 11. SOP Pemilukada 12. SOP Penegakan Perda 13. SOP Pengamanan Aset 14. SOP Pengawalan 15. SOP Unjuk Rasa 16. SOP Pengajuan Bantuan Perawatan Kesehatan 17. SOP Pengajuan KTA Linmas 18. SOP Pengajuan Santunan Kematian Linmas 19. SOP Pelaporan Kejadian Kebakaran 20. SOP Penanggulangan Kejadian Kebakaran		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 8 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 8 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) TA 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD TA 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pelacuran		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada sebanyak 14	0,92 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 48 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,0059 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan — x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 12 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang	0,85 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 14 orang	0,071 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 8 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 8 Prog	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 10 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 10 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 10 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 10 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp.7.779.225.000 ,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,0032 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp 73.039.000 ,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 7.750.408.653,-	0,0094 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.8.390.000 ,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD Rp. 2.832.965.631.000,-	0,003 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.8.390.000 ,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp.7.752.477.407,-	0,0010 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 4 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 8.910.711.974,-	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Himbauan 2. Papan Larangan	Ada 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : INSPEKTORAT
Urusan yang dilaksanakan : Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Tentang Penatausahaan Pemeriksaan Reguler 2. SOP Tentang Monitoring Diluar PKPT 3. SOP Tentang Gelar Pengawasan Daerah 4. SOP Tentang Penatausahaan Pemeriksaan Khusus dan Kasus 5. SOP Tentang Penatausahaan Pemeriksaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. SOP Tentang Penatausahaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7. SOP Tentang Pengembangan Jaringan dan Simwas 8. SOP Tentang Penugasan Diklat/Workshop/Seminar 9. SOP Tentang Perencanaan dan Evaluasi 10. SOP Tentang Monitoring dan Evaluasi TLHP 11. SOP Agenda Surat Keluar Masuk	Ada, 11 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 40 Thn 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara.	100 %	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yg harus ada sebanyak 8	87,5 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jenis Jabatan fungsional dalam struktur organisasi, sebagai berikut: 1. Auditor 2. P2UPD	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 35 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,004 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.893.890.000 - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.410.277.498.000	2,44 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 67.200.000 - Total Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.893.890.000	1.14 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 78.199.000 - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.222.554.000	6.4 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 78.199.000 - Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.893.890.000	1.32 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, yaitu : 1. Buku Inventaris Barang 2. Buku Barang Pakai Habis 3. Buku Hasil Pengadaan 4. Kartu Barang 5. Kartu Persediaan Barang 6. KIB A s/d F 7. KIR	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 5.360.372.307,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	ada	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Sekretariat DPRD
Urusan yang dikalsanakan : Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 11 SOP, terdiri dari : 1. Pencatatan Surat Keluar 2. Pencatatan Surat Masuk 3. Pelayanan Permintaan ATK 4. Pelayananana Permintaan Barang Inventaris 5. Pengumpulan barang Inventaris kantor yang akan di hapus 6. Perawatan barang inventaris kantor	Ada 11 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					7. Pinjaman kendaraan dinas 8. Pembuatan undangan rapat dan penggandaan 9. Pembuatan hasil Risalah rapat /Persidangan 10. Penyusunan awal Perda Inisiatif 11. Fasilitasi penyelenggaraan rapat/siding		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada sebanyak 13	85 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 42 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.521 orang	0,0050 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan $\frac{\text{Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan $\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA SETWAN 3. RENJA DPRD 4. RKA-OPD	4 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp.36.686.729.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	15,2 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 1.989.675.772,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 32.155.017.256	6 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 268.719.500,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 25.888.518.333,-	1 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 268.719.500,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 32.155.017.256,-	0,8 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk 4. LPE 5. LO	Ada Ada sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. Buku Persediaan barang	Ada 2 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 40.889.229.523,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Internet 2. Majalah	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggung jawab

: Sekretariat Daerah

Urusan yang dilaksanakan

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 17 SOP yaitu Penyelesaian permasalahan pertanahan 1. SOP Fasilitas Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan 2. Penerbitan ijin/rekomendasi pelaksanaan KKN di lingkungan Setda 3. Prosedur fasilitas kerjasama di lingkungan Setda	Ada 17 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Prosedur fasilitasi penyelesaian permasalahan/permohonan ijin pertanahan di lingkungan Setda 5. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah 6. Fasilitasi PPD dan ABP 7. Penyusunan dan pembaharuan produk hukum daerah di lingkungan Setda 8. Pengendalian dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kab. Jepara 9. Pencarian bantuan fasilitasi kegiatan kesenian, pentas hiburan, kesenian tradisional dan festival serta lomba di bidang kesenian 10. Pencairan bantuan fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat 11. Pengadaan brg & jasa 12. Penanganan surat masuk dan keluar		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					13. Pengelolaan surat 14. Pencairan tambahan penghasilan 15. Pengajuan ijin belajar 16. Pengajuan kenaikan pangkat berkala		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda 1. Peraturan Daerah Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Jepara	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 36 - Jabatan yang harus ada sebanyak 38	94,74 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD, Sebanyak 114Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	1,42 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan $\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 32 orang - Pejabat yang ada sebanyak 36 orang	88,9 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan — x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 36 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 38 orang	94,74 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 12 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 12 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 12 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 12 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 32.119.335.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,33 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 1.413.431.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp 32.119.335.000,-	4,4 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 1.265.634.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD,sebesar Rp. 18.764.696.000,-	6,74 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 1.265.634.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 32.119.335.000,-	3,94 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR, Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 182.852.061.321,-	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Baliho 3. Pengumuman di mass media 4. Website	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : BPBD
Urusan yang dilaksanakan : Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Jika ada, sebutkan	Ada 30 SOP, terdiri dari : 1. SOP Cuti PNS 2. SOP Kenaikan Gaji Berkala PNS 3. SOP Kenaikan pangkat Reguler PNS 4. SOP Penyusunan LkjIP 5. SOP Penanganan Surat Masuk 6. SOP Penanganan Surat keluar	30 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					7. SOP Pengajuan Tambahan Penghasilan 8. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 9. SOP Penatausahaan dan Penyusunan SPJ 10. SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 11. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas 12. SOP Penyusunan Rencana Kerja 13. SOP Penyusunan Rencana Strategis 14. SOP Pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 15. SOP Posko Piket Siaga bencana (saat tidak terjadi bencana) 16. SOP Posko Piket Siaga bencana (saat terjadi bencana) 17. SOP Penyediaan Narasumber		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					18. SOP Pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 19. SOP Pengajuan Bantuan Sosial dan Kejadian Khusus 20. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 21. SOP Pelayanan Droning Air Bersih 22. SOP PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (Saat Terjadi Bencana) 23. SOP PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (Saat Tidak Terjadi Bencana) 24. SOP Bantuan Logistik 25. SOP Pemakaian Kendaraan Rescue 26. SOP Pemakaian Peralatan Kebencanaan 27. SOP Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					28. SOP Peminjaman Peralatan Bencana 29. SOP Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 30. SOP Tim Reaksi Cepat		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 10 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 11 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Perda No 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara 5. Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara 6. Perda No 60 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah BPBD Kab. Jepara 7. Perda No. 55 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kab. Jepara 8. Perda No 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kab. Jepara 9. Perda No 10 Tahun 2016 Tentang REncana Penanggulangan Bencana Kab. Jepara		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					10.Perda No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Perda No. 60 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemilihan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Jepara 11.Perda No. 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada sebanyak 5	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD, Sebanyak 12 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,15 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 5 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan — x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 5 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD 4. DPA-OPD 5. LKjiP	5 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 8 Program	62,5 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 3.010.358.000,-,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,24 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 109.822.426 - Total Belanja SKPD Rp. 2.961.374.268,-	3,7%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 48.263.631,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD,sebesar Rp.1.845.961.547,-	2,6 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 48.263.631 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.010.358.000,-	1,6%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. Buku Persediaan barang	Ada Sebanyak 2 dokumen	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 8.342.824.445,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : DISHUB
Urusan yang dilaksanakan : Perhubungan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 22 SOP, yang terdiri dari : 1. Penanganan Pengaduan masyarakat 2. SOP Tentang Pelayanan Uji Pertama kali 3. SOP Tentang Pelayanan Mutasi Uji	22 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. SOP Tentang Pelayanan Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor 5. SOP Tentang Pelayanan Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor 6. SOP Tentang SOP Pelayanan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor 7. SOP Tentang uji berkala kendaraan bermotor 8. SOP Tentang pelayanan pengganti tanda uji 9. SOP Tentang pelayanan penerbitan rekomendasi surat ijin STNK kendaraan angkutan umum 10. SOP Tentang pelayanan penerbitan surat rekomendasi ijin usaha angkutan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					11. SOP tentang penanganan aduan gangguan LPJU dan traffic light 12. SOP jasa kepelabuhan (ijin standar kapal) 13. SOP Perestujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan 14. SOP Tentang Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal 15. SOP Tentang Rekomendasi ijin pemBelanjaan BBM kapal Perintis 16. SOP layanan keberangkatan penumpang 17. SOP tentang Pengajuan karcis retribusi terminal 18. SOP tentang Penarikan retribusi kios terminal		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					19. SOP tentang penarikan retribusi angkutan masuk terminal 20. SOP tentang pengawasan atau monitoring penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum 21. SOP tentang penetapan lokasi dan besaran harga juru parkir di tepi jalan umum 22. SOP tentang jalan umum sampai penyetoran ke kas daerah		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- Jumlah PERDA pelaksanaan Permen sebanyak 12 perda - Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen sebanyak 12 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No. 7/2001 tentang retribusi ijin trayek 5. Perda No. 9/2001 tentang retribusi izin usaha angkutan 6. Perda No. 7/2008 tentang retribusi perijinan perhubungan laut dan penyeberangan 7. Perda No. 9/2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					8. Perda No. 9/2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor 9. Perda No. 10/2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan 10. Perda No. 22/2011 tentang retribusi terminal 11. Perda No. 23/2011 tentang retribusi tempat khusus parkir 12. Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada sebanyak 16	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan fungsional : - Penguji Kendaraan Bermotor	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 75 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,93 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	88 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD 4. DPA-OPD	4 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 9 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 9 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 9 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD sebesar Rp. 43.934.500.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498000,	1,82 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp.20.013.360.600,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 48.558.179.951,-	41,22 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 1.844.351.066,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 22.210.062.652 ,-	8,30 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 1.844.351.066,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 48.558.179.951,-	3,80 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 3. Neraca 4. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 Aset - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 116.903.959.992,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran 3. Leaflet/booklet/spanduk 4. Website	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: DPU-PR

Urusan yang dilaksanakan

: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	-	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	$\frac{\text{Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada}}{\text{jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen}} \times 100\%$	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda yaitu :	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jepara 2. Perda No. 20 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang APBD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2018		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 27 - Jabatan yang harus ada sebanyak 27	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 142 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	1,77 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 18 orang - Pejabat yang ada sebanyak 27 orang	66,67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 27 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 17 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 17 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 17 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 17 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 17 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 17 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 246.519.100.238,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	10,2%	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 246.519.100.238,- - Total Belanja SKPD Rp. 369.960.450.000,-	66 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 76.755.544.806,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 94.646.949.456,-	81 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 76.755.544.806,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 369.960.450.000,-	20,75 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 3. Neraca 4. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 Aset - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 3.697.009.419.362	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Layanan Pengaduan via telephone 3. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: DISPERKIM
: Perumahan dan Permukiman

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP Tentang Pengusulan Kegiatan Pembangunan Air Minum 2. SOP Tentang Pengusulan Kegiatan Pembangunan Sanitasi	Ada, 7 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. SOP Tentang Pengajuan Bantuan Sosial Rehab RTLH 4. SOP Tentang Pencairan Bantuan Sosial Rehab RTLH 5. SOP Tentang Pelayanan Sewa Hunian Rusunawa Jepara 6. SOP Tentang Pemaikan Kendaraan Operasional Makam 7. SOP Tentang Surat Masuk		
7. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda yaitu : 1. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 20 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2018 3. Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022 4. Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah 5. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang APBD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2018		
8. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada sebanyak 12	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
9. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 27 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 org	0,33 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12orang	76 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 12 orang	100 %	
10. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 7 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 7 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 7 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 7 Program	100 %	
9. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 33.944.516.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,- -	1,40 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 6.479.338.000,- - Total Belanja SKPD Rp. 33.944.516.000,-	19,08 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 75.102.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 24.702.527.000,-	0,30 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 75.102.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 33.944.516.000,-	0,22 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 3. Neraca 4. Calk	Ada Ada sebanyak 3 Jenis	
10. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 5. Buku Inventaris 6. KIB 7. KIR 8. Buku Persediaan Barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 Aset - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 136.670.262.875	0 %	
11. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 4. Papan Pengumuman 5. Layanan Pengaduan via telephone 6. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: BAPPEDA

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 7Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Kabupaten Jepara 4. Perda No. 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kab. Jepara Tahun 2005-2025 5. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RPJMD Kab. Jepara Tahun 2012-2017 6. Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 19 - Jabatan yang harus ada sebanyak 21	90,47 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jenis jabatan fungsional dalam struktur organisasi, yaitu Perencana Muda	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 42 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,052 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ——— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 19 orang - Pejabat yang ada sebanyak 19 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ——— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 21 orang	90,47 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 9 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 9 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 9 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 10.829.727.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	4,4 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 474.657.557,- - Total Belanja SKPD, Rp. 10.400.147.765,-	4,97 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 128.686.100,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD Rp. 4.916.285.843,-	1,7 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, Rp. 128.686.100,- - Total Belanja SKPD, Rp. 10.400.147.765,-	0,97 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada 1. LRA 2. Lap Operasional 3. NERACA 4. CALK 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada Ada sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 322.123.138,- - Asset yang dikuasai SKPD,sebanyak Rp. 9.032.677.008,-	0,5 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Peng di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1.Papan Pengumuman 2. Website : bappeda.jeparakab.go.id	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : SurveySIKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Welahan
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 1 SOP, yang terdiri dari : 1. SOP Keepegawaian	1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada sebanyak 9	88,9 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 31 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8025 Orang	0,39 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan _____ x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	37,5 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan _____ x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 8 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 10 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 10 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 10 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 10 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD, Sebesar Rp. 2.922.136.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,2 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 177.737.250,- - Total Belanja SKPD Rp. 2.914.379.690,-	2,89 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 22.844.300,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 255.167.544,-	8.95 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 22.844.300,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.914.379.690,-	0,79 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 3. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100persen	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai Rp. 3.866.602.397,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan / saran 3. Blog Kecamatan 4. Mobil Pelayanan Umum 5. Website Kecamatan	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Mayong
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ,: 1. SOP Tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan 2. SOP Tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Non Perijinan	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	$\frac{\text{Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada}}{\text{jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen}} \times 100\%$	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu :	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada sebanyak 9	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 30 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,37 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 5 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	55,56 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD, Sebesar Rp. 2.676.566.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,11 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 41.334.100,- - Total Belanja SKPD Rp. 2.746.226.144,-	1,5 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 49.975.875,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 320.484.000,-	15,6 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 49.975.875,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.746.266.144,-	1,82 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 Aset - Asset yang dikuasai Rp. 10.393.006.463	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan / saran 3. Leaflet 4. Mobil Pelayanan Umum 5. Website Kecamatan dan Fanpage di Facebook	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Kalinyamatan
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional, sebanyak 1 program. - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan sebanyak 1 Program.: - Prog.Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil.	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 13 SOP, yg terdiri dari : - Prosedur Pelayanan Permohonan Kartu keluarga. - Prosedur Pelayanan Perekaman E-KTP. - Prosedur legalisasi keterangan tidak mampu.	Ada 12 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Prosedur legalisasi jaminan kesehatan daerah. 5. Prosedur legalisasi jaminan kesehatan masyarakat. 6. Prosedur legalisasi izin keramaian/hiburan. 7. Prosedur legalisasi surat keterangan catatan kepolisian. 8. Prosedur legalisasi pindah penduduk antar Kabupaten. 9. Prosedur legalisasi pindah prnduduk antar Kecamatan. 10. Prosedur legalisasi surat keterangan waris. 11. Prosedur legalisasi pindah nikah. 12. Prosedur pelayanan pengaduan.		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	Perda pelaksanaan, sebanyak : 1. Perda.Kab.Jepara No.27 Tahun 2011 ttg.Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda Kab.Jepara No. 4 Tahun 2016 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Jepara No. 5 Tahun 2010 ttg.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 3. Permen.PU.PR No.5/PRT/M/2016 tentang IMB dan Gedung. 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa. 5. Perda No.13 th.2008 ttg.Org.dan tata kerja kec.dan Kelur. 6. Perda No.1 Th.2001 ttg.Larangan kminuman beralkohol. 7. Perda.No.20 Th.2012 ttg.Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					8. PP.24/2018 ttg.Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tanggal 21 Juni 2018. 9. Perda No.8 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Petinggi. 10.Perda.No.10 Th.2016 ttg.Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 11.Perda.No.16 Th.2017 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.8 Th.2015 ttg.Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi. 12.Perda.No.17 Th.2017 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah No.10 Th.2016 tentang Pengangkatan dan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pemberhentian Perangkat Desa..		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada sebanyak 9	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	0 %	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 26 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,30 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jml pejabat OPD yg ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jml pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.578.059.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	1,06 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal Rp. 44.550.000 - Total Belanja Sebesar Rp 2.600.412.965	1,71%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	➤ Total Belanja pemeliharaan barang dan jasa kec, sebesar Rp 34.773.500 ➤ Total Belanja Barang dan Jasa Kec. Sebesar Rp 291.222.000	11,94 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	➤ Total Belanja pemeliharaan kec, sebesar 291.222.000 ➤ Total Belanja Kec. Sebesar 2.600.412.965	11,19 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 Jenis 1. LRA. 2. NERACA. 3. CALK.	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1.KIB A. 2.KIB B 3.KIB C. 4.KIB D 5.KIB E 6.KIB F	Ada 6 jenis dokumen	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	➤ Asset yg tdk digunakan, sebanyak Rp 0 ➤ Asset yg dikuasai Kec., sebanyak Rp 9.939.286.832		
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran. 3. Facebook : Kecamatan Kalinyamatan. 4. Website : kecamatankalinyamatan@yahoo.com.	Ada	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM		

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Jepara
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 22 SOP, yaitu : 1. SOP Tentang Prosedur Pengendalian Dokumen 2. SOP Tentang Prosedur Pengendalian Rekaman 3. SOP Tentang Prosedur Internal Audit 4. SOP Tentang Penanganan Produk Tidak Sesuai 5. SOP Tentang Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan	Ada 22 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. SOP Tentang Prosedur Tinjauan Manajemen 7. SOP Tentang Pembuatan Kartu Anggota 8. SOP Tentang Prosedur Pengembalian Bahan Perpustakaan 9. SOP Tentang Prosedur Peminjaman Bahan Perpustakaan. 10. SOP Tentang Prosedur Penagihan Bahan Perpustakaan 11. SOP Tentang Prosedur Pengadaan Bahan Perpustakaan 12. SOP Tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 13. SOP Tentang Prosedur Evaluasi Rekanan 14. SOP Tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan 15. SOP Tentang Prosedur Perawatan Bahan Perpustakaan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					16. SOP Tentang Prosedur Perawatan Bahan Perpustakaan (Majalah dan Koran) 17. SOP Tentang Prosedur Penempatan SDM 18. SOP Tentang Prosedur Pengembangan SDM 19. SOP Ttg Prosedur Pemel & Perbaikan Peralatan 20. SOP Tentang Prosedur Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 21. SOP Tentang Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan. 22. SOP Tentang Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan.		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda yaitu :	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 4. Perda 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. Perda 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yg ada sebanyak 59 - Jabatan yg harus ada sebanyak 64	0,92 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 85 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	1,06 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 15 orang - Pejabat yang ada sebanyak 64 orang	23,4 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan — x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 59 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 64 orang	92 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD 4. RKT SKPD	4 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dalam DPA x 100%	- Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program		
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 9.261.611.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	3,84 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 179.791.113,- - Total Belanja SKPD Rp 9.267.817.253,-	1,94 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 173.786.498,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD,sebesar Rp. 891.862.079,-	19,5 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 173.786.498,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.261.611.000,-	1,88 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LKPD	Ada sebanyak 4 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada Sebanyak 4 jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 15.173.664.942,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6.	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 5 (lima) Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggung jawab

: Kecamatan Donorojo

Urusan yang dilaksanakan

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 10 SOP, yang terdiri dari : 1. SOP Prosedur Evaluasi Kinerja Pegawai 2. SOP Prosedur Pengelolaan dan Evaluasi Pelatihan 3. SOP Prosedur Pemeliharaan Sarana Prasarana 4. SOP Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	10 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. SOP Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Kegiatan 6. SOP Prosedur Monitoring Pelayanan Administrasi Kependudukan 7. SOP Prosedur Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 8. SOP Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian 9. SOP Prosedur Pembinaan Kesejahteraan Sosial 10. SOP Prosedur Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara - Izin Gangguan - Lingkungan Hidup - Miras - Penambangan - IMB - Pajak Reklame		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 orang - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 20 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.521 Orang	0,23 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikutit Diklatpim, sebanyak 7 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	78 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jml pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jml total pejabat OPD yg ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 6 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 6 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 6 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.083.011.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,86 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 37.200.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.083.011.000,-	1,8 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan, sebesar Rp.16.206.000,- - Total belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 295.052.000,-	5,5 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.16.206.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.083.011.000,-	0.8 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK 4. LO 5. LPE 6. Lap. Kas	Ada sebanyak 6 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan dokumennya: 1. Buku Inventaris 2. Daftar Aser Lainnya 3. Data Persediaan 4. KIB A-F 5. Mutasi Barang 6. Pengadaan Barang 7. Buku Extracountable	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai sebanyak Rp. 3.587.750.186	0%	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Pelayanan	Jumlah sebanyak 4 jenis 1 buah 1 buah 1 paket 1 buah	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan Survey kepuasan tentang Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Nalumsari
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 5 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang IMB 2. SOP Tentang Izin Gangguan/ HO 3. SOP Tentang Izin SIUP/ TDP 4. SOP Tentang Izin Usaha Pariwisata 5. SOP Tentang Izin Pemasangan Reklame	Ada 5 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 1 Th. 200 tentang Retribusi Larangan Minuman Beralkohol 4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 5. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD, Sebanyak 35 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.521 Orang	0,44 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 9 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA, RENJA , OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.608.168.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	1,08 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 21.550.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 455.439.000,-	4,73 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 11.908.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 254.310.000,-	4,7 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 11.908.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 455.439.000,-	2,61 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, Dokumen Inventarisasi barang ada sebanyak 5 (enam) Jenis Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yaitu antara lain :	Ada Sebanyak 5 (enam) Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. KIB A : Tanah 2. KIB B : Mesin & Peralatan 3. KIB C : Gedung & Bangunan 4. KIB D : Jalan, Irigasi & Jaringan 5. KIB E : Aset Tetap Lain		
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 2.259.180.649,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Pelayanan Umum	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Batealit
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Prog Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ,: 1. SOP Tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan 2. SOP Tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Non Perijinan	Ada 3 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. SOP Tentang Pengajuan Pencairan ADD/DD		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabJepara. 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada sebanyak 9	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 23 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,3 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan _____ x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	66,7 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan _____ x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD, Sebesar Rp. 2.284.339.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,0009 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.427.195,- - Total Belanja SKPD Rp. 2.270.065.765,-	0,2 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 23.722.800,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 327.339.598,-	7,24 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 23.722.800,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.270.065.765,-	1,04 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 (tiga) jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada sebanyak 5 yaitu antara lain : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan	Ada Sebanyak 4 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 4.004.140.092,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan / saran 3. Leaflet pelayanan 4. Mobil Pelayanan Umum 5. Website Kecamatan dan Fanpage di Facebook	Jumlah sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Pakis Aji
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 9 (sembilan) yang terdiri dari : 2. SOP Tentang Pemeliharaan Lingkungan Kerja 3. SOP Tentang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4. SOP Tentang Penempatan SDM 5. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	Ada SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. SOP Tentang Pengembangan SDM dan Pelatihan 7. SOP Tentang Penyusunan Laporan Keuangan 8. SOP Tentang Penyusunan Laporan Bulanan 9. SOP Tentang Pelayanan IMB / SIUP / TDP 10. SOP Tentang Pelayanan Teknis Perekaman E-KTP		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda,	100 %	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 21 (dua puluh tiga) Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0.26 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 5 (lima) orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 (sembilan) orang	55.55 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 (sembilan) orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 (sembilan) orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 10 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 10 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 2.299.327.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000 ,-	0.1 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp 59.100.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.313.141.699,-	2.55 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar 8.341.500,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD,sebesar Rp 286.365.982 ,-	2.91 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 8.341.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.313.141.699,-	0.36 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, Dokumen Inventarisasi barang ada sebanyak 4 Jenis yaitu antara lain : 1. Kartu Inventarisasi Barang (KIB) 2. Buku Persediaan Barang	Ada Sebanyak 2 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp 2.967.102.401,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengmn di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak satan 3. Mobil Keliling 4. Bangku Tunggu 5. Sarana Internet	Jumlah sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Mlonggo
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 8 yang terdiri dari 1. SOP Tentang Pelayanan umum masyarakat (non perijinan) 2. SOP Tentang Pelayanan perijinan terpadu (PATEN) Kecamatan 3. SOP Tentang Pelayanan KK/KTP	Ada 8 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. SOP Tentang IMB (Ijin mendirikan bangunan) 5. SOP Tentang Izin gangguan /HO 6. SOP Tentang Ijin SIUP/TDP 7. SOP Tentang Ijin usaha pariwisata SOP Tentang ijin pemasangan Reklame		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabJepara 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 26 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,32 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 3 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	37,50 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	88,89 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 7. RENSTRA OPD 8. RENJA OPD 9. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 3 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 3 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.560.582.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,11 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 32.394.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 32.450.000,-	99,8%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp325.687.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. .367.379.000,-	88,7%	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp37.902.000 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 35.614.500,-	94 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 (tiga) Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, Dokumen Inventarisasi barang ada sebanyak 4 Jenis yaitu antara lain : 1. KIB 2. KIR 3. Buku Inventaris 4. Buku Persediaan Barang	Ada Sebanyak 4 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD Rp. 2.360.447.574	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Pos Pengaduan 4. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggungjawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Kecamatan Pecangaan

: PEmerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. Tidak Ada	Tidak Ada	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 25 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,31 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 5 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	57 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.632.452.318,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,10 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 286.263.680,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 2.632.452.318,-	10,19 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 38.297.510 Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 252.995.572,-	15,13 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 38.297.510,- Total Belanja OPD, sebesar Rp. 2.632.452.000,	1,45 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, Dokumen Inventarisasai barang ada sebanyak 4 Jenis yaitu: 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada Sebanyak 4 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD Rp. 8.251.170.956,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil pelayanan 3. Hotspot 4. Tempat baca surat kabar	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Kecamatan Kembang

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 1 yang 1. SOP tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN) Kecamatan	Ada 1 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 28 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,003 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	89 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.608.168.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,0010 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 21.550.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 2.608.168.000,-	0,008 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 11.908.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 254.310.000,-	0,046 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 11.908.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 455.439.000,-	0,26 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, Dokumen Inventarisasai barang sebanyak 4 Jenis yaitu: 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang 5. Buku Extracountable	Ada Sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.328.878.867,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil pelayanan	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Kedung
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD _____ x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
		2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 8 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang Pelayanan Umum Masyarakat (Non Perijinan) 2. SOP Te SOP Tentang Pelayanan KK &/ KTP 3. SOP Tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) 4. SOP Tentang Izin Gangguan/ HO 5. SOP Tentang Izin SIUP/ TDP 6. SOP Tentang Izin Usaha Pariwisata	Ada 8 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					7. SOP Tentang Izin Pemasangan Reklame 8. SOP tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN) Kecamatan		
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 5. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 29 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,004 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	77,77 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan $\frac{\text{Jml pejabat OPD yang ada}}{\text{Jml pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 (Tiga) jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program 6. Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Prog	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.717.248.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,0011 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp 29.666.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.717.248.000	32,6 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 72.760.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 369.042.000	97,2 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 72.760.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.717.248.000	(97,2 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 4, yaitu: 1. Buku inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	– Asset yang tidak digunakan Rp. 0,- – Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp 2.176.991.268	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Ada, jenisnya: 1. Papan pengumuman 2. Kotak saran 3. Spanduk pelayanan	Jumlah sebanyak 3 (tiga) jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Kecamatan Tahunan

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 2 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang Pelayanan Umum Masyarakat (Non Perijinan) 2. SOP Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN) Kecamatan	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	$\frac{\text{Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada}}{\text{jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen}} \times 100\%$	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah) TA 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 5. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada 6 Jabatan Fungsional bidang/Jabatan Fungsional Kecamatan yaitu pada : 1. Penyuluh Pertanian 2. Penyuluhan Peternakan 3. Penyuluh Perikanan 4. Penyuluh KB 5. Penyuluh Hutbun 6. Penyuluh BPS	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, Sebanyak 25 (dua puluh lima) Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 (delapan ribu dua puluh lima) Orang	0.31 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 6 (enam) orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 (sembilan) orang	66.67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 (sembilan) orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 (sembilan) orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.552.770.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,0010 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 18.400.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 2.552.770.000,-	0,72 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 58.800.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 348.828.000,-	16.85 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 58.800.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.552.770.000,-	2,30 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada,yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, yaitu : 1. Buku inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku persediaan barang	Ada Sebanyak 4 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.493.178.973,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Kotak Saran 4. Bangku Tunggu 5. Sarana Internet (WIFI)	Jumlah sebanyak 5 (lima) Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Kecamatan Bangsri
: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 2 yang terdiri dari : 3. SOP Tentang Pelayanan Umum Masyarakat (Non Perijinan) 4. SOP Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN) Kecamatan	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	$\frac{\text{Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada}}{\text{jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen}} \times 100\%$	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah) TA 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 5. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 25orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,0032 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 9 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 4. RENSTRA OPD 5. RENJA OPD 6. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 6 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 6 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD _____ x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 6 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 6 Program	100%	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.563.409.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,10 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp 17.500.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 384.294.000	4,55 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 6.220.000 - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar, Rp. 248.809.000	2,49 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 6.220.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 384.294.000	1,61 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 (tiga) Jenis Sbb 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	1. Buku inventaris 2. KIB A – F 3. KIR 4. Buku Extracountable 5. Buku Persediaan barang	Ada sebanyak 5 jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 2.649.182.482,-	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Mobil keliling	2 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Kecamatan Karimunjawa

: Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang KTP/ KK 2. SOP Tentang Pelayanan Umum	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda, yaitu :	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 4. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 5. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 29 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,036 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	77,78 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 7. RENSTRA OPD 8. RENJA OPD 9. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Prog	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 7.090.376.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,29 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 41.500.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.090.376.000	0,58%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Belanja Pemeliharaan OPD,sebesar Rp. 120.159.270 - Total Belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 1.176.706.000	10,21 %	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 120.159.270,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 7.090.376.000,-	1,69 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 (tiga) Jenis Sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, yaitu : 1. Buku inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku persediaan barang	Ada Sebanyak 4 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.287.830.509,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil pelayanan 3. Pos Pengaduan	Jumlah sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada : Survey IKM	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : Kecamatan Keling
Urusan yang dilaksanakan : Pemerintahan Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	$\frac{\text{Jml program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD}}{\text{Jumlah program Nasional}} \times 100 \%$	- Jumlah Program Nasional Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Layanan Penerbitan Izin Gangguan (HO) → Untuk Gangguan Skala Kecil 2. SOP Layanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) → Untuk Bangunan Skala Kecil 3. SOP Pelayanan Izin Pariwisata/Izin Usaha Salon Kecantikan	Ada 22 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. SOP Layanan Penerbitan Izin Rumah Makan 5. SOP Layanan Penerbitan Ijin Reklame 6. SOP Layanan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. SOP Layanan Penerbitan Surat Keterangan dan Rekomendasi Lainnya yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat 8. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 9. SOP Pelayanan Pengantar Perijinan Pertambangan/Galian C 10. SOP Layanan Pengantar Research/Survey 11. SOP Layanan Penerbitan Dispensasi Nikah 12. SOP Pelayanan Pengantar Akta Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin)		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					13. SOP Pelayanan Proposal Bantuan Pendidikan 14. SOP Layanan Legalisasi Surat Keterangan Boro Kerja 15. SOP Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris 16. SOP Layanan Penerbitan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTRC) 17. SOP Layanan Pengantar Pindah Nikah 18. SOP Pelayanan Proposal Bantuan Sosial 19. SOP Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Keagamaan 20. SOP Layanan Penerbitan Pindah Penduduk 21. SOP Pelayanan Pemrosesan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 22. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Badan Jalan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 9 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 9 Perda, yaitu 1. Perda No. 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 3. Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan 4. Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5. Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Jepara No. 2 Tahun 2010 tentang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Penyelenggaraan Administrasi Kedudukan. 6. Perda No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jepara No.8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi 7. Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jepara No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8. Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jepara Tahun Anggaran 2018 9. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jepara Tahun Anggaran 2018		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 Jabatan	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 22 orang Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,27 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada 3 jenis yaitu : 10. RENSTRA OPD 11. RENJA OPD 12. RKA-OPD	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 6 Program - Jumlah Program Renja yang diakomodir, sebanyak 6 Program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 6 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.474.399.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.489.000,-	0,10 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp 50.250.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp Rp 2.383.625.032,-	2,10 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 56.574.000,- - Total belanja barang dan jasa,sebesar Rp 337.980.000,-	16,73%	
		16	Total Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 56.574.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.383.625.032	2,37%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 (tiga)Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	ada, yaitu : 1. Buku inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku persediaan barang	Ada Sebanyak 4 Jenis	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 1.897.435.393,-	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Mobil keliling 4. http://keling.jepara.go.id	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, Survey Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan dan Unit Pelayanan "Baik"	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

PD Penanggung jawab

Urysan yang dilaksanakan

: JEPARA

: Disdikpora

: 1. Pendidikan

2. Kepemudaan dan Olahraga

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidika n	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPN D) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD dibagi Jumlah program Nasional x 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Progrm - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 8 SOP Yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pelayanan Teknis Kantor 2. SOP Tentang Ijin Operasional Pendirian TK/SD/SDLB/SLB	Tidak ada	Ada, 5 SOP	Tidak ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. SOP tentang Pendataan Pendidikan 4. SOP tentang Mutasi Pegawai/Pendidik 5. SOP tentang Ijin Operasional Pendirian Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD				
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun	100 %	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada sebanyak 20 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 1 Jabatan yang harus ada sebanyak 1 orang	100%	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	- Ada, - Jabatan Fungsional Guru dan pengawas	- Ada 2 orang pelatih olahraga	100%	100%	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 93 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 7 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,011 %	0,0008 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jml pejabat yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Dibagi Jml total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	84 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jml pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan _____ x 100 % Jumlah total pjbt OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 19 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 1 orang	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pendidikan	Ururan Kepemudaan dan olahraga	Ururan Pendidika n	Ururan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 3 Progm	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 2 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jml Program RENJA RKPD yang diakomodir dlm RKA OPD _____ x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 2 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD _____ x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 3 Program - Program dalam DPA-OPD 3 Progm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 2 Program - Program dalam DPA- OPD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat daerah terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ———— x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 134.323.120.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.886.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	55,7 %	0,78 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja Perangkat Daerah	Belanja modal ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp. 38.525.752.000 - Total belanja SKPD Rp. 39.149.892.000	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp. 25.200.000 - Total belanja SKPD Rp. 39.149.892.000	98.40%	0.06%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 67.482.662.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD Rp. 86.911.962.000	- Total Belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.860.800.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD Rp. Rp. 86.911.962.000	77.64%	2.14%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 67.482.662.000 - Total belanja SKPD Rp. 86.911.962.000	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.860.800.000 - Total belanja SKPD Rp. 86.911.962.000	77.64%	2.14%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Ekuitas 5. Calk	Tidak ada	Ada sebanyak 5 jenis	Tidak ada	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR; Buku Pemeliharaan Buku Pengadaan Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR; Buku Pemeliharaan Buku Pengadaan Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat daerah	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp . 14.027.441.879	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 0	0%	0%	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengum 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengm di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masya thd plynan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : DKPP
Urusan yang dilaksanakan : 1. Pangan
2. Pertanian

Lampiran SE.Mendagri Nomor : 120.04/9804 Tanggal 17 Desember 2018

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Sebanyak 10 SOP yang terdiri dari : 1. SOP tentang Penanganan Daerah rawan Pangan 2. SOP tentang Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 3. SOP Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal 4. SOP tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah 5. SOP tentang Fasilitasi Pengisian Lumbung 6. SOP tentang Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten 7. Pelaksanaan Kegiatan Festival Pangan Lokal 8. SOP tentang Aksi Percepatan	Ada 2 SOP 1. SOP nomor 1989.1/VI/2012 tentang pengajuan bantuan/ hibah bidang pertanian dan peternakan 2. SOP no. 1989.2/VI/2012 tentang penyelenggaraan dan hibah bidang pertanian, peternakan dan kesehatan hewan 3. SOP tentang Penyusunan Kebutuhan Penduduk	11 SOP	2 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Diversifikasi Pangan 9. Sosialisasi Mutu Gizi dan Keamanan Pangan 10.SOP tentang Penanganan Daerah Rawan pangan 11.SOP tentang Perintisan Desa Mandiri Pangan				
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya,,sebanyak 3 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya,,sebanyak 5 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) TA 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 4. Perda No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 5. Perda No,. 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi)sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada sebanyak 20	100 %	85 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada, yaitu: Fungsional Pengawas mutu hasil pertanian	Ada, yaitu : - Medik Veteriner - Penyuluh Perikanan - Paramedik Veteriner - Fungsional APHP - Fungsional - Pengawas Bibit	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 17 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD sebanyak 7 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025Orang	0,002 %	0,0008 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jml pejabat yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan dibagi Jml total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 18 org - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	100 %	90 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jml pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 17 orang	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD ———— x 100 % Jumlah program Renja yang diakomodir	- Program Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 1 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 12 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 12 Program	100 %	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jml Program RENJA RKPD yang <u>diakomodir</u> dlm RKA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dlm RKA OPD, sebanyak. 12 rogm - Program dalam RKA OPD, sebanyak 12 progrom	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD : 1 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD : 12 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 12 Program'	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat daerah terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ———— x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.464.790.000 - Total Belanja APBD Rp.2.410.277.498.000	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 8.514.710.000,- Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	0,60 %	3,53 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja Perangkat Daerah	Belanja modal ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 7.125.000,- - Total Belanja OPD, Rp. 1457.026.400,-	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 110.789.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 7.617.165.122,-	0,48 %	1,45 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, Rp. - - Total Belanja Barang dan Jasa OPD Rp. 1.364.551.400,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, Rp. 98.683.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD Rp. 7.262.625.542.000,-	0 %	0,01 %	
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja PD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, Rp. - - Total Belanja OPD, Rp. 1.364.551.400,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, Rp. 98.683.542 Total Belanja OPD, Rp. 7.262.625.542.000,-	0 %	0,13 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk 4. LO/LPE 5 Laporan Kinerja	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk 4. LO/LPE 5 Laporan Kinerja	Ada, Sebanyak 5 Jenis	Ada Sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat daerah	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 71.882.614.313	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. -	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masy	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leafleat	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leafleat 3. Peng di media massa	Jumlah sebanyak 2 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA

OPD Penanggung jawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan yang dilaksanakan : 1. Industri
2. Perdagangan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPN D) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP Tentang Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI)	Tidak Ada, yaitu :	1 SOP	-	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100	- Jabatan yang ada (terisi)sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	100 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 5 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 11 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Org	0,1 %	0,1 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jml pejabat yang memenuhi persyaratan Diklat kepemimpinan $\frac{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jml pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pjbt OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD ———— x 100 % Jumlah program Renja yang diakomodir	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 3 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 4 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dlmRKA OPD dibagi Juml program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 4 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 4 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA OPD ——— x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 4 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 4 Program	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ——— x 100 % Total APBD	Total Anggaran OPD, Sebesar Rp. 28.786.389.000,- Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 28.786.389.000,- Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	12 %	12 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal ——— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 7.887.534.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 28.786.389.000,-	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 7.887.534.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 28.786.389.000	27 %	27 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan _____ x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 3.916.485.000,- - Total Belanja Barang & Jasa OPD,sebesar Rp. 11.278.725.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 3.916.485.000,- - Total Belanja Barang & Jasa OPD,sebesar Rp. 11.278.725.000,-	35 %	35 %	
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan _____ x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 3.916.485.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 28.786.389.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 3.916.485.000,- - Total Belanja OPD, Rp. 28.786.389.000,-	14 %	14 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. KIB 2. KIR	Ada yaitu : 1. KIB 2. KIR	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 354.130.434.668	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 0	0 %	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran	Jumlah sebanyak 2 jenis	Jumlah sebanyak 2 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung Jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
: 1. Budaya
2. Pariwisata

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPN D) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD dibagi Jumlah program Nasional 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP) : 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu SOP : 1. Prosedur Layanan Izin Rekomendasi Usaha Pariwisata 2. Prosedur Penarikan retribusi obyek wisata	Ada, yaitu SOP : 1. Prosedur Layanan Surat Keluar Pengiriman Barang 2. Prosedur Layanan Surat Keluar dan masuk	Ada 4 SOP	Ada 2 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. Prosedur Layanan Surat Keluar dan masuk 4. Prosedur Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil				
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 4 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No 26 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jbtn yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (Terisi)sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada sebanyak 11	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	100 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 26 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD sebanyak 7 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,032 %	0,0008 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan $\frac{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan di bg Jumlah total pjabat yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100%	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 5 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 4 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 4 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 5 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 5 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 4 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 4 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 5 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 5 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 4 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 4 Program	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ———— x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 41.665.257.000 ,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 3.565.244.000,-Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	17,3 %	1,5 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal OPD sebesar Rp. 26.265.068.877,- - Total Belanja OPD sebesar Rp. 45.230.501.000,-	- Belanja Modal OPD sebesar Rp. 651.252.500,- - Total Belanja OPD sebesar Rp. 45.230.501.000,-	58,1%	1,43%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 860.713.656,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD sebesar Rp. 17.448.553.000,-	- Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 52.111.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD sebesar Rp. 17.448.553.000,-	4,93%	0,29%	
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 860.713.656,- - Total Belanja OPD sebesar Rp. 45.230.501.000,-	- Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 52.111.000,- - Total Belanja OPD sebesar Rp. 45.230.501.000,-	1,9%	0,11%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	- KIB - Mutasi - Pengadaan - Persediaan - Laporan Kegiatan	- KIB - Mutasi - Pengadaan - Persediaan - Laporan Kegiatan	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebanyak 0 aset - Aset yang dikuasai OPD sebanyak Rp. 217.804.353.782	- Aset yang tidak digunakan sebanyak 0 aset - Aset yang dikuasai OPD sebanyak -	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	- Papan pengumuman - Pos pengaduan - Leaflet - Website	- Papan pengumuman - Pos pengaduan - Leaflet - Website	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: DISKARPUS

: 1. Kearsipan
2. Perpustakaan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH-AN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPD) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada/Tidak ada, Kalau Ada, Sebutkan : 1. SOP tentang Penelusuran Arsip 2. SOP tentang Pembinaan Kearsipan	Ada/Tidak ada, Kalau Ada, Sebutkan : 1. SOP tentang Pengadaan Bahan Pustaka 2. SOP tentang Pengolahan Bahan Pustaka	4 SOP	20 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. SOP tentang Publikasi Kearsipan 4. SOP tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BINTEK) Kearsipan	3. SOP Perawatan Bahan Pustaka 4. SOP PEmbinaan dan Pengembangan Perpustakaan 5. SOP Publikasi dan Promosi Perpustakaan 6. SOP Entry Data 7. SOP Perbaikan Buku Rusak 8. SOP Pembuatan Kartu Anggota 9. SOP Peminjaman dan PERpanjangan 10. SOP Penagihan Bahan Pustaka 11. SOP PEngembalian Bahan Pustaka 12. SOP PEmbuatan Kartu Anggota 13. SOP PELayanan Referensi 14. SOP Pelayanan Internet 15. SOP Layanan			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Perpustakaan Keliling 16.SOP Pelayanan Wisata Edukasi 17. SOP Pelayanan Warung Baca 18. SOP Kegiatan Komunitas 19. SOP Layanan Literatur 20.SOP Penelusuran Literatur			
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi juml Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi)sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	100 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada Jika ada, sebutkan : • Arsiparis Mahir	Ada Jika ada, sebutkan : 1. Pustakawan Terampil 2. Pustakawan Ahli	Ada	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani SKPD,sebanyak 5 Orang - Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani SKPD,sebanyak 14 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,06%	0,17 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	n tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait				sebanyak 8.025 Orang				
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklatn kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim dibagi Jumlah total pjbt OPD yg ada x 100 %	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan _____ x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	100%	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD ———— x 100 % Jumlah program Renja yang diakomodir	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 3 program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak. 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD RKPD yang , sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 1 Program	100 %	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak. 1 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-SKPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 1 Program - Program dalam DPA-SKPD, sebanyak 1 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ———— x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD sebesar Rp. 461.898.700 - Total Belanja APBD Rp.2.410.277.498.000,-	Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.053.226.448Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,-	0,19 %	0,43 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 231.382.138 - Total Belanja SKPD, Rp 441.955.000	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp 177.307.160 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 441.995.000	57,21 %	40,11 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 129.857.116 - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD Rp. 161.656.000	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 31.466.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 161.656.000	80,32 %	19,46 %	
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, Rp. 129.857.116 - Total Belanja SKPD, Rp. 2.802.108.307	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 31.466.000 - Total Belanja SKPD, Rp. 2.802.108.307	4,63 %	1,12 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 14.958.935.407,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 0	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Ruang Wisata Arsip 2. Papan Display Foto 3. Banner 4. Film	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Kendaraan Perpustakaan Keliling	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						4. Pengumuman di Media Sosial			
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Ada Survey Kepuasan Masyarakat tentang IKM	- Ada Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan IKM	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: DP3AP2KB
: 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD dibagi Jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu: SOP tentang Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Perempuan	Ada, yaitu : SOP Pelaksanaan Safari Pelayanan KB	1 SOP	1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	departemen / LPNK				Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak				
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda, yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 5. Perda No 1 Tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan daerah 6. Perbup no. 42 tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan 7. Perbup no.39 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah dan Desa	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. h Kabupaten Jepara Tahun anggaran 2017 5. Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi)sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada sebanyak 6	100 %	83 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 4 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD sebanyak 19 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,0005 %	0,002 %	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklatpim dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak.3 orang	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pejabat OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak.3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	91 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah program Renja yang diakomodir x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 3Program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 11 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 11 Program	100 %	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 11 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 11 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD ———— x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 11 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 11 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ———— x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.264.020.000,- - Total Belanja APBD Rp.2.410.277.498.000	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 10.320.494.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000,	0,52 %	4,3 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 41.100.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 12.568.637.000,-	- Belanja Modal OPD,sebesar Rp. 1.529.070.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 12.568.637.000,-	1,4 %	29,6 %	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD Rp. 1.570.170.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 72.400.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 1.570.170.000,-	0 %	4,6%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	Ururan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, Rp. 0,- - Total Belanja OPD, Rp 12.568.637.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp.72.400.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp 12.568.637.000,-	0 %	0,57 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.Calk 4. Laporan Kinerja	Ada, Sebanyak 4 Jenis	Ada Sebanyak 4 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada - KIR - Daftar Pengadaan - Laporan Barang Milik Daerah	Ada - KIR - Daftar Pengadaan - Laporan Barang Milik Daerah	Ada	Ada	-
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 16.021.112.910,-	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. -	0 %	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8. PEMBERI-AN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Pos Pengaduan 2. Mobil Perlindungan 3. Leaflet 4. Baliho 5. Roll Banner	1. Jenisnya : 2. Mobil Pelayanan 3. Mobil Penerangan KIE 4. Pengumuman di Mass Media 5. Baliho 6. Roll Banner	Jumlah sebanyak 5 jenis	Jumlah sebanyak 5 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masy terhadap pelayanan publik	Ada - Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan DP3AP2KB	Ada - Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan DP3AP2KB	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: DINSOSPERMADES
: 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sosial

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak	1. SOP Kenaikan Pangkat Reguler 2. SOP Penanganan Surat Masuk	ada	ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	departemen / LPNK				2. SOP Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 3. SOP Bantuan Hibah/Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial 4. SOP Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran/Surat Tanda Pendaftaran Ulang/Rekomendasi Bagi Yayasan/LKS/LKSA 5. SOP Pemberian Surat Ket. PBI-JKN (BPJS Kesehatan) 6. SOP Pemberian Surat Rekomendasi Sosial (Ranap Pemkab)	3. SOP Penanganan Surat Keluar 4. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 5. SOP Penyelenggaraan Adm Keuangan Pengajuan Tambahan Penghasilan PNS Daerah 6. SOP Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan Penatausahaan dan Penyusunan SPJ 7. SOP Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 8. SOP Penyusunan Rencana Strategis 9. SOP Penyusunan Rencana Kerja			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						10. SOP Penyusunan LkjIP 11. SOP Fasilitas Bedah Rumah Keluarga Miskin 12. SOP Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 13. SOP Pengajuan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan KPMD 14. SOP Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa			
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	Jumlah Perda yang 1. Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah	1. Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 2. Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					2. Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	3. Tahun Anggaran 2018 Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabtan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada sebanyak 11	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur i OPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 7 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 24 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 orang	0,087%	0,299%	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklatpim $\frac{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}}{\text{Jumlah total pejabat OPD yang ada}} \times 100 \%$	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 oran - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan ———— x 100 % Jumlah total pjbt OPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100%	100%	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD ———— x 100 % Jumlah program Renja yang diakomodir	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 Program	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Sosial	Ururan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Ururan Sosial	Ururan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD _____ x 100 % Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 Program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 Program	100%	100%	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD _____ x 100 % Jumlah program dalam DPA OPD	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 9 Program dalam DPA-SKPD, sebanyak 9	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD, sebanyak 8 Program - Program dalam DPA-SKPD, sebanyak 8 Program	100%	100%	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD _____ x 100 % Total APBD	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 10.834.323.000,- Total Belanja APBD Rp.2.410.277.498.000		4,5 %		
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal _____ x 100 % Total Belanja OPD	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 185.470.000 - Total Bel SKPD Rp. 8.012.379.000		2,31%		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 185.538.000 - Total Bel Barang dan Jasa SKPD Rp. 7.713.034.000		2,41%		
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, Rp. 185.538.000 - Total Belanja SKPD, Rp. 8.012.379.000		2,32%		
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	1. Laporan Inventaris Barang (KIB) 2. Laporan Mutasi Barang 3. Laporan Pengadaan Barang 4. Laporan Persediaan Barang	1. Laporan Inventaris Barang (KIB) 2. Laporan Mutasi Barang 3. Laporan Pengadaan Barang 4. Laporan Persediaan Barang	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 7.733.597.551		0 %		
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	Ada 2	Ada 2	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masy thd pelayanan publik	Ada - Survey Kepuasan Masyarakat tentang Bantuan Sosial	Ada - Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Pemerintahan Desa	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Diskop UKM Nakertrans
: 1. Koperasi dan UKM
2. Tenaga Kerja
3. Transmigrasi

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketramigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketramigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD ———— x 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	1/1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP tentang > Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar ➤ Pendirian Ijin Operasional Simpan Pinjam 2. SOP tentang ijin UKM	Ada, yaitu : 1. SOP tentang > Pelayanan rekomendasi CTKI 2. Pelayanan Pembuatan AK 1 3. Pelayanan Perpanjangan IMTA 4. Pelayanan Bursa Khusus Kerja Online 5. Pelayanan LPK	Ada, yaitu SOP Transmigrasi	2 SOP	5 SOP	1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	- PERDA Pelaksanaan sebanyak -3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Jepara	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketransmigrasian	Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi)sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada sebanyak 16			100 %			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Ada, yaitu : 1. Instruktur las 2. Instruktur jahit 3. Instruktur Pengantar Kerja	Tidak ada	Tida Ada	ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 6 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 13 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD sebanyak 1 orang - Total PNS Kabupaten 8.025 Orang	0,07 %	0,15 %	0,01 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yg mengikuti pendidikan pelatkepimpinan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang			75 %			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yg mengikuti kepangkatan Dibagi Juml total pejabat OPD yg ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang			100 %			
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang tidak diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD ———— x 100 % Jumlah program Renja yang diakomodir	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 2 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 2 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir, sbnyk 1 Program	100 %	100%	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Juml Progm RENJA RKPD yg diakomodir dlm RKA PD — x 100% Jumlah program dalam RKA OPD	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 1 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program	100 %	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dlm DPA OPD dibagi Jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program	100 %	100%	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD ----- x 100 % Total APBD	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 740.293.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.000	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp 2.989.870.000, - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.000	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp. 81.874.345 - Total Belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	0,30 %	1,23 %	0.033 %	
	Besaran Belanja modal	14	Belanja modal terhadap total Belanja OPD	Belanja modal dibagi Total Belanja OPD x 100	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 36.450.000,- - Total Belanja Rp.8,911,473,000	- Belanja Modal SKPD,sebesar Rp. 214.550.000,- - Total Belanja, Rp. 8.911.473.000	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ,- Total Belanja SKPD, Rp.8.911.473.000	2.41 %	2.57 %	 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketransmigrasian	Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketrans migrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total Belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja barang dan jasa OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 70.800.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 4.471.541.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp 0,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 3 4.471.541.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Barang dan Jasa OPD, sebesar Rp. 1 4.471.541.000	15,01 %	0 %	0 %	
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja OPD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total Belanja OPD	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 70.800.000,-,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 8.911.473.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 8.911.473.000,-	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja OPD, sebesar Rp 8.911.473.000,-	0,79 %	0 %	0 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketransmigrasian	Ururan Koperasi dan UKM	Ururan Ketenagakerjaan	Ururan Ketransmigrasian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan brg	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, Rp. 20.403.314.720	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 0	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 0	0 %	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Brosur	Sebutkan Jenisnya : 1. Mobil Keliling 2. Mobil Operasional Bencana	Sebutkan Jenisnya : 1. Brosur	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 2 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat	Ada - Masyarakat cukup puas dengan pelayanan Koperasi dan UKM	Ada - Masyarakat puas dengan pelayanan urusan pembuatan AK 1	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (PD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
PD Penanggung jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: DISKOMINFO
: 1. Komunikasi dan Informatika
2. Statistik
3. Persandian

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh PD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh PD $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times$ 100 % Jumlah program Nasional	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 1 Program	- Jumlah Program Nasional (RKP), Sebanyak 1 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan PD, sebanyak 1 Program	1/1	1/1	1/1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 6 SOP, yaitu : 1. SOP tentang Perjalanan Dinas 2. SOP Tentang Surat Perintah Membayar 3. SOP tentang Surat Perintah Pembayaran 4. SOP tentang Prosedur Layanan Gaji Pegawai 5. SOP tentang Prosedur Penyusunan Renja 6. SOP tentang Tambahan Penghasilan	Ada 6 SOP, yaitu : 1. SOP tentang Perjalanan Dinas 2. SOP Tentang Surat Perintah Membayar 3. SOP tentang Surat Perintah Pembayaran 4. SOP tentang Prosedur Layanan Gaji Pegawai 5. SOP tentang Prosedur Penyusunan Renja 6. SOP tentang Tambahan Penghasilan	Ada 6 SOP, yaitu : 1. SOP tentang Perjalanan Dinas 2. SOP Tentang Surat Perintah Membayar 3. SOP tentang Surat Perintah Pembayaran 4. SOP tentang Prosedur Layanan Gaji Pegawai 5. SOP tentang Prosedur Penyusunan Renja 6. SOP tentang Tambahan Penghasilan	Ada	Ada	Ada	
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PD menurut	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada	Jumlah PERDA pelaksanaan	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
	Peraturan Menteri (Permen)		terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Permen yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%	- PERDA yang seharusnya,.seba nyak 5 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD Kab. Jepara TA. 2018 2. Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Kab. Jepara TA. 2018 3. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	- PERDA yang seharusnya,.seba nyak 3 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD Kab. Jepara TA. 2018 2. Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Kab. Jepara TA. 2018 3. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	Perda - PERDA yang seharusnya,.seb anyak 3 Perda yaitu : 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD Kab. Jepara TA. 2018 2. Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Kab. Jepara TA. 2018 3. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan				

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
					4. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara 5. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara				

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah Jabatan yang seharusnya ada X 100 %	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada sebanyak 8	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada sebanyak 2	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada sebanyak 2	100 %	100 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada 1. Pranata Komputer	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS PD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) PD, sebanyak 27 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) PD, sebanyak 3 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (3) PD, sebanyak 4 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	0,34 %	0,04 %	0,05%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jml pejabat yg mengikuti Diklat kepemimp dibagi Jml total pejabat yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 8orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	100 %	100 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jml pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan ——— x 100 % Jumlah total pejabat PD yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 8 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 2 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 2 orang	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PD -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA-PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan PD berikut jumlah-nya	Ada terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program Renja yang diakomodir dlm RKPD dibagi Jml program Renja yang diakomodir x 100%	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 Program - Program Renja PD yang diakomodir, sebanyak 5 Program	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 1 Program - Program Renja PD yang diakomodir, sebanyak 1 Program	- Program Renja yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	Ururan Komunika si dan Informati ka	Ururan Statistik	Ururan Persandi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
	Sinkronisasi program RKA PD dengan Program RENJA PD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD	Jml Program RENJA RKPD yang <u>diakomodir</u> dlm RKA PD dibagi Juml prog dalam RKA PD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 5 Program - Program dalam RKA PD, sebanyak 5 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak. 1 Program - Program dalam RKA PD, sebanyak 1 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak. 1 Program - Program dalam RKA PD, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	Jumlah Program RENJA PD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA PD	Jumla Prog RENJA PD <u>ygdiakomodir</u> dalam DPA PD dibagi Juml prog dlm DPA PD X 100%	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA-PD, sebanyak 5 Program - Program dalam DPA-PD, sebanyak 5 Program	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA-PD, sebanyak 1 Program - Program dalam DPA-PD, sebanyak 1 Program	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA-PD, sebanyak 1 Program - Program dalam DPA-PD, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	Ururan Komunika si dan Informati ka	Ururan Statistik	Ururan Persandi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran PD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran PD _____ x 100 % Total APBD	- Total Anggaran PD sebesar Rp. 4.336.361.500,- - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.00 0,-	- Total Anggaran PD sebesar Rp. 227.650.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.00 0,-	- Total Anggaran PD,Sebesar Rp. 175.175.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.410.277.498.0 00,-	0,18 %	0,009%	0,007%	
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja PD	Belanja modal _____ x 100 % Total belanja PD	- Belanja Modal PD sebesar Rp. 563.131.802 - Total Belanja PD, Rp. 4.144.974.350,-	- Belanja Modal PD sebesar Rp. 0 - Total Belanja PD, Rp.212.393.185,-	- Belanja Modal PD sebesar Rp. 0,- - Total Belanja PD, Rp. 168.407.375,-	13,6%	0	0	
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan Total belanja barang dan jasa PD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan PD, sebesar Rp.94.020.600 - Total Belanja Barang dan Jasa Rp.3.731.758.588	- Total Belanja Pemeliharaan PD, sebesar Rp 0 - Total Belanja Barang dan Jasa PD Rp. 0	- Total Belanja Pemeliharaan PD, sebesar Rp. - - Total Belanja Barang dan Jasa PD Rp-	2,52	0	0	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
		16	Belanja Pemeliharaan dari total Belanja PD	Total Belanja Pemeliharaan ———— x 100 % Total belanja PD	- Total Belanja Pemeliharaan PD, Rp. 94.020.600 - Total Belanja PD, Rp. 4.144.974.350,-	- Total Belanja Pemeliharaan PD, Rp. - - Total Belanja PD, Rp. 212.393.185	- Total Belanja Pemeliharaan PD, Rp. - - Total Belanja PD, Rp. 168.407.375	2,3 %	0	0	
	Laporan keuangan PD	17	Keberadaan laporan keuangan PD	Ada / tidak ada laporan keuangan PD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	Ada, Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset PD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset PD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset PD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan brg	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan brg	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaanbrg	Ada	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset PD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah Aset yang tidak digunakan PD dibagi total aset yang dikuasai PD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. - - Asset yang dikuasai PD,sebanyak Rp. 11.100.055.360	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai PD, sebanyak Rp. 0	0 %	0 %	0 %		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Ururan Komunikasi dan Informatika	Ururan Statistik	Ururan Persandian	Ururan Komunika si dan Informati ka	Ururan Statistik	Ururan Persandi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)		(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Penguman di Mass Media	Jenis Fasilitas/ Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 5. Papan Pengumuman 6. Pos Pengaduan 7. Leaflet 8. Mobil Keliling 9. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 5. Papan Pengumuman 6. Pengumuman di media massa 7. Kotak Saran	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di media massa 3. Kotak Saran	Jumlah sebanyak 5 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 5 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III.3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan URUSAN WAJIB	CAPAIAN KINERJA		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100 \%$	$\frac{36.895}{63.368} \times 100 \%$	58,21 %	Disdikpora
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tdk buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100\%$	$\frac{845.250}{884.900} \times 100\%$	95,52 %	Disdikpora
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$	$\frac{106.616}{107.125} \times 100 \%$	99,52 %	Disdikpora
		4	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/Mts paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$	$\frac{51.112}{62.650} \times 100 \%$	81,58 %	Disdikpora
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{jumlah Siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD ada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{28}{77.805} \times 100 \%$	0,04 %	Disdikpora
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/Mts}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	$\frac{19}{22.299} \times 100 \%$	0,09 %	Disdikpora

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan URUSAN WAJIB	CAPAIAN KINERJA		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	19.718 ----- x 100 % 19.718	100 %	Disdikpora
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	17.924 ----- x 100 % 17.924	100 %	Disdikpora
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	19.716 ----- x 100 19.763	99,76 %	Disdikpora
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-4 ----- x 100 % Jumlah guru SD/MI/SMP/MTS,SMA/MA/SMK	15.214 ----- x 100 % 17.863	85,17 %	Disdikpora
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	4152 ----- x 100% 4152	100 %	DKK
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama	19.684 ----- x 100% 19.684	100 %	DKK

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan URUSAN WAJIB	CAPAIAN KINERJA		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	$\frac{195}{195} \times 100\%$	100 %	DKK
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. kerja pada kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wil kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	$\frac{114}{114} \times 100\%$	100 %	DKK
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$	$\frac{1009}{1158182} \times 100.000$	87,1 %	DKK
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$	$\frac{216}{216} \times 100\%$	100 %	DKK
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kes trata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}} \times 100 \%$	$\frac{348.163}{619.196} \times 100\%$	56,22 %	DKK
		18	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jml seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja pd kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$	$\frac{19.666}{19.812} \times 100\%$	99,26 %	DKK

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100\%$	$\frac{649,16 \text{ m3}}{5640 \text{ m3 perhari}} \times 100\%$	11,51 %	DLH
		20	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}}$	$\frac{4}{21} \times 100 \%$	19,05 %	Disperindag
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk yang terlayani}} \times 1000$	$\frac{576 \text{ m3} \times 1000}{1.168.261 \text{ penduduk}}$	0,049	DLH
		22	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanPemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 1000$	$\frac{13}{13} \times 100 \%$	100 %	DLH
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang Jalan kabupaten dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan}} \times 100\%$	$\frac{575 \text{ km}}{873 \text{ km}} \times 100 \%$	65,99 %	DPU-PR
		24	Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{6.184 \text{ ha}}{28.247 \text{ ha}} \times 100 \%$	22 %	DPU-PR
		25	Rumah Tangga per sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100 \%$	$\frac{279.238}{317.316} \times 100 \%$	88 %	Disperkim
		26	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	$\frac{4,13 \text{ ha}}{2466,701 \text{ ha}} \times 100 \%$	0,17 %	Disperkim

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	$\frac{3.802,14 \text{ ha}}{100.400 \text{ ha}} \times 100\%$	3,78 %	DLH
5	Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah tangga}} \times 100 \%$	$\frac{343.528}{380.762} \times 100 \%$	90,22 %	DISPERKIM
		29	Lingkungan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	$\frac{4,13 \text{ ha}}{100.413,189 \text{ ha.}} \times 100 \%$	0,41 %	DISPERKIM
		30	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100 \%$	$\frac{231107}{289546} \times 100 \%$	79,82 %	DISPERKIM
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	$\frac{8}{1,223,199} \times 100\%$	X100%	Disdikpora
		32	lapangan olahraga	Jenis Lapangan olahraga : 1. Lapangan Sepak Bola : 174 Lapangan 2. Lapangan Bola Volley : 172 Lapangan 3. Lapangan Bulu Tangkis : 119 Lapangan 4. Lapangan Tenis Lapangan : 4 Lapangan 5. Lapangan Wood Ball : 1 Lapangan 6. Lapangan Atletik : 1 Lapangan 7. Panjat Tebing : 1 Lapangan 8. Selam : 1 Lapangan 9. Latihan Dayung : 1 Lapangan	474 lapangan	474 lapangan	Disdikpora
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2018} - \text{Realisasi PMDN 2017}}{\text{Realisasi PMDN 2017}} \times 100 \%$	$\frac{2.217.628.445.661 - 111.420.550.872}{111.420.550.872} \times 100\%$	1.890,23 %	DPMPTSP

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	$\frac{525}{645} \times 100 \%$	81 %	Diskop UKM NAKERTRANS
		35	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro aktif}}{\text{Jumlah seluruh usaha Mikro}} \times 100 \%$	$\frac{78.505}{79.112} \times$	99,23	Diskop UKM NAKERTRANS
9	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100 \%$	$\frac{778.748}{851.189} \times 100$	91,49 %	Disdukcapil
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumah _penduduk}} \times 1000$	$\frac{467.696}{1.168.261} \times 1000$	400,34 orang / 1000 penduduk	Disdukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Disdukcapil
10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif}}{\text{Jumlah Pekerja/buruh}} \times 100\%$	$\frac{31.142}{86.199} \times 100 \%$	36,12%	Diskop UKM Nakertrans
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pekerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pekerja yang mendaftar}} \times 100\%$	$\frac{6.350}{17.957} \times 100 \%$	35 %	Diskop UKM Nakertrans

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
11	Pangan	41	Regulasi Ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dsb.	Ada 1. PP No. 68 Th. 2002 tentang Ketahanan Pangan 2. UU No. 18 Thun 2012 tentang Pangan 3. Perpres No. 22 Tahun 2009 Tentang kebijakan Percepatan Penganekaragam-an konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4. Permentan no. 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganerkaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ada	DKPP
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata rata juml ketersediaan pangan utama pertahun (kg) ----- x 1000 Jumlah Penduduk	151.988 Ton ----- X 1.000 1.168.261 orang	124,19 kg/org/t hn	DKPP
12	Pember-dayaan Perempuan dan Perlindungan anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<u>Pekerja perempuan di lem`baga pemerintah</u> x 100% Jumlah pekerja perempuan	4.013 orang ----- X 100% 58.502 orang	6,85 %	BKD/DISKP UKM NAKERTRA NS

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah\_anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah\_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100\%$	$\frac{443.919}{444.716} \times 100 \%$	99,82 %	DISDIKPOR A
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah\_partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah\_angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	$\frac{5.733}{58.502 \text{ orang}} \times 100 \%$	9,79 %	Diskop UKM Nakertrans
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\sum \text{Peserta program KB Aktif}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{151.979}{219.426} \times 100 \%$	69,26 %	DP3AP2KB
		47	Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah\_desa/KelurahanI}}{\text{PLKB/PKB}} \times 100\%$	$\frac{195}{43} \times 100 \%$	4,53 %	DP3AP2KB
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah Penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	$\frac{786}{1.088.061} \times 100 \%$	0,07%	Dishub

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET	
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada/tdk ada	Ada 49, yaitu : 1. jepara.go.id 2. satpolpp-damkar.jepara.go.id 3. setwan.jepara.go.id 4. inspektorat.jepara.go.id 5. bpbd. jepara.go.id 6. bakesbangpol.jepara.go.id 7. bappeda.jepara.go.id 8. bpkad.jepara.go.id 9. bkd.jepara.go.id 10.bagianhukum.jepara.go.id 11.bagiankesra.jepara.go.id 12.bagianorganisasi.jepara.go.id 13.bagianpembangunan.jepara.go.id 14.bagianperekonomian.jepara.go.id 15.bagiantapem.jepara.go.id 16.bagianpemdes.jepara.go.id 17.bagianumum.jepara.go.id 18.diskominfo.jepara.go.id 19.dishub.jepara.go.id 20.disparbud.jepara.go.i	49 web	Diskominfo

Lampiran SE.Mendagri Nomor : 120.04/9804/OTDA Tanggal 17 Desember 2018

9

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	Ada, yaitu : 1. Miratex Expo Mataram 2018 2. CJIBF Jakarta 2018 3. Bumi Kartini Expo 4. Javanes Creation 5. IFEX 6. Inacraft 7. Apkasi 8. Trade Expo Indonesia (TEI) 9. Warisan 10. Gelar Produk Daerah 11. Kedutaan Expo	11 kali DPMPTSP Disperindag
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas wilayah daerah yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{28.279,55 \text{ ha}}{100.413,19 \text{ ha}} \times 100\%$	28,2 % BPN
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$	$\frac{12}{12} \times 100 \%$	100 % Bag Tata Pemerintahan Setda
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$	$\frac{22}{33} \times 100 \%$	66,66 % DPMPTSP
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	$\frac{195}{195} \times 100 \%$	100% Dinsospermades
		55	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$	$\frac{1122}{1122} \times 100 \%$	100 % Dinsospermades

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET	
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	1. Panti Asuhan Aisyiyah 2. Panti Asuhan Putra Muhammadiyah 3. Panti Asuhan Al-Islah 4. Panti Asuhan Bina Isani Jepara (BIJ) 5. Panti Asuhan Miftakhul Jannah 6. Panti Asuhan Ibu RA. Kartini 7. Panti Asuhan Achmad Dahlan 8. Panti Asuhan Trisno Ing Siwi 9. Panti Lanjut Usia Nurussalam 10. Panti Asuhan Aisyiyah 11. Panti Asuhan Darul Yatama Apida 12. Panti Asuhan Al-Huda Ridlwaniyah 13. Panti Asuhan Darul Aitam Masyhuriyah 14. Panti Asuhan Nurunni'matil Ulya 15. Panti Asuhan Al-Falah 16. Panti Lanjut Usia Hidayatullah 17. Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU 18. Panti Asuhan Al Husain 19. Panti Asuhan Darul Ihsan 20. Panti Asuhan Mah	33 buah	Dinsospermades
Lampiran SE.Mendagri Nomor : 120.04/9804/OTDA Tanggal 17 Desember 2018							

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		57	Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	$\frac{83}{83} \times 100\%$	100 %	Dinsospermades
	Kebudayaan	58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	$\frac{46.176}{176.791} \times 100\%$	26,12 %	Dinsospermades
		59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	25 Kali	25 Kali	Disparbud
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 buah	1 buah	Disparbud
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ----- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	$\frac{5}{40} \times 100\%$	12,5 %	Disparbud
20	Statistik	62	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada /Tidak ada	Ada, yaitu Jepara Dalam Angka 2017	Ada	BPS
		63	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada /Tidak ada	Ada, yaitu PDRB Kab.Jepara 2017	Ada	BPS

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
21	Kearsip-an	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku ----- x 100 % Jumlah OPD	$\frac{50 \text{ OPD}}{50 \text{ OPD}} \times 100 \%$	100 %	Diskarpus
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	6 Kegiatan yaitu : 1. BinteK dan Pembinaan Kearsipan 2. Pembenahan arsip OPD dan UPT OPD 3. Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Karsipan 4. Pembinaan Arsip bagi BUMD / Organisasi / Koperasi / Swasta / Tempat Ibadah 5. Pembenahan Arsip Desa 6. Penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip Berbasis SIMARDI	6 Kegiatan	Diskarpus
22	Perpustakaan	66	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<u>Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah</u> Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	39.923 judul 82.936 eks	48,14	Diskarpus

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		67	Pengunjung perpustakaan	<u>Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun</u> Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	952.527 org 1.223.198 org	77,87 %	Diskarpus

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan URUSAN PILIHAN	CAPAIAN KINERJA		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) ----- x 100% Target Daerah (Ton)	29.067,75 (Ton) ----- x 100 % 28.987,78 (Ton)	100,27 %	Dinas Perikanan
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Ton) ----- x 100% Target Daerah (Ton)	22,10 (kg)/Kapita/tahun ----- x 100 % 20,5 (kg)/kapita/tahun	107,80 %	Dinas Perikanan
2	Pertanian	3	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- Luas areal tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	2.372.670 kwintal ----- 44.579 ha	53,22 kwintal/ha	DKPP
		4	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan ----- x 100% Jumlah total PDRB	3.606.395,02* * ----- x 100 % 25.865.317,87* *	1,39 %	BPS
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2018	2.601.528 orang	2.601.528 orang	Disparbud
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB	3.276.522,17* ----- x 100 25.865.317,87* *	12,7 %	BPS
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri (Rp) ----- x 100% Jumlah total PDRB	8.940,26 * x 100% 25.862,32* *	34,57 %	BPS

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN PILIHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		8	Pertumbuhan industri	Jumlah Industri thn 2018- jumlah industri thn 2017 ----- x 100% Jumlah industri sampai dengan thn 2018	19.646 - 19.576- x 100% 19.646	0,36 %	Disperindag
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100% Jumlah total PDRB	4.370,73* *- x 100% 25.862,32* *	16,90 %	BPS
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	347.409.178,75 USD	100 %	Disperindag
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa ----- x 100% Jumlah transmigran	5 KK x 100% 5 KK	100 %	Diskop UKM Nakertrans
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH							
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada Perda No. 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kab. Jepara Tahun 2005-2025	Ada	BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022	Ada	BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada Perbup No. 24 Tahun 2017 tentang RKPd Kab. Jepara Tahun 2018	Ada	BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Jumlah program RKPd tahun berkenaan -----x 100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	144 -----100-% 144	100 %	BAPPEDA

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN PILIHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	Ada 52 buah yaitu : 1. SIMPATEN 2. SIMPTSP 3. SIM PERIZINAN ONLINE 4. SEMPEDAL 5. SIM DP3AP2KB 6. http://siga.jeparakab.go.id/ 7. http://lpse.jeparakab.go.id/ 8. http://jdih.jeparakab.go.id/ 9. http://singmantap.jeparakab.go.id/ 10.http://imta.jeparakab.go.id/ 11.http://asmara.jeparakab.go.id/ 12.http://sibangtanah.jeparakab.go.id/ 13.http://perijinan.jeparakab.go.id/ 14.http://skp.jeparakab.go.id/ 15.http://paten.jeparakab.go.id/ 16.http://e-presensi.jeparakab.go.id/ 17.http://simpeg,jeparakab.go.id/ 18.http://pelayanan.disdukcapil.jeparakab.go.id/ 19.http://simpad.jeparakab.go.id/ 20.http://bphtb.jeparakab.go.id/ 21.http://epbb.jeparakab.go.id/	52 buah	DPMPTSP DP3AP2KB DISKOMINFO
Lampiran SE.Mendagri Nomor : 120.04/9804/OTDA Tanggal 17 Desember 2018							

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN PILIHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada	Ada	Semua OPD/Orpeg
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	1. Penyuluhan politik kepada masyarakat, 2. fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 3. koordinasi forum forum politik	6 keg	BAKESBANG POL
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM ,Ormas,dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik terhadap LSM,Ormas dan OKP	4 kegiatan	4 keg	BAKESBANG POL